BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Firman Noor
Ade Wiharso

Partai Islam dan Pluralisme

Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Partai Islam dan Pluralisme

Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2024 oleh Penerbit BRIN
Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id

Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).
Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Firman Noor
Ade Wiharso

Partai Islam dan Pluralisme

Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2024 Firman Noor & Ade Wiharso

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Partai Islam dan Pluralisme: Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi/Firman Noor & Ade Wiharso–Jakarta: Penerbit BRIN, 2024.

li hlm. + 200 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-623-8372-86-7 (*e-book*)

1. Ideologi Partai Politik
2. Partai Islam
3. Pluralisme
4. Partai Masyumi

324.23

Editor Akuisisi : Wijananto
Copy Editor : S. Mutiara Fitry
Proofreader : Anton Surahmat & Martinus Helmiawan
Penata Isi : Donna Ayu Savanti
Desainer Sampul : Donna Ayu Savanti

Edisi Pertama : Juli 2024

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: https://penerbit.brin.go.id/
Penerbit BRIN
@penerbit_brin
@penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL ix
PENGANTAR PENERBIT xi
KATA PENGANTAR
Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia xiii
KATA PENGANTAR
Prof. Dr. Valina Singka, M.Si
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia xvii
KATA PENGANTAR
Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.
Ketua Umum Partai Masyumi xxiii
PRAKATA xlix

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Islam dan Pluralisme 1
B. Sisi Pluralisme Masyumi 12
C. Pluralisme sebagai Inti Bahasan 18

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 2 BIOGRAFI MASYUMI 27
A. Lahirnya Masyumi 27
B. Upaya Mempersatukan Umat Islam 30
C. Kepengurusan Partai Masyumi 33
D. Islam sebagai Ideologi 38
E. Dinamika Peran dan Situasi Internal Masyumi 40
F. Masyumi dan Pemilu 1955 43
G. Pembubaran Masyumi 53
H. Upaya Merehabilitasi Masyumi 57

BAB 3 PANDANGAN MASYUMI TENTANG NEGARA IDEAL: POSISI IDEOLOGI DAN PENJABARANNYA 63
A. Masyumi dalam Spektrum Ideologi Politik di Indonesia 63
B. Tipologi Pemikiran Politik Islam Masyumi 67
C. Peran Islam dalam Kehidupan Politik dan Kenegaraan 74
D. Negara Indonesia yang akan Dibangun 83
E. Tentang Keragaman di Indonesia 93

BAB 4 PLURALISME DALAM SIKAP DAN KEBIJAKAN MASYUMI 99
A. Pluralisme Politik dalam Konteks Internal Umat Islam 99
B. Sikap terhadap Kelompok Minoritas Nonmuslim 115
C. Sikap terhadap Kalangan Nasionalis dan Sosialis 121
D. Sikap terhadap Kalangan Komunis 128
E. Program Masyumi 135
F. Menolak Demokrasi Terpimpin 144
G. Antara Pluralisme dan Dialektika Islam-Negara 153

BAB 5 PENUTUP 167

DAFTAR SINGKATAN 175
GLOSARIUM 177
DAFTAR PUSTAKA 181
TENTANG PENULIS 191
INDEKS 197

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Hasil Perolehan Suara Masyumi pada Pemilu 1955 6

Gambar 2.1 Surat Suara pada Pemilu 1955 44

Gambar 3.1 Peta Aliran Pemikiran Politik Indonesia (1945–1965) 65

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perolehan Suara dan Kursi Pemilu DPR 1955 45
Tabel 2.2 Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Konstituante 1955 48
Tabel 2.3 Perolehan dan Persentase Suara Masyumi 51

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku *Partai Islam dan Pluralisme: Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi* membahas mengenai hubungan antara partai Islam dengan pluralisme. Kajian pandangan dan sikap Partai Masyumi sebagai salah satu partai Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia pada masa Orde Lama yang sangat moderat dalam sikap dan pandangan politiknya, jauh dari kesan ekstrem yang anti pluralisme. Buku ini tidak saja akan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, tetapi juga dapat melihat perkembangan pemikiran dan sikap mayoritas umat Islam dalam menerima pluralisme itu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia

Buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini adalah sebuah buku yang membahas sekelumit sejarah salah satu partai politik Islam yang terbesar pada masa lalu, Partai Masyumi. Masyumi adalah sebuah partai yang menarik untuk dikaji karena partai itu pernah didukung oleh sejumlah besar umat Islam seperti yang ditunjukkan oleh hasil Pemilihan Umum 1955, tetapi kemudian dianggap musuh besar oleh Orde Lama sehingga partai ini dipaksa untuk membubarkan diri oleh Presiden Soekarno. Ironisnya, partai ini tetap dianggap sebagai musuh yang menakutkan oleh Orde Baru. Oleh karena itu, ini buku yang menarik untuk memahami sejarah Masyumi. Buku ini membantu generasi muda yang ingin memahami sejarah politik Indonesia modern secara mendalam.

Karya mengenai hubungan antara partai Islam dan pluralisme, melalui kajian pandangan dan sikap Partai Masyumi ini, sangat menarik untuk dibaca. Penulis, dalam hal ini, berupaya untuk membuktikan secara argumentatif dan ilmiah bagaimana sebenarnya Masyumi, sebagai salah satu partai Islam terbesar yang pernah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ada di Indonesia pada masa Orde Lama itu, sangat moderat dalam sikap dan pandangan politiknya, jauh dari kesan ekstrem yang anti-pluralisme.

Seperti kita ketahui, perjalanan sejarah Partai Masyumi dipenuhi dengan aspek patriotisme di satu sisi, tetapi juga diwarnai dengan ironi di sisi lain. Banyak tokoh-tokoh partai tersebut yang memiliki jasa besar bagi awal berdirinya republik ini. Namun, akhir perjalanan Masyumi harus menghadapi pembubaran dari rezim Soekarno. Para eks Masyumi masih mengalami "pahit getirnya" sejarah politik. Bukan saja sejak tahun 1960 tidak pernah lagi mendapat jatah kursi, melainkan juga tokoh-tokohnya banyak yang dipenjara, disingkirkan macam "kucing kurap", bahkan dituduh akan mendirikan negara Islam.

Nasib para eks Masyumi pun tidak pernah menjadi lebih baik selama Orde Baru berkuasa. Rehabilitasi Masyumi tidak pernah diizinkan, malahan cap sebagai kalangan ekstrem kanan dengan mudah dialamatkan kepada mereka. Pada era Orde Baru, jangankan bintang jasa, tokoh-tokohnya pun tidak pernah dikembalikan nama baiknya. Mohammad Natsir dengan mosi integral dihapus dari sejarah; Sjafruddin Prawiranegara sebagai mantan presiden PDRI diminimalkan jasanya, bahkan Burhanuddin Harahap, selaku Perdana Menteri penyelenggara pemilihan umum pertama yang demokratis tahun 1955, dilupakan.

Kehadiran penelitian ini sangat penting untuk memberikan sudut pandang lain mengenai rekam jejak sikap dan pandangan politiknya yang sebenarnya sangat moderat dan menghargai nilai-nilai pluralisme. Dalam rumusan resmi program politik Masyumi disebutkan bahwa partai itu menghendaki Indonesia menjadi negara hukum yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sebuah negara yang bersifat Islam, tetapi bukan secara formal disebut sebagai "negara Islam" ataupun "berdasarkan Islam", melainkan negara yang disusun *sesuai dengan ajaran-ajaran Islam*, baik dalam teori maupun praktiknya.

Dengan demikian, langkah moderat yang dilakukan Masyumi dalam pandangan dan aksi politik, mengenai hubungan antara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

agama dan negara, dapatlah dikatakan telah mengalami semacam objektifikasi. Sebuah partai dikatakan melakukan objektifikasi jika (1) mengakui adanya pluralisme masyarakat dalam SARA; (2) menjadikan moral agama sebagai landasan gerakan; (3) berusaha supaya moral agama (kemanusiaan, keadilan, dan kemajemukan) itu menjadi kenyataan objektif.

Dalam beberapa butir tersebut sebenarnya Masyumi merupakan partai yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas objektif yang ada di Indonesia. Masyumi selalu mengakui Indonesia sebagai negara yang plural dan terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Dengan begitu, tidak mengherankan jika partai ini mampu berdampingan dengan semua partai, baik sesama partai Islam, nasionalis, maupun partai nonmuslim. Walaupun hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) bak air dengan minyak, hubungan itu tidak menghalangi pertemanan baik antara tokoh Masyumi dan PKI.

Masyumi juga terlihat tidak terlalu mengedepankan simbol Islam dalam penyusunan program-programnya. Hal ini tidak berarti bahwa bagi Masyumi label dan kepentingan umat Islam itu tidak penting. Namun, Masyumi meyakini bahwa hakikat Islam sudah tercakup di dalam program dan kebijakan mereka itu sehingga secara substansial Masyumi merasa sudah sejalan dengan prinsip atau nilai-nilai Islam. Selain itu, hal tersebut juga dilandasi kesadaran yang mendalam bahwa masyarakat, sebagai sasaran dari program dan kebijakan itu, adalah masyarakat yang esensinya plural sehingga perlu didekati dengan cara pandang yang inklusif.

Dengan cara pandang substansialistik sekaligus nasionalistik ini, tidak mengherankan jika semangat menghargai perbedaan itu tertampung dan terimplementasi dalam program dan kebijakan Masyumi. Sebagai partai Islam, tentu langkah ini, pada masa Orde Lama yang kental dengan nuansa ideologis, sudah sangat maju.

Cara berpolitik Masyumi dari sisi penghargaan terhadap pluralisme, yang diulas buku ini, sangat relevan untuk dikaji pada era reformasi yang multipartai ini. Pandangan dan sikap Masyumi, selaku partai Islam terhadap pluralisme pada masa hidupnya, harus

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi inspirasi partai-partai yang mengaku berada di rumpun partai Islam. Dengan demikian, mereka mampu menjadi partai yang memperjuangkan kepentingan semua kalangan, bukan malah melakukan politik yang bersifat eksklusif. Akibatnya, segmen pemilih mereka akan menjadi lebih luas dan nilai-nilai Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam.

Sejarah politik Indonesia modern (termasuk sejarah tentang perkembangan dan peran Masyumi) adalah sebuah bidang kajian yang kurang mendapat perhatian dalam studi ilmu politik akhir-akhir ini, padahal memahami sejarah politik Indonesia modern, mulai dari sejarah pergerakan nasional Indonesia sampai masa Orde Baru, adalah bagian penting dalam studi ilmu politik. Bagi masyarakat luas, pengetahuan tentang sejarah politik Indonesia modern juga sangat diperlukan agar dapat memahami dinamika politik Indonesia. Apabila sejarah politik Indonesia modern tidak dipahami dengan baik, tentu saja ini akan sulit untuk memahami perkembangan politik kontemporer. Oleh karena itu, para mahasiswa dan masyarakat luas perlu memahami dengan baik salah satu aspek penting dari sejarah politik Indonesia modern, yaitu Partai Masyumi.

Selamat membaca!

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Valina Singka, M.Si
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia

Buku yang mengulas mengenai Partai Masyumi dan pluralisme yang ditulis Prof. Firman Noor, Ph.D dan Ade Wiharso, S.I.P. ini sangat penting dan menarik karena masih belum banyak ilmuwan yang menuliskannya, apalagi yang telah secara gamblang menyimpulkan bahwa pada dasarnya Partai Masyumi memiliki gagasan dan praktik politik yang sesuai dengan nilai-nilai pluralisme. Dengan demikian, hal ini mampu menjawab pertanyaan besar, apakah semangat pluralisme itu ada dalam gagasan dan aksi politik Partai Masyumi?

Seperti parta-partai politik lainnya, Partai Masyumi tumbuh pada era ketika politik Indonesia didominasi oleh politik aliran. Merujuk pada riset Geertz mengenai tipologi aliran dalam masyarakat Jawa, Partai Masyumi disebut meraih dukungan terbesar dari kalangan santri sebagaimana halnya partai-partai Islam lainnya, seperti Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) atau Partai Nahdatul Ulama (PNU).

Begitu juga ketika kita membaca kajian Feith dan Castles. Kajian yang merekam bagaimana politik aliran yang begitu kuat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mewarnai hampir semua aspek kehidupan politik saat Indonesia baru merdeka. Konteks politik yang sangat dinamis itu, misalnya, terlihat ketika adanya perdebatan mengenai dasar negara di badan konstituante antara partai-partai yang setuju negara berlandaskan nilai-nilai Islam (tergabung dalam faksi Islam nasionalis) dan negara berdasarkan Pancasila (tergabung dalam faksi non-Islam nasionalis).

Jika melihat realitas politik pada masa itu, bisa dikatakan bahwa pertarungan aliran ideologi yang dibawa oleh setiap partai sangat tidak bisa dihindarkan. Bahkan, pertarungan ideologi saat itu juga sempat membuat setiap partai politik yang berbeda ideologi untuk saling melemparkan isu. Contohnya, perang isu yang terjadi antara Partai Masyumi dan Partai Komunis Indonesia (PKI) terkait eksistensi Lapangan Banteng yang saat itu kerap dijadikan arena kampanye partai politik pada pemilu 1955.

Pada saat berkampanye di Lapangan Banteng, juru kampanye PKI melemparkan isu yang menyerang Partai Masyumi, bahwa jika Partai Masyumi menang, Lapangan Banteng ini akan diubah jadi Lapangan "Onta". Namun, saat giliran kampanye Partai Masyumi, isu tersebut pun dibalas. Bahwa Jika PKI menang, Lapangan Banteng akan diubah jadi Lapangan "Merah, Kremlin di Moskow."

Namun, di tengah memanasnya kompetisi antaraliran politik pada masa menjelang pemilu 1955 itu, suasana kampanye dan pemilu pun malah berjalan dengan damai. Bahkan, persaingan ideologi yang terjadi hanya sebatas kata-kata, tidak sampai berujung pada tindakan saling menyerang dan menimbulkan konflik (fisik/nonfisik) antarpendukung partai.

Hal yang menarik lainnya adalah bahwa pertarungan aliran yang begitu kuat tersebut, pada sisi lain, tidak menutup partai-partai untuk melakukan penyesuaian agar dapat meraih dukungan suara terbanyak dari pemilih. Tentu saja keinginan untuk meraih dukungan dari luar konstituennya itu dilakukan dengan mengembangkan dan menjalankan pemikiran, gagasan, dan sikap moderat. Partai-partai berhadapan dengan politik empiris yang sangat kompetitif itu dan mau tidak mau dituntut untuk lebih terbuka serta bersedia bekerja sama dengan berbagai kelompok politik yang berlainan aliran.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Oleh sebab itu, sikap untuk menjadi lebih moderat itu juga dilakukan oleh Partai Masyumi—yang sejak awal dianggap banyak kalangan mengusung gagasan untuk mendirikan negara Islam. Tentu saja banyak kalangan yang meragukan ketulusan Partai Masyumi untuk bersikap moderat, toleran, dan mau mengakomodasi kepentingan pihak-pihak lain. Bahkan, sikap plural yang ditampilkan oleh Partai Masyumi dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan pragmatis untuk berkuasa.

Namun, buku ini, dengan menyuguhkan berbagai data empirik konteks politik Indonesia, setidaknya telah mematahkan keraguan atas sikap plural Partai Masyumi. Dengan dikatakan bahwa pilihan untuk menjadi moderat dan menghargai pluralisme dapat juga bersifat ideologis. Artinya, berbagai aksi politik Partai Masyumi yang cenderung moderat bukanlah pilihan pragmatis, tetapi sebuah keharusan ideologis. Aspek normatif yang dianut oleh Masyumi cenderung mengarah untuk meniadakan paksaan dalam agama dan bersedia bekerja sama dengan semua golongan. Artinya, pandangan atau ideologi politik Masyumi mengisyaratkan sebuah penghormatan terhadap pluralisme.

Di samping itu, meskipun kerap melakukan kompromi, Partai Masyumi juga dikenal teguh dan konsisten dalam meyakini apa yang dianggapnya baik, antara lain, dalam hal penegakan demokrasi (yang mana pluralisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya) dan sikap anti-komunis, yang dianggap berbahaya bagi berkembangnya pluralisme. Dua kepentingan itu tidak pernah berubah sedikit pun, bahkan hingga partai ini dibubarkan oleh penguasa saat Orde Lama.Dapat dikatakan bahwa sikap anti kepada komunisme yang dianut Partai Masyumi merupakan bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai pluralisme. Mengingat Masyumi tidak setuju dengan prinsip kediktatoran proletariat sebagaimana yang diyakini oleh PKI, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kaum komunis (PKI) akan segera mendirikan kediktatoran manakala mendapat kemenangan politik dalam pemilu.

Selain itu, dalam pemahaman para kader Partai Masyumi, demokrasi dianggap juga sesuai dengan nilai-nilai pluralisme, yakni

Buku ini tidak diperjualbelikan.

demokrasi harus memberikan kebebasan bagi rakyat untuk mengemukakan ekspresi dan kepentingannya tanpa diskriminasi. Negara demokrasi yang diinginkan Partai Masyumi tidak identik dengan negara teokrasi yang pemerintahannya dikuasai oleh satu kependetaan yang mempunyai sistem hierarki sebagai wakil Tuhan di dunia.

Bisa dikatakan bahwa negara demokrasi yang dikehendaki adalah negara yang bekerja untuk kepentingan seluruh warga negara, tanpa membeda-bedakan latar belakang primordial. Keragaman adalah sesuatu yang dihargai oleh Partai Masyumi dan keyakinan ini didasari oleh ajaran Islam. Dalam buku ini, disinggung "Tafsir Asas Masyumi" yang menjelaskan bahwa negara yang dimaksud oleh Partai Masyumi adalah negara yang "*menudju kepada 'Baldatun Thoijbatun wa rabbun ghofur',… di mana bagi seluruh penduduknya dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman*". Kalimat tersebut tertulis dalam surah Saba' ayat 15 yang artinya adalah "sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan penduduknya, sebuah negeri yang baik yang penuh ampunan dari Allah". Dengan melihat berbagai gagasan dan aksi politik Partai Masyumi tersebut, bisa dikatakan bahwa Partai Masyumi memiliki sebuah perspektif ideologis yang sangat dekat dengan pengakuan terhadap pluralisme. Hubungan Islam dan politik, menurut Partai Masyumi, akan membawa pada penghormatan atas keberagaman dalam politik dan juga keberagaman pada semua aspek kehidupan manusia.

Tentu saja masih diperlukan banyak kajian dari para ilmuwan politik yang mengupas mengenai kesesuaian ide dan aksi politik partai-partai Islam, khususnya Partai Masyumi, terhadap nilai-nilai pluralisme dari berbagai sisi supaya makin ditemukan adanya penghargaan yang besar dari partai-partai beraliran Islam terhadap semangat keberagaman di Indonesia. Prof. Firman Noor dan Ade Wiharso berhasil menuliskannya dalam bahasa yang mengalir dan mudah dipahami para pembaca. Oleh karena itu, buku ini sangat layak menjadi bacaan wajib bagi mereka yang ingin memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang konteks kesejarahan partai-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

partai politik Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini dan insyaallah ini akan memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.
Ketua Umum Partai Masyumi

Dalam sejarah politik Indonesia, Partai Masyumi memiliki posisi penting dan menentukan dalam perjalanan politik kebangsaan, lebih khusus lagi politik Islam di Indonesia. Berdirinya Partai Masyumi tidak terlepas dari akar sejarah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 1943. Bedasarkan maklumat wakil Presiden atau "Maklumat X" tanggal 3 November tahun 1945, tokoh-tokoh Islam mengadakan Kongres Umat Islam di Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta pada 7–8 November 1945. Hasil kongres itu menyepakati berdirinya Partai Politik Islam Indonesia Masyumi dengan diinisiasi oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, dan organisasi lainnya.

Masyumi merupakan kekuatan politik bagi umat Islam dalam percaturan politik nasional dan menjadi wadah politik satu-satunya umat Islam pada masa itu. Sebuah partai yang telah menjadi ingatan kolektif bangsa ini dengan sikap politik yang moderat dan berkemajuan. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa Masyumi telah menjadi "telaga keteladanan" politik bagi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

umat Islam Indonesia. Sebuah partai yang berumur kurang lebih 15 tahun itu menjadi legenda yang terus dikaji, diteliti, dan dihidupkan dalam diskursus politik, lebih-lebih diskursus akademis.

Buku *Partai Islam dan Pluralisme: Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi* menjadi satu kajian yang dilakukan oleh Firman Noor dan Ade Wiharso yang bukan saja sebagai bentuk legitimasi sejarah bagi partai Masyumi yang "dibidani" oleh para ulama dan cendekiawan Islam, melainkan juga menjadi sebuah karya akademik untuk didalami dan dikembangkan kemudian hari agar umat Islam dapat membaca literasi sejarah atas kegigihan ideologis dan pemikiran yang dikembangkan oleh para tokoh Masyumi pada masa pergerakan membangun Indonesia yang sesuai dengan ajaran Islam dalam bernegara.Perjalanan Masyumi, yang dibangun Masyumi sejak medio 1945–1960 untuk bangsa Indonesia, masih memiliki relevansi sangat tinggi pada setiap zaman atau orde pemerintahan meskipun berbagai perubahan, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam setiap zaman itu berbeda-beda. Sebagai kekuatan politik terpenting pada zamannya, Masyumi menjadi ikon perjuangan umat Islam. Masyumi terbukti menjadi partai terbesar dengan jumlah 10 juta pengikut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi partai egaliter yang diterima di seluruh Indonesia.

Sebagai kekuatan politik Islam, Masyumi menyadari Indonesia dibangun atas rantai keterkaitan gugus entitas kultural yang plural dalam etnis, ras, agama, dan golongan. Sejak awal, pluralisme telah disadari oleh para tokoh Masyumi (yang juga pendiri republik). Pluralitas tidak saja menjadi hak dari tiap-tiap orang yang mengaku menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga lebih dari itu. Dalam sejarahnya, tiap-tiap bagian bangsa ini telah berkorban, memberi, dan berperan dalam perjuangan membentuk Indonesia.

Kesadaran itu pula yang muncul ketika tokoh-tokoh Masyumi hendak membahas falsafah dasar dan konstitusi Indonesia merdeka. Beberapa di antaranya ada Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Kasman Singodimejo, Sukiman Wirjosanjojo, K.H. Kahar Muzakkir, dan Abikoesno Tjokrosoejoso.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Para tokoh Masyumi ini bersama dengan anggota Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersepakat untuk membentuk sebuah negara Republik Indonesia yang merdeka "buat semua golongan, agama, etnis, dan suku" yang keberagamannya sangat kompleks.

Ini terbukti ketika hendak merumuskan falsafah dasar negara (*filosofiche groundslaag*) *Indonesia Merdeka*, para tokoh-tokoh Islam tidak hendak memaksakan diri untuk memajukan konsep negara Islam. Meskipun dalam sidang BPUPKI, ada dua golongan besar, yaitu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam yang memiliki perbedaan pandangan mengenai bentuk dan dasar negara, mereka tetap berupaya untuk mencapai titik temu (*kalimatun sawa'*), tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya masing-masing. Setelah perdebatan yang cukup alot, para pendiri republik ini bersepakat untuk membentuk negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial dan tidak mengadopsi pemerintahan sekuler seperti Kemal Atatürk di Turki ataupun sistem kekhalifahan dalam Islam, atau bentuk negara Islam. Ketika kesepakatan mengenai falsafah negara tercapai pada tanggal 22 Juni 1945, golongan Islam memilih kalimat yang sangat khusus, yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kalimat ini merupakan kewajiban internal bagi umat Islam dalam negara Republik Indonesia untuk menegakkan syariat Islam tanpa harus memaksa umat-umat lain yang hidup dalam negara merdeka.

Piagam Jakarta *(the Jakarta Charter*) bukan dokumen negara Islam, tetapi lebih pada penegasan mengenai penegakan syariat Islam bagi umat Islam dengan tetap berpegang pada prinsip pluralisme. Oleh karena itu, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam itu diikuti dengan kalimat "berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia…" ini menggambarkan betapa syariat Islam itu dijalankan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan permusyawaratan.

Menariknya, Piagam Jakarta diterima oleh seluruh anggota BPUPKI dan PPKI, baik golongan nasionalis sekuler maupun golongan nasionalis Islam. Bung Karno sendiri adalah pembela uta-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ma Piagam Jakarta saat Dr. Johanes Latuharhari mempersoalkan dokumen tersebut. Bagi Bung Karno, Piagam Jakarta adalah titik temu atas semua golongan dalam bangsa Indonesia. Kata Bung Karno "*… Panitia Ketjil penjelidik usul-usul berkejakinan bahwa inilah préambule jang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran jang ada dikalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.*" Artinya, Piagam Jakarta adalah dokumen pluralisme, bukan dokumen negara Islam. Di dalamnya ada golongan Islam, golongan sekuler, golongan Kristen, golongan Hindu, dan golongan-golongan lainnya.

Meskipun telah disepakati dan diterima oleh semua golongan, ketika hendak diubah, golongan Islam juga tidak mati-matian mempertahankan piagam itu sebagai falsafah bernegara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, perundingan kedua untuk membahas Piagam Jakarta dilakukan. Pada hari itulah, golongan Islam merelakan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Ketuhanan yang Maha Esa." Sejak itu pula, Piagam Jakarta berubah menjadi Pancasila. Golongan Islam pun menerima perubahan itu.

Piagam Jakarta menjadi dokumen sejarah yang menuai banyak polemik di kalangan tokoh Islam dan sekuler. Sejarah likaliku Piagam Jakarta kembali lagi dalam sidang konstituante tahun 1955–1959. Meskipun dokumen itu masih menimbulkan polemik, pada saat pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta diakui sebagai dokumen historis dan dokumen yuridis. Sebagaimana tertulis dalam biografi M. Natsir (Lukman Hakiem, 2019), ketika dukungan terhadap Pancasila dan Islam tidak memperoleh dukungan yang cukup, para anggota konstituante bersepakat untuk kembali ke UUD 1945. Pihak Islam melalui K.H. Masjkur menghendaki Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dijadikan "Pembukaan", sedangkan pihak Pancasila menghendaki "Pembukaan" yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Ketika dilakukan *voting*, tidak ada yang mampu mencapai suara mayoritas.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sehubungan dengan rencana pemerintah kembali ke UUD 1945, sembilan belas anggota parlemen mengajukan pertanyaan kepada Perdana Menteri Djuanda. Salah dua di antara 19 anggota parlemen itu, Anwar Hadjono (Masyumi) dan Ahmad Sjaichu (NU), menekankan pernyataan tertulis tentang pengakuan terhadap adanya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Anwar Harjono, anggota konstituante dari Masyumi, mempertanyakan beberapa hal mengenai rencana keluarnya dekret presiden. "Apakah yang dimaksud dalam putusan dewan menteri tentang pengakuan Piagam Jakarta, apakah hanya sekadar pengakuan historis dan hanya dipergunakan secara insidentil atau pengakuan itu mempunya kekuatan UUD?"

Pertanyaan itu dijawab secara tertulis oleh Perdana Menteri Djuanda pada tanggal 25 Maret 1959. "Dengan kembali ke UUD 1945, diharapkan agar kita dapat memulihkan potensi nasional kita, setidak-tidaknya memperkuatnya jika dibandingkan dengan masa sesudah akhir 1949. Dengan memulihkan, mendekati hasrat golongan-golongan Islam, pemerintah mengakui pula adanya Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang mendahului pembentukan UUD 1945." Walaupun Piagam Jakarta bukan merupakan bagian dari UUD 1945, yang di antaranya terlihat dari tanggalnya, 22 Juni 1945, naskah itu menjadi dokumen historis besar yang besar artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia dan bahan penyusunanan UUD 1945 yang menjadi bagian dari konstitusi proklamasi.Kemudian, Ahmad Sjaichu mengajukan pertanyaan: "Apakah pengakuan Piagam Jakarta berarti pengakuan sebagai dokumen historis saja ataukah mempunyai akibat hukum, yaitu perkataan *Ketuhanan* dalam Mukaddimah UUD 1945 berarti 'Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariatnya' sehingga atas dasar itu bisa diciptakan perundang-undangan yang bisa disesuaikan dengan syariat Islam bagi pemeluknya?"

Perdana Menteri Djuanda menjawab: "Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945. Jadi, pengaruhnya termaksud tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Dengan demikian, perkataan *Ketuhanan* dalam Pembukaan UUD 1945 diberikan arti 'Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya', sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam". Dari pertanyaan para anggota parlemen dan jawaban dari pemerintah pada saat itu, dapat kita katakan bahwa Piagam Jakarta adalah dokumen historis dan dokumen yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kembali ke UUD 1945 adalah kembali pada Piagam Jakarta sebagai dokumen hukum yang otentik.

Sebagai jawaban atas tuntutan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pemerintah membentuk Kementerian Agama sebagai bagian dari badan eksekutif yang pada dasarnya untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam. Kemudian, pemerintah membentuk peradilan agama sebagai badan yudikatif bagi umat Islam. Selain badan-badan itu, negara juga membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syariat Islam, yaitu

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,
6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan
7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Transformasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara konsisten. Bahkan, baru-baru ini pemerintah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia membentuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk menjalankan roda ekonomi berbasis syariat Islam. Oleh karena itu, syariat Islam sudah menjadi sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui transformasi hukum yang dinamis.

Dari peristiwa tersebut tergambar jelas bagaimana tokoh-tokoh Islam selalu menghormati dan mengakomodasi perbedaan dengan sikap toleransi dan tidak mengambil jalan di luar konstitusi untuk menyelesaikan tuntutan mereka. Egalitarianisme yang terbangun di kalangan tokoh Islam ini menjadi keteladanan berpolitik dengan cara-cara yang beradab.

Semangat egalitarian yang tumbuh di kalangan tokoh Islam (khususnya tokoh Masyumi) telah hidup dalam alam politik Indonesia. Setelah menjadi partai politik pada tahun 1945, Masyumi menegakkan prinsip-prinsip egalitarian dan inklusifitas dalam memperjuangkan tujuan dan cita-citanya, tanpa membeda-bedakan golongan, agama, suku, dan etnis dalam negara Indonesia—semangat kerja sama sebagai sebuah bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional dengan semua entitas politik.

Masyumi Mempertahankan Republik

Situasi politik setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam ancaman agresi militer (Agresi Militer Belanda I tahun 1947) dan pemberontakan dari dalam yang dilakukan oleh Muso di Madiun dan Amir Syarifuddin di Banten pada 18 September 1948. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia ditentang oleh Masyumi. Masyumi tampil sebagai kekuatan utama menghadapi pemberontakan itu.

Beberapa bulan setelah pemberontakan PKI, pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan Agresi Militer II dan berhasil menguasai ibu kota negara, Yogyakarta. Serangan ini nyaris mengakhiri riwayat Republik Indonesia yang baru berumur lebih kurang 3 tahun. Praktis, kekuasaan pemerintah lumpuh. Para pemimpin bangsa, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Haji Agus Salim, ditangkap oleh Belanda di Istana Negara. Belanda berniat menghancurkan republik dan menghapus TNI untuk selamanya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jenderal Soedirman menolak berunding dengan Belanda karena telah ingkar janji dan mengajak Bung Karno untuk melakukan perang gerilya. Soekarno menolak ajakan itu dan tetap bertahan di Yogyakarta untuk menghadapi Belanda lewat perundingan. Setelah Belanda menguasai ibu kota, Presiden dan Wakil Presiden melakukan rapat kilat dan mengirim kawat kepada Sjafruddin Prawiranegara yang masih berada di Bukittinggi, Sumatra Barat, untuk membentuk pemerintahan darurat. Surat—yang tidak pernah diterima Sjafruddin—itu dikirim pula ke A.A. Maramis dan L.N. Palaar di Delhi untuk membentuk *exil government* apabila ikhtiar Sjafruddin tidak berhasil.

Tanpa mengetahui adanya mandat dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta yang dikirimkan kepadanya, pada sore hari tanggal 19 Desember 1948, Sjafruddin Prawiranegara bersama dengan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Daerah Sumatera, Mr. Teungku Muhammad Hasan, bersepakat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang kemudian diumumkan di Halaban, sebuah desa di pedalaman Sumatra Barat pada tanggal 22 Desember 1948. Sjafruddin Prawiranegara adalah Ketua (Presiden) PDRI yang memimpin jalannya perang gerilya itu. Ketika perang gerilya sedang gencar, beberapa negara mengecam tindakan Belanda dan memaksa mereka untuk melakukan perundingan. India bahkan mengadakan konferensi inter-Asia untuk Indonesia.

Jalan pintas yang dilalui adalah dengan mendekati Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa menteri yang ditahan. Akhirnya, Presiden dan Wakil Presiden setuju untuk melakukan perundingan, ketika itu pula *pelanggaran konstitusional* tak terhindarkan. "Bukankah PDRI yang berkuasa walaupun sifatnya darurat dan sementara?," kata Taufik Abdullah (Sjafruddin Prawiranegara, Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah, 2011). Untuk mengutus delegasi, diangkatlah Mohammad Roem (tokoh Masyumi) sebagai ketua delegasi Indonesia. Akan tetapi, sebuah *insiden* tak terhindarkan. Ketika seorang kurir menyampaikan surat pengangkatan Presiden Soekarno kepada Sutan Sjahrir sebagai *penasihat delegasi Indonesia*,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sjahrir menolak dengan nada marah dan berkata, "Hanya Sjafruddin yang berhak mengangkat saya." Betapapun merasa diberlakukan tidak adil, Sjafruddin dan Soedirman adalah pemimpin yang berjiwa besar. Mereka siap menerima segalanya demi keutuhan Republik Indonesia.

Pasalnya, sejak Agresi Belanda II pada 19 Desember 1948, pemerintah pusat melalui Presiden Soekarno memandatkan Menteri Pertahanan Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jadi, seharusnya Sjafruddin-lah yang berhak disebut perwakilan sah Indonesia.

Bahkan, di internal Partai Masyumi terjadi silang pendapat antara Mohammad Roem dan M. Natsir meskipun keduanya terlibat langsung dalam proses perundingan dan rekan separtai. Natsir mengkritik keabsahan Roem selaku ketua delegasi RI. Menurutnya, mandat dari Soekarno dan Hatta sebetulnya sudah tidak berfungsi lagi karena keduanya berada dalam tahanan Belanda. Natsir juga berpendapat seharusnya Roem membicarakan poin-poin kesepakatan terlebih dulu dengan PDRI. Mestika Zed dalam buku *Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (1997) menyebutkan bahwa Natsir memang lebih condong ke kubu PDRI pimpinan Sjafruddin Prawiranegara. PDRI pun menyatakan ketidaksepakatan serupa.

Meskipun Sjafruddin dan Soedirman menolak pernyataan Roem-Roijen dan tidak menerima jalannya perundingan Roem-Roijen, mereka tetap kembali ke Yogyakarta. Pada penyerahan kembali mandat sebagai Ketua PDRI, T.B. Simatupang berkisah bahwa "setelah Yogyakarta kembali—sebuah ungkapan yang menyatakan Yogyakarta kembali kepangkuan RI—maka kini, Yogyakarta menanti kedatangan Soedirman dan Sjafruddin," tulis Simatupang. Kedatangan keduanya sangat krusial, bukan saja sebagai kelanjutan perjuangan, melainkan juga sebagai keutuhan NKRI karena merekalah yang memimpin perjuangan ketika Soekarno dan Hatta ditawan. Walaupun kembalinya Yogyakarta, hasil perundingannya secara konstitusional tidak sah. Sjafruddin dan Soedirman tidak sepakat dengan "*statement Roem-Roijen*", bahkan ide perundingan itu sendiri. Bagi Sjafruddin, perundingan itu cacat secara hukum

Buku ini tidak diperjualbelikan.

karena perundingan terjadi atas wibawa Soekarno-Hatta, bukan atas legitimasi kekuasaan yang sah.

Sjafruddin dan Soedirman lebih memilih nilai yang lebih tinggi untuk bangsa dan negara, meskipun diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu, pada tanggal 13 Juli 1949, Sjafruddin sebagai ketua PDRI menyerahkan mandat kepada Soekarno-Hatta. Pada waktu penyerahan mandat itu, Sjafruddin mengatakan, "PDRI tidak mempunyai pendapat tentang pernyataan 'Roem-Roijen', tetapi segala akibat yang ditimbulkannya kita tanggung bersama."

Setelah Agresi Militer Belanda II dan Perundingan Roem-Roijen, disepakati diadakannya Konferensi Meja Bundar di Denhaag, Belanda. Konferensi yang dirancang sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949 itu menghasilkan kesepakatan dengan membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Meskipun bentuknya hanya negara serikat, untuk pertama kalinya, Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949.

Akan tetapi, hasil Konferensi Meja Bundar telah melucuti persatuan Indonesia karena hasil konferensi tersebut memutuskan bentuk negara Indonesia menjadi negara federal, bukan negara kesatuan. Negara Indonesia terpecah-belah. Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Setidaknya ada 16 negara bagian yang terbentuk di seluruh wilayah Indonesia. Terbentuknya RIS merupakan keberhasilan dari politik adu domba Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Jelas itu merupakan ancaman yang sangat serius bagi keutuhan Republik Indonesia ketika itu.

RIS adalah hasil kompromi antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Kompromi tersebut jelas merugikan Indonesia dan memecah belah negara yang baru merdeka itu. Tambahan pula, adanya negara RIS justru mengesampingkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada Jumat, 17 Agustus 1945. Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu adalah bagian dari negara RIS yang pejabat presidennya adalah Mr. Assaat yang berpusat di Yogyakarta.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam keadaan yang serba sulit itu, Mohammad Natsir muncul dengan sebuah gagasan yang sangat cemerlang untuk memecahkan kebuntuan itu. Terdapat sebuah metode untuk menyatukan kembali republik yang sudah pecah itu. Natsir menawarkan satu *pernyataan integral* untuk menyatukan kembali negara-negara bagian, apalagi banyak negara-negara bagian ingin meleburkan diri pada republik. Konsep untuk menyatukan republik inilah yang dikenal dengan "Mosi Integral Natsir". Natsir bertekad untuk mengakhiri perpecahan dan mempertahankan keutuhan republik yang sudah bubar itu. Kemudian, Natsir melakukan perundingan, mengadakan pertemuan, termasuk berunding dengan Mr. Assaat di Yogyakarta untuk membicarakan pemulihan kembali Republik Indonesia.

Setelah berunding dengan pemimpin negara bagian, Natsir mulai melakukan lobi-lobi politik di semua fraksi di parlemen. Akhirnya, pada tanggal 3 April 1950, M. Natsir menyampaikan pidato yang bersejarah itu dalam sidang Parlemen RIS dengan menyampaikan gagasan bahwa semua negara bagian, bersama-sama, mengajukan diri untuk mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Semua fraksi sepakat, bahkan fraksi PKI pun ikut menyepakati mosi tersebut. Mosi integral itu diterima dengan suara bulat oleh semua fraksi di Parlemen RIS.

Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta, menyambut gembira mosi tersebut dan berkata, "Mosi Integral Natsir kami jadikan sebagai dasar untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang sedang dihadapi." Dengan mosi integral dan dukungan semua fraksi di Parlemen RIS, pulihlah NKRI secara demokratis dan terhormat pada tahun 1950. Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh Dr. Mohammad Noer bahwa Indonesia memiliki dua proklamasi, yaitu proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dan proklamasi NKRI tanggal 17 Agustus 1950.

Proklamasi 1950 adalah proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena dalam pernyataannya dikatakan "pembubaran 16 negara bagian yang tergabung dalam RIS, termasuk Negara Republik Indonesia Yogyakarta (yang diproklamasikan 17 Agustus 1945), dan meleburkan diri dalam sebuah negara yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Tidak mengherankan ketika Asa Bafagih, wartawan *Harian Merdeka*, bertanya kepada Bung Karno mengenai siapa yang akan dia tunjuk menjadi perdana menteri kabinet pertama di era negara kesatuan. Tanpa ragu, Bung Karno menjawab, "Siapa lagi kalau bukan Natsir dari Masyumi. Mereka punya konsepsi untuk menyelesaikan masalah bangsa menurut konstitusi."

Mungkin ada yang bertanya, kenapa Sjafruddin Prawiranegara, M. Natsir, dan tokoh-tokoh Masyumi, tokoh PSI, dan lainnya terlibat dalam gerakan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)? Bukankah mereka adalah pejuang yang mempertahankan Republik Indonesia, baik dari ancaman komunis maupun Belanda? Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1955–1960. Situasi politik sesudah Pemilu 1955 mengalami gejolak yang sangat dahsyat setelah Soekarno menunjuk Ali Sostroamijojo sebagai formatur kabinet. Sejak awal Kabinet Ali banyak menemui kesulitan karena perbedaan pandangannya dengan presiden dalam menjalankan programnya. Kemajuan-kemajuan yang dicapai terdesak ke belakang, terutama terjadinya pemogokan oleh Serikat Buruh yang dimotori oleh PKI yang makin leluasa di bawah pelindungan Soekarno sehingga rencana peningkatan produksi menjadi lumpuh.

Pembangunan daerah terbengkalai sehingga menimbulkan pergolakan dan protes di mana-mana. Harga kebutuhan pokok, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap yang relatif stabil, meningkat makin tajam. Gerakan anti-Cina menyebar di berbagai kota dan menimbulkan beberapa insiden kekerasan. Keamanan yang sudah mantap—terutama saat-saat pemilihan umum di bawah Perdana Menteri Buhanuddin Harahap (tokoh Masyumi)—menjadi kacau lagi. Terjadi pengungsian besar-besaran di berbagai daerah, khususnya di Sumatra, Sulawesi, Aceh, dan Jawa Barat.

Kesulitan yang paling serius dihadapi oleh Kabinet Ali adalah terjadinya penyelundupan berskala besar di berbagai daerah yang memiliki latar belakang politik. Kolonel J.F. Warow dan Letnan Kolonel Andi Mattalata di Sulawesi, serta Kolonel M. Simbolon di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumatra Utara menyatakan secara terang-terangan berdiri di belakang penyelundupan-penyelundupan tersebut. Alasan mereka jelas, yakni dengan sikap inilah daerah-daerah diperhatikan untuk gaji pegawai, prajurit, dan biaya operasi militer.

Selain itu, kesulitan lain yang dihadapi oleh Kabinet Ali adalah timbulnya kecaman-kecaman keras terhadap berbagai korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kecaman itu tidak saja muncul dari koran PKI, tetapi juga koran-koran satelit PSI, terutama *Indonesia Raya* pimpinan Muchtar Lubis. Koran terakhir ini dengan keras menyebutkan bahwa adanya korupsi yang dilakukan oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Lie Tok Hay yang menjabat sebagai pimpinan di sebuah percetakan negara. Kasus Lie ini melibatkan Menteri Luar Negeri, Roeslan Abdulgani. Akibatnya, pada tanggal 13 Agustus 1956, terjadilah penangkapan atas diri Roeslan ketika ia hendak pergi ke London untuk menghadiri Konferensi Terusan Suez—sejumlah militer melakukan penangkapan atas perintah Deputi KSAD, Kolonel Zulkifli Lubis. Bukti keterlibatan Roeslan dalam kasus Lie Tok Hay menyebabkan Kabinet Ali "kehilangan muka". Akhir November 1956, setelah delapan bulan memerintah, pamor Kabinet Ali menurun tajam.

Keadaan ini mendorong daerah-daerah untuk lebih memperhebat tekanan-tekanan pada pusat supaya pusat memberikan perhatian khusus pada daerah. Pada tanggal 1 Desember 1956, Wakil Presiden Moh. Hatta mengundurkan diri karena perbedaan pandangan dengan Soekarno yang lebih "mesra" dengan komunis. Pengunduran diri Hatta ini melipatgandakan ketidakpuasan daerah-daerah pada pusat. Banyak orang di luar Jawa, terutama Sumatra, menganggap sosok Hatta sebagai wakil mereka. Aksi tuduh-menuduh dalam diri militer tentang "antek Jawa" pun muncul, seperti tuduhan Simbolon dan Zulkifli Lubis kepada Nasution yang menjadi "antek" Soekarno dan Ali.

Di tengah pertentangan politik yang tajam antara pusat dan daerah, di Padang pada tanggal 20–24 November 1956, diadakanlah reuni perwira-perwira bekas divisi Banten yang dibubarkan oleh Nasution. Sebanyak 746 orang diberitakan hadir dalam reuni itu, ter-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masuk Letnan Kolonel Barlian, Komandan Distrik Militer Sumatra Selatan. Hasilnya ialah terbentuknya Dewan Banteng yang diketuai Kolonel Ahmad Husen, Komandan Resimen Militer Sumatra Tengah. Pada bulan November itu pula, Kolonel Zulkifli Lubis mendesak Simbolon untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat apabila tuntutan daerah tidak digubris oleh pusat. Pada tanggal 20 Desember 1956, Ahmad Husen mengambil alih pemerintah sipil di Sumatra Tengah dari Ruslan Muljohardjo. Simbolon melakukan tindakan serupa di Sumatra Utara. Ia mengambil alih kekuasaan sipil dan menyatakan keadaan darurat berlaku di seluruh wilayahnya. Dua hari kemudian, Barlian melakukan kontrol politis terhadap pemerintah sipil di Sumatra Selatan. Pada tanggal 15 Januari 1957, Barlian dan Alamsjah membentuk Dewan Garuda yang praktis berkuasa di Sumatra Selatan.

Tindakan serupa juga terjadi di Sulawesi. Tokoh-tokoh militer, seperti Vantje Sumual, D. Somba, dan Saleh Lahade segera membentuk dewan-dewan serupa di Sulawesi. Pada tanggal 2 Maret 1957, Saleh Lahade membacakan Piagam Perjuangan Semesta yang mengandung tuntutan pada pusat dan kejadian ini adalah awal berdirinya Permesta.

Pada tanggal 9 Januari 1957, Masyumi menarik menterinya dari Kabinet Ali karena perbedaan pandangan mengenai penanganan kesulitan yang dihadapi oleh negara. Dari 12 poin pernyataan yang ditandatangani oleh Mohammad Natsir dan M. Yunan Nasution, dapat diketahui dengan jelas bahwa sebab pokok penarikan mereka dari koalisi adalah karena Ali dan Nasution telah merencanakan untuk menghadapi gerakan-gerakan daerah dengan kekerasan militer, sedangkan Masyumi menginginkan agar masalah itu diselesaikan secara damai dan mengembalikan dwitunggal Soekarno-Hatta.

Dalam kondisi politik yang memanas, tanggal 7–8 September 1957 di Sungai Dareh, diadakanlah pertemuan tokoh pergolakan daerah. Semua petinggi militer dari Sumatra dan Sulawesi hadir. Pertemuan ini akhirnya melahirkan Piagam Palembang yang berisi enam poin penting, antara lain, dipulihkannya dwitunggal Soekarno-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hatta, pergantian pimpinan TNI, desentralisasi, pembentukan senat, dan perbaikan sistem bernegara.

Di Padang, terjadi pertemuan tokoh-tokoh daerah pada tanggal 10 Februari 1958 atas prakarsa Kolonel Dahlan Djambek. Pertemuan ini diikuti oleh tokoh-tokoh militer di Sumatra dan tokoh nasional yang pergi ke Padang untuk mengamankan diri. Hasil pertemuan itu melahirkan Dewan Perjuangan yang beranggotakan 16 orang, terdiri atas 11 tokoh militer dan 5 orang tokoh sipil. Dengan terbentuknya Dewan Perjuangan, mereka mengeluarkan ultimatum kepada pusat untuk segera mengindahkan tuntutan Dewan Perjuangan itu lima hari setelah dibacakan oleh Ketua Dewan Perjuangan, Kolonel Ahmad Husein, melalui RRI Padang. Inti ultimatum tersebut adalah agar dalam waktu lima hari, Perdana Menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada presiden dan dibentuk kabinet baru di bawah Hatta dan Hamengkubuwono IX sebagai tokoh yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian, Dewan Perjuangan meminta kepada Presiden Soekarno untuk menaati konstitusi, baik dalam kata maupun perbuatan. Apabila tuntutan itu tidak diindahkan, mereka berhak untuk tidak taat kepada Presiden Soekarno dan itu menjadi tanggung jawab Soekarno sendiri.

Setelah lewat lima hari, berdirilah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menterinya. Natsir sendiri tidak duduk dalam kabinet. Di Sulawesi Utara, berdiri Dewan Manguni yang dipelopori oleh perwira militer yang mayoritas beragama Kristen untuk menyokong berdirinya PRRI, maka disebutlah sebagai PRRI/Permesta. Masyumi secara institusi tidak ikut dan menyokong berdirinya PRRI/Permesta. Namun, akibat PRRI/Permesta, Masyumi dipaksa untuk *membubarkan diri* oleh Soekarno. Adapun keberadaan para tokoh Masyumi, seperti Sjafruddin dan Natsir, adalah untuk membentengi pergerakan yang dilakukan oleh perwira militer dan menghalangi keterlibatan langsung pihak asing (Amerika Serikat) untuk memecah belah wilayah Indonesia. Mungkin saja tanpa tokoh-tokoh sipil itu, PRRI/Permesta akan mendeklarasikan negara. Tidak hanya Sumatra, Sulawesi pun akan membentuk negara sendiri. Keberadaan Natsir

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan Sjafruddin adalah untuk menghalangi jangan sampai tujuan asing untuk memecah Indonesia berhasil.

Pada kenyataannya, PRRI/Permesta bukanlah negara, melainkan pemerintahan oposisi yang memperjuangkan nasib-nasib daerah. Mereka menentang pembangunan yang tidak adil dengan menuntut pemerintah pusat untuk memperhatikan daerah-daerah di luar Jawa serta menuntut Soekarno untuk taat konstitusi dalam kata dan perbuatan. Keberadaan Natsir dan Sjafruddin dalam PRRI/Permesta telah menyelamatkan Republik Indonesia dari perpecahan. Belakangan, konsep pemerintahan yang dibentuk oleh PRRI/Permesta itu menjadi sistem otonomi dalam negara Indonesia dan diperkuat setelah reformasi.

Meskipun diperlakukan tidak adil oleh Presiden Soekarno, tokoh-tokoh Masyumi tidak berkecil hati dan menaruh dendam sedikit pun kepada Soekarno. Para tokoh-tokoh Islam, seperti Sjafruddin, Natsir, Buya Hamka, dan lain-lain ditangkap tanpa proses pengadilan. Adapun Sutan Sjahrir (tokoh PSI) ditangkap dan akhirnya meninggal dalam tahanan. Ketika semua tokoh-tokoh ini ditangkap, pada September 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan atas perlindungan Soekarno untuk kedua kalinya. Kali ini, para jenderal ditebas. Pemberontakan PKI itu terjadi karena mereka sudah merasa telah dilindungi dan tidak ada lawan yang seimbang seperti Masyumi. Pada saat pemberontakan itu, tokoh-tokoh Islamlah yang pertama-tama membela dan mempertahankan Republik Indonesia dengan bekerja sama di bawah komando Jenderal Soeharto.

Menegakkan Konstitusi dalam Kata dan Perbuatan

Partai Masyumi adalah partai yang istikamah dalam garis perjuangannya, tidak pernah melanggar konstitusi, apalagi korupsi. Ketaatan terhadap konstitusi dilakukan semenjak awal berdiri dengan memilih berjuang melalui jalur konstitusi. Komitmen politik itu dapat dibaca dalam sejarah politik Indonesia. Misalnya, ketika S.M. Kartosuwirjo mengambil jalan di luar konstitusi, Natsir menulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

surat yang berisi permintaan agar Kartosuwirjo membatalkan rencananya untuk memproklamasikan negara Islam dan mengajak Kartosuwiryo kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Usaha-usaha untuk tetap memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui jalan konstitusional terus dilakukan. Natsir mengajukan mosi integral pada tahun 1950 juga melalui prosedur konstitusi. Oleh karena itu, Soekarno mengatakan "… Natsir dari Masyumi. Mereka punya konsepsi untuk menyelesaikan masalah bangsa menurut konstitusi."

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum juga tidak terlepas dari peran besar Masyumi dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis dan konstitusional. Pemilihan umum pada tahun 1955 dilaksanakan di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu yang disebut-sebut sebagai *pemilu ultrademokratis* itu telah menjadi legasi politik kepemiluan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam sejarah Indonesia. Pemilu 1955, yang berada di bawah tanggung jawab Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, dilaksanakan dengan biaya yang sangat kecil dengan persiapan yang relatif singkat.

Dalam proses pelaksanaannya, Pemilu 1955 adalah pemilu yang berintegritas karena diikuti oleh peserta pemilu yang memiliki integritas moral yang tinggi dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas yang sama. Tidak ada politisasi kebijakan, tidak ada politisasi aparat, dan tidak ada politik uang. Soekarno sebagai presiden tidak melakukan *abuse of power* untuk memenangkan partainya dengan melakukan politisasi kebijakan dan pengerahan aparatur negara.

Setelah hasil Pemilu 1955 keluar, Presiden memiliki hak penuh untuk menunjuk formatur kabinet. Akan tetapi, tindakan Soekarno menunjuk Ali Sostoamijojo sebagai formatur kabinet untuk mewujudkan impiannya tahun 1926 menyatukan nasionalisme, islamisme, dan marxisme rupa-rupanya tidak disetujui oleh Partai Islam Masyumi dan NU. Mereka menolak untuk berkoalisi dengan PKI. Dengan melihat kondisi yang demikian, terpaksalah Ali membangun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

koalisi nasionalisme-Islam sambil mengajak partai-partai kecil lainnya untuk memperkuat sokongan parlemen.

Karena mendengar hal tersebut, Soekarno marah besar, "Saudara sebagai formatur bertindak tidak adil kepada PKI. Mengapakah suatu partai besar, yang mendapat suara dari rakyat lebih dari enam juta itu, tidak kau ikut sertakan dalam kabinet baru? Ini tidak adil," kata Soekarno. Ali hanya menjawab bahwa itulah hasil maksimum yang bisa dicapainya karena partai Islam menolak keras partai komunis. Dalam kondisi terpojok, Ali berpasrah dan hanya menunggu presiden menyetujuinya atau tidak. Namun, Soekarno tidak langsung menolak. Ia meminta waktu untuk berpikir selama seminggu. Penguluran waktu tersebut menimbulkan spekulasi dalam masyarakat bahwa ada ketidakserasian antara presiden dan formatur. Ternyata, waktu seminggu itu dipakai Soekarno untuk memanggil tokoh-tokoh NU dan Masyumi ke istana. Soekarno mendesak Masyumi dan NU agar mau mengukitsertakan PKI dalam kabinet. Namun, sikap Masyumi melalui ketuanya, Dr. Sukiman Wirjosanjojo dan KH. Idham Chalid, tetap menolak.

Ketika semua orang masih menunggu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Soekarno, muncullah Natsir yang memberikan reaksi di koran *Abadi*, 30 Oktober 1956. Natsir mengatakan bahwa tampaknya Presiden mulai merasa banyak hal yang tidak memuaskan. Rupa-rupanya, sebab musabab dari semua yang tidak memuaskan itu adalah partai-partai. Dengan demikian, Natsir menjelaskan pendirian demokrasinya bahwa "semasih demokrasi itu ada, maka partai politik harus ada dan apabila partai politik dikubur, demokrasi pun turut pula Yang tinggal berdiri di atas kuburan itu diktatur," kata Natsir.

Reaksi terhadap konsepsi itu cukup seru. Beberapa partai seperti PKI, Murba, dan PNI menyokong konsepsi itu. Akan tetapi, partai-partai agama, seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia, menolak konsepsi itu dengan cara dan gaya masing-masing. Dalam pernyataan bersama pada tanggal 9 Maret 1957, mereka menilai bahwa konsepsi itu harus diserahkan kepada dewan konstituante karena menyangkut perombakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

struktur ketatanegaraan secara fundamental. Bahkan, Bung Hatta semenjak mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, untuk kali pertamannya menanggapi dengan "keras" konsepsi itu. Pada tanggal 1 Maret 1957, Hatta menyampaikan hal, yang pada prinsipnya, menolak konsepsi, baik dilihat dari konsepsinya, segi hukumnya, maupun pada tingkat pelaksanaannya.

Kebiasaan menyimpang yang dilakukan oleh Presiden Soekarno—dengan cara-cara yang diatur oleh konstitusi—itulah yang dikritik oleh Masyumi. Soekarno membentuk kabinet yang diberi nama "zaken kabinet" atau "kabinet ekstraparlementer" dengan cara *Presiden Republik Indonesia, menunjuk seorang warga negara, Ir. Soekarno, menjadi formatur kabinet*. Ini merupakan suatu yang mengherankan, jika ditinjau dari sistem tata negara. Namun, Soekarno tidak membentuk kabinet presidensial karena ia menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri didampingi oleh Mr. Hardi, K.H. Idham Chalid, dan dr. J. Leimena. Menanggapi hal itu, anggota parlemen Masyumi yang juga juru bicara partai, Mawardi Noor, mengatakan bahwa kabinet tersebut adalah "kabinet haram jadah". Kabinet, katanya, adalah "anak kandung" yang sah dari parlemen. Akan tetapi, kabinet ini—kata Mawardi—dibentuk di luar parlemen sehingga tak ada istilah yang tepat kecuali "haram jadah". Sampai akhir hayatnya, Masyumi tetap teguh pendirian bahwa Kabinet Djuanda adalah inkonstitusional.

Kiprah Para Tokoh Masyumi

Peran politik Masyumi dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari peran tokoh-tokoh Masyumi dalam pemerintahan. Haji Agus Salim, misalnya, merupakan tokoh penting dalam diplomasi Indonesia. Agus Salim adalah guru para diplomat yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalan diplomasi.

Haji Agus Salim adalah tokoh diplomat yang diutus menjadi ketua tim untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan dari Mesir. Dia seorang pemimpin Islam yang cerdas. Ia mahir berpidato dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda. Pidato-pidato Agus Salim memikat rakyat dan pemerintah Mesir—yang akhirnya memutuskan untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Setelah pengakuan Mesir, negara-negara Arab lainnya langsung menunjukkan dukungannya pada Indonesia, bukan hanya karena fasih berbahasa Arab, melainkan juga sikap sederhana yang ditunjukkan Agus Salim. Ia mampu meluluhkan hati negara-negara tersebut karena nilai etis yang dicontohkan. Agus Salim, saat berdiplomasi di dunia internasional, memperlihatkan martabat Indonesia yang berwibawa.

M. Natsir, seorang tokoh penting Masyumi, telah menanamkan legasi politik yang tidak bisa disepelekan. Selain mengajukan mosi integral untuk memulihkan NKRI, Natsir adalah Perdana Menteri Pertama NKRI. Natsir merupakan sosok yang bersahaja. Ketika pemerintah Jepang menghadapi situasi sulit akibat embargo minyak dari Arab Saudi, industri Jepang mengalami kolaps. Dalam keadaan tersebut, pemerintah Jepang mengirim utusan ke Indonesia untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar berkenan membuka kembali embargo minyak tersebut.

Nakajima pernah menulis artikel khusus di majalah *Media Dakwah* edisi Maret 1993, menceritakan tentang wafatnya Mohammad Natsir yang meninggal di Jakarta pada 6 Februari 1993. "Kami Banyak Belajar dari Mohammad Natsir" adalah judul artikel Nakajima tersebut. Nakajima menyatakan bahwa ia dan Fukuda pergi ke Indonesia untuk bertemu Natsir sampai 200 kali. Dia juga mengatakan bahwa bagi orang Jepang, Mohammad Natsir memiliki arti khusus.

Pasalnya, Natsir pernah membantu Jepang hanya dengan mengirim sepucuk surat dari balik penjara dan hal itu membuat embargo pasokan minyak dari Arab Saudi ke Jepang berakhir. Dengan adanya realisasi pengiriman minyak dari Arab Saudi ke Jepang, industri Jepang mulai bangkit. Berbagai industri otomotif merajai pasar dunia. Industri Jepang bangkit atas jasa baik Natsir. Satu hal yang membuat bangsa Jepang sangat hormat pada Natsir adalah tidak ada satu pun hadiah dari pemerintah Jepang yang diterimanya,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semua hadiah dikembalikan. Pengakuan Jepang atas jasa Natsir itu tertera dalam surat yang ditulis Takeo Fukuda tertanggal 8 Februari 1993 kepada keluarga besar Mohammad Natsir "Kami sangat berduka atas kematian Dr. Mohammad Natsir. Berita duka ini terasa lebih dahsyat daripada jatuhnya bom atom di Hiroshima karena kita kehilangan banyak pemimpin dunia, termasuk pemimpin Islam yang signifikan. Beliau masih sangat penting untuk mengatur dunia yang stabil." (Adian Husaini, Hidayatullah.com 2020).

Pada awal Orde Baru, Natsir dan keluarga besar Masyumi baru saja dikecewakan oleh rezim itu. Bukan hanya karena rezim Orde Baru menolak rehabilitasi Partai Masyumi, melainkan juga kebijakan Orde Baru ketika itu sangat represif terhadap aspirasi politik Islam. Pada masa Orde Baru, Natsir dikucilkan. Sebagai ketua Kongres Muslim Sedunia (World Moslem League), Sekjen Rabitah al-Alam al-lslami, dan Presiden The Oxford Centre for Islamic Studies London, Natsir dilarang ke luar negeri mengikuti pertemuan organisasi-organisasi itu. Natsir dicekal, terutama setelah menandatangani Petisi 50 yang mengkritisi Soeharto.

Sungguhpun demikian, sebagai negarawan, Natsir tetap mengambil peran untuk kebaikan bangsa dan negara. Ketika Presiden Soeharto menemui kesulitan untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia, Natsir mengirim surat kepada sahabatnya, yaitu Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdurrahman. Dalam suratnya, Natsir meminta PM Abdurrahman agar menerima utusan Soeharto untuk memulihkan hubungan kedua negara. Tidak hanya itu, saat Orde Baru gagal meyakinkan Jepang untuk membantu pendanaan untuk Indonesia, Natsir menyurati sahabatnya, yaitu Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda. Dari sini, atas inisiatif Jepang, didirikanlah International Governmental Group for Indonesia (IGGI). "Mr Natsir meyakinkan saya untuk membantu pemerintah Indonesia," kata Fukuda ketika Natsir wafat, 14 Maret 1993.

Meskipun diperlakukan tidak adil oleh negaranya, Natsir lebih mementingkan nasib rakyat Indonesia sehingga bersedia membantu pemerintah untuk membuka hubungan baik dengan Jepang dan Malaysia. Sampai akhir hayatnya, Natsir tetap menjadi pribadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang sederhana dan bersahaja. Ia tidak menyukai kemewahan dan kemegahan serta selalu konsisten dengan cita-cita dan keyakinannya.

Selain Natsir, ada tokoh-tokoh lain yang lahir dari Masyumi, seperti Sjafruddin Prawiranegara. Peran Sjafruddin dan PDRI sangat menentukan dalam sejarah. Itulah sebabnya Sjafruddin bukan hanya dianggap sebagai ketua PDRI, tetapi juga Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Sjafruddin adalah Menteri Keuangan yang cukup cemerlang dengan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI), mata uang sendiri bagi Indonesia dan menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama.

Terdapat juga nama Burhanuddin Harahap yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 1955. Kemudian, Kasman Singodimedjo, seorang politisi Masyumi yang menjabat Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat Pertama (KNIP) tahun 1945. KNIP adalah parlemen pertama Indonesia. Kasman juga menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia (1945–1946). Ada juga Sukiman Wirjosanjojo. Ia adalah Ketua Umum Masyumi pertama dan menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan perpolitikan Indonesia. Sukiman adalah Perdana Menteri ke-6 Republik Indonesia (1951–1952) yang mengeluarkan kebijakan mencakup nasionalisasi Bank Indonesia dan dimulainya sistem tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai pemerintah.

Mohammad Roem adalah seorang politisi Masyumi yang sangat andal dalam berdiplomasi. Karena kecakapannya itu, Roem memimpin delegasi Indonesia mengadakan perjanjian dengan Roijen yang akhirnya dikenal dengan Perjanjian Roem-Roijen sebagai perjanjian yang menjadi pengantar penyerahan kedaulatan penuh Indonesia oleh Belanda. Para pemimpin Islam dari Masyumi, seperti K.H. Hasyim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama), Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah), K.H. Wahid Hasyim, Buya Hamka (pendiri dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pertama), dan nama-nama lainnya yang cukup bersahaja. Mereka-mereka ini adalah pahlawan nasional dan tokoh politik yang cukup andal, mewariskan legasi bagaimana berpolitik dengan moral dan agama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keteladanan yang Tak Habis

Pada akhirnya, keteladanan yang diajarkan oleh para tokoh Masyumi selalu hidup dalam perpolitikan Indonesia meskipun sebagian generasi muda sudah mulai meninggalkan semangat untuk mempelajari sejarah dan kearifan itu. Perilaku kejujuran dan integritas Muhammad Natsir kemudian mengundang seorang indonesianis, George Mc.T Kahin, untuk berkomentar "Dia (Natsir) tidak bakal berpakaian seorang menteri. Meskipun demikian, dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh dengan kejujuran. Jadi, kalau Anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam republik Anda, sudah seharusnya berbicara dengannya." Selain itu, Masyumi sebagai partai politik menegaskan keteguhan dalam mempertahankan *ideologi Masyumi* dan konsisten dalam memperjuangkan terwujudnya ideologi itu. Sepanjang perjalanan politiknya selama 15 tahun itu, Masyumi telah memberikan warisan politik yang tidak pernah diberikan oleh partai politik mana pun. Masyumi telah melahirkan begitu banyak pahlawan, tokoh, kaum intelektual, dan cendekiawan, termasuk mereka yang menyebut dirinya sebagai anak-cucu Masyumi.

Begitu pula partai-politik yang lahir pascareformasi. Banyak yang mengeklaim diri sebagai penerus perjuangan Masyumi, seperti Partai Umat Islam (Deliar Noor), Partai Bulan Bintang (Yusril Ihza Mahendra), Partai Politik Islam Masyumi (Abdullah Hehamahua), Masyumi Baru (Ridwan Saidi), Partai Amanat Nasional (Amien Rais), dan Partai Keadilan Sejahtera. Indentifikasi diri sebagai partai penerus Masyumi memang cukup menggiurkan, tetapi kenyataannya politik Islam mengalami kemunduran dari hari ke hari.

Di tengah makin tenggelamnya partai-partai Islam, tentu ini menjadi bahan evaluasi diri bagi umat Islam untuk memperjuangkan kembali kebangkitan politik Islam di Indonesia. Oleh karena itu, kami—ketika kami mendirikan kembali Masyumi (Masyumi *reborn*)—menyadari tidak mudah untuk mengembalikan citra dan perjuangan Masyumi pada masa lalu, tetapi paling tidak kami berjuang untuk mengingatkan bahwa ada partai Islam yang melegenda dalam politik dan menjadi teladan politik yang mampu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Keinginan untuk menghidupkan kembali Masyumi—bukan hanya infrastruktur partai, melainkan juga ideologi—adalah keteladanan politik yang ideal bagi Indonesia di tengah rusaknya moralitas dan etika politik bangsa Indonesia.

Masyumi, yang kemudian digagas oleh anak-cucu Masyumi, bertujuan untuk membangkitkan politik Islam, mengikat persatuan dan kesatuan umat, dan meluruskan kiblat politik Indonesia yang sudah mulai melenceng dari tujuannya. Dengan demikian, bagi kami, kebangkitan Masyumi adalah kebangkitan politik yang berbudi luhur, mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, serta berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

Masyumi memiliki banyak generasi yang hidup. Ada yang secara biologis ataupun ideologis membangun dan mengembangkan Masyumi. Meskipun begitu, ada juga anak-anak Masyumi yang hanya mengetahui Masyumi, tetapi tidak melakukan internalisasi nilai-nilai dan keteladanan dari perjuangan tokoh-tokoh masyumi pada masa lalu. Internalisasi nilai perjuangan dan semangat kepahlawanan itu menjadi penting di tengah pragmatisme politik yang makin merugikan bangsa dan negara. Tokoh-tokoh Masyumi selalu konsisten memperjuangkan ideologinya dan tidak pernah melakukan konfrontasi politik dengan kelompok mana pun, kecuali dengan cara-cara yang demokratis, sah, dan konstitusional.

Sebagai penutup, selaku Ketua Umum Partai Masyumi, saya ingin mengatakan bahwa buku ini sangat penting sebagai ilmu pengetahuan yang akan menjadi pedoman untuk generasi mendatang. Buku ini membahas persoalan latar belakang pemikiran Masyumi, mengkaji secara mendalam sisi praktis sikap Masyumi atas keragaman politik dalam konteks internal umat Islam, sikap terhadap kelompok-kelompok politik nonmuslim (minoritas), dan sikap partai ini terhadap kalangan sekuler, termasuk kalangan nasionalis, sosialis, dan komunis. Buku ini juga membahas karakter program, agenda, dan kebijakan politik atau pemerintahan yang dipimpin oleh Masyumi. Hingga pada akhirnya, buku ini sampai pada kesimpulan bahwa pemikiran, sikap, dan tindakan Masyumi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mencerminkan penghormatan yang sungguh-sungguh terhadap pluralisme.

Bahan Bacaan:

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta, LP3ES, 1985.

Anwar Harjono, Dr., S.H., *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1417/1997.

Anwar Harjono dan Lukman Hakiem, *Disekitar Lahirnya Repuublik Bakti Sekolah Tinggi Islam dan Balai Muslim Indonesia kepada Bangsa*, Jakarta, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1997.

Badruzzaman Busyairi, *Catatan Perjuangan: H. M. Yunan Nasution*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1985.

Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Democracy Project, 2011.

Cornelis Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta, Grafiti Press, 1983.

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1987.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1988.

Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1946-1959*, Jakarta, CV Rajawali, 1986.

Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Lukman Hakiem dkk, *MR. Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin bangsa dalam pusaran sejarah*, Jakarta, Republika, 2011.

Lukman Hakiem, *100 tahun Mohammad Natsir berdamai dengan sejarah*, Jakarta, Republika, 2008.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lukman Hakiem, *Dari Pangung Sejarah Bangsa Belajar dari Tokoh dan Peristiwa*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Mohammad Natsir, *Utang Republik Pada Islam: Perjuangan Para Tokoh Islam dalam Menjaga NKRI*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2021.

Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Media Dakwah, 2001.

Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta, Yayasan Bulan Bintang Abadi, 2008.

Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung, Sega Arsy, 2014.

Mohammad Yamin, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang Dari: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jilid Pertama tahun 1959.

Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, terjemahan Ahmadie Thaha, Jakarta, 1987.

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta, Dabara Publishers, 1964.

Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, Jakarta, Paramadina, 1999.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA

Pluralisme masih menjadi pro dan kontra di tengah umat Islam. Padahal, realitas sejarah menunjukkan bahwa Islam di Indonesia mempunyai pengalaman panjang dalam pergumulan tentang keragaman, baik dari sisi aliran politik maupun keagamaan, sejak zaman prakemerdekaan sampai sesudahnya. Bahkan, masih terawatnya persatuan dan kesatuan nasional hingga kini tidak terlepas dari peran umat Islam sebagai mayoritas dalam merawat keragaman. Kahin dalam bukunya mengenai nasionalisme di Indonesia juga menyatakan bahwa selain bahasa Indonesia, agama Islam merupakan salah satu faktor krusial dalam mempersatukan nusantara.

Berangkat dari fenomena itu, maka penulisan buku ini berupaya untuk mengungkap sikap dan pandangan kelompok *mainstream* di tubuh umat Islam pada awal kemerdekaan, mengenai pluralisme. Kelompok yang dikaji dalam buku ini adalah Partai Masyumi, yang pernah tercatat sebagai salah satu partai terbesar dalam sejarah awal politik Indonesia, bersama partai-partai besar lainnya pada pemilu pertama tahun 1955, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Namun, kami memahami bahwa sampai saat ini belum ada pandangan monolitik terkait sikap Masyumi terhadap pluralisme di Indonesia. Sebagian kalangan menilai partai ini sebagai wadah kalangan kaku, "garis keras", atau fundamentalis yang memiliki toleransi minim terhadap kelompok-kelompok nonmuslim. Beberapa studi menempatkan Masyumi dan pengikutnya sebagai bagian dari kelompok Islam "garis keras" atau yang menginisiasi lahirnya kalangan yang menyebarkan kebencian dan kelompok-kelompok radikal kontemporer di Indonesia, termasuk Jamaah Islamiyah.

Walaupun demikian, bagi sebagian yang lain, Masyumi, baik sebagai lembaga maupun yang diwakili oleh tokoh-tokohnya, dianggap contoh *par excellence* dari para pendukung pluralisme, termasuk dalam hal menegakkan sikap toleran. Kajian Audrey Kahin tentang Natsir, misalnya, mengindikasikan komitmen figur utama Masyumi itu terhadap demokrasi di balik ketaatannya terhadap ajaran-ajaran Islam.

Penulis menyadari pluralisme, apalagi dalam konteks Islam, kerap dikaitkan dengan pluralisme agama yang belakangan menimbulkan perdebatan. Perdebatan itu terutama terkait dengan persoalan apakah pluralisme itu harus berujung pada relativisme (peleburan total keragaman) atau cukup pada persoalan koeksistensi (hidup rukun dalam keragaman). Namun, kajian pluralisme yang dimaksudkan terkait Masyumi itu, masih dalam kerangka pluralisme, dalam makna politik.

Mengingat kajian pluralisme terkait sikap dan pandangan Masyumi yang diangkat dalam buku ini lebih dalam dimensi politik, maka cakupan pluralisme dalam buku ini hanya akan dibatasi dalam lima hal. *Pertama*, pandangan Masyumi dalam mengakui adanya keragaman keyakinan, visi, tujuan, dan strategi dalam berpolitik yang dianut atau diyakini oleh berbagai kelompok politik termasuk partai politik. *Kedua*, selain pengakuan akan adanya perbedaan, pluralisme juga terkait dengan kesediaan Masyumi untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain. Dengan kata lain, Masyumi menolak kekuasaan yang bersifat terpusat pada satu tangan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketiga, keyakinan atas pluralisme juga terkait dengan komitmen dalam mengedepankan dialog dan kompromi dalam mencapai tujuan atau kesungguhan untuk menolak cara-cara pemaksaan terhadap pihak yang berbeda. Dengan kata lain, perbedaan atau keragaman tidak disikapi dengan upaya untuk menghapuskan, apalagi dengan cara paksa. *Keempat*, pluralisme juga berarti kesediaan untuk membangun sikap toleran terhadap perbedaan politik yang dicerminkan dengan kesediaan memberikan kesempatan kelompok yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pandangan atau keyakinannya. *Kelima*, pluralisme adalah kesediaan untuk hidup bersama atau koeksistensi secara adil dan sejajar dengan berbagai golongan dalam sebuah entitas politik yang sama, tanpa berupaya untuk mengurangi hak hidup kelompok-kelompok politik yang berbeda.

Penulis menyadari bahwa sikap politik dalam mendukung pluralisme di Indonesia tidaklah berada di ruang hampa. Masyumi lahir dan hidup di tengah-tengah kondisi bangsa yang masih memegang politik aliran yang begitu kuat. Oleh karena itu, sikap untuk mendukung pluralisme itu sendiri dapat bersifat murni normatif atau merupakan kombinasi atau normatif dan pragmatisme atau secara umum didasarkan pada persoalan yang pragmatis semata untuk meraih dukungan yang lebih luas dalam pemilu.

Terima kasih kepada semua kalangan yang telah membantu penulisan naskah ini sehingga layak untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Penerbit BRIN yang telah bersedia menerima dan menerbitkan naskah ini menjadi sebuah buku yang layak dibaca publik luas. Semoga kehadiran buku ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan yang tertarik pada kajian politik Islam di Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Islam dan Pluralisme

Beberapa peristiwa kontemporer, baik dalam konteks global maupun nasional, seolah menguji komitmen partai Islam terhadap semangat pluralisme. Beberapa tindak kekerasan, yang kerap berujung pada aksi terorisme, yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dengan mengatasnamakan ajarannya seolah memperlihatkan Islam yang sesungguhnya, yakni sebuah agama yang minim toleransi atas keberagaman.

Bagi sebagian kalangan, kekerasan itu dianggap bukanlah mewakili ajaran Islam. Sesungguhnya, Islam sangat menghargai perbedaan dan keragaman. Bahkan, tindakan kekerasan tersebut dianggap sebagai respons dari sikap ambigu Barat terhadap dunia Islam atau sebuah efek panjang dari kolonialisme masa lalu. Sementara itu, yang lain berkeyakinan bahwa sikap kalangan Islam itu memiliki pembenaran dan akar dari ajaran Islam itu sendiri.

Penghargaan terhadap perbedaan atau pluralisme memang tampak belum utuh benar dipahami oleh sebagian orang, termasuk di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kalangan umat Islam itu sendiri. Di sini muncul pertanyaan apakah umat Islam dan ajaran-ajarannya adalah proponen atau justru lawan dari pluralisme? Apakah Islam memang ajaran toleran yang menghargai perbedaan atau agama yang intoleran? Hingga kini, Islam, terutama dalam pandangan sebagian masyarakat Barat, kerap dianggap sebagai ajaran yang berkontestasi dengan pluralisme atau setidaknya tidak sepenuhnya menerima pluralisme sebagaimana yang umum diyakini oleh masyarakat Barat.[1]

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi menunjukkan keragaman sikap umat Islam terhadap pluralisme. Di satu sisi, berbagai kajian menunjukkan bahwa bagi umat Islam Indonesia, terutama kalangan *mainstream* atau mayoritas, pluralisme adalah sebuah kenyataan yang tidak terelakkan. Kalangan yang juga mayoritas ini dapat menerimanya dengan baik, bahkan bagi sebagiannya menjadi penganjur pluralisme yang gigih dan kerap dilabelkan sebagai kalangan pemikir Islam liberal.

Salah satu tokoh intelektual Islam di Indonesia yang sangat dikenal dalam menyebarkan ide mengenai adanya hubungan yang sesuai antara Islam dan pluralisme adalah Nurcholis Madjid. Gagasan Nurcholis mengenai koherensi Islam dan pluralisme di Indonesia bisa dikatakan berawal dari realitas masyarakat Indonesia yang sangatlah pluralis, baik dari segi etnis, adat istiadat, maupun agama. Selain Islam, realitas menunjukkan bahwa hampir semua agama, khususnya agama-agama besar dapat berkembang subur dan terwakili aspirasinya di Indonesia. Itulah sebabnya masalah toleransi atau hubungan antaragama menjadi penting. Meskipun demikian, ia tetap optimis bahwa dalam soal toleransi dan pluralisme ini, Islam telah membuktikan kemampuannya secara meyakinkan.[2]

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural jika ditinjau dari berbagai aspeknya,

---

[1] Mengenai penerimaan konsep pluralisme dalam masyarakat Islam lihat misalnya A.F. Ansary dan S.A. Ahmed, eds. *The Challenge of Pluralism*: *Paradigms for Muslim Context* (Ediburgh: Edinburg University Press, 2009).

[2] Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cedekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 229–230.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

baik etnis, bahasa, budaya maupun agama. Ini artinya, pluralitas merupakan realitas dan keniscayaan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Heldred Geertz, sebagaimana yang dikutip oleh Zada, di Indonesia terdapat lebih dari 300 etnis. Tiap-tiap etnis memiliki budayanya sendiri dan ada lebih dari 250 bahasa yang digunakan, serta hampir semua agama besar dunia terdapat di dalamnya, selain dari ragam agama asli itu sendiri.[3]

Menurut Nurcholis Madjid, realitas statistik sebagian besar bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Ini adalah sebuah kondisi yang ideal karena Islam merupakan agama yang pengalamannya dalam melaksanakan toleransi dan pluralisme termasuk unik dalam sejarah agama-agama. Bukti hal itu kurang lebih tampak jelas dan nyata pada berbagai masyarakat dunia. Ketika agama Islam merupakan anutan mayoritas, agama-agama lain tidak mengalami kesulitan yang berarti. Sebaliknya, di mana mayoritas bukan Islam dan kaum muslim menjadi minoritas, mereka selalu mengalami kesulitan yang tidak kecil, kecuali di negara-negara demokratis Barat. Di sana umat Islam sampai saat ini masih memperoleh kebebasan beragama yang menjadi hak mereka.[4]

Walaupun demikian, beberapa studi juga menunjukkan adanya kecenderungan sikap setengah hati dari sebagian umat Islam Indonesia dalam menerima dan menjalankan pluralisme. Kalangan penolak pluralisme memiliki kecenderungan menganggap bahwa pluralisme agama sebagai paham dan bukan keniscayaan dari realitas.

Kelompok yang menolak pluralisme agama berpendapat bahwa *pluralitas agama* dan *pluralisme agama* merupakan dua hal yang berbeda. Pluralitas agama adalah kondisi di mana berbagai macam agama mewujud secara bersamaan dalam suatu masyarakat atau negara. Sementara itu, pluralisme agama adalah suatu paham yang

---

[3] Hamami Zada, "Agama dan Etnis: Tantangan Pluralisme di Indonesia" dalam *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam, ed.* Sururin dan Maria Ulfa (Jakarta: Nuansa-Fatayat NU-Ford Foundation, 2006), 184.

[4] Nurcholis Madjid. *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 158.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi tema penting dalam disiplin sosiologi, teologi, dan filsafat agama yang berkembang di Barat dan merupakan agenda penting globalisasi. Oleh karena itu, menganggap pluralisme agama sebagai sunatullah adalah klaim yang keliru dan berlebihan.[5]

Setidaknya pandangan yang tidak kompatibel dengan pluralisme itu menguat di kalangan kelompok-kelompok Islam minoritas, antara lain, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ismail Yusanto, yang pernah menjadi juru bicara HTI, pluralisme agama adalah absurd. Yusanto menegaskan bahwa pluralisme agama adalah paham dari Barat yang dikembangkan dari teologi inklusif yang bertentangan dengan Al-Qur'an (3: 85): "Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi". Berdasarkan ayat tersebut, Yusanto yakin bahwa kebenaran hanyalah milik dan monopoli umat Islam.[6]

Kelompok-kelompok ini kerap kemudian dianggap sebagai kalangan radikal. Kalangan ini dilihat sebagai yang kurang toleran terhadap kelompok minoritas dalam umat Islam sendiri, ataupun terhadap nonmuslim. Namun, pandangan yang tidak kompatibel dengan pluralisme di Indonesia itu cenderung menguat hanya di dalam konteks kelompok-kelompok minoritas.

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di kalangan kelompok umat Islam mengenai pluralisme, realitas sejarah menunjukkan bahwa Islam di Indonesia mempunyai pengalaman yang panjang dalam pergumulan tentang keragaman, baik dari sisi aliran politik maupun keagamaan, sejak zaman prakemerdekaan sampai sesudahnya. Masih bertahannya persatuan Indonesia yang beragam tidak terlepas dari peran besar Islam sebagai agama mayoritas yang sangat menghargai pluralisme itu sendiri.

---

[5] "Pengantar" *Majalah Islamia*, September–November 2004.

[6] Umi Sumbulah, "Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majlis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi," (Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2006), 13.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Untuk mendapat gambaran yang lebih utuh tentang pluralisme dalam komunitas Islam di Indonesia, penelaahan yang bersifat sejarah menarik untuk dikaji. Kajian ini tidak saja akan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, tetapi juga dapat melihat perkembangan pemikiran dan sikap mayoritas umat Islam dalam menerima pluralisme itu. Kajian yang hanya membahas kelompok kecil tertentu pada era kontemporer adalah sebuah hal yang menarik, tetapi perlu tampaknya dilengkapi dengan mengkaji sebuah institusi yang besar agar apa yang disebut sebagai bagian dari umat Islam itu benar-benar dapat terwakili. Kajian ini bertujuan melengkapi hal itu dengan mencoba melihat sikap dan pandangan kelompok *mainstream* Islam pada masa lalu, tepatnya pada awal kemerdekaan hingga tahun 1960.

Salah satu ikon yang layak dianggap mewakili umat Islam *mainstream,* terutama dalam konteks mewakili cita-cita dan perjuangan ajaran Islam pada masa lalu, adalah Masyumi. Partai Islam ini pernah tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Jumlah pendukungnya bahkan ditengarai sebagai yang terbesar di dunia pada masa kejayaannya.[7] Pada tahun 1948 partai ini memiliki anggota sekitar 10 juta orang dan menjadi partai dengan jumlah anggota paling besar dibanding partai-partai lain.[8] Pada Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, Masyumi memperoleh 57 kursi di parlemen Indonesia, yang berarti menjadi yang terbanyak suaranya bersama dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, perolehan suara Masyumi dianggap lebih merata karena menjadi pemenang di 10 dari 15 daerah pemilihan. Sebagai perbandingan, PNI hanya memenangkan dua daerah pemilihan (keduanya di Pulau Jawa). Gambaran betapa lebih meratanya perolehan suara Masyumi pada Pemilu 1955 itu dapat dilihat pada Gambar 1.1.

---

[7] Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*, (Bandung: Mizan, 2013), 1.

[8] Masyumi mengkalim bahwa sampai tanggal 31 Desember 1950 telah memiliki anggota hingga 10.000.000 orang, lihat dalam *Kepartaian di Indonesia*, Seri Peopra 8 (Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1951), 14. Menurut Charles Wolf anggota Masyumi saat itu mengalahkan anggota partai-partai lainnya, Charles Wolf, *The Indonesia Story* (New York: Institute of Pacific Relation, 1949), 57.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keterangan: Warna hitam adalah daerah di mana Masyumi unggul.

Sumber: Pratinjau, "Sejarah & Hasil Pemilu 1955–2019"

Gambar 1.1 Peta Hasil Perolehan Suara Masyumi pada Pemilu 1955

Kebesaran partai ini juga terkait dengan kontribusinya kepada negara. Beberapa tokoh Masyumi pernah menjabat beberapa posisi penting di level nasional, termasuk sebagai perdana menteri dan menteri-menteri dalam beberapa kabinet. Salah satu pimpinan partai, yakni Sjafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai pejabat presiden pada sebuah pemerintahan bawah tanah yang disebut sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Soekarno dan Hatta ditahan oleh Belanda pada tahun 1948. PDRI dibentuk untuk menunjukkan pada dunia bahwa republik masih ada.[9]

Keberadaan PDRI itu sesungguhnya amat penting dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu ingin direbut kembali oleh Belanda. Mr. S.M. Rasjid menuturkan bahwa target pihak Belanda itu tidak akan terealisasi karena bangsa dan negara Indonesia masih punya Pemerintahan Darurat Republik

[9] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965* (Bandung: Mizan, 2000), 199. Mengenai PDRI lihat juga Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut Kepada Allah SWT* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1986), 106–131.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia (PDRI). Sebelum terjadi penangkapan, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan kawat pertama 19 Desember 1948 kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.[10]

Alasan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, melalui kawat pertama 19 Desember 1948 itu, adalah untuk mempercayakan kepada Mr. Syarifudin Prawiranegara dari Masyumi untuk menjadi Ketua PDRI dan itu tidak terlepas dari sikap partai.[11] Hal ini terutama terkait dengan sikap latar belakang Partai Islam Indonesia Masyumi (Masyumi) yang selalu menunjukkan loyalitasnya yang tinggi kepada kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta Panglima Besar Soedirman, baik pada saat terjadinya Kudeta 1 Juli 1946 di Yogyakarta oleh komunis nasional Tan Malaka maupun Kudeta PKI di Madiun pada 19 September 1948 oleh Amir Syarifudin dan Muso.

Komitmen kebangsaan partai Islam ini memang tidak dapat diragukan. Beberapa kalangan menyebut tokoh-tokoh teras Masyumi sebagai *patriot sejati*.[12] Sebut saja misalnya H. Agus Salim, Mr. Mohammad Roem, dan Mohammad Natsir. Agus Salim adalah guru para diplomat generasi awal yang dimiliki oleh Indonesia. Sosok yang jago berdebat dan dijuluki "*the Grand Old Man*" ini adalah Menteri Luar Negeri RI kedua yang berkiprah dalam banyak perjuangan di ranah diplomasi bersama dengan para diplomat-diplomat muda untuk memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai negara baru yang kerap kali dirongrong oleh Belanda.[13]

---

[10] Sutan Muhammad Rasjid, *Di Sekitar PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 19–20.

[11] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2* (Bandung: Salamadani, 2012), 267.

[12] Lihat misalnya pandangan Jenderal A.H Nasution atas Moh Natsir dalam Abdul Haris Nasution, "Bung Natsir adalah Pejuang Besar", *Media Dakwah*, Maret 1993.

[13] Mengenai Agus Salim, lihat misalnya, Suradi, *Grand Old Man of the Republic: Haji Agus Salim dan Konflik Politik Sarekat Islam* (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2014).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Perjuangan yang gigih dari Agus Salim terbukti tidak sia-sia karena makin lama, Indonesia makin dikenal dan diakui kemerdekaannya oleh negara-negara di dunia.

Adapun Roem adalah juga seorang diplomat yang memiliki latar belakang pendidikan hukum setara master (*Meester in de Rechten*). Roem adalah tokoh utama dalam *Perjanjian Roem-Royen* yang berlangsung pada 17 April 1949. Perjanjian itu menghasilkan kesepakatan damai di antara kedua belah pihak dan sebagai bagian dari persiapan untuk pelaksanaan pertemuan yang selanjutnya, yakni Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Dalam perjanjian itu sudah mulai terbersit semacam pengakuan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara berdaulat.

Tokoh Masyumi lain yang memiliki jasa besar terhadap republik adalah Mohammad Natsir. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia dan terkenal memiliki konsep "mosi integral". Berdasarkan konsep itulah, akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terlahir kembali setelah sebelumnya negara ini terpecah-belah dalam naungan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Gagasan mosi integral tersebut dianggap sebagai embrio lahirnya NKRI. Mosi yang kemudian populer dengan nama "Mosi Integral Mohammad Natsir" ini, pada intinya, berisi kesediaan seluruh negara bagian RIS dan negara boneka buatan mantan Gubernur Militer Belanda Van Mook serta Negara Republik Indonesia untuk bersama-sama membubarkan diri dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta.

Mosi integral lahir tidak terlepas dari upaya mengantisipasi berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) bentukan Belanda lewat inisiatif Van Mook hasil Konferensi Meja Bundar pada Selasa, 23 Agustus 1949 yang bersamaan dengan 27 Syawal 1368 H.[14] Untuk itulah, dengan meleburkan semua negara bagian ciptaan Van Mook, Mosi Integral Mohammad Natsir mampu dan berhasil mengubah wajah negara Indonesia dari bentuk RIS menjadi NKRI.

[14] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, jilid dua, cetakan ketiga*, (Bandung: Surya Dinasti, 2018), 280.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menariknya, Mohammad Natsir berjaya meyakinkan sejumlah orang di parlemen dari berbagai kekuatan politik di luar Masyumi untuk menandatangani mosi tersebut dan kemudian hasil tanda tangan tersebut dapat melegalkan istilah NKRI sebagaimana yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sungguh sangat luar biasa hasil kerja seorang Mohammad Natsir untuk menyelamatkan sebuah negara yang bernama Indonesia dari upaya-upaya politik *devide et impera* (politik pecah belah) yang diprakarsai penjajah Belanda.[15]

Dari kiprah para tokoh-tokohnya itu, terlihat jelas bahwa Masyumi adalah partai yang berjasa besar yang turut memperjuangkan keberadaan dan sekaligus mempertahankan keutuhan NKRI. Meskipun Masyumi telah menunjukan komitmen dan karya nyata bagi keutuhan NKRI, terkait dengan sisi pluralisme, keberadaan Masyumi masih menimbulkan polemik tersendiri. Hingga kini, tidak ada pandangan yang monolitik atas keberadaan partai ini terkait pluralisme. Sebagian kalangan menilai partai ini sebagai wadah kalangan kaku, garis keras, atau fundamentalis yang memiliki toleransi minim terhadap kelompok-kelompok nonmuslim. Beberapa studi bahkan menempatkan Masyumi dan pengikutnya sebagai bagian dari kelompok Islam "garis keras",[16] atau yang menginisiasi lahirnya kalangan yang menyebarkan kebencian[17] dan kelompok-kelompok radikal kontemporer di Indonesia,[18] termasuk Jamaah Islamiyah. Sementara itu, sebagian kalangan melihat karakter Masyumi yang kurang sensitif dan kurang menghargai perbedaan, bahkan di antara sesama umat Islam.[19] Beberapa kalangan

[15] Hasanuddin Yusuf Adnan, *Mosi Integral Mohammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummah Dan Bangsa Dalam NKRI,* (Banda Aceh:Adnin Foundation Publisher, 2019), 69.

[16] Lihat misalnya Baladas Ghosal, *Indonesia Politics 1955–1959: The Emergece of Guided Democracy* (Calcutta: K.P. Bagchi, 1982).

[17] Madinier, *Partai Masjumi,* 411.

[18] Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia," *South East Asia Research*10, no.2 (2002), 117–154.

[19] Remy Madinier & Andree Feilard, "At the Sources of Indonesian Political Islam's Failure: the Split between NU and the Masyumi," *Studia Islamika* 6, No. 2 (1999), 1–38.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang menganalisis tentang warisan (*legacy*) langsung Masyumi, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan majalah Media Dakwah, menyimpulkan adanya kecenderungan kaku dan skripturalisme dari kalangan Masyumi ini[20]. Tidak jarang pula dalam berbagai kesempatan Masyumi disinggung sebagai kelompok radikal atau fundamentalis.[21]

Walaupun demikian, bagi sebagian kalangan yang lain, Masyumi baik sebagai lembaga maupun yang diwakili oleh tokoh-tokohnya, dianggap contoh *par excellence* dari para pendukung pluralisme, termasuk dalam hal menegakkan sikap toleran. Kajian Audrey Kahin tentang Natsir,[22] misalnya, mengindikasikan komitmen figur utama Masyumi itu terhadap demokrasi di balik ketaatannya terhadap ajaran-ajaran Islam. Dalam epilog disebutkan oleh Kahin bahwa, "*the state Natsir publicy espoused and envisage was one that responded and was responsible to the various peoples making up the society it governed, whatever their religion or ethnicity*".[23]

Sementara itu, Jacob Oetama, tokoh berlatar belakang agama Katolik, yang juga pendiri koran *Kompas*, mengapresiasi perilaku Masyumi yang menurutnya telah menunjukkan sebuah sikap positif dari pluralisme. Pada bagian akhir buku biografi Ketua Umum Masyumi Ketiga, Prawoto Mangkusasmito, Oetama mengatakan:

> "Partai Masyumi bisa melakukan aliansi politik dengan serasi bersama Partai Katolik dan Partai Sosialis Indonesia. Partai Masyumi, lahan perjuangan aspirasi politik di mana Prawoto ikut mengembangkannya dan ketua umum terakhir ketika dibubarkan, memberikan pencerahan secara *sincere* bagi masyarakat. Partai

[20] Lihat misalnya kajian R. William Liddle, "Media Dakwah Scriptualism: One Form Islamic of Political Thought and Action in New Order Indonesia," dalam *Toward a New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Political Thought*, ed. Mark R. Woodward. (Temple: Arizona State University, 1996).

[21] Lihat Aan Hasanudin, "Islam Negara dalam Pusaran Politik*," RT,* 1 Agustus 2022. *https://bidikutama.com/akademik/opini/islam-negara-dalam-pusaran-politik/*

[22] Audrey Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir* (Singapore: NUS Press, 2012).

[23] Kahin, *Islam, Nationalism,* 216.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> Islam modern dengan ciri mengakui adanya pluralisme Indonesia ini kemudian dilanjutkan antara lain oleh K.H. Abdurrahman Wahid."[24]

Hal yang juga menarik adalah pengakuan Nurcholis Madjid, tokoh Islam inklusif yang dikenang sebagai pembela nilai-nilai pluralisme di Indonesia, yang menggambarkan dirinya sebagai "anak Masyumi". Dia mengatakan, "Saya dan Ibu saya kan Masyumi. Jadi, kalau ada sesuatu yang boleh dijadikan identifikasi diri saya itu adalah Masyumi, yakni 'anak Masyumi'".[25] Pengakuan sebagai "anak Masyumi" memperlihatkan adanya sebuah kedekatan emosional antara tokoh yang banyak menginsiprasi kalangan liberal Islam itu dengan partai Islam tersebut.

Kajian atas Natsir, pengakuan atas sikap Masyumi, dan pengidentifikasian diri sebagai bagian Masyumi oleh tokoh-tokoh seperti Kahin, Oetama, atau Madjid tampak tidak ditujukan untuk mencari sensasi atau pembelaan yang berlebihan terhadap Masyumi pada umumnya. Tokoh-tokoh yang dapat dikatakan berjarak atau mengambil posisi tidak terlibat mendalam dengan Masyumi ini merupakan mereka yang cenderung mengedepankan penilaian objektif dan apa adanya atas partai ini beserta para tokoh ikonik di dalamnya.

Berangkat dari kondisi ini, mengamati seberapa besar komitmen partai ini terhadap pluralisme adalah kajian yang menarik, apalagi pembahasan yang mengkaji khusus persoalan ini secara mendalam, mulai dari akar pemikiran hingga sikap relatif belum ada. Kajian akademis tentang peran partai ini masih terbatas. Kebanyakan literatur justru terkait dengan pemikiran dan sikap dari tokoh-tokohnya, terutama sekali M. Natsir, fenomena yang melibatkan

---

[24] Saleh U. Bajasut dan Lukman Hakiem, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito: Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), 545.

[25] Nurcholis Madjid, "Sekapur Sirih" dalam *Teologi Inklusif Cak Nur,* ed. Sukidi (Jakarta: Pebernit Buku Kompas, 2001), xvii, dalam *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, ed. Nur Khalik Ridwan (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 65.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masyumi di dalamnya atau sebagai bagian dari kajian tentang partai-partai Islam secara umum, khususnya di era Demokrasi Liberal.

Selain beberapa hal tersebut, alasan lain mengapa pengkajian atas partai ini menjadi menarik adalah sekali lagi karena Masyumi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempertahankan eksistensi dan peran politik Islam di Indonesia. Masyumi juga adalah wakil dari kalangan Islam Indonesia masa lalu, yang tentu saja tidak dapat diabaikan manakala membahas tentang Islam di Indonesia. Dengan demikian, memahami Masyumi adalah memahami sebuah pemikiran *mainstream* masyarakat Islam Indonesia pada umummnya.

B. Sisi Pluralisme Masyumi

Sehubungan dengan itu, hakikat buku ini adalah ingin mendalami tentang persoalan bagaimanakah pandangan dan sikap Masyumi terhadap pluralisme, khususnya pluralisme politik. Sejauh mana pluralisme Masyumi, baik yang tercermin dalam pemikiran maupun tindakan itu, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pluralisme.

Untuk melihatnya, tulisan ini akan mengetengahkan pembahasan melalui beberapa dokumen, sikap resmi, beberapa fenomena, pandangan para tokoh-tokoh partai, perilaku partai dan pengakuan beberapa kalangan yang mengindikasikan sebuah sikap dan pandangan yang positif terhadap perbedaan atau sejalan dengan esensi pluralisme. Meskipun demikian, tulisan ini tidak berarti hanya akan sekadar menunjukkan atau membuktikan hal-hal yang bersifat normatif. Tulisan ini juga akan mengulas sisi lain pluralisme Masyumi dan mencoba untuk menangkap hal-hal yang melatarbelakangi sikap tersebut. Beberapa bagian akan membahas persoalan lingkungan yang mendorong Masyumi untuk bersikap.

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman akan pemikiran dan sikap Masyumi terkait dengan pluralisme. Pemahaman mengenai landasan berpikir, pemikiran, dan sikapnya untuk melihat kelebihan, kekurangan, konsistensi, dan inkonsistensi sehingga dapat terlihat kualitas dan komitmen sesungguhnya partai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini terhadap pluralisme. Meskipun pandangan Masyumi mengenai pluralisme dalam konteks politik menyinggung pula pluralisme dalam konteks agama, kajian ini tidak akan membahas pluralisme agama secara mendalam.

Adapun sikap Masyumi dalam kehidupan politik terkait dengan pluralisme terbagi menjadi dua, yakni dalam aspek normatif (pandangan Masyumi mengenai negara ideal) dan dalam kenyataan (sikap dan kebijakan Masyumi). Untuk itu, dalam buku ini akan dibahas beberapa persoalan dari sisi normatif, yaitu Masyumi dalam spektrum ideologi politik di Indonesia, tipologi pemikiran politik Masyumi, pandangan Masyumi mengenai peran Islam dalam kehidupan politik dan kenegaraan, pandangan Masyumi mengenai bentuk negara ideal dan, pandangan tentang kenyataan adanya keragaman primordial dan politik di Indonesia. Dari sisi praktis akan dibahas sikap partai terhadap keragaman politik dalam konteks internal umat Islam, termasuk terhadap kalangan ekstremis, sikap terhadap kelompok-kelompok politik nonmuslim (minoritas), sikap partai ini terhadap kalangan sekuler, termasuk kalangan nasionalis, sosialis, komunis, program Masyumi, dan karakter agenda serta kebijakan politik atau pemerintahan yang dipimpin oleh Masyumi.

Kami menyadari bahwa kajian tentang Masyumi itu sendiri bukan hal yang baru dalam dunia akademis. Di antara kajian yang cukup mendalam dan bermutu tentang partai ini dilakukan oleh Dr. Remy Madinier. Kajian yang merupakan disertasinya ini merupakan kajian dari salah satu Indonesianis terkemuka asal Prancis, yang mencoba menelaah dengan kritis partai Masyumi.[26] Sebagai seorang pengamat asing dengan posisi di luar partai, yang dalam batas tertentu menjamin objektivitasnya, Madinier melihat banyak aspek dalam partai ini.

Beberapa bagian awal buku ini menjelaskan latar belakang terbentuknya partai yang pada kemudian hari memberikan dampak dan kecenderungan-kecederungan sikap dan perilaku partai ini. Dalam soal ini, Madinier juga menjelaskan kecenderungan Masyumi

[26] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk memiliki pandangan yang dekat dengan pandangan Barat yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan mayoritas para elitenya. Buku Madinier ini menunjukkan bahwa sebelum Pemilu 1955, Masyumi mencoba bersikap akomodatif dan bersikap moderat terhadap tuntutan yang bersifat formalistik, bahkan cenderung positif dalam melihat Pancasila. Sungguhpun demikian, dalam perkembangannya Masyumi tampak menjadi lebih keras dan radikal. Kajian ini tampak sejalan dengan pandangan beberapa sarjana yang memperhatikan adanya perubahan sikap Masyumi ini.

Kajian Madinier pada akhirnya tidak saja mempertanyakan kesiapan Masyumi sebagai sebuah partai untuk memberikan jawaban yang tepat dan konkret atas segudang persoalan kenegaraan, tetapi juga ingin memperlihatkan berbagai sikap ambigu dari partai ini yang terkesan moderat pada awalnya, tetapi mengeras seiring dengan posisinya yang makin lama makin tersingkir dari panggung politik nasional. Meskipun pada awalnya, kajian dalam buku ini relatif hati-hati dan imbang dalam membuat sebuah alur argumentasi, tetapi di beberapa bagian, terutama di pertengahan dan akhir buku ini tampak terkesan tidak *sabaran*. Ketidaksabaran Madinier tampak muncul dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dialamatkan pada sebuah partai yang tentu saja masih amat belia dan belum berpengalaman.

Sungguhpun demikian, menurut Madinier ketakkonsistenan dan kegagalan menjawab persoalan dengan jawaban yang persis dan konkret tentu saja bukan hanya milik Masyumi. Bahkan, dengan mengambil contoh negara diperlukan ratusan tahun untuk dapat benar-benar mendekati jawaban yang konkret dan mendekati kenyataan. Akhir dari kajian buku ini menempatkan Masyumi sebagai lembaga yang turut bertanggungjawab atas lahirnya generasi baru yang cenderung radikal dalam tubuh umat Islam Indonesia. Sebuah kesimpulan yang tampak terburu-buru dan meloncat demikian drastis.

Kajian tentang Masyumi yang cukup dalam juga dilakukan oleh Prof. Dr. Deliar Noer. Kajian itu sebenarnya merupakan bagian dari sebuah buku, yang merupakan pengembangan tesis tentang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masyumi, yang bertujuan memotret peran partai Islam selama lima belas tahun setelah kemerdekaan.[27] Namun, dalam buku tersebut terdapat informasi yang otoritatif, dalam, dan langka tentang Masyumi. Sebagai seorang peneliti kawakan yang dekat dengan tokoh-tokoh partai Masyumi, Deliar Noer memiliki kesempatan yang jarang didapatkan oleh peneliti lain, yakni terlibat langsung dengan objek penelitiannya. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh partai ini memberikannya kesempatan untuk dapat lebih memahami partai ini meskipun dalam batas-batas tertentu yang membuatnya cenderung terlalu berupaya memahami dan melakukan pembelaan terhadap apa yang disaksikannya itu.

Dalam bukunya ini dijelaskan awal pembentukan partai Masyumi. Kehadirannya dikaitkan dengan konteks perjuangan dan pergulatan umat Islam di masa-masa awal kemerdekaan sehingga sulit dibayangkan jika kebanyakan dari para pendiri Masyumi adalah bukan tokoh-tokoh nasionalis. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan kiprah Masyumi dalam pentas politik nasional yang meliputi perjuangan menegakkan negara yang baru terbentuk dari ancaman kembalinya penjajahan, upaya demokratis untuk membangun negara atas dasar Islam, persaingan dengan kelompok-kelompok sekuler, terutama kalangan komunis, persoalan seputar pemberontakan yang melibatkan kalangan Islam dan juga elemen-elemen Masyumi di beberapa daerah dan akhirnya kemunduran peran partai-partai Islam pada masa Orde Lama.

Inilah kajian akademis pertama yang cukup tuntas dalam membahas kelahiran dan kiprah Masyumi. Kajian ini juga memberikan pemahaman yang baik tentang berbagai situasi yang dihadapi partai Masyumi yang mempengaruhi sikap dan perilaku politik partai ini. Kedekatan Noer terhadap Masyumi menyebabkan data yang dimilikinya memang sulit untuk dibantah. Di sisi lain, kedekatannya itu cenderung menempatkan kajian ini dalam sudut pandang orang dalam, yang coba menerjemahkan situasi dari apa yang ada dalam benak para pelakunya. Hal yang menyebabkan dalam beberapa hal kajian ini bersifat afirmatif dan *taken for granted*.

[27] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 1987.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sementara itu, kajian yang ketiga adalah buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Buku ini menunjukkan bahwa Masyumi adalah contoh dari sebuah partai yang berdiri di atas tradisi pemikiran sikap kalangan modernisme Islam.[28] Dalam buku yang merupakan juga disertasinya, Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki hubungan spesial dengan tokoh-tokoh Masyumi terutama Natsir, ingin membuktikan adanya garis tegas antara partai ini dan kalangan fundamentalisme Islam. Untuk membuktikan adanya perbedaan antara kalangan modernis dan fundamentalis, Mahendra menjadikan Partai Jama'at-i-Islam, yang mewakili kalangan fundamentalis sebagai pembanding Masyumi.

Dalam buku yang merupakan disertasinya, Mahendra membuat sebuah batasan apa yang menjadi karakteristik dari kalangan modernis, yang juga menjadi karakter dari Masyumi. Dia menyebutkan bahwa karakter itu meliputi pengedepanan rasionalisasi dan kontekstualisasi, mementingkan substansi ketimbang bentuk formal, pengedepanan pendapat umum, penghargaan terhadap pluralisme, dan bersikap inklusif dalam mengambil hikmah atau ajaran dari kalangan nonmuslim. Atas dasar kerangka yang dibangunnya itu, Mahendra mengkaji beberapa fenomena untuk menguatkan argumentasinya, termasuk di antaranya persoalan dasar negara dan program-program Masyumi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pembahasan Masyumi oleh Mahendra telah menunjukkan beberapa aspek penting dari Masyumi. Buku ini mampu dengan baik memperlihatkan sisi modern partai yang menyebabkan partai ini leluasa dalam menerima dan menjalankan demokrasi dalam kerangkan negara bangsa serta penerimaan Masyumi atas keberagaman. Sumber-sumber data yang diperoleh cukup melimpah—hasil dari kedekatannya dengan partai yang ditelitinya itu. Kedekatannya dengan para pelaku sejarah membawanya pula pada sebuah penafsiran yang lebih mendekati dari apa dimaksud oleh

[28] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

para pelaku itu ketimbang hasil tafsiran kalangan yang ada di luar lingkaran. Biarpun demikian, bagi sebagian kalangan kajian Yusril ini tampak timpang dengan upaya pembuktian "kebaikan" Masyumi dan tampak tidak berupaya untuk kritis terhadapnya.

Kajian-kajian yang lain membahas Masyumi dalam konteks pemikiran politik, terutama pandangan partai ini seputar bentuk negara dan ideologi politik. Kajian lainnya mengaitkan partai Masyumi dengan tokoh-tokoh partai, yang menggambarkan secara umum sikap partai yang nasionalis, demokrat, sederhana, dan anti-komunis. Kajian-kajian semacam ini pada umumnya lebih menonjolkan aspek positif dari Masyumi. Sementara itu, kajian yang lebih kritis membahas beberapa aspek yang tidak banyak digali oleh kalangan yang cenderung pro kepada partai ini. Kajian kesejarahan yang dilakukan oleh Remy Madinier, misalnya, merupakan sebuah kajian kritis yang mencoba bersikap objektif dan "menjaga jarak" dengan Masyumi sebagai objek kajian. Hasilnya adalah sebuah telaah akademis yang tidak saja mengangkat sisi positif Masyumi, tetapi juga mempertanyakan hal-hal yang tidak banyak dikaji, bahkan mengkritiknya dengan cukup pedas.[29]

Pada umumnya kajian kalangan kritis, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, mengarah pada kesimpulan Masyumi sebagai sebagai kelompok Islam sayap kanan dengan karakter khas radikal. Sebagian pula menempatkan partai ini sebagai islamis yang sulit diajak bekerja sama, anti-Barat, dan curiga terhadap kalangan minoritas. Studi-studi sejenis juga ada yang mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa Masyumi merupakan kekuatan politik lama yang tidak lagi popular dan kebanyakan penerusnya terjebak dalam romantika masa lalu atau menjadi bagian kelompok radikal yang minor.[30]

Kajian-kajian di atas telah cukup baik menjelaskan Masyumi dalam beberapa aspeknya. Biarpun demikian, khusus mengenai sikap dan tindakan Masyumi yang mencerminkan penghormatan

[29] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*.

[30] Greg Fealy & Bernard Platzdasch, "The Masyumi Legacy: Between Islamist Idealism and Political Exigency", *Studia Islamika* 12, no. 1 (2005), 73–99.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terhadap pluralisme belumlah banyak diketengahkan secara mendalam dalam kajian-kajian tersebut. Tulisan ini, dengan kata lain, adalah untuk mengisi kekosongan tersebut.

C. Pluralisme sebagai Inti Bahasan

Konsep pluralisme bukanlah sebuah konsep yang tanpa perdebatan. Oleh karena itu, nyaris tidak mungkin untuk mengakomodir berbagai perbedaan yang muncul. Sebagian kalangan mengatakan bahwa pluralisme adalah sebuah pandangan yang mengakui adanya perbedaan dalam sebuah komunitas atau entitas, baik dalam konteks masyarakat atau negara, yang terkait dengan keragaman latar belakang primordial, pemikiran, keberpihakan akan satu hal, dan kecenderungan-kecenderungan yang terkait dengan metode atau mekanisme dalam menjawab sebuah persoalan.[31]

Pengakuan ini tidak saja berarti menyadari adanya perbedaan atau pengakuan bahwa *kita memang berbeda*, tetapi juga memberikan ruang agar perbedaan itu tetap terpelihara dan mendapat akses hingga tiap-tiap pihak dapat berkembang secara alamiah (*natural*) atau sebagaimana harusnya. Nurcholis Madjid mengatakan bahwa pluralisme harus pula mencapai sebuah kondisi untuk saling mengikat diri dalam perbedaan atau *pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban* (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).[32] Dengan kata lain, pluralisme tidak saja terkait dengan menyingkirkan fanatisme, tetapi juga kesiapan untuk bersikap toleran terhadap perbedaan. Sikap toleransi ini pada akhirnya cenderung akan mengarah pada terciptanya sebuah kehidupan yang sejajar dan berkeadilan.[33] Tiap kelompok dapat sa-

[31] Roger Scruton, *A Dictionarny of Political Thought* (London: Macmillan, 1982). *The Shorter Oxford English Dictionary on Historiacl Principles*, (Oxford: The Clarendon Press, 1933). William E. Connoly, *Pluralism*, (Durham: Duke University Press, 2005).

[32] Nurcholis Madjid. (1999, 10 Agustus). Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan. *Republika*.

[33] Nurcholis Madjid, "Ikatan Keadaban", dalam *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2001), 72.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ling mendorong terciptanya pola hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme di antara mereka. Adapun pluralisme menurut Giddens terkait dengan terbentuknya kehidupan bersama (*co-existance*) yang seimbang di antara kelompok-kelompok etnik yang berbeda.[34]

Karena pluralisme diyakini terkait dengan toleransi, pluralisme ini tidak dimaksudkan sebagai paham yang mengaburkan, apalagi menghapuskan batas-batas (*boundaries*) perbedaan antara pihak-pihak yang saling berhubungan dalam perbedaan. Toleransi justru akan bermakna karena memang ada sebuah perbedaan, tiap-tiap pihak memberikan penghormatan dan kesempatan bagi pihak yang berbeda untuk hidup dan berkembang. Tanpa adanya perbedaan yang nyata dan diekspresikan dengan apa adanya, toleransi justru secara esensial tidak dibutuhkan. Menurut Legenhausen, "*The Key of tolerance is not the removal or relativisation of disagreement, but the willingness to accept genuine disagreement*".[35] Dengan kata lain, pluralisme di sini bukan dimaknai sebagai peleburan perbedaan-perbedaan ke dalam sebuah kesepahaman yang monolitik,[36] melainkan sebuah sikap untuk tetap memelihara perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing.[37]

Pemaknaan pluralisme dalam persepektif relativisme, di mana keragaman yang ada dilebur dan menghasilkan sebuah kesepahaman baru, cenderung mengaburkan makna keberagaman itu sendiri. Padahal, keragaman itulah makna mendasar pluralisme. Dengan batasan di atas, pluralisme dalam tulisan ini adalah sebuah pengakuan atas keberagaman dan menghormati keragaman itu hingga pada tingkatan bersedia untuk hidup saling mentoleransi, bekerja sama dan hidup berdampingan dalam sebuah ikatan luhur yang saling memberi manfaat.

---

[34] Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1989), 271–272, 737.

[35] Muhammad Legenhausen, "Misgiving about the Relious Pluralisms of Seyyed Hossein Nasr and John Hick", *Al-Tawhid* 14, no. 3, (1997), 120. Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama. Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 213.

[36] William L. Rowe, *Philosopy of Religion. An Introduction, 4th Edition* (California: Wodsworth Publishing Company, 1992), 178–182.

[37] Thoha, *Tren Pluralisme Agama. Tinjauan Kritis*, 12.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Cakupan pluralisme dalam tulisan ini hanya dalam wilayah pembahasan politik. Sehubungan dengan itu, pluralisme dalam politik yang dimaksud dalam tulisan ini mencakup lima hal. *Pertama*, pandangan yang mengakui adanya keragaman keyakinan, visi, tujuan, dan strategi dalam berpolitik yang dianut atau diyakini oleh berbagai kelompok politik termasuk partai politik. Keyakinan tersebut, terutama berhubungan dengan latar belakang ideologi, tradisi dan kecenderungan-kecenderungan yang diyakini, ataupun terkait dengan metode atau mekanisme yang digunakan dalam menjawab sebuah persoalan politik. Perbedaan politik dan pengelompokan atasnya itu dengan sendirinya adalah hasil dari sebuah keyakinan politik yang distingtif atau berbeda, yang tidak dimaksudkan untuk dilebur atau disintesiskan.

Kedua, selain pengakuan akan adanya perbedaan, pluralisme juga terkait dengan kesediaan untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain. Dengan kata lain, pluralisme menolak kekuasaan yang bersifat terpusat pada satu tangan. Sehubungan dengan itu, penganut pluralisme cenderung menghormati demokrasi dan meyakini bahwa konstitusi negara harus memberikan ruang yang cukup luas bagi keragaman politik.[38] Alam demokrasi, menurut Nurcholish Madjid, mengharuskan masyarakat untuk menerima secara positif adanya perbedaan orientasi politik, yang juga harus tersedia ruang bagi kegiatan oposisi. Demokrasi menuntut adanya pandangan ini pada setiap pribadi, lebih-lebih pada setiap pribadi pemimpin, suatu pandangan yang selaras dengan keharusan berendah hati sehingga mampu melihat diri sendiri berkemungkinan salah dan orang lain yang berbeda dengan dirinya berkemungkinan benar. Demokrasi tidak mungkin disertai dengan absolutisme dan sikap-sikap mau benar sendiri.

Demokrasi mengharuskan adanya sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) di antara sesama warga masyarakat. Di bawah pertimbangan tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum, demokrasi tidak membenarkan adanya

[38] Roger Scruton, *A Dictionary of Political Thought* (London: Pan Books, 1983) 357.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sikap *all or nothing* (semua atau tidak), *take it or leave it (*ambil atau tinggalkan), yaitu sikap serba kemutlak-mutlakan. Sebaliknya, seperti dalam kaidah fikih Islam (*usul al-fiqh),* yang berlaku ialah "yang tidak semua bisa didapat tidak semua harus ditinggalkan".[39] Dengan demikian, demokrasi memerlukan adanya kesediaan setiap pesertanya untuk menerima kenyataan bahwa keinginan seseorang tidak mungkin seluruhnya diterima dan dilaksanakan oleh semua orang, tetapi hanya sebagian saja. Salah satu segi asasi demokrasi ialah *partial functioning of ideas* atau berlakunya hanya sebagian *ide-ide* karena selebihnya datang dari orang lain sesama peserta demokrasi.[40] Menurut Maurice Duverger, dalam sebuah rezim yang plural, pertarungan politik bersifat terbuka (*openly*) dan bebas (*freely*) atau tanpa paksaan melalui saluran berupa partai-partai politik.[41] Pluralisme dalam buku ini tidak dimaksudkan sebagai "perlawanan" atas kedaulatan tunggal negara atau penyadaran adanya beragam pihak di luar negara yang sama pentingnya dengan negara. Pluralisme juga tidak dimaksudkan sebagai sikap "negara yang netral", sebagaimana yang dibayangkan penganut paham liberal.

Ketiga, keyakinan atas pluralisme juga terkait dengan komitmen mengedepankan dialog dan kompromi dalam mencapai tujuan atau kesungguhan untuk menolak cara-cara pemaksaan terhadap pihak yang berbeda. Dengan kata lain, perbedaan tidak disikapi dengan upaya untuk menghapuskannya, apalagi dengan cara paksa. *Keempat*, pluralisme juga berarti kesediaan membangun sikap toleran terhadap perbedaan politik, yang dicerminkan dengan kesediaan memberikan kesempatan kelompok yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pandangan atau keyakinanya. Kesempatan itu termasuk kesediaan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan memberikan akses terhadap posisi-posisi politik strategis. *Kelima*, pluralisme adalah kesediaan untuk hidup bersama atau koeksistensi secara adil dan

[39] Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia, 2003), 98.

[40] Madjid, *Indonesia Kita,* 99.

[41] Maurice Duverger, *The Study of Politics* (London: Nelson, 1972), 83.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sejajar dengan berbagai golongan dalam sebuah entitas politik yang sama, tanpa berupaya untuk mengurangi hak hidup kelompok-kelompok politik yang berbeda.

Penulis menyadari pluralisme, apalagi dalam konteks Islam, kerap dikaitkan dengan pluralisme agama, yang belakangan menimbulkan perdebatan. Perdebatan itu, terutama, berkaitan dengan persoalan apakah pluralisme itu harus berujung pada relativisme (peleburan total keragaman) atau cukup pada persoalan koeksistensi (hidup rukun dalam keragaman).[42] Meskipun pembahasan nanti akan menyentuh pula pandangan Masyumi terhadap kelompok-kelompok agama yang berbeda, baik dalam wilayah agama Islam maupun di luar Islam, kajian yang dimaksudkan masih dalam kerangka pluralisme dalam makna politik.

Partai Masyumi tak pelak adalah partai yang berasaskan Islam dan menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun dipimpin oleh orang-orang berpendidikan Barat, komitmen partai ini terhadap Islam demikian tinggi. Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa ciri umum elite Masyumi adalah didikan sekolah Belanda dan tertarik dengan Islam[43]. Bahkan, seperti dikatakan Deliar Noer, bahwa lahirnya Masyumi diharapkan mampu menjadi tonggak awal penyatuan umat Islam pada masa awal kemerdekaan dan semacam upaya umat Islam untuk mengorganisasi kekuatan dan kiprahnya mengaplikasikan ajaran syariat di bidang politik.[44]

Masyumi adalah partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam atau kelompok Islam untuk memperjuangkan penegakan nilai-nilai Islam dan kepentingan kelompok-kelompok muslim, selain juga kepentingan nasional. Dengan batasan itu, Masyumi adalah partai yang masuk dalam kategori ini. Dalam perkembangannya, makna partai Islam makin "elastis". Beberapa kalangan tetap memasukkan

[42] Adapun mengenai kajian yang optimis mengenai Pluralisme Agama di Indonesia lihat misalnya, Th. Sumartana dkk. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

[43] *Tempo*, 14–20 Juli 2008, 83.

[44] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

partai Islam pada partai-partai yang memadukan Islam dengan ideologi lain, seperti Pancasila atau sosialisme, sebagai dasar atau ideologi partai dan yang dapat menggunakan simbol-simbol Islam sebagai identitas kelompok atau tidak.

Keberadaan Masyumi sebagai partai Islam itu tidak terlepas dari masih kuatnya peran politik aliran, dalam hal ini, agama dalam percaturan politik Indonesia saat itu. Dalam sejarahnya terlihat bahwa Indonesia pernah memiliki pemilu yang sangat demokratis pada tahun 1955. Dalam pemilu tersebut, dari 10 partai Islam, dua di antaranya memperoleh dukungan yang sangat signifikan, yaitu Masyumi (20,6 persen) dan Nahdlatul Ulama (18,5 persen), sedangkan peringkat pertama diraih PNI (24 persen). PKI berada di urutan keempat dengan peroleham 16,5 persen.

Perolehan suara partai pada pemilu 1955 bisa dijelaskan melalui politik aliran. Sebagaimana dapat dibaca dalam artikel Geertz, "*The Javanese Village*",[45] inti dari teori aliran Geertz yang berawal dari trikotomi aras masyarakat Jawa—yakni kalangan priayi, santri, dan abangan—adalah adanya kesamaan ideologis yang lebih luas dan komprehensif. Menurut Bahtiar Effendy, dalam konsep aliran Geertz terjadi pembilahan religio-kultural dalam tradisi masyarakat Jawa yang kemudian bertransformasi ke dalam pola pengelompokan-pengelompokan sosial politik.[46] Dalam hal ini, agama menjadi faktor penting yang memengaruhi pengelompokan sosial-politik. Dengan kata lain, ketaatan dan afiliasi sosial keagamaan ekuivalen dengan afinitas sosial-politik.

Geertz menjelaskan bahwa abangan adalah kelompok yang menekankan aspek anismisme yang pada umumnya berkaitan dengan kalangan petani; santri adalah kelompok masyarakat berorientasi Islam dan pada umumnya berasal dari kalangan pedagang; priayi adalah kalangan yang menekankan aspek Hinduisme dan berkaitan

[45] Clifford Geertz, "The Javanese Village", dalam *Local, Ethnic, and National Loyalties in Village Indonesia,* ed. G. William Skinner (Itacha: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1959), 37.

[46] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 36.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan unsur birokrat.[47] Orang-orang abangan mempunyai orientasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan orang-orang santri. Orang-orang dengan kultur priayi lebih merasa aman berada di bawah naungan PNI (Partai nasional Indonesia), kultur wong cilik lebih memilih pada PNI dan PKI. Wong cilik abangan lebih pada PKI, sedangkan masyarakat santri lebih pada NU untuk santri konservatif dan Masyumi untuk santri modernis. Dengan kata lain, kalangan abangan cenderung memilih untuk berpihak pada partai politik yang tradisional, sekuler, dan nasionalistis, sedangkan orang-orang santri pada politik Islam dengan organisasi-organisasi massa di bawah partai-partai politik. Trikotomi Geertz, yang kemudian dikenal pembagian masyarakat sebagai kalangan abangan, santri dan priayi ini, dipandang mampu mengungkap tabir perilaku politik masyarakat.[48] Biarpun demikian, belakangan skisma atau pembelahan politik model ini banyak menuai kritik. Salah satunya adalah karena dianggap mencampurkan sesuatu yang terlahir (primordial) dan yang tercapai atas bentukan sosiologis *(achievement).*

Sementara untuk kajian yang lebih menukik terkait dengan partai politik, kajian Herbert Feith dan Lance Castles mengenai aliran pemikiran politik di Indonesia dalam kurun waktu dua dekade pertama kemerdekaan (1945–1965) menyimpulkan adanya aliran-aliran politik di Indonesia.

Feith dan Castles mengambil sampel berdasarkan hadirnya empat partai politik besar sesudah Pemilu 1955, yaitu Partai Nasional Indonesia (nasionalisme radikal), Masyumi (Islam modernis), Nahdlatul Ulama (Islam tradisionalis), dan Partai Komunis Indonesia (komunisme). Empat partai ini lalu ditambah kenyataan adanya satu partai, yaitu Partai Sosialis Indonesia, yang secara kuantitatif anggotanya kecil tetapi memiliki kader yang mampu menjadi menteri kendati suara partai mereka sangat tidak signifikan. Mereka ini representasi aliran sosialisme demokratik.

---

[47] Clifford Geertz, *Religion of Java* (Chicago and London: University of Chicago Press, 1976), 6.

[48] Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam pembagian aliran politik yang dilakukan oleh Feith dan Castels itu terlihat bahwa Masyumi digolongkan sebagai penganut aliran Islam yang dipengaruhi oleh (pemikiran) Barat dan Islam. Aliran politik yang Masyumi miliki ini tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pengaruh pemikiran Hindu-Jawa. Pemikiran politik Masyumi memiliki arsiran dengan pemikiran politik demokrasi sosial—terbukti belakangan bahwa kedua aliran ini memiliki banyak kesamaan dan agenda politik di Indonesia—khususnya dalam hal memperjuangan nilai-nilai demokrasi dan mempertahankan semangat kebebasan sipil.

Aliran demokrasi sosial diwakili oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kedua partai ini dalam perjalannya menjadi "musuh tradisional" Sukarnoisme, selain komunisme (PKI). Menjelang keduanya dibubarkan oleh rezim Orde Lama pada tahun 1960, baik PSI maupun Masyumi sama-sama menentang ide Demokrasi Terpimpin dan bahu membahu membentuk "Liga Demokrasi", yang terutama ditujukan untuk menentang konsep dan praktik Demokrasi Terpimpin yang diprakarsai oleh Soekarno yang didukung oleh PKI dan Angkatan Darat.

Di tengah politik aliran yang begitu kuat saat itu, maka sikap untuk mendukung pluralisme itu sendiri dapat bersifat murni normatif atau merupakan kombinasi atau normatif dan pragmatisme atau secara umum didasarkan pada persoalan yang pragmatis semata. Dalam beberapa aspek, dukungan terhadap pluralisme memang terkait erat dengan sebuah idealisme yang diambil dari sebuah ideologi atau kepercayaan tertentu. Di sini menjadi pendukung pluralisme adalah pelaksanaan ideologi atau merupakan kewajiban ideologis sebagai konsekuensi atas keyakinan akan kebenaran ideologi yang dianutnya itu.

Sekalipun demikian, dukungan terhadap pluralisme kerap juga disebabkan oleh kepentingan untuk mempertahankan atau meluaskan eksistensi. Dalam konteks politik, ini berarti terkait dengan upaya memperoleh, mempertahankan, dan meluaskan kekuasaan. Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, sikap untuk moderat atau terbuka terhadap pluralisme memang sebuah kebutuhan partai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk dapat bertahan dalam persaingan politik, khususnya meraih simpati dan dukungan sebanyak mungkin kalangan. Adakalanya kepentingan itu diselingi oleh keyakinan yang ideologis. Namun, untuk partai-partai pragmatis dan tidak beorientasi ideologis, keberpihakan terhadap nilai-nilai pragmatisme itu cenderung murni demi dapat bertahan dalam lingkaran kekuasaan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 2
BIOGRAFI MASYUMI

Berdirinya Partai Masyumi tidak terlepas dari dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat itu menyatakan bahwa pemerintah mendukung lahirnya partai-partai politik. Keluarnya maklumat itu mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan umat Islam. Empat hari setelah keluarnya maklumat tersebut, maka diadakanlah Muktamar Umat Islam pada tanggal 7 dan 8 November 1945 bertempat di Gedung Muallimin Yogyakarta. Pelaksana muktamar adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia.

A. Lahirnya Masyumi

Muktamar Umat Islam dihadiri tokoh-tokoh Islam, yakni para ulama, guru-guru agama dari pondok pesantren dan madrasah, serta pemimpin-pemimpin organisasi Islam. Muktamar tersebut memutuskan beberapa hal. *Pertama,* Masyumi merupakan partai politik Islam. *Kedua,* Masyumi merupakan satu-satunya partai politik di kalangan umat Islam. *Ketiga,* Masyumi memperkuat per-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

siapan umat Islam untuk berjihad *fi sabilillah* dalam melawan segala bentuk penjajahan. *Keempat,* Masyumi memperkuat pertahanan negara Indonesia dengan menyusun Barisan *Sabilillah* di daerah-daerah. *Kelima,* Masyumi memilih Dr. Soekiman sebagai ketua dan wakil ketua, yaitu Abikusno dan Wali Al-Fatah. Ketiga orang itu diberi mandat untuk menyusun kepengurusan Masyumi.[49]

Sebenarnya, sebelum keluarnya maklumat 3 November 1945 itu, keinginan untuk mendirikan sebuah partai yang menjadi satu-satunya rumah aspirasi bagi umat Islam sudah timbul. Keinginan para tokoh umat Islam mengenai sebuah partai untuk memperjuangkan aspirasi umat islam itu muncul ketika dalam realitasnya kedudukan umat Islam secara politis tidak terlalu menggembirakan pada bulan-bulan pertama kemerdekaan Indonesia.

Keadaan ini bisa dilihat dari kurang terwakilinya tokoh Islam dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Melihat kedudukan umat Islam dan aspirasi umat Islam seperti itulah yang kemudian menimbulkan kesadaran di kalangan tokoh-tokoh Islam untuk membentuk partai politik Islam. Serangkaian pembicaraan dan diskusi pun dilakukan untuk menjawab tantangan itu. Pembicaraan-pembicaraan itu pada awalnya dilakukan secara informal pada bulan September 1945 di Jakarta, seperti pembicaraan antara K.H. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, dan Mr. Moh. Roem. Pembicaraan informal seperti itu disambut para tokoh Islam lainnya sehingga makin berkembang dan mengkristal untuk membentuk partai politik Islam. Mereka mengadakan rapat di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1945 untuk menyusun rencana aksi dalam rangka membentuk partai politik Islam.[50] Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa di satu sisi, kelahiran Masyumi merupakan respons umat Islam atau kebutuhan saluran politik untuk menyuarakan kepentingan mereka. Di sisi lain, kelahirannya dimaksudkan sebagai sarana bagi bangsa

[49] *Harian Kedaulatan Rakyat*, 9 November 1945.

[50] Deliar Noer, "Masjumi: Its Organization, Ideology, and Political Role in Indonesia,"(*Disertasi*, Cornell University, 1960), 39–40. Lihat juga Aboebakar, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar* (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957), 449–450.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia untuk mempertahankan eksistensi negaranya, yang saat itu masih terancam oleh kembalinya penjajahan.[51]

Dalam soal pertama, Masyumi lahir sebagai upaya umat Islam untuk mempertahankan peran dan kedudukan ajaran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendiri Masyumi merasakan bahwa umat Islam akan makin tersingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara manakala tidak memiliki sebuah kendaraan politik sendiri. Muncul sebuah kekawatiran bahwa umat Islam akan tersingkir dari pertarungan ideologi dan kekuasaan, yang mulai hari pertama kemerdekaan menampakkan arah yang kurang bersahabat bagi kelompok Islam.

Hal itu dapat dilihat misalnya dari komposisi anggota lembaga-lembaga politik yang menentukan mulai dari BPUPKI, PPKI, dan KNIP, bentukan Jepang dan kesepakatan elite, yang mayoritas diisi oleh figur-figur dari kelompok-kelompok sekuler,[52] yang diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang menghalangi upaya membentuk sistem politik yang lebih sejalan dengan kepentingan umat Islam.

Di sisi lain, kalangan penggagas dan pendiri partai ini adalah pemimpin-pemimpin organisasi Islam dan tokoh-tokoh masyarakat yang pernah berkecimpung pada organisasi perjuangan dalam upaya merebut kemerdekaan. Dengan latar belakang itu, kehadiran Masyumi juga diselimuti oleh kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Bagi Masyumi, tegaknya kedaulatan bangsa merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya ajaran Islam dan keberadaannya merupakan bagian dari ikhtiar menyelamatkan bangsa

---

[51] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 72.

[52] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia,* 32–37, 49–50 Dari 60 anggota BPUPKI hanya 15 orang yang berorientasi pada Islam. Saat anggota BPUPKI menjadi 88 orang, hanya 17 (19,3%) yang berorientasi Islam. Sementara itu, dalam KNIP hanya 15 orang dari 136 (11,03%) anggotanya yang mewakili kalangan Islam. Mereka adalah Abikusno Tjokrosujoso, Kasman Singodimedjo, Jusuf Wibisono, Dahlan Abdullah, Mohammad Roem, A.R. Baswedan, A. Basajut, Harsono Tjokroaminoto, Ny. Sunarjo Mangunpuspito, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Zainul Arifin, Agus Salim, Ahmad Sanusi, dan Anwar Tjokroaminoto.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu, dalam Program Perjuangan Masyumi dengan jelas disampaikan bahwa Masyumi menghendaki sebuah negara yang "*mendjamin* keselamatan *djiwa* dan harta semua penduduk di Indonesia."[53]

Selain itu, perpaduan cita-cita antara mempertahankan kedaulatan negara dan membangun kekuatan politik Islam yang disegani menjadi sebuah kepentingan utama Masyumi pada awal pembentukannya. Dengan kepentingan yang merupakan sintesis antara nasionalisme dan keislaman itu, ide pembentukan Masyumi menjadi mudah diterima oleh mayoritas ormas-ormas Islam besar saat itu, termasuk para tokoh-tokohnya. Umat Islam, yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Pesatuan Umat Islam, dan Perikatan Ummat Islam,[54] bersepakat bulat untuk membentuk Masyumi dan menjadikan partai ini menjadi satu-satunya partai Islam.[55] Belakangan, berbondong-bondong ormas Islam lain yang menyatakan bergabung dan menjadi anggota istimewa partai ini seperti Al-Jamiyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Al-Irsyad, Persis, hingga Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Sementara Al-Khairat, Mathla'ul Anwar, Nahdlatul Wathan, menyatakan dukungannya meskipun tidak menjadi anggota istimewa.[56]

B. Upaya Mempersatukan Umat Islam

Kehadiran Masyumi menjadi salah satu tonggak bersatunya kembali umat Islam Indonesia dari berbagai aliran dalam sebuah wadah perjuangan bersama. Diambilnya nama Masyumi adalah lebih karena alasan praktis. Hal ini mengingat nama Masyumi yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Islam dan di beberapa daerah masih meninggalkan sebuah kepengurusan yang dapat segera dihidup-

[53] "Program Perjuangan Masyumi", dalam *Pedoman Perdjuangan Masjumi*, cetakan ke-2 (Jakarta: Partai Masjumi Bagian Keuangan, 1955), 60.

[54] Persatuan Ummat Islam dan Perikatan Ummat Islam melakukan fusi menjadi Persatuan Ummat Islam di tahun 1951.

[55] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia,* 53.

[56] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 188.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kan kembali.[57] Berbeda dengan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) bentukan Jepang yang didirkan tahun 1943 dan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang didirikan tahun 1942, yang lebih berorientasi pada sosial keagamaan, Masyumi—lengkapnya Partai Politik Islam Indonesia Masyumi—adalah sebuah organisasi politik dan tidak bersifat federatif.

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi memang berbeda dengan Masyumi bentukan Jepang pada tahun 1943 yang sedikit banyak tercampuri oleh kepentingan pemerintahan pendudukan Jepang. Bahkan, menurut H.J. Benda, terbentuknya Masyumi di tahun 1943 merupakan kemenangan politik Jepang terhadap Islam. Mengingat tujuan dari Masyumi menurut anggaran dasarnya adalah mengendalikan dan merapatkan hubungan antara perkumpulan-perkumpulan agama Islam di Jawa dan Madura. Di samping itu, pembentukan Masyumi juga untuk memimpin dan memelihara pekerjaan perkumpulan tersebut dalam rangka mempertinggi peradaban agar umat Islam mau membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk memelihara lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon. Tujuan seperti itu dipandang oleh umat Islam sesuai perintah Allah.[58]

Sejak diadakannya Muktamar Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November 1945, Masyumi sudah didukung organisasi-organisasi Islam yang sudah didirikan pada masa penjajahan Belanda, seperti NU dan Muhammadiyah. Dukungan kedua organisasi itu bisa dilihat dari keterlibatan orang-orangnya dalam pelaksanaan Muktamar Umat Islam. Bergabungnya kedua organisasi itu menambah anggota Masyumi sehingga tidak terlalu mengherankan kalau anggota Masyumi berkembang dengan cepat. Perkembangan anggota Masyumi makin pesat setelah bergabungnya berbagai organisasi Islam yang bersifat lokal. Pada mulanya yang bergabung adalah Persatuan Umat Islam. Kemudian disusul

[57] Madinier, *Partai Masyumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 50.

[58] Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 185.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Persatuan Islam (Persis) di Bandung, Jami'ah Al-Wasliyah dan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara pada tahun 1948, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Aceh pada tahun 1949, Al-Irsyad pada tahun 1950, Mathlaul Anwar di Banten, dan Nahdatul Wathan di Lombok.[59]

Organisasi-organisasi itu bergabung dengan Partai Masyumi sebagai anggota istimewa. Bergabungnya organisasi-organisasi itu memberikan andil besar dalam penambahan anggota Masyumi dan memperluas pengaruhnya ke seluruh pelosok nusantara. Selain organisasi-organisasi itu, ada juga organisasi Islam yang meleburkan diri ke dalam Masyumi, misalnya, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan di Medan pada akhir November 1945. Parmusi meleburkan diri ke Masyumi pada 6 Februari 1946. Sejak saat itu berdirilah Masyumi di Sumatra Timur. Langkah Parmusi ini juga diikuti oleh Majelis Islam Tinggi yang berpusat di Bukit Tinggi.[60]

Begitu juga halnya dengan Serikat Muslimin Indonesia (SERMI) di Kalimantan Selatan.[61] Meskipun Partai Masyumi sudah didukung oleh berbagai organisasi keislaman, tetapi tidak berhenti di situ saja. Artinya, Masyumi tetap melakukan usaha untuk merekrut anggota dengan cara mendirikan berbagai bentuk organisasi yang bersifat otonom. Misalnya, mendirikan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) pada tangggal 26 Oktober 1946 di Yogyakarta. Pendirian STII dimaksudkan untuk merekrut anggota Masyumi dari kalangan petani. Selain STII, Masyumi juga mendirikan perserikatan untuk buruh, yakni Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) di Solo. Masyumi juga mendirikan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII).[62]

Adanya dukungan dari berbagai organisasi, baik organisasi Islam yang bersifat nasional maupun lokal dan dukungan dari ber-

---

[59] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, 49–50, 55.

[60] Badruzzaman Busyairi, *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 194–196.

[61] Ramlan Mardjoned, *K.H. Hasan Basri: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid* (Jakarta: Media Da'wah, 1990), 36.

[62] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik,* 56.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bagai kaum profesi yang tergabung dalam SNII, SBII, dan STII tentunya menambah kuantitas anggota Masyumi. Partai Masyumi pada masa revolusi sudah mempunyai cabang dan anak cabang hampir di seluruh Indonesia, bahkan cabang Masyumi sudah dibentuk di Kepulauan Kai (Irian), yang ketika itu masih menjadi kawasan yang dipersengketakan dengan Belanda. Tidak hanya cabang dan anak cabang yang sudah dibentuk, tetapi ranting pun di tingkat desa sudah ada. Bahkan hampir tiap desa di Jawa sudah memiliki ranting Masyumi. Sampai 31 Desember 1950, tercatat 237 cabang, 1080 anak cabang, 4982 ranting, dan anggotanya berjumlah lebih kurang 10.000.000 orang sehingga Partai Masyumi menjadi partai politik terbesar di Indonesia pada masa itu.[63]

C. Kepengurusan Partai Masyumi

Kepengurusan atau struktur organisasi Masyumi terdiri dari muktamar dan dewan partai, pimpinan partai dan majelis partai. Muktamar dan dewan partai merupakan badan legislatif yang bertugas terutama sebagai pencerminan suara mayoritas anggota partai yang dalam keputusannya merupakan mandat yang harus dijalankan oleh pimpinan partai. Muktamar merupakan ajang pembuatan keputusan tertinggi partai yang dihadiri oleh pengurus-pengurus Masyumi seantero nusantara yang jumlahnya bisa mencapai ribuan orang. Adapun pimpinan partai merupakan lembaga eksekutif yang membuat pernyataan politik dan memutuskan kebijakan partai. Terdapat pula majelis partai yang merupakan lembaga penasihat yang berfungsi untuk memberi nasihat dan fatwa kepada pimpinan partai dalam pekerjaan partai secara garis besar.[64]

Kedudukan majelis partai itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, tidak lebih tinggi dari pimpinan partai, bahkan pimpinan partai berperan dalam membentuk kepengurusan badan ini.[65] Hal yang

[63] George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan Press, 1995), 194.

[64] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 124.

[65] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme,* 125.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kerap disalahpahami oleh sebagian kalangan yang melihat majelis partai sebagai badan legislatif, seperti misalnya Dewan Syuro di NU, yang fatwanya merupakan sebuah keputusan yang mutlak diimplementasikan oleh pimpinan partai sebagai lembaga legislatif partai. Adapun fungsi utama muktamar partai yang diselenggarakan secara rutin adalah untuk melakukan laporan pertanggungjawaban pimpinan partai dan pemilihan pengurus-pengurus partai yang baru.[66]

Susunan kepengurusan pimpinan partai didominasi oleh politisi karier yang berlatar belakang pendidikan Barat, misalnya, Dr. Sukiman Wirjosandjojo yang pernah menjadi Ketua Partai Islam Indonesia yang didirikan pada 4 Desember 1938. Ia merupakan seorang ahli di bidang kedokteran yang pernah menempuh pendidikan doktoral di Belanda.

Begitu juga Mohammad Natsir yang pernah menempuh pendidikan *Aglemene Middlebare School* (AMS) di Bandung—yang setelah lulus sebenarnya dia mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di Belanda. Dengan nilai-nilai yang baik sepanjang masa sekolahnya dan kemampuan bahasa Belanda yang mengesankan, Natsir memiliki dua pilihan apakah akan menempuh jenjang pendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Namun, kedua pilihan itu tidak diambilnya dan Natsir lebih memilih untuk menjadi guru.

Adapun Prawoto Mangkusasmito, sebagai pimpinan Partai Masyumi terakhir, juga menempuh Pendidikan AMS di Yogyakarta. Beliau kemudian melanjutkan studi di *Recht Hoge School* (Sekolah Tinggi Hukum) yang dia selesaikan di tahun 1935. Sementara itu, pada level majelis partai didominasi oleh para ulama, terutama para pemimpin organisasi keislaman, seperti K.H. Hasyim Asyari, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, dan K.H. Wahid Hasyim dari NU, serta Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Masuknya unsur-unsur organisasi dalam Masyumi sebagai anggota istimewa memberi darah segar bagi Masyumi untuk mengembangkan sayapnya dan

[66] Mahendra, *Modernisme*, 127.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memperbanyak anggotanya, terutama dari kalangan umat Islam. Berikut ini susunan pengurus Masyumi saat dideklarasikan:

Majelis Syuro

Ketua	: K.H. Hasjim Asj'ari (NU)
Ketua Muda I	: Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah)
Ketua Muda II	: K.H. Abdul Wahid Hasjim (NU)
Ketua Muda III	: Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah)
Anggota	: Syaikh Djamil Jambek (Ulama Sumatera Barat)
	K.H. Abdul Wachab (NU)
	H. Agus Salim (Gerakan Penyadar)
	R.H.M. Adnan (Persatuan Penghulu dan Pegawai)
	K.H. Sanusi (PUI)

Pengurus Besar

Ketua	: Dr. Soekiman (PSII)
Ketua Muda I	: Abikoesno Tjokrosoejoso (PSII)
Ketua Muda II	: Wali Al-Fatah (PII)
Sekretaris I	: Harsono Tjokroaminoto (PSII)
Sekretaris II	: Prawoto Mangkusasmito (Muhammadiyah)

Dengan komposisi seperti itu, menurut Madinier, Masyumi mencerminkan ikhtiar untuk menghimpun seluruh perkumpulan Islam serta payung politik masing-masing. Perlu diketahui bahwa selama hidupnya, Masyumi memiliki beberapa anggota (organisasi) istimewa, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Irsyad, Jam'iyatul Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Hal ini tentunya menambah kekuatan politik Masyumi. Dalam aliran beragama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan PUSA digolongkan sebagai kalangan Islam modernis. Adapun NU, PUI, Jam'iyatul Al-Wasliyah, dan Al-Ittihadiyah adalah kelompok tradisionalis.[67] Bergabungnya berbagai organisasi keagamaan tersebut tidak lepas dari adanya kebersamaan dan semangat persaudaraan yang tecermin dari ideologi yang dimiliki Partai Masyumi.

[67] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme,* 183.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jadi, bisa dikatakan bahwa selain komitmen keislaman yang berpadu pada semangat kebangsaan, kemauan bersikap inklusif menjadi salah satu karakter dari partai ini. Kombinasi antara keislaman, kebangsaan, dan sikap inklusif itu dapat berjalan karena ditopang oleh keberadaan pengurus teras Masyumi yang kebanyakan memiliki atau pernah bersentuhan baik dengan model pengajaran Islam maupun sistem pendidikan Barat.[68] Latar belakang ini menyebabkan mereka dapat menerima sebuah konsep sintesis antara keislaman, kebangsaaan, dan inklusifisme.[69]

Di sisi lain, latar belakang ormas Islam dari para pimpinan teras dan anggota legislatif Masyumi yang juga kebanyakan berasal dari ormas-ormas yang berkarakter modernis Islam, begitu pula dengan mayoritas anggota parlemen yang mewakili Masyumi,[70] menyebabkan mereka cenderung dapat terbuka dengan ide-ide Barat meskipun tidak berarti menghilangkan komitmen terhadap keislaman. Kedua latar belakang tersebut pada akhirnya turut mewarnai sikap dan keberpihakan partai untuk dapat terbuka pada perbedaan, membela demokrasi, menjunjung tinggi negara hukum, serta membela hak-hak individu. Di sisi lain, kalangan berlatar belakang tradisionalis juga eksis dan memengaruhi kehidupan partai ini. Hal ini memperlihatkan bahwa Masyumi merupakan milik semua kalangan Islam dari beragam latar belakang. Memang belakangan, khususnya pada tahun 1952, NU akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Masyumi. Namun, elemen-elemen Islam tradisionalis tidak seluruhnya "angkat kaki" dari partai ini. Kalangan seperti PUI, Jam'iyatul Al-Wasliyah, dan Al-Ittihadiyah masih menjadi bagian dari Masyumi, bahkan juga menjadi pembela partai ini yang militan dan loyal.

---

[68] Menurut Remy Madinier, dari 15 pengurus pusat Masyumi hanya dua saja yang tidak bersentuhan dengan pendidikan Barat, lihat Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 24.

[69] Selain itu menurut Mahendra, latar belakangan juga menyebabkan Masyumi cenderung berpandangan rasional legal dalam mengelola organisasi dan bersikap pragmatis dalam pembuatan kebijakan. Mahendra *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, 306–307.

[70] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 41.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Karakteristik Masyumi yang tampak memadukan antara Barat dan Islam ini belakangan dikritisi oleh sebagian kalangan. Sikap itu tidak saja dianggap bernuansakan "borjuis", sebagaimana yang sering dikatakan PKI sebagai "borjuis komprador",[71] tetapi juga dinilai telah menyebabkan *kebingungan visi dan orientasi*.

Terkait dengan persoalan kedua, Masyumi dianggap tidak tuntas dalam menjawab dan menjabarkan apa yang sebenarnya dikehendaki.[72] Konsep negara Islam, misalnya, terasa masih kabur, bahkan bagi kalangan umat Islam sendiri. Hal ini justru belakangan menyebabkan kalangan-kalangan yang anti terhadapnya seolah mendapat keuntungan karena solusi Masyumi dianggap penuh ketidakpastian, serba tanggung, dan tidak kontekstual. Meskipun demikian, menurut Martin Van Bruissen, sebagaimana yang disampaikan oleh Artawijaya, situasi tersebut mengindikasikan bahwa Partai Masyumi bukanlah partai yang sektarian, juga bukan partai yang dimiliki oleh satu golongan saja, dan pastinya merupakan partai yang dipimpin oleh perpaduan antara para priayi religius dan kiai modernis, yang tidak hanya terdiri dari orang-orang yang mampu berbicara masalah agama, tetapi juga menguasai ilmu modern.[73]

Dari aspek kepengurusan ini, dapat diidentifikasi bahwa Masyumi adalah partai terbuka untuk seluruh kalangan umat Islam. Dengan demikian, sejak kelahirannya, Masyumi telah terbiasa menampung sekaligus mengelola keragaman di antara umat Islam sendiri. Situasi itu membuat Partai Masyumi disegani oleh lawan-lawan politiknya.[74]

---

[71] Olle Tornquist, *Penghancuran PKI* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 62.

[72] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral,* xvii.

[73] Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 56.

[74] Artawijaya, *Belajar dari Partai,* 56.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

D. Islam sebagai Ideologi

Meskipun pada awalnya Partai Masyumi tidak memberikan keterangan yang tegas, jelas, dan terperinci tentang ideologinya, sebenarnya dapat dengan mudah dibaca bahwa Masyumi berideologikan Islam. Identitas keislaman dalam Masyumi sangat menonjol, terlihat dalam mengambil keputusan dan pola pikirnya yang bersumber dari ajaran Islam, ataupun dengan seringnya menggunakan kata-kata Islam dalam anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi.

Resolusi Partai Masyumi pada masa perang kemerdekaan, misalnya, menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan *jihad fi sabilillah* dalam menghadapi segala bentuk penjajahan, terutama menghadapi sekutu yang masuk ke Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Di dalam anggaran dasar Masyumi, disebutkan bahwa tujuan Partai Masyumi adalah untuk menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Selain itu, Partai Masyumi juga mempunyai tujuan untuk melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.[75]

Bagi Masyumi, Islam adalah cara hidup yang relevan dalam turut mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan politik. Menurut Masyumi kehidupan politik, sosial, budaya ekonomi dan lain sebagainya tidak dapat dilepaskan dari aturan ataupun ajaran yang telah sampaikan oleh Allah dan Nabi Muhammad di Madinah.

Masyumi meyakini bahwa pesan moral agama Islam itu juga terkait dengan salah satu prinsip dalam Islam untuk membangun hubungan yang baik antara sesama manusia (*hablun minannas*), selain membangun hubungan yang baik dengan Tuhan (*hablun minallah*). Prinsip tersebut dengan jelas mengisyaratkan terbangunnya sebuah sistem kehidupan atau sistem sosial yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai konsekuensi sekaligus sarana dari menciptakan hubungan yang baik dengan sesama ma-

[75] Kementerian Penerangan R.I., *Kepartaian di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Penerangan R.I, 1951), 15.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nusia. Masyumi meyakini kesempurnaan agama Islam karena turut mengatur persoalan kehidupan sosial umatnya. Seperti yang dikatakan Ketua Umum Masyumi, Natsir, bahwa cakupan ajaran Islam adalah meliputi kehidupan dunia dan akhirat yang saling tersambung, termasuk soal-soal sosial di dalamnya.[76]

Partai ini kerap menyitir kisah Kaum 'Ad dan Tsamud, sebagai kelompok manusia yang mendapatkan bencana besar dari Tuhan karena mengingkari dan menentang ajaran dan hukum-hukum Tuhan. Keyakinan ini mendasari partai ini akan pentingnya menegakkan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah. Atas dasar itu pulalah Islam sebagai asas partai ini merupakan sebuah "roh perjuangan".

Walaupun demikian, Partai Masyumi terlihat belum memberikan keterangan yang jelas tentang ideologi Partai Masyumi, terutama sampai tahun 1947. Ideologi Partai Masyumi baru diungkapkan dengan adanya kata-kata ideologi Islam dalam manifesto politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947. Meskipun ada pernyataan ideologi Islam dalam manifesto tersebut, Partai Masyumi belum memberikan keterangan yang terperinci dan resmi tentang ideologi Islam.[77]

Kurangnya penjelasan ideologi Masyumi pada masa perang kemerdekaan Indonesia dapat dimaklumi, karena Pimpinan Masyumi masih lebih berkonsentrasi dalam perjuangan kemerdekaan menghadapi penjajah. Perjuangan itu tentunya memerlukan perhatian yang khusus dari semua lapisan masyarakat, termasuk para pimpinan Masyumi. Dalam menghadapi penjajah ini energi dari partai lebih difokuskan untuk mengusir penjajah dari bumi nusantara tercinta. Apalagi memang banyak tokoh hingga aset maupun jaringan yang dimiliki oleh kader-kader partai yang dapat dimanfaatkan dalam rangka merebut kemerdekaan dari tangan kolonial Belanda itu. Selain itu, tidak terfokusnya pemikiran terhadap ideologi Partai

[76] Mohammad Natsir, *Fiqud Da'wah*, (Malaysia: International Federation of Student Organization, 1982), 12.

[77] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia,*120–122.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masyumi bisa ditafsirkan demi menghindari adanya konflik ideologi dengan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Indonesia, agar tetap terjaganya persatuan di kalangan masyarakat Indonesia yang saat itu sedang fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Setelah Indonesia memperoleh kedaulatan secara penuh dan kembali kepada NKRI, para pemimpin Masyumi mulai memanfaatkan situasi dengan meluangkan waktu dan pikirannya untuk menafsirkan asas Partai Masyumi, sebagaimana yang tertuang secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyumi yang disahkan Muktamar Masyumi VI pada bulan Agustus 1952. Sejak tahun 1952 sampai Partai Masyumi dibubarkan—atau tepatnya membubarkan diri—, asas Partai Masyumi tercatat adalah Islam. Selanjutnya, tujuan Partai Masyumi adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia, menuju keridaan Ilahi.[78] Selain menyatakan asas partai adalah Islam, pada tahun 1952, Masyumi juga mengeluarkan tafsir asas. Tafsir asas Masyumi ini merupakan rumusan resmi ideologi partai Masyumi yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi anggota Masyumi.[79]

E. Dinamika Peran dan Situasi Internal Masyumi

Pada lima tahun pertama setelah kemerdekaan (1945–1950), Masyumi memainkan peran oposisi, bahkan, dapat dikatakan, pinggiran. Meski demikian, jika dicermati pada masa itu pula telah mulai bermunculan tokoh-tokoh Islam atau anggota Masyumi yang diberikan peran secara individual oleh pemerintah untuk membantu mengurus negara dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Beberapa di antaranya adalah Sjafruddin Prawiranegara (Menteri Keuangan), Mohammad Natsir (Menteri Penerangan), dan

[78] Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Penerangan RI 1954), 443.

[79] Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Rekaman Suara M. Natsir.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mohammad Roem (Menteri Dalam Negeri). Pada tahun 1948, Sjafruddin menjabat sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Namun, dalam hal kelembagaan, partai ini memilih peran sebagai oposisi yang kerap bersikap keras dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk beberapa perjanjian dengan Belanda yang dipandang merugikan Indonesia, seperti Perjanjian Linggarjati dan Renville.[80] Pada masa pemerintahan Amir Syarifuddin I, Masyumi juga harus kehilangan anggota-anggota eks-PSII yang bersedia melepaskan diri dari Masyumi demi mendapatkan jabatan dalam Kabinet Amir Syarifuddin I itu.

Peran Masyumi baru benar-benar menguat pada lima tahun kedua setelah kemerdekaan. Mosi Integral Natsir di tahun 1950,[81] yang mengukuhkan kembali eksistensi NKRI, merupakan sebuah prestasi gemilang yang menandai fase baru peran politik Masyumi. Fase baru itu ditandai dengan didapatkannya posisi tertinggi pemerintah. Beberapa kader Masyumi menjadi perdana menteri, yakni Mohammad Natsir (1950–1951), Dr. Sukiman Wirjosandojo (1952–1953), dan Burhanuddin Harahap (1955–1956). Pada masa ini, Masyumi menjadi kekuatan politik yang berada di pusat pemerintahan. Meskipun demikian, fase ini ditandai pula oleh kenyataan yang tidak mengenakkan, yakni keluarnya PSII dari Partai Masyumi pada tahun 1947, yang disusul oleh NU pada tahun 1952.

Secara internal, keanggotaan Masyumi mengalami pengurangan, terutama setelah NU keluar dari Masyumi pada 1952. Keluarnya NU dari Masyumi disebabkan karena kurang terakomodasinya keinginan dan kepentingan NU dalam Masyumi. Hal ini bisa dilihat dari dua hal. *Pertama,* NU sudah lama merasa tidak nyaman dalam Masyumi, terutama sejak Muktamar Masyumi IV di Yogyakarta pa-

[80] Hal yang unik adalah kerap kader-kader Masyumi yang ada dalam pemerintahan adalah mereka yang justru berkeras membela kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini menyiratkan bahwa sikap kritis partai tidak terhenti, meskipun beberapa kadernya ada dalam pemerintahan.

[81] Mengenai Mosi Integral lihat Hasanuddin Yusuf Adan & Husni A. Jalil, *Mosi Integral Mohammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummah da Bangsa dalam NKRI* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

da tanggal 15–18 Desember 1949. Ketidaknyamanan itu semakin terasa ketika muktamar memutuskan untuk mengubah status Majelis Syuro Muslimin Indonesia (yang notabene diisi oleh para tokoh NU), hanya menjadi badan penasihat. NU merasa kedudukannya dalam Masyumi sudah tidak begitu penting dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan partai. Hal itu bisa dipahami karena selama ini orang-orang NU hanya duduk dalam majelis syura, sementara kedudukan wakil NU dalam jajaran pimpinan partai Masyumi tidak terakomodasi dan tidak seimbang jika dibandingkan dengan golongan lainnya.[82]

Perubahan struktur Masyumi tersebut, terutama fungsi Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menimbulkan kekecewaan di kalangan NU. Sebagaimana dikatakan Syaifuddin Zuhri, perubahan struktur itu tidak mencerminkan demokrasi dalam sistem musyawarah karena kebijaksanaan partai lebih banyak menitikberatkan pada pertimbangan politik daripada fatwa majelis syura. Ketimpangan struktur organisasi Masyumi dirasakan tidak wajar, di samping kurang terwakilinya tokoh-tokoh NU di tingkat pimpinan partai, suara NU pun sering tidak mendapat tempat dalam keputusan-keputusan politik Masyumi.[83]

Kedua, tidak dipenuhinya tuntutan dari kalangan NU agar kursi menteri agama diserahkan kepada mereka. Penolakan terhadap tuntutan NU tersebut oleh pimpinan Partai Masyumi menjadi puncak dari kekecewaan NU terhadap Masyumi. Berangkat dari serangkaian peristiwa itu, maka di kalangan tokoh NU muncul pemikiran untuk mengkaji ulang kedudukan NU dalam Masyumi. Masalah ini pun akhirnya dibawa dan dibahas di tingkat Pengurus Besar NU. Dalam rapat NU pada tanggal 5 April 1952 di Surabaya, diputuskan untuk mengeluarkan NU dari Masyumi. Keputusan PB NU ini kemudian diperkuat Muktamar NU ke-19 di Palembang pada 28 April–1 Mei

[82] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia,* 80–81.

[83] Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Al maarif, 1981), 640–641.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1952. Keputusan itu diambil melalui *voting* dengan hasil 61 suara setuju, 9 suara menolak, dan 7 suara abstain.[84]

Berdasarkan hasil *voting* itu, akhirnya Muktamar NU ke-19 di Palembang memutuskan NU keluar dari Masyumi. Keputusan Muktamar NU kemudian dikomunikasikan ke pimpinan Partai Masyumi. Pertemuan yang diadakan antara pimpinan Partai Masyumi dan PBNU menghasilkan kesepakatan untuk mencabut keanggotan NU dari Masyumi.[85] Oleh karena itu, NU keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik sendiri, yakni Partai NU. NU kemudian ikut sebagai salah satu kontestan pada Pemilu 1955.

F. Masyumi dan Pemilu 1955

Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 untuk memilih wakil rakyat di DPR dan konstituante. Pemilu dilakukan dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR dan 15 Desember untuk pemilihan anggota konstituante. Adapun pemilihan anggota konstituante dan DPR itu dilakukan untuk menyusun undang-undang dasar tetap, menggantikan undang-undang dasar yang berlaku saat itu yang masih bersifat sementara atau dikenal dengan UUDS. Sejumlah partai yang ikut serta dalam pemilu 1955 bisa dilihat pada Gambar 2.1.

Pelaksanaan pemilu diikuti oleh 172 kontestan, baik partai maupun perorangan. Meskipun peserta pemilu demikian besar, pemilu berjalan dengan damai, miskin kecurangan, dan bahkan dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai pemilu yang demokratis. Kualitas tersebut tidak pernah disamai oleh pelaksanaan pemilu-pemilu pada era Orde Baru. Jumlah pemilih total adalah 43.104.464 orang, yang merupakan 87,65% dari keseluruhan warga negara yang berhak memilih. Jumlah yang besar untuk sebuah negara yang belum lama berdiri. Menurut Ridwan Saidi, meskipun terdapat riak-riak gesekan, terutama antara pendukung Masyumi dan PKI, secara

[84] Katjung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Surabaya: Erlangga, 1992), 62–63.

[85] Arsip Nasional R.I, *Nahdhatul Ulama*, No. 142.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

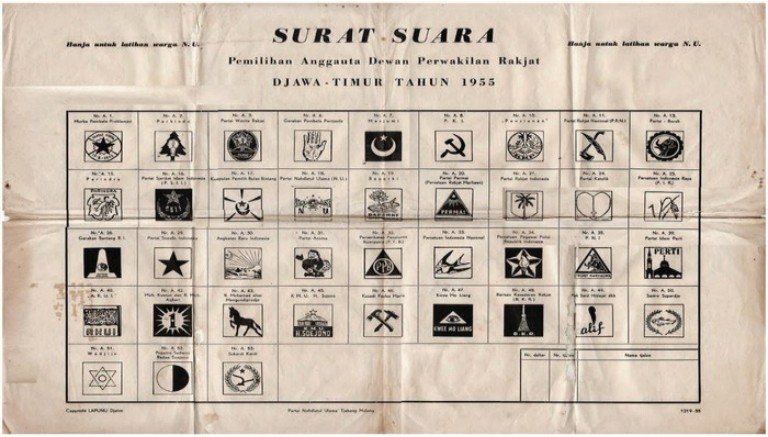

Sumber: "Surat Suara Pemilu 1955 untuk Latihan Warga NU", Catatan Nusantara

Gambar 2.1 Surat Suara pada Pemilu 1955

umum pemilu berjalan secara aman dan damai. Berbagai kecurangan terkait pemilu pun relatif kecil dan dapat dilokalisasi. Pemilu 1955, menurut Feith, dapat dikatakan merupakan sebuah pagelaran yang penuh khidmat dan kesadaran demokrasi yang tinggi, yang secara umum berjalan secara beradab dan bermartabat.[86]

Pemilu itu sendiri dilakukan dengan menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup yang dalam konteks perjalanan pemilu di Indonesia terus dilakukan hingga Pemilu 2004. Sistem pemilu itu memungkinkan partai-partai kecil masih dapat berkiprah, baik dalam Konstituante Republik Indonesia maupun DPR.

Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Dari hasil Pemilihan Umum I yang diikuti 172 kontestan Pemilu 1955, hanya 28 kontestan (tiga di antaranya perseorangan) yang berhasil memperoleh kursi. Empat partai besar secara berturut-turut me-

[86] Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menangkan kursi: Partai Nasional Indonesia (57 kursi/22,3%), Masyumi (57 kursi/20,9%), Nahdlatul Ulama (45 kursi/18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (39 kursi/15,4%)[87]. Hasil pemilu tahap pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR bisa dilihat pada Tabel 2.1.[88]

Tabel 2.1 Perolehan Suara dan Kursi Pemilu DPR 1955

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4

[87] Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 317.

[88] Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Jakarta* (Jakarta: Gramedia, 1999), 84–86.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	1
		37.785.299	100,00	257

Sumber: Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Jakarta* (Jakarta: Gramedia, 1999)

Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. Tiga kursi sisa diberikan pada wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat Presiden Soekarno. Selain itu, diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, keseluruhan anggota DPR hasil Pemilu 1955 adalah 272 orang.[89]

Sementara itu, untuk memilih anggota konstituante, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 520, tetapi di Irian Barat, yang memiliki jatah 6 kursi, tidak ada pemilihan. Oleh sebab itu, kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota dewan konstituante menunjukkan bahwa dukungan untuk PNI, NU, dan PKI meningkat, sementara Masyumi, meskipun tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Adapun peserta pemilihan anggota konstituante yang mendapatkan kursi bisa dilihat pada Tabel 2.2.[90]

[89] Herbert Feith, *Pemilihan Umum*, 86.

[90] Herbert Feith, *Pemilihan Umum*, 86–87.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 2.2 Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Konstituante 1955

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	040	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia Permai	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31.	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)	39.874	0,11	1
33.	PIR NTB	33.823	1,09	1
34.	L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1
35.	Lain-lain	426.856	1,13	1
	Jumlah	37.837.105	100,00	514

Sumber: Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Jakarta* (Jakarta: Gramedia, 1999)

Hasil pemilu menunjukan bahwa Partai Masyumi sendiri memperoleh suara terbanyak, kedua setelah PNI. Bahkan, Masyumi merupakan partai terbesar di antara partai Islam lainnya dengan perolehan suara sebanyak 7.789.619 untuk pemilu konstituante. Perolehan suara tersebut menempatkan anggota Masyumi yang duduk dalam konstituante sebanyak 112 orang dari 514 kursi yang diperebutkan. Sementara itu, dalam pemilihan anggota DPR, Masyumi memperoleh 7.903.886 suara sehingga memperoleh 57 kursi—sama dengan PNI—dari 257 kursi yang diperebutkan.[91] Selain itu, bisa dikatakan perolehan suara Masyumi menyebar di seluruh daerah pemilihan dan yang terbanyak diperoleh dari daerah Jawa Barat, tetapi jika dilihat dari persentasenya, lebih banyak dari daerah pemilihan Sumatra Tengah dengan 50,8%. Perolehan suara Masyumi berdasarkan daerah pemilihan dapat dilihat pada Tabel 2.3.[92]

[91] Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1973), 434–435.

[92] Marwati Djoened Posponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia,* 228.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 2.3 Perolehan dan Persentase Suara Masyumi

No.	Daerah Pemilihan	Suara yang Diperoleh	% Suara Daerah	Keluar sebagai No.	Kursi yang Didapat
1	Jakarta Raya	200.460	26,0	1	2
2	Jawa Barat	1.844.442	26,4	1	3
3	Jawa Tengah	902.387	10,0	4	6
4	Jawa Timur	1.109.742	11,2	4	7
5	Sumatra Selatan	628.382	43,2	1	4
6	Sumatra Tengah	797.692	50,8	1	6
7	Sumatra Utara	789.910	36,9	1	6
8	Nusa Tenggara Barat	264.719	21,2	2	2
9	Nusa Tenggara Timur	157.972	21,2	2	1
10	Kalimantan Timur	44.347	25,7	1	
11	Kalimantan Barat	155.173	33,2	1	1
12	Sulawesi Utara/ Tengah	189.199	25,0	1	1
13	Sulawesi Selatan/ Tenggara	446.255	40,0	1	
14	Maluku	117.440	35,4	1	1
	Jumlah	7.903.886			57

Sumber: Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

Masyumi mengumpulkan suara terbanyak, yakni 10 dari 14 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Masyumi merupakan partai yang paling luas kawasan pengaruhnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di Nusantara, dibandingkan partai-partai lain. PNI hanya unggul atau mayoritas di dua tempat pemilihan, yakni Jawa Tengah dan Bali. Sementara itu, NU menang besar di dua daerah pemilihan, yakni Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Bahkan, PKI sejatinya tidak memenangkan daerah pemilihan manapun. Namun, kemenangan Masyumi di sepuluh tempat pemilihan tidak menentukan jumlah kursi yang diperolehnya karena pemilihan umum di Indonesia saat itu menggunakan sistem pemilihan proporsional.[93]

Fenomena persebaran suara Masyumi yang cenderung merata di seluruh Indonesia itu menunjukkan penerimaan yang lebih plural dan lebih "mengindonesia" dari Masyumi sebagai partai. Dengan keragaman latar belakang pulau dan etnisitas yang dimilikinya, Masyumi merupakan partai dengan corak keragaman pemilih yang tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain. Meskipun PNI adalah pemenang dari kontestasi Pemilu 1955, konsentrasi suara mereka ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah hingga kini menjadi basis dari partai nasionalis, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sehingga kerap dijuluki "Kandang Banteng".

Kenyataan bahwa mayoritas pemilih PNI adalah di Pulau Jawa sempat membuat PNI dilabeli sebagai "partainya orang Jawa". Meskipun hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, pulau tersebut memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia sehingga tidak mengherankan jika PNI menjadi partai dengan suara pemilih terbanyak. Begitu pula dengan NU. Meskipun meraih tempat ketiga, sebenarnya partai ini hanya menang di dua distrik, yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan—Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Situasi di mana jumlah pemilih di Jawa memainkan peran penting ini, ternyata memang tetap berlanjut hingga saat ini. Jumlah pemilih di Jawa dan Bali mewakili lebih dari 57% dari jumlah total pemilih di Indonesia.

[93] *Thaqafiyyat* 14, no. 1, 98.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

G. Pembubaran Masyumi

Setelah fase lima tahun kedua itu, peran Masyumi mulai menurun. Kabinet Burhanuddin adalah kabinet terakhir yang dipimpin Masyumi, yang berhenti setelah pelaksanaan Pemilu 1955. Zaken Kabinet yang dipimpin oleh PM Juanda juga tidak memberikan keuntungan apa pun bagi Masyumi, apalagi kemudian presiden, dengan dukungan tentara, pada tahun 1959 membubarkan parlemen dan menyatakan kembali ke UUD 1945 dan menyerukan penerapan sistem Demokrasi Terpimpin.

Tindakan Soekarno, yang tidak melibatkan sama sekali wakil-wakil Partai Masyumi dalam badan-badan negara hasil bentukan rezim Demokrasi Terpimpin, tidak kemudian menyurutkan sikap Partai Masyumi untuk tetap vokal mengkritik atau beroposisi terhadap kepemimpinan Soekarno. Politik ideologi nasionalis, agama, komunis (Nasakom), yang sejak permulaan Demokrasi Terpimpin gencar dikampanyekan Soekarno, tidak luput dari serangan kritik dan penolakan dari Partai Masyumi. Partai Masyumi bersikukuh tidak mau menerima Nasakom karena tidak lain merupakan cara Soekarno untuk memaksakan masuknya komunisme ke segala lapisan negara dan kehidupan bangsa.

Sikap keras Partai Masyumi terhadap rezim Demokrasi Terpimpin membuat Soekarno pada akhirnya berada pada suatu kesimpulan bahwa langkah-langkah untuk menyingkirkan Partai Masyumi dari peta perpolitikan Indonesia harus segera disusun. Soekarno merasa perlu menggunakan cara-cara yang "legal konstitusi" dan sedikit campuran pembenaran dari "logika revolusi" untuk menyingkirkan partai tersebut sebab bagaimanapun Partai Masyumi adalah partai Islam terbesar yang memiliki potensi konstituen apabila membubarkan partai tersebut dengan cara-cara yang tanpa memiliki payung konstitusi di atasnya.

Presiden Soekarno pun membentuk suatu logika revolusi yang dipergunakannya untuk menyerang eksistensi Partai Masyumi, yaitu dengan membenturkan penolakan Partai Masyumi pada ide Nasakom. Soekarno menyatakan: "Siapa yang setuju kepada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila! Sekarang saya tambah: Siapa setuju kepada UUD 1945 harus setuju kepada Nasakom, siapa tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada UUD 1945."[94]

Partai Masyumi menyatakan sikap menolak terhadap ide Nasakom. Dengan begitu, secara tidak langsung Partai Masyumi masuk dalam kriteria yang ditetapkan pada Bab IX Pasal 9 dari Penpres No. 7/1959, yaitu sikap yang bertentangan dengan asas dan tujuan negara. Pertentangan antara Presiden Soekarno dan Partai Masyumi makin meruncing dengan adanya keterlibatan beberapa pemimpin partai tersebut dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakya Semesta (PRRI/Permesta). Beberapa tokoh teras partai ini, yakni Natsir, Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap bersama dengan beberapa tokoh PSI, menggabungkan diri ke dalam PRRI/Permesta sebuah "gerakan koreksi" terhadap pemerintah. Gerakan ini dapat dilihat sebagai sebuah puncak dari protes atas sikap pemerintah pusat yang dirasakan makin otoriter, Jawa-sentris, dan pro-komunis.[95] Atas dasar sikap beberapa tokoh teras itulah, pemerintah—dalam hal ini Presiden Soekarno—menuduh partai ini terlibat atau setidaknya menyetujui eksistensi PRRI/Permesta.[96] Setelah PRRI berhasil ditumpas, Presiden bergegas mengambil tindakan untuk melarang Masyumi dan PSI melakukan tindakan politik.

Pada 21 Juli 1960, Presiden Soekarno mengundang tokoh-tokoh dari Partai Masyumi ke Istana Bogor dan seminggu berikutnya pertemuan dilanjutkan kembali di Istana Merdeka, yakni untuk memenuhi undangan presiden yang meminta jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan yang diajukan Presiden kepada Partai Masyumi

[94] Zaini Muslim Ahmad, "Sikap Politik Soekarno terhadap Masyumi Tahun 1957–1960," (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2013), 77.

[95] R.Z. Leirissa, "PRRI: Membangun Indonesia Tanpa Komunis," *Tempo,* 14 Juli 2008.

[96] Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt. Sebuah Biografi*, 199–223.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sehubungan dengan dikeluarkannya Penpres No. 7/1959 yang diundangkan akhir tahun 1959. Selain Partai Masyumi, diundang juga tiga tokoh PSI yang mengemban topik permasalahan yang sama. Delegasi dari Partai Masyumi diwakili oleh Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito dan Sekretaris Umum Yunan Nasution.[97]

Partai Masyumi secara tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah. Partai Masyumi menolak segala tuntutan yang dituduhkan pemerintah bahwa Partai Masyumi mensponsori PRRI dengan berdasar pada keterlibatan Ketua Umum Partai Masyumi Natsir yang terlibat di dalamnya. Kedua tokoh ini menegaskan bahwa yang memimpin Partai Masyumi sekarang ini bukan lagi Natsir, tetapi Prawoto Mangkusasmito, dan yang ikut ke PRRI bukan mengatasnamakan partai, melainkan atas nama pribadi. Kepala Seksi Sekretariat Staf Peperti, Letkol Mr. Sutjipto, menerangkan bahwa Presiden Soekarno akan mengajukan persoalan Partai Masyumi dan PSI kepada Mahkamah Agung RI pada hari Minggu, 31 Juli 1960. Keterangan ini disampaikan oleh Letkol. Mr. Sutjipto pada Sabtu siang setelah selesai sidang ke-6 musyawarah Badan Pembantu Peperti yang berlangsung di Istana Bogor. Sidang tersebut dihadiri oleh pejabat MP Leimena mewakili Deputi 1 Peperti MP Djuanda, Deputi 2 MKN Jenderal Nasution, para anggota Badan Pembantu Peperti, Asisten dan Kepala Staf Peperti, serta Ketua Mahkamah Agung RI.[98]

Mengenai kehadiran ketua Mahkamah Agung pada waktu sebelum sidang dimulai Presiden telah memanggil wartawan dan mengatakan bahwa "Saya telah meminta Ketua Mahkamah Agung hadir dalam sidang ini untuk mendengarkan pembicaraan para anggota sidang, tetapi Mahkamah Agung dalam sidang ini tidak akan ikut mengeluarkan pendapat apa pun. Ketua Mahkamah Agung hanya akan mendengarkan saja." Dalam amanat ulang tahun ke-15 Proklamasi Kemerdekaan, Presiden Soekarno memberitahukan kepada rakyat bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia, sesudah mendengar

[97] Zaini Muslim Ahmad, "*Sikap Politik Soekarno terhadap Partai Masyumi 1957–1960*," Indonesian Journal of History Education, Juni (2013), 4–5.

[98] Zaini Muslim Ahmad, "Sikap Politik Soekarno", 5.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendapat Mahkamah Agung, ia memerintahkan bubarnya Masyumi dan PSI. Jika satu bulan setelah perintah ini diberikan Masyumi dan PSI belum dibubarkan, Masyumi dan PSI dinyatakan sebagai partai terlarang. Menurut Presiden, pembubaran partai Masyumi dan PSI adalah berdasarkan masalah Penpres No. 7/1959 dan Perpres No. 13/1960 yang sudah berjalan.[99]

Keputusan pembubaran Partai Masyumi dan PSI diumumkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi dalam pidato 17 Agustus 1960 di Istana Merdeka. Hal ini ditindaklanjuti dengan Keppres No. 200 Tahun 1960 tentang pembubaran Partai Masyumi dan Keppres No. 201 tahun 1960 tentang pembubaran Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pertimbangan pembubaran kedua partai tersebut ialah untuk kepentingan keselamatan negara dan bangsa karena telah melakukan pemberontakan. Pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan yang disebut dengan "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI/Permesta) atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan. Kedua partai tersebut tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinannya.[100]

Dari dua keputusan Presiden tersebut, secara langsung negara menekan Partai Masyumi untuk segera membubarkan diri jika tidak ingin dinyatakan sebagai partai terlarang. Meskipun menolak tuduhan itu—mengingat keterlibatan perorangan tidak dapat disamakan dengan keterlibatan lembaga—pada tahun 1960, Masyumi akhirnya menyatakan membubarkan diri.

Di pihak lain, Partai Masyumi sempat melawan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Mohammad Roem diberikan kuasa oleh Prawoto Mangkusasmito untuk menggugat perintah pembubaran itu. Gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Istimewa Negeri Jakarta tertanggal 8 September 1960.[101]

---

[99] Harian Abadi, 1 Agustus 1960.

[100] Nazaruddin Sjamsuddin, *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek* (Jakarta: CV Rajawali, 1998), 198–199.

[101] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban* (Yogjakarta: IRCiSoD, 1999), 149.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Namun, setelah hampir sebulan lebih surat gugatan itu dilayangkan tidak ada jawaban sama sekali dari pihak pengadilan. Baru pada 11 Oktober 1960, Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, Moh. Rochjani Soe'oed, menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Jawaban tersebut sudah terlambat atau didahului oleh sikap Partai Masyumi yang jauh sebelumnya telah menyatakan bubar.[102]

Bersandar pada hasil pemanggilan perwakilan Partai Masyumi ke istana dan melihat dari sikap mereka yang tetap keras mendebat pemerintah, Soekarno menilai Partai Masyumi tidak lebihnya seperti kekuatan kepala batu yang hanya akan merintangi jalannya revolusi Indonesia. Menurut logika revolusi Soekarno, Masyumi tidak patut lagi hidup dan harus dikorbankan demi revolusi.[103]

H. Upaya Merehabilitasi Masyumi

Setelah membubarkan diri tahun 1960, yang disusul dengan dipenjaranya beberapa tokoh Masyumi tanpa pengadilan—meskipun jelas tidak terlibat dalam PRRI/Permesta—praktis partai ini tidak banyak berperan pada masa transisi terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Upaya eksponen dan simpatisan Masyumi untuk menghidupkan kembali partai ini pun ditolak oleh rezim Orde Baru, bahkan disertai sebuah ancaman penangkapan.[104]

Padahal, harapan untuk kembali berdirinya Masyumi di masa Orde Baru sempat tumbuh. Dengan naiknya pemerintahan Orde Baru, banyak kalangan pemimpin dan aktivis politik Islam berharap besar. Harapan itu terutama tampak jelas di kalangan bekas pemimpin Masyumi dan pengikut-pengikutnya yang selama periode Demokrasi Terpimpin merasa benar-benar disudutkan. Karena merasa menjadi bagian penting dari kekuatan-kekuatan

[102] Maarif, *Islam dan Politik,* 150.

[103] Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 54.

[104] Deliar Noer, *Aku Bagian Umat, Aku Bagian Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1999), 602.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

koalisi, seperti militer, kelompok fungsional, kesatuan pelajar, organisasi sosial-keagamaan, dan sebagainya yang telah berhasil menghancurkan PKI dan menjatuhkan rezim Soekarno, mereka sudah memperkirakan kembalinya Islam dalam panggung diskursus politik nasional.[105]

Tindakan rezim Orde baru untuk membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang dipenjarakan oleh Soekarno makin memperbesar harapan mereka bahwa rehabilitasi Masyumi berlangsung tidak lama lagi. Manakala pembebasan itu mewujud, ini disambut dengan sebuah optimisme bahwa Masyumi akan segera direhabilitasi. Prawato Mangkusasmito menyatakan bahwa rasa syukur itu hendaknya diiringi dengan sebuah rehabilitasi Partai Masyumi. Beliau mengatakan:

> "Adapun keinginan yang sangat sederhana yang ada pada kami adalah supaya rehabilitasi multikompleks yang maha besar ini meliputi pula rehabilitasi alat perjuangan kami untuk dapat digunakan sebagai tambahan pengawal menyelamatkan jalannya konvoi rehabilitasi multikompleks tadi, selamat sampai kepada tempat yang sama-sama diidam-idamkan, yaitu negara yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah."[106]

Pidato itu merupakan isyarat akan kemungkinan dilakukannya rehabilitasi Masyumi. Oleh karena itu, sebuah panitia yang diberi nama Badan Koordinasi Amal Muslimin didirikan untuk merealisasikan harapan tersebut.[107] Namun, rupanya harapan tinggi itu tidak pernah tercapai karena pemerintahan rezim Orde Baru merasa keberatan atas kembalinya pemimpin-pemimpin Masyumi ke pentas politik nasional sekaligus menolak rehabilitasi Masyumi dengan didasari kekhawatiran-kekhawatiran lain jika Masyumi di-

[105] Al Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Darul Falah, 1998), 32.

[106] Soemarsono, "Pengalaman dari Tiga Pendjara" dalam *Biografi Muhamamd Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*,ed. Lukman Hakiem (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 504.

[107] Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Ode Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), 37.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rehabilitasi. Sikap Orde Baru, yang diwakili oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto, dengan tegas menolak rehabilitasi Masyumi. Soeharto mengatakan, "Alasan-alasan Yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis telah membawa ABRI kepada satu pendirian bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi partai politik Masyumi."[108] Meskipun demikian, Soeharto menjamin hak-hak demokrasi individu bekas anggota Masyumi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal itu tidak mengherankan karena ABRI, sebagai pilar penting berdirinya Orde Baru, pada tanggal 21 Desember 1966, mengeluarkan pernyataan yang menyamakan Masyumi (sebagai ekstrem kanan) dengan PKI (sebagai ekstrem kiri).[109] Tentu saja ini merupakan sebuah kesimpulan yang sangat tidak berdasar dan ahistoris. Para pendukung Masyumi hanya diberikan kesempatan oleh Jenderal Soeharto untuk membentuk partai bernama Parmusi—singkatan dari Partai Muslimin Indonesia—dengan syarat tidak lagi melibatkan tokoh-tokoh lama Masyumi.[110] Terkait dengan keberadaan tokoh-tokoh Masyumi, Soeharto mengatakan, "Karenanya, untuk mempercepat kelahiran partai ini (Parmusi), tokoh-tokoh Masyumi, baik di pusat maupun di daerah, yaitu pemimpin-pemimpin pada waktu Masyumi dibubarkan, hendaknya sekarang tidak usah muncul. Mereka itu boleh memimpin di belakang layar. Namun, untuk masa mendatang, apabila partai memanggil kongres dan pemimpin-pemimpin Partai Masyumi terpilih, hal itu merupakan masalah intern partai. Pada waktu itu, saya tidak akan campur tangan. Akan tetapi, sekarang sayalah orang yang bertanggung jawab."[111] Rezim Orde Baru pun mengesahkan pendirian Parmusi sebagai wadah aspirasi politik umat Islam yang belum tertampung di dalam NU, PSII, Perti, dan

[108] Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*, 506.

[109] Faisal Islamil, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tira Wacana, 1999), 122.

[110] Lihat pendirin Parmusi dalam Kenneth Ward, *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia* (Ithaca: Cornell University, 1970).

[111] Lukman hakiem, *Biografi Mohammad Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2019), 510.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Golkar, tetapi dengan kontrol yang sangat ketat oleh pemerintah dan ABRI.[112]

Untuk selanjutnya, gerak politik para bekas pemimpin Masyumi sangat diawasi dan dibatasi, bahkan sama sekali dilarang duduk dalam kepengurusan Parmusi. Untuk membatasi gerak politik bekas para pemimpin Masyumi, pemerintah melalui Presiden Soeharto merekomendasikan Djarnawi H. dan Lukman Harun sebagai pemimpin Parmusi.[113] Dalam perjalanannya, ternyata campur tangan pemerintah menjadi suatu yang kerap ditemui oleh partai ini. Seperti halnya ketika kongres yang pertama di Malang, terpilih Mohammad Roem sebagai ketua partai, tetapi tidak disetujui oleh rezim. Bahkan, rezim Orde Baru bisa mengganti pimpinannya kapan saja sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Sejak itu, muncul banyak kelompok oportunis di dalam tubuh partai ini.[114]

Dalam perkembangannya—didorong oleh kekhawatiran Parmusi dapat berkembang menjadi kekuatan alternatif yang ditandai dengan munculnya cabang-cabang Parmusi di seluruh Indonesia secara serempak—pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, mendukung manuver politik Jaelani Naro S.H. bersama Imran Kadir untuk melakukan pembajakan partai, yaitu dengan menuduh Parmusi bersikap menentang ABRI. Akibatnya, timbul kemelut dan pemerintah pun menunjuk H.M. Mintareja sebagai Ketua Umum Parmusi yang baru. Tindakan Naro selanjutnya berusaha menyingkirkan orang-orang "Bulan Bintang" sekaligus menarik massa pendukungnya.[115]

Pada masa Orde Baru yang menerapkan sistem otoritarian, partai-partai cenderung mengalami tekanan berat. Rezim dengan kendaraan politik Golkar dan di-*back-up* oleh ABRI itu telah me-

[112] Abdul Munir Mulkan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat 1965–1987* (Jakarta: Rajawali, 1998), 132.

[113] Al Chaidar, *Reformasi Prematur. Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, 32.

[114] M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 111.

[115] Mulkan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat 1965–1987*, 133.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nerapkan empat metode: (1) memberi peran dan posisi khusus pada ABRI, tidak hanya sebagai kekuatan keamanan, tetapi juga kekuatan sosio-politik; (2) memperlakukan Golkar sebagai anak emas; (3) meluncurkan kebijakan sistematis depolitisasi semua kekuatan sosial-politik; dan (4) mengisi Badan Perwakilan negara dalam dua cara, yaitu dengan penunjukan wakil-wakilnya dari atas dan dengan memilih mereka melalui pemilihan umum.[116]

Usaha-usaha pemerintah rezim Orde Baru untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu 1971, antara lain dengan mengharuskan semua pegawai negeri sipil untuk memilih Golkar. Semua pegawai negeri sipil tanpa kecuali diharuskan menjadi anggota Sekber Golkar.[117] Didorong oleh kemenangan besar Golkar, pemerintah melalui operasi khusus (opsus) mempercepat program penyederhanaan partai politik. Melalui kebijakan itulah, pada tahun 1973, Parmusi dilebur oleh rezim Orde Baru ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama dengan NU, PSII, dan Perti.

Saat terjun langsung dalam dunia politik terasa semakin sulit akibat intervensi pemerintah Orde Baru, beberapa kader dan pendukung Masyumi merintis terbentuknya wadah perjuangan baru. Natsir dan beberapa teman dekatnya, seperti Prawoto, Kasman Singodimejo, dan Junan Nasution, membentuk ormas yang berkomitmen untuk berpolitik melalui dakwah.[118]

Dalam hal ini, Natsir tidak mengikuti jejak rekan-rekannya yang bergabung dengan partai politik. Menurutnya, berkecimpung di lapangan politik merupakan bagian dari ibadah dan dakwah. Akan tetapi, apabila ia tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah dan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar sehingga ia kemudian mengubah jalur dakwahnya. Dengan demikian, sesuai dengan motonya, yaitu apa-

[116] Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 112.

[117] Albert Widjaja, *Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1982), 96.

[118] Mengenai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia lihat misalnya, Thohir Luth, *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 53–62.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bila dahulu ia menjalani "dakwah lewat jalur politik", sekarang ia "berpolitik lewat jalur dakwah". Untuk mewujudkan tujuan dakwahnya tersebut, ia mendirikan organisasi dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 26 Februari 1967.[119]

Kecintaan Natsir terhadap negara Indonesia tidak pernah berkurang. Natsir dan para pemimpin Masyumi lainnya tidak putus asa dan duduk "berpangku tangan". Mereka sepakat untuk mencari cara dan strategi baru untuk memperjuangkan Islam. Salah satunya dengan memutuskan untuk aktif di dunia dakwah. Menurut Natsir, politik bukanlah jalan satu-satunya untuk berdakwah. Natsir mengubah haluan politiknya menjadi aktif dalam bidang dakwah dengan mendirikan lembaga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.[120] Hadirnya Dewan Dakwah atau DDII menjadi suatu terobosan baru di Indonesia. DDII yang didirikan oleh para pemimpin Masyumi masa lalu memiliki visi pemahaman Islam totalitas yang berakar pada sejarah umat Islam.[121]

DDII menjadi salah satu ormas Islam yang disegani, terutama hingga tahun 1990-an. Meskipun domain penyebaran aktivitas eks-Masyumi sebenarnya demikian luas, DDII kerap dianggap sebagai penerus[122] atau diidentikkan dengan Masyumi. Hal ini mungkin disebabkan oleh keberadaan Natsir dan beberapa tokoh utama Masyumi yang aktif di dalamnya. Selain itu, hal tersebut juga mungkin disebabkan oleh bekas markas besar Masyumi digunakan kembali sebagai kantor resmi DDII untuk beraktivitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan DDII menandai berakhirnya upaya untuk membangkitkan lagi Partai Masyumi pada era Orde Baru.

---

[119] Wildan Hasan, "Berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia." *RT,* 27 Agustus 2023, *http//www.dewandakwah.com*.

[120] Tian Anwar Bachtiar. *Setengah Abad Dewan Da'wah Berkiprah Mengokohkan NKRI* (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2017), 85–86.

[121] Mas'oed Abidin. *Gagasan dan Gerak Dakwah Natsir* (Yogyakarta: GRE Publishing, 2012), 15.

[122] Luth, *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*, 55.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 3

PANDANGAN MASYUMI TENTANG NEGARA IDEAL: POSISI IDEOLOGI DAN PENJABARANNYA

Masyumi adalah partai yang digerakkan oleh pandangan atau ideologi politik Islam, tidak terkecuali dalam mengambil sikap dan kebijakan, termasuk dalam merespons pluralisme. Bagian ini akan mengetengahkan pandangan mendasar Masyumi terkait dengan pluralisme. Untuk itu, akan disampaikan pandangan Masyumi atas peran Islam dalam kehidupan politik sebagai landasan ideologis pemikiran dan sikap partai ini secara umum. Selanjutnya, akan diketengahkan pandangan Masyumi tentang negara yang ideal. Di sini akan dilihat apakah semangat pluralisme itu ada dalam model negara yang dicita-citakan Masyumi. Pada bagian terakhir akan dibahas pandangan normatif Masyumi terhadap pluralisme itu sendiri.

A. Masyumi dalam Spektrum Ideologi Politik di Indonesia

Masyumi tumbuh di era ketika politik Indonesia didominasi oleh politik aliran. Pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, salah satu karya besar yang berpengaruh dalam kajian politik aliran adalah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kajian Clifford Geertz dalam *magnus opus*-nya, *the Religion of Java* (Geertz, 1960). Geertz membagi tipologi aliran dalam masyarakat Jawa yang mencerminkan ideologi politik mereka menjadi tiga, yakni santri, priayi, dan abangan. Menurut Geertz (1960), mereka yang cenderung masuk dalam kebudayaan santri berorientasi pada partai-partai Islam, seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), atau Partai Nahdlatul Ulama (PNU).

Adapun mereka yang berorientasi priayi mempunyai kecenderungan kuat untuk memilih partai-partai non-agama yang kental bernuansa kejawen dan "berbudaya tinggi", seperti Partai Nasional Indonesia (PNI). Adapun mereka yang termasuk dalam kategori abangan (merah) akan memiliki orientasi kepada partai non-agama dan berkarakter populis, seperti Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) yang sangat menolak peran agama Islam dalam segenap aspek kehidupan. Akibat pandangan ini, kaum abangan kerap juga terhubung atau bersimpati dengan gerakan komunis.[123]

Hampir bersamaan dengan studi Geertz, Robert R. Jay dalam bukunya juga mengembangkan kajian mengenai budaya politik. Di sini, dia melakukan pembelahan kultur politik menjadi dua kelompok, yakni "ortodoksi" (santri) dan "sinkretis" (abangan).[124] Kalangan ortodoksi merupakan kalangan yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Islam, sedangkan sinkretis adalah mereka yang memadukan antara ajaran-ajaran Hindu-Buddha dan Islam. Jay meyakini bahwa perkembangan politik Indonesia merupakan arena pertarungan antara kedua kelompok itu. Konflik internal di dalam tubuh Sarekat Islam (SI), misalnya, dilukiskan oleh Jay sebagai pertarungan antara dua kelompok itu, yang tercermin antara SI-Putih dan SI-Merah dalam berbagai variannya yang kemudian terus berlangsung hingga Republik Indonesia ini berdiri.

---

[123] Lihat Firman Noor, "Perilaku Politik Pragmatis dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian atas Menyurutnya Peran Ideologi di Era Reformasi", *Masyarakat Indonesia* 40, no. 1, (2014), 59.

[124] Robert R. Jay, "Religion and Politics in the Rural Central Java", *Cultural Research Series No. 12*, Southeast Asian Studies, Yale University, 1963.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Salah satu buku suntingan Herbert Feith dan Lance Castles juga dengan baik menggambarkan hal ini.[125] Pada masa itu, terdapat beberapa aliran-aliran besar di antaranya adalah modernisme Islam, tradisionalisme Islam, nasionalisme-radikal, sosialisme, dan komunisme. Beberapa aliran lainnya, seperti jawanisme, Kristen, dan Katolik juga ada, meskipun tidak cukup mampu berperan signifikan. Aliran-aliran itu kemudian berkembang cukup subur. Satu aliran dapat saja menginspirasi beberapa partai politik, ormas, dan demikian banyak simpatisan. Lihat Gambar 3.1.

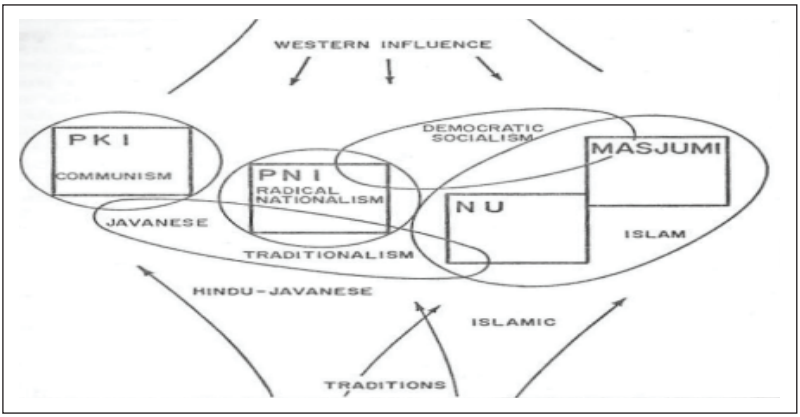

Sumber: Herbert Feith dan Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945–1965* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1970)

Gambar 3.1 Peta Aliran Pemikiran Politik Indonesia (1945–1965)

Kajian Feith dan Castles ini mengindikasikan fenomena politik aliran yang demikian mendominasi dan mewarnai hampir semua aspek kehidupan politik saat itu. Hidup matinya partai politik sedikit-banyak ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Pembubaran Masyumi dan PSI pada tahun 1960, misalnya, menjadi bukti bagaimana kerasnya pertarungan ideologi yang ada. Nuansa ideologis juga terlihat kental dengan adanya perdebatan mengenai

[125] Herbert Feith & Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945–1965* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1970), 57.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

landasan negara di badan konstituante antara partai-partai yang setuju negara berlandaskan nilai-nilai Islam (tergabung dalam faksi Islam) dan negara berdasarkan Pancasila.[126]

Dalam nuansa demikian, kontestasi ideologi menjadi tidak terhindarkan. Tiap-tiap pihak berupaya menjalankan kepentingan ideologisnya. Perang wacana menjadi hal yang biasa terjadi. Saling serang dan menyurutkan atas pandangan politik kerap dilontarkan oleh masing-masing kontestan. Kajian mendalam oleh Mestenhauser tentang kontestasi ideologi di Indonesia pada masa itu memperlihatkan bagaimana tiap partai dan ormas menjadikan ideologi sebagai tumpuan untuk melakukan kegiatan yang berujung pada sebuah kontestasi.[127] Di sisi lain, partai-partai itu kerap melakukan penyesuaian agar dapat lebih diterima oleh masyarakat. Mereka menyadari bahwa tidak semua pandangan politik mereka dapat diterima oleh kalangan umum, apalagi lawan-lawan politiknya. Demi kepentingan tersebut, mengembangkan dan menjalankan pemikiran dan sikap moderat—termasuk sikap untuk lebih terbuka dan mau bekerja sama dengan berbagai kelompok politik—adalah sebuah pilihan politik yang kerap diambil oleh partai-partai.

Sikap ini kerap dianggap sebagai sebuah strategi politik semata. Kajian Daniel Pippes, misalnya, sampai pada kesimpulan bahwa setelah memenangkan sebuah kontestasi politik, bisa jadi moderasi atau sikap moderat sebuah partai Islam itu akan lenyap digantikan oleh karakter fundamentalis.[128] Dalam nuansa ini sikap untuk menghargai pluralisme sebenarnya hanya sekadar "kedok" sementara yang menutupi cita-cita sesungguhnya. Terkait dengan Masyumi, kajian Madinier, misalnya, mengindikasikan bahwa setelah tidak mampu mewujudkan keinginan menjadi partai terbesar di Indonesia dan membawa Indonesia menjadi negara berdasarkan semangat dan

[126] Herbert Feith & Lance Castles, *Indonesian Political Thinking*, 60.

[127] Josef A. Mestenhauser, "Ideologies in Conflict in Indonesia, 1945–1955" (*Disertasi*, University of Minnesota, 1960).

[128] Daniel Pippes, *In the Path of God: Islam and Political Power* (New York: Basic Books, 1983).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hukum Islam secara moderat, Masyumi muncul dengan raut wajah yang sesungguhnya yakni, eksklusif dan kaku.

Selain itu, kepentingan untuk tetap eksis dan bahkan berkuasa dalam ranah politik memaksa partai-partai politik untuk mau tidak mau mengambil pilihan-pilihan kompromistis. Sebagai konsekuensinya, partai kerap muncul dengan tampilan moderat, toleran, dan mau mengakomodasi kepentingan pihak-pihak lain. Dalam kepentingan politik ini, sikap pengakuan dan pemberian akses bisa jadi hanya merupakan ekses atau konsekuensi saja dari kebutuhan-kebutuhan pragmatis untuk berkuasa.

Sungguhpun demikian, pilihan untuk menjadi moderat dan menghargai pluralisme dapat juga bersifat ideologis. Artinya, ini bukanlah pilihan pragmatis, melainkan sebuah keharusan ideologis. Sebagaimana yang dapat terlihat dari pembahasan sebelumnya, aspek normatif yang dianut oleh Masyumi cenderung mengarah pada pilihan untuk tidak ada paksaan dalam agama dan bersedia bekerja sama dengan semua golongan. Artinya, pandangan atau ideologi politik Masyumi mengisyaratkan sebuah penghormatan terhadap pluralisme.

Di samping itu, meskipun kerap melakukan kompromi, Masyumi juga dikenal teguh dan konsisten dalam meyakini apa yang dianggapnya baik. Ada beberapa hal yang bersifat tidak dapat dikompromikan bagi Masyumi, yakni dalam persoalan penegakan demokrasi (pluralisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya) dan sikap anti-komunis. Dua kepentingan itu tidak pernah berubah sedikit pun, yang belakangan justru dianggap oleh banyak kalangan sebagai sikap keras kepala yang membawa kehancuran bagi partai ini sendiri.

B. Tipologi Pemikiran Politik Islam Masyumi

Dalam kajian pemikiran politik Islam, terdapat dua polarisasi kecenderungan dalam melihat hubungan negara dan agama. Yang pertama, negara dilihat tidak berhubungan dengan agama seperti gagasan Ali Abd. Al-Raziq di Mesir dan yang kedua, agama dikait-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kan dengan negara. Yang terakhir ini, berimplikasi bahwa nilai-nilai agama dapat dijadikan panduan dalam perumusan kehidupan berbangsa dan bernegara.[129]

Dunia Islam tidak pernah surut dalam perdebatan tentang hubungan agama dengan negara. Beragam pengalaman negara Islam di dunia dalam mengaplikasikan hubungan antara agama dan negara telah menjadi contoh nyata yang bisa dipelajari. Dari hubungan negara yang bersifat terintegrasi dengan mendirikan negara Islam seperti di beberapa negara Timur Tengah hingga pengalaman Turki pada masa Kemal Pasya yang lebih bersifat memisahkan urusan agama dengan negara. Akhirnya, Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan kenegaraan.

Pandangan mengenai hubungan antara agama dan negara di kalangan pemikir Islam setidaknya dapat dikategorikan ke dalam tiga arus besar. *Pertama*, mereka berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu. Agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian: (1) Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula, antara lain, sistem kenegaraan atau politik. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat; dan (2) sistem ketatanegaraan atau politik islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. dan oleh empat Al-Khulafâ Al-Rasyidîn. Ulama-ulama utama yang memiliki pandangan seperti ini, antara lain, Syekh Hasan Al Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridhâ, dan yang paling vokal adalah Abul A'la Al-Maududi.

[129] Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), 138–139.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sehubungan dengan itu, Abul A'la Al-Maududi menegaskan bahwa ajaran Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan yang diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw. dengan membangun negara Madinah memiliki sembilan ciri khas sebagai berikut:

1) Negara berdasarkan kekuasaan perundang-undangan Ilahi, yakni kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah Swt., dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khilafah atau perwakilan.
2) Keadilan antarmanusia, yakni tumpuan bangunan negara bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka.
3) Persamaan di antara kaum muslimin, yakni semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna tanpa memandang warna, suku, bahasa, atau tanah air.
4) Tanggung jawab pemerintah, yakni pemerintah dan kekuasaannya serta kekayannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang beriman, bersifat adil dan benar.
5) Permusyawarahan, yakni keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridaan mereka, mengikuti pendapat mereka, serta melaksanaan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah.
6) Ketaatan dalam hal kebajikan, yakni kewajiban menaati pemerintah dalam hal-hal yang baik saja.
7) Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, yakni bahwa orang-orang yang mengejar jabatan-jabatan kepemimpinan di dalam pemerintahan, serta berdaya upaya untuk itu, mereka sesungguhnya adalah orang yang paling sedikit keahlian dan kelayakan.
8) Tujuan adanya negara, yakni menegakkan kehidupan islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti.
9) *Amar makruf nahi mungkar*, yakni setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, bahkan wajib membela kebaikan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan mempertahankannya, berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencegah kemunkaran.[130]

Pandangan atau aliran yang *kedua* mengemukakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut pandangan ini, Nabi Muhammad saw. hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ulama atau tokohnya adalah 'Âli Abd. Al-Râziq dan Thâha Husain.

Menurut 'Âli Abd. Al-Râziq bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan khilâfah itu tidak perlu karena risâlah atau misi kenabian dengan pemeritahan memiliki perbedaan. Risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara.[131] Selanjutnya, Thâha Husein menjelaskan bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali bukan dengan jalan kembali pada ajaran Islam yang lama dan juga bukan mengadakan reformasi atau pembaruan ajaran Islam, melainkan dengan perubahan-perubahan total yang bernafas liberal dan sekuler dengan berkiblat ke Barat. Dia juga menegaskan bahwa dari awal sejarah Islam, agama dan negara selalu terpisah.[132]

Pandangan atau aliran yang *ketiga* menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Pandangan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Pandangan ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ulama atau tokohnya yang terkenal, antara lain, Muhammad Husain Haikal.

---

[130] Abû al-A'lâ al-Mawdûdi, *al-Khilâfah wa al-Mulk* (Kuwait: Dâr al-Kalam, 1398 H/ 1978 M), 93–106.

[131] Syadzali, *Islam dan Tata Negara,* 16–17.

[132] Syadzali, *Islam dan Tata Negara,* 138.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menurut Muhammad Haikal, kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru dimulai pada waktu Nabi Muhammad saw. berhijrah dan menetap di Madinah. Di tempat yang baru itulah, Nabi Muhammad saw. berdasarkan wahyu-wahyu meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha, dan jual-beli. Tentang apakah ajaran Islam lebih dekat dengan sistem republik daripada sistem kerajaan, Haikal menyatakan bahwa memang khalifah pada periode pertama Islam itu dibaiat berdasarkan musyawarah dan tidak selalu melalui pemilihan langsung. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat dikatakan serupa dengan sistem parlementer atau sistem perwakilan. Dengan pembaiatan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifah tersebut lebih dekat dengan kedudukan presiden daripada kedudukan raja.[133]

Dari tiga arus besar pemikiran Islam terkait hubungan negara dan agama itu, bisa dikatakan bahwa pandangan Masyumi lebih condong pada arus pemikiran ketiga. Mereka berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Bagi Masyumi, Islam merupakan petunjuk hidup sekaligus merupakan ajaran komprehensif yang mencakup berbagai persoalan kehidupan manusia. Masyumi meyakini bahwa Islam merupakan sebuah ajaran yang memberikan landasan yang kuat bagi umatnya untuk berkecimpung dalam dunia politik. Islam bukanlah sebuah agama privat yang hanya mengatur ibadah kepada Tuhan dan bertujuan membangun "kesalehan individual" semata, melainkan juga agama yang mengisyaratkan kepada para pemeluknya untuk membangun "kesalehan sosial" dengan terlibat dalam kehidupan sosial dan politik untuk membangun pemerintahan yang dapat menopang tegaknya nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.[134]

---

[133] Muhammad Husain Haikal, *al-Hukûmah al-Islâmiyah* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1983),17–18.

[134] Rahmah Eljunisiah & Dr. H. Kaharudin Yunus, *Djalan Lurus dalam Pendidikan Putera/Puteri, Agama dan Ekonomi*, dikemukakan kepada seluruh warga Negara Indoensia umumnja, chususnja kepada para kongresisten Masjumi jang ke-8, Desember 1956 di Bandung, (Jakarta: Fikiran Baru, 1956), 35.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pandangan Natsir sebagai Ketua Umum Masyumi menebalkan kedudukan ajaran Islam itu yang baginya Islam bukanlah agama semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti salat dan puasa, tetapi agama yang meliputi semua kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, menurut Natsir, untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah saw. kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa, yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh Al-Qur'an itu".[135]

Begitu pula pesan yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad. Masyumi percaya bahwa nabi telah memberikan pesan yang jelas agar umat Islam dapat membangun sebuah peradaban yang islami, dengan turut memegang tampuk pemerintahan atau setidaknya terlibat secara langsung dalam sebuah pemerintahan. Nabi Muhammad tidak menganjurkan umatnya bersifat pasif dalam dunia politik karena dirinya juga terlibat penuh dalam urusan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat secara langsung. Nabi adalah pemimpin negara yang dibantu oleh para sahabatnya dalam mengatur masalah kenegaraan. Umat Islam harus berpedoman terhadap cara-cara rasulullah dalam mengatur masyarakat. Dalam "Tafsir Asas Masyumi" disebutkan bahwa umat Islam harus mengikuti perintah Alllah dan "*berpedoman kepada tjaranja Rasulullah saw. melaksanakan perintah-perintah dan peraturan2 Allah itu dengan mengingat keadaan dan masanja*".[136]

Atas dasar berbagai pemikiran itulah, keterlibatan umat Islam dalam politik bagi Masyumi adalah sebuah keharusan. Tugas umat Islam adalah menjalankan semua petunjuk yang terkait dengan kehidupan politik, yang dalam bentuk konkretnya adalah

[135] Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Media Dakwah, 2000), 4.

[136] "Tafsir Asas Masyumi", dalam *Pedoman Perdjuangan Masjumi*, cetakan ke-2, (Jakarta: Partai Masjumi Bagian Keuangan, 1955), 40.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menegakkan sebuah sistem pemerintahan atas dasar nilai-nilai dan hukum Islam.[137] Dalam pandangan Masyumi, hanya melalui sistem seperti itulah umat Islam dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan perintah agama.

Dengan berbagai pandangan di atas, dapat dipahami bahwa Masyumi menolak segala bentuk pemisahan agama dan politik. Masyumi dengan tegas menolak cara pandang sekularisme dalam politik. Sikap ini menyebabkan Masyumi kerap berseberangan dengan kelompok-kelompok politik yang memisahkan agama dengan politik, termasuk kelompok nasionalis, sosialis, dan terutama komunis. Sikap menentang komunisme—sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya—adalah tidak saja karena komunisme memisahkan antara agama dan politik, tetapi juga anti terhadap agama atau anti kepada Tuhan. Dengan keyakinan ini, jelas persoalan negara juga termaktub di dalam ajaran Islam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Natsir bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral, bahkan simbiosis, yaitu saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral. Natsir bersikukuh mengajukan konsep Islam sebagai dasar negara bukan semata-mata karena umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, tetapi menurut keyakinannya, ajaran Islam mempunyai hukum ketatanegaraan dalam masyarakat dan mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat, serta dapat menjamin hidup keragaman atas saling menghargai di antara pelbagai golongan di dalam negara.

Salah satu surat yang kerap disitir Natsir untuk menguatkan argumennya dalam memperlihatkan ketegasannya tentang hubungan Islam dan negara yang tidak bisa dipisahkan adalah surah Adz-Dzariat ayat 56 yang menyatakan, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada Ku".[138]

---

[137] Lihat "Tugas dan Kewajiban Masjumi," dalam *Pedoman Perdjuangan Masjumi,* 45–46.

[138] *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 56.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan firman Allah ini, M. Natsir mengembangkan teorinya dengan menyatakan, "Seorang muslim hidup di dunia ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dalam arti yang sesungguhnya,[139] yang berasaskan Al-Qur'an dan sunah. Asas berarti rumusan cita-cita dan motivasi tempat bertolak, sumber inspirasi, dan kekuatan.[140] Dunia dan akhirat tidak mungkin dipisahkan bagi kaum muslimin dari ideologi mereka.

Walaupun menyatakan adanya hubungan integral antara agama—dalam hal ini Islam—dan negara, tetapi Natsir juga tidak memungkiri bahwa Islam tidak menentukan sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Pandangan itu terlihat ketika golongan sekuler memberikan pertanyaan bagaimana mungkin Islam dapat mengatur negara modern seperti saat ini. Al-Qur'an memberikan petunjuk-petunjuk untuk merancangkan anggaran belanja negara. Menurut Natsir, itu semua memang tidaklah ada dan memang tidak perlu diatur dengan wahyu Ilahi yang bersifat kekal sebab hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan selalu bertukar dan berubah menurut tempat, zaman, dan keadaannya. Islam hanya mengatur dasar dan pokok-pokok mengatur masyarakat manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan dan keperluaannya selama manusia itu masih bersifat manusia.

C. Peran Islam dalam Kehidupan Politik dan Kenegaraan

Platform Masyumi sebagai partai berasaskan Islam telah diputuskan sejak pertama kali didirikan dengan dicantumkannya "asas Islam" dalam AD/ART partai serta tujuan partai disebutkan hendak membentuk negara "berkedaulatan rakyat" serta "persamaan hak" yang bersifat modern demokratis berdasarkan "Prinsip-prinsip Islam".[141]

[139] Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, 3.

[140] Mohammad Natsir, *Indonesia di Persimpangan Jalan* (Jakarta: PT Abadi, 1994), 15.

[141] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Islam: Perbandingan Partai Masyumi,* 74–75

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rumusan resmi program politik Masyumi menyebutkan bahwa partai itu menghendaki Indonesia menjadi negara hukun yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sebuah negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut sebagai *negara Islam* ataupun *berdasarkan Islam*, tetapi negara itu disusun *sesuai dengan ajaran-ajaran Islam*, baik dalam teori maupun praktiknya. Dasar negara dapat dirumuskan dengan klausal-klausal yang bersifat umum sepanjang mencerminkan kehendak-kehendak Islam.[142]

Masyumi memandang keterlibatan secara langsung dalam jabatan-jabatan kekuasaan negara adalah suatu jalan strategis untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Dengan cara demikian, kata salah seorang tokoh Masyumi, "Hukum-hukum Allah tidak saja keluar dari mulut alim ulama di atas mimbar masjid-masjid, tetapi juga keluar dari pejabat-pejabat pemerintahan dan menjadi undang-undang negara".[143]

Pemikiran modern Islam secara umum mendapatkan berbagai macam pengaruh dan kemudian mereproduksinya agar sesuai dengan Islam sepanjang dalam konteks muamalat atau bukan akidah, dapat ditemukan dalam program-program partai Masyumi. Program-program yang menjadi cerminan prinsip yang dipakai Masyumi dapat kita lihat dalam program-program berikut.

Pertama, demokrasi. Oleh pengikut pemikiran modern Islam, agama Islam diyakini dan diterima sebagai ajaran yang mempunyai sifat universal dan berlaku sepanjang zaman bagi umat manusia. Jadi, dalam tatanan kehidupan, petunjuk-petunjuk yang diberikan bersifat umum. Hal ini dianggap sebagai kebijaksanaan Sang Pencipta, agar Islam mampu mengahadapi tantangan zaman yang mengalami perubahan terus-menerus. Ini kemudian mendorong digalakkannya ijtihad atau berkembangnya pemikiran baru, serta bersikap fleksibel dengan pemikiran dari peradaban lain di dunia.[144]

---

[142] Sjafruddin Prawiranegara, *Islam dalam Pergolakan Dunia*, (Bandung: Al Ma'arif, 1950), 51–53.

[143] Zainal Abidin Ahmad, *Masjoemi: Partij Politiek Islam Indonesia*, (Pematang Siantar: Tanpa penerbit, 1946), 15–16.

[144] Yusril Ihza Mahendra, *Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, Buku 3. (Jakarta: Pro Deleader, 2016), 215–216.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemahaman di atas menjadikan banyak persoalan, termasuk soal kenegaraan, seperti gagasan atas demokrasi, diadaptasikan ke dalam rumusan-rumusan yang dibuat kemudian. Seiring arus demokrasi yang sedang berkembang antara tahun 1940–1960 di negara-negara demokrasi liberal, demokrasi dianggap mewakili kebebasan yang sesuai dengan yang diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Untuk dapat disebut negara demokrasi, setidaknya sebuah negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi diantaranya adalah kedaulatan di tangan rakyat serta pemilihan umum.[145]

Dengan latar belakang pemikiran di atas, Masyumi kemudian merumuskan patokan-patokan dalam prinsip resmi yang menjadi pedoman partai mengenai demokrasi yang diinginkan Masyumi. Dalam "Tafsir Asas Masyumi", disebutkan pada bagian tugas dan wewenang, Masyumi mengungkapkan keinginan untuk membentuk negara yang kekuasaannya atas dasar musyawarah dan menggunakan kaidah-kaidah kedaulatan rakyat dan negara demokrasi berbentuk republik.[146]

Dalam pemahaman Masyumi, demokrasi yang patut dikembangkan adalah demokrasi yang memberikan kebebasan bagi rakyat untuk mengemukakan ekspresi dan kepentingannya. Hak rakyat itu tidak boleh dibatasi. Atas dasar itu, menurut Natsir, negara demokrasi tidak identik dengan negara teokrasi karena teokrasi adalah satu sistem kenegaraan di mana pemerintahan dikuasai oleh satu kependetaan yang mempunyai sistem hierarki, sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam, tidak dikenal sistem semacam itu. Lebih lanjut, M. Natsir berpendapat bahwa demokrasi yang dikehendaki Islam hampir sama dengan demokrasi liberal. Hanya saja, demokrasi Islam berpedoman pada asas-asas doktrin yang diwahyukan Allah yang disebut Natsir dengan istilah "*theistic democracy*", yaitu demokrasi yang berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Jadi, negara yang

[145] Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1988), 19–31.

[146] Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi* (Jakarta: Masyumi Bagian Penerangan, 1954), 57–71.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berdasarkan Islam bukanlah satu negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara demokrasi.[147]

Pemikiran Natsir itu setidaknya sejalan dengan Maududi, yang menyebutkan bukan negara teokrasi, melainkan teo-demokrasi. Di mana menurutnya sistem ini tidak sama dengan sistem teokrasi yang pernah diterapkan oleh dunia Kristen. Dalam sistem teo-demokrasi, kaum muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di bawah pengawasan Tuhan.[148]

Di sisi lain, menurut Natsir Islam menganut paham *theistic democracy*.[149] Yang berarti demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. *Theistic* berasal dari bahasa Yunani, *theos* yang berarti 'Tuhan', yaitu keyakinan yang bertentangan dengan ateisme yang mendasarkan kepercayaaan pada tidak adanya Tuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *theistic democracy* adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan atau suatu negara demokrasi Islam. Gagasan *theistic democracy* tersebut dijelaskan oleh Mohammad Natsir dalam sidang konstituante:

> "Apakah sekarang negara yang berdasarkan Islam seperti itu satu negara *theocratie*? *Theocratie* adalah satu sistem kenegaraan di mana pemerintahan dikuasai oleh satu *priesthoad* (sistem kependetaan), yang mempunyai *hierarcheie* (tingkat bertingkat) dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal *priesthood* semacam itu. Jadi, negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu negara *theocratie,* ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekuler seperti yang telah saya uraikan lebih dahulu. Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah,

[147] Saidan, *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Antara Hasan Al-Banna dan Mohammad Natsir* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 79.

[148] Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* (Jakarta, Bandung: Mizan, 1998), 160.

[149] Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 223.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> saudara ketua, orang hendak memberi nama umum juga, maka barangkali negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut *Theistic Democracy*".[150]

Selain itu, meskipun menggunakan kaidah kedaulatan rakyat, demokrasi yang diusung Masyumi memiliki perbedaan dengan demokrasi yang diusung marxisme yang berfokus pada bentuk kediktatoran proletar yang dihasilkan dari pertentangan dengan dengan jalan revolusi ataupun demokrasi liberal Barat yang bersifat sekuler dengan memisahkan agama dan pemerintahan. Kedaulatan rakyat dipahami Masyumi sebagai kedaulatan rakyat yang diamanahkan Tuhan.

Oleh karena itu, dalam draf konstitusi yang diajukan di Sidang Konstituante Republik Indonesia, pasal 3 mengenai kedaulatan negara, Masyumi berprinsip kedaulatan negara ada di tangan rakyat yang dipercayakan Tuhan kepada manusia.[151] Dengan demikian, tampak pengakuan atas kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, tetapi dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, manusia yang memegang peranan dalam sebuah negara, termasuk dalam memilih pemimpin. Ini berhubungan erat dengan prinsip modern Islam, di mana manusia adalah wakil Tuhan di muka bumi yang secara moral, apa pun yang dilakukan oleh manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Islam ditetapkan untuk keselamatan umat manusia. Contohnya, Islam memiliki kriteria atau ukuran ketika ingin melantik seorang pemimpin, baik menjadi seorang kepala negara maupun kepala daerah, yaitu agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak, dan kecakapannya untuk memegang suatu amanah.[152]

Partisipasi rakyat untuk menyuarakan kepentingannya, di antaranya, dapat berupa pemberian hak suara dalam pemilihan umum. Masyumi mengakomodasinya dengan mengajukan pasal-

[150] Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 2001), 220.

[151] Pasal 3, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).

[152] Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, 86.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pasal dalam draf konstitusinya mengenai perlunya pemilihan umum sebagai cara rakyat menyampaikan kepentingannya.[153] Partispasi rakyat dalam pemilihan umum mempunyai peran untuk menentukan sebuah kebijakan atau kepentingan publik. Selain itu, implementasi demokrasi, dengan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum ini, dapat dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 1955 pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap (Masyumi), setelah tidak berhasil dituntaskan oleh kabinet sebelumnya.

Soal struktur pemerintahan, Masyumi mengajukan bentuk struktur pemerintahan seperti yang ditawarkan oleh Montesquieu, yaitu *trias politica*. Montesquieu, dalam bukunya *The Spirit of Laws*, menawarkan gagasan berupa prinsip pembagian kekuasaan yang terdiri atas eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (penegak hukum). Masyumi, dalam rancangan draf konstitusinya, mengajukan bentuk yang sama.

Pertama, kekuasaan eksekutif. Masyumi mengajukan sistem kabinet parlementer. Dengan presiden sebagai kepala negara yang ditunjuk oleh parlemen dalam sistem kabinet parlementer, presiden hanya bersifat simbolis saja dengan sedikit kekuasaan dan otoritas dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan presiden sendiri terbatas pada menunjuk formatur kabinet dan menetapkan perdana menteri serta menteri-menteri yang dipilih.[154] Adapun yang menjalankan pemerintahan adalah dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Perdana menteri diangkat oleh presiden beserta menteri-menteri yang dipilih.

Kedua, legislatif yang terdiri atas Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Daerah dipilih sebagai wakil dari daerah setingkat provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah tiga orang, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dari pemilihan umum di mana setiap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili tiga ratus ribu jiwa penduduk. Golongan minoritas, seperti

[153] Pasal 11, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).

[154] Pasal 55, Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi, (Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tionghoa, Eropa, dan Arab mendapat perwakilan tersendiri.[155] Salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang dan menjadi pengawas pemerintah.

Ketiga, kekuasaan yudikatif yang berperan sebagai penegak hukum dan pemutus sengketa. Konsep Masyumi dalam yudikatif, jika dihubungkan dengan tata aturan Islam, merupakan bentuk kombinasi dengan struktur penegakan hukum modern. Struktur lembaga yudikatif ini terdiri atas beberapa tingkatan. Mulai dari yang terbawah, yaitu pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, dan yang paling atas adalah Mahkamah Agung.[156] Mahkamah Agung, dalam tugasnya, diberikan kewenangan untuk menguji sebuah undang-undang. Undang-undang yang diuji Mahkamah Agung merupakan undang-undang yang telah disahkan parlemen. Pengujian ini bertujuan memutuskan apakah sebuah undang-undang sesuai dengan norma-norma syariat sebagai sumber hukum tertinggi ataupun undang-undang dasar yang berasaskan Islam.

Sebagai partai Islam, Masyumi memperjuangkan hukum yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam. Tercantum dalam anggaran dasar tahun 1952, tujuan Masyumi, untuk memperjuangkan pelaksanaan ajaran dan hukum Islam dan negara Republik Indonesia. Untuk memperjelasnya, dalam tafsir asas disebutkan bahwa ajaran dan hukum Islam tersebut mempertimbangkan keadaan zaman dan tempat.[157]

Rumusan tersebut tentunya mewakili pandangan pemikiran modern, di mana konsep hukum Islam tidak berhenti hanya pada masa kenabian atau para sahabat, tetapi menyesuaikan zaman dengan cara ijtihad. Mengenai posisi hukum Islam, Masyumi memberlakukan hukum syariat sebagai sumber hukum tertinggi di dalam negara. Mengutip pendapat Yusril Ihza Mahendra, sumber hukum

[155] Pasal 61 dan 63, Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi, (Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).

[156] Pasal 31, Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi, (Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).

[157] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tertinggi ini berbeda dengan syariat sebagai hukum. Sumber hukum ini mengandung pengertian bahwa syariat tidak diaplikasikan secara langsung, tetapi diperinci dahulu dan dimusyawarahkan dengan pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah.[158] Bahkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Natsir, pemerintah tidak diharamkan untuk memakai aturan atau undang-undang yang sudah berlaku di dalam negara selama tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat di dalam ajaran Islam. Menurut Natsir, apabila sudah ada aturan atau sistem undang-undang yang baik terdapat di negara lain, kita sebagai orang Islam berhak mencontohnya selama tidak bertentangan dan berlawanan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Islam.[159] Negara-negara yang bukan Islam pun menyusun peraturan kenegaraannya sebagian mencontoh dari undang-undang negara lain yang telah ada terlebih dahulu atau yang lebih tinggi kecerdasannya dalam soal-soal kenegaraan.

Dengan penjelasan tersebut, hukum Islam atau syariat adalah sumber hukum yang menjiwai setiap undang-undang dengan tetap mengedepankan rumusannya dari hasil musyawarah dan menyesuaikan keadaan zaman. Selain itu, dalam hukum perdata, Masyumi menghendaki pemberlakuan berbagai aturan yang berbeda, disesuaikan dengan dengan adat dan suku yang ada di Indonesia.[160] Dengan begitu, Masyumi bermaksud menerapkan kesatuan dalam keberagaman dengan menjadikannya sebagai hukum yang mengakomodasi masyarakat yang multikultur dan membentuknya menjadi hukum nasional Indonesia, menggantikan hukum era kolonial.

Mengenai hak asasi manusia dan hak-hak sipil, Masyumi mengemukakan bahwa negara harus menjamin hak asasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.[161] Dalam hal ini, Masyumi menyadari

---

[158] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Islam,* 238–239.

[159] Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, 88.

[160] Pasal 138, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi.*

[161] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 46.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hak sipil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara demokrasi. Draf konstitusi Masyumi—dalam salah satu bagian khusus tentang hak-hak asasi manusia yang secara keseluruhan memuat semua hak-hak sipil dan politik—sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa.[162] Hal ini dapat diartikan bahwa masalah hak asasi manusia menjadi landasan bernegara Indonesia yang menjamin hak sipil dan politik setiap warga negaranya.

Terkait status wanita, Masyumi melihat bahwa keikutsertaan perempuan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan dari proses demokratisasi sebuah negara. Hal ini kemudian dapat kita simak dalam rumusan Partai Masyumi yang menyambut gagasan tentang persamaan hak dalam bidang sosial, ekonomi, ataupun politik. Pendapat di atas dapat dijumpai pada rumusan Masyumi untuk wanita, baik pada draf konstitusi maupun program perjuangan yang tercantum pada Pedoman Perjuangan Masyumi. Dengan pengakuan terhadap perbedaan dalam hal sifat, tugas, dan lapangan pekerjaaan, Masyumi berprinsip bahwa hak-hak sosial, ekonomi, dan politik wanita sama dengan laki-laki.[163]

Bentuk akomodasi atas emansipasi tersebut menjadikan peran perempuan tidak terbatas hanya mengurus keluarga di rumah, tetapi juga ikut duduk dalam parlemen seperti yang dipraktikkan Masyumi dengan mendudukkan wakil-wakil perempuannya dari KNIP hingga majelis konstituante. Bahkan, Masyumi juga membuka peluang untuk perempuan menjadi presiden karena dalam draf konstitusi yang diajukan Masyumi tidak merinci mengenai jenis kelamin dari seorang presiden dan jabatan publik lainnya.[164] Selain itu, Masyumi juga berusaha merumuskan undang-undang dalam hal perburuhan dan perkawinan, tetapi menemui kegagalan ketika diajukan ke dalam parlemen atau majelis konstituante.

---

[162] Pasal. 28 s.d Pasal 48, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi*.

[163] Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 72.

[164] Pasal 18, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

D. Negara Indonesia yang akan Dibangun

Negara yang hendaknya dibangun oleh Masyumi adalah negara yang berdiri di atas moral, nilai-nilai, dan hukum Islam. Dengan demikian, Islam tidak memainkan peran informal atau sebagai pelengkap saja, juga tidak hanya sekadar pemberi bimbingan moral, tetapi juga sebagai salah satu rujukan utama konstitusi negara. Masyumi mengatakan bahwa

> *"agama kita, agama Islam jang sempurna itu menetapkan pokok-pokok asas untuk mengatur kehidupan masjarakat sebagai djama'ah persaudaraan dibawah Allah, jaitu didasarkan kepada ke-Tuhanan jang Maha Esa, seperti ditetapkan djuga sebagai asas negara kita Republik Indonesia, jang melarang kita menuhankan barang satu apa di samping Tuhan Jang Maha Esa itu, dan mewajibkan kita mengatur hukum dan peraturan negara kita dalam politik, dalam ekonomi, dalam perhubungan-perhubungan dalam masjarakat sesuai dengan hukum jang diturunkannya oleh Allah".*[165]

Keyakinan ini tidak dimaksudkan sebagai landasan terbentuknya sebuah negara trans-nasional atau kekhalifahan. Tidak ada sebuah catatan yang mengarahkan bahwa perjuangan Masyumi akan berujung pada terbentuknya negara kekhalifahan. Kenyataannya, negara yang diperjuangkan oleh Masyumi adalah sebuah negara nasional yang terdiri dari berbagai suku dan agama dengan luas wilayah dari Sumatra hingga Irian Barat (Sabang sampai Merauke).[166] Singkatnya, ini adalah sebuah negara-bangsa (*nation-state*) yang berlandaskan ajaran Islam. Lebih jauh, Natsir mengatakan, *"Djangan kuatir Islam akan melarang melagukan Indonesia Raja. Silahkan sama2 lagukan, njanjikan, kumandangkan lagu Indonesia Raja itu pada saat2 dan tempat yang pantas untuk melakukannja".*[167]

---

[165] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi,* 54.

[166] Mohammad Natsir, *Tjita-Tjita Masjumi*, *Pidato Mohammad Natsir dalam Peringatan Ulang Tahun Ke-X Masjumi di Jakarta*, (Jakarta: Kapu Masjumi Djakarta Raya, 1955), 3.

[167] Mohammad Natsir, *Tjita-Tjita Masjumi*, 4.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Terkait dengan bentuk negara, Masyumi berkeyakinan bahwa setiap muslim memiliki kebebasan untuk membangun negara sesuai perkembangan zaman, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mengingat tidak ada batasan yang definitif dalam Islam tentang bentuk negara. Untuk itu, menurut Masyumi, tidak ada larangan menggunakan sistem yang dipergunakan oleh nonmuslim.[168] Sehubungan dengan itu, bagi Masyumi negara ideal berbentuk republik sesuai dengan asas-asas demokrasi dalam Islam.[169] Istilah republik dan demokrasi bukanlah berasal dari Islam, melainkan dipilih oleh Masyumi karena, berdasarkan hasil ijtihad, dianggap lebih memungkinkan umat Islam memaksimalkan perjuangannya untuk menegakkan nilai-nilai Islam.

Secara lebih spesifik Masyumi meyakini bahwa negara ideal adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hal ini di dalam rumusan resmi program politik Masyumi disebutkan bahwa partai itu menghendaki Indonesia menjadi negara hukun yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam.

Sebuah negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut sebagai "Negara Islam" ataupun "berdasarkan Islam", tetapi negara itu disusun *sesuai dengan ajaran-ajaran Islam*, baik dalam teori maupun praktiknya. Dasar negara dapat dirumuskan dengan klausal-klausal yang bersifat umum sepanjang mencerminkan kehendak-kehendak Islam.[170] Masyumi memandang bahwa keterlibatan secara langsung dalam jabatan-jabatan kekuasaan negara adalah sebagai suatu jalan strategis untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Dengan demikian, menurut Masyumi, "hukum-hukum Allah tidak saja keluar dari mulut alim ulama di atas mimbar masjid-masjid, tetapi juga keluar dari pejabat-pejabat pemerintahan dan menjadi undang-undang negara."

Lebih lanjut, dengan prinsip-prinsip di atas, bentuk negara seperti apakah yang dibayangkan oleh Masyumi akan terbentuk?

---

[168] Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, 29.

[169] "Program Perdjuangan Masjumi", dalam *Pedoman Perjuangan Masjumi*, cetakan ke-2 (Jakarta: Partai Masjumi Bagian Keuangan, 1955), 60.

[170] Ahmad, *Masjoemi: Partij Politiek Islam Indonesia*, 15–16.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masyumi setidaknya memiliki pandangan-pandangan prinsipiel pada beberapa persoalan yang terkait dengan bentuk negara ideal yang dicita-citakannya itu. Pandangan prinsipiel terkait bentuk negara yang dicita-citakan itu terdapat dalam pandangan Natsir mengenai beberapa hal yang harus ditanamkan dalam dasar Islam sebagai dasar negara. Prinsip yang bisa dikatakan sangat sesuai dengan prinsip negara demokratis dan menghargai perbedaan atau pluralis, antara lain, *pertama,* konstitusi harus bebas dari tekanan-tekanan. Menjaga konstitusi ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya tugas pejabat semata, tetapi juga harus dijaga oleh negara (institusi) atau masyarakat agar kontitusi bisa berjalan dengan baik. Institusi itu adalah suatu badan atau organisasi yang bertujuan mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, diakui oleh masyarakat, mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, mempunyai keanggotaan, mempunyai daerah berlakunya, dan memberikan hukuman kepada pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-normanya.

Kedua, dasar negara harus berakar dalam kalbu masyarakat. Dalam hal ini, Islam harus kuat tertanam di dalam jiwa setiap muslim. Artinya, tidak hanya sekadar namanya yang Islam, tetapi dalam pengamalannya yang sangat terpenting.[171] *Ketiga,* masyarakat jangan melanggar demokrasi. Dalam hal ini, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh (1) golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan dari golongan terbesar (mayoritas) dan (2) golongan-golongan kecil yang berlainan pendapat dari mayoritas, terjamin hak hidupnya dalam masyarakat.[172]

Masyumi meyakini bahwa negara yang ideal adalah negara yang memberikan kedaulatan kepada rakyat dan membuka kesempatan yang luas kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi. Masyumi mendukung sebuah bentuk negara yang memfasilitasi dialog atau musyawarah dalam pengambilan keputusannya. Dalam Konstitusi Masyumi disebutkan bahwa, *"Kemauan rakjat adalah dasar kekuasaan dalam negara, jang dilakukan oleh pemerintah bersama-*

[171] Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, 55.

[172] Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, 57.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/dan/atau Dewan Daerah dengan djalan musjawarah".[173]

Kemauan rakyat itu, menurut Masyumi, hendaknya dinyatakan dalam sebuah pemilu yang diatur dalam undang-undang.[174] Dalam hal ini, partisipasi rakyat dalam politik melalui pemilu merupakan sebuah keharusan. Bagi Masyumi setiap kalangan berhak untuk memperjuangkan kepentingannya, sejauh tetap berada dalam koridor demokrasi. Dalam dokumen "Tafsir Asas Masyumi" disebutkan bahwa pendirian Masyumi sendiri akan diperjuangkan dengan, *"Melalui jalan yang sah, sebagaimana yang terbuka jalannya dalam negara republik kita yang berdasar kedaulatan rakyat, melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara demokrasi".*[175]

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan atau negara yang akan dibangun oleh Masyumi didasarkan pada demokrasi atau kedaulatan rakyat. Rakyat harus dapat dengan pasti menentukan kebijakan. Dengan demikian, negara yang hendak dibangun Masyumi tidak menempatkan segolongan orang di atas golongan yang lain, termasuk tidak menempatkan kalangan agamawan pada sebuah kedudukan yang teramat sangat istimewa. Hal ini ditegaskan oleh Natsir, bahwa dalam Islam tidak dikenal adanya sistem kependetaan yang memberikan otoritas dan hak-hak suci kepada sekelompok orang untuk dapat menentukan dan mengatur kehidupan masyarakat. Menurutnya, tugas ulama adalah tak lain menjadi guru dan pemimpin hal-hal praktis, seperti salat.[176]

Sejalan dengan semangat demokrasi, negara ideal adalah yang bekerja untuk kepentingan seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang primordial. Keragaman adalah sesuatu yang

---

[173] Pasal 11 ayat 1, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi* (Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).

[174] Pasal 11 ayat 1, Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi.

[175] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi,* 46.

[176] Mohammad Natsir, *Sumbangan Islam bagi Perdamaian Dunia*, (Jakarta: U.B. Ideal, 1953), 21, 23.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dirayakan oleh Masyumi. Disebutkan dalam "Tafsir Asas Masyumi" bahwa negara yang dimaksud oleh Masyumi adalah negara yang "*menudju kepada "Baldatun Thoijbatun warabbun ghofur",…di mana bagi seluruh penduduknya dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman*".[177]

Dalam negara yang akan dibangun itu, bagi Masyumi, setiap nonmuslim diperkenankan untuk menganut dan mengamalkan agamanya,[178] serta membentuk partai politik berdasarkan landasan agama mereka sebagai bentuk hak politik.[179] Kebebasan beragama harus dijamin oleh negara.[180] Negara juga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menduduki jabatan di pemerintahan, bahkan termasuk orang asing sekalipun,[181] terkecuali jabatan presiden dan wakil presiden yang harus dijabat oleh seorang muslim.[182]

Alasan yang dikemukakan oleh Masyumi adalah alasan proporsionalitas, sebagaimana pada Pasal 38 ayat 1 mengenai Islam sebagai agama resmi negara. Mayoritas masyarakat Indonesia beragam Islam yang diperkirakan saat itu berkisar lebih dari 90%. Pandangan ini secara umum bersifat absolut dan jelas memberikan kedudukan yang istimewa semata terhadap kaum muslimin. Dalam praktiknya, pada kebanyakan negara demokrasi maju, asas proporsionalitas ini bekerja sehingga akan sulit kiranya seseorang dengan agama minoritas, bahkan suku minoritas, dapat menjadi orang nomor satu dalam sebuah pemerintahan nasional, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi.

---

177 "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 46.

178 Pasal 38 ayat 2 *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi.* Natsir, *Tjita-Tjita Masjumi*, 5.

179 "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 46.

180 "Program Perdjuangan Masjumi", dalam *Pedoman Perjuangan Masyumi,* 60.

181 Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi.*

182 Pasal 49 ayat 3 *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi.*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam pada itu, negara ideal bagi Masyumi adalah juga negara yang mampu melindungi dan membangun kerja sama dengan seluruh anak bangsa. Hal ini tersirat dalam anggaran dasar Pasal IV ayat (4) ditegaskan bahwa usaha partai untuk mencapai tujuannya adalah dengan, "*Bekerja sama dengan lain-lain golongan dalam lapangan yang bersamaan atas dasar harga-menghargai*".[183] Masyumi juga meyakini arti penting toleransi di sebuah negara yang plural seperti Indonesia. Dalam suatu dokumen disebutkan bahwa republik yang akan dibangun Masyumi adalah yang hidup atas dasar keragaman dan pengertian agar tercipta cita-cita Islam sebagai rahmat bagi semuanya.[184] Pandangan beberapa tokoh masyumi juga serupa, antara lain, Anwar Harjono—yang juga tokoh sentral Gerakan Pemuda Islam (GPI)—mengatakan bahwa, "*Kita ingin membangun masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni yang toleran dalam agama, kebudayaan, dan politik*".[185] Begitu juga Sjafruddin Prawiranegara yang mengatakan bahwa Islam mendidik umatnya untuk menghargai mereka yang tidak seagama dan fanatisme—sikap membenci agama atau orang lain—adalah asing dalam Islam.[186]

Penegakan negara atas dasar Islam sendiri tidak perlu dikhawatirkan akan menghancurkan toleransi karena ajaran Islam melindungi perbedaan. Natsir mengatakan bahwa esensi Islam adalah memberantas intoleransi. Natsir mengatakan

> "Agama Islam memberantas intoleransi agama serta menegakkan kemerdekaan berama dan melatakkan dasar-dasar bagi keberagaman hidup antaragama. Kemerdekaan menganut agama adalah suatu nilai hidup, yang dipertahankan oleh tiap-tiap muslimin dan

[183] *Anggaran Dasar Partai Politik Islam Indonesia "Masjumi", Ayat (3) dan Ayat (4) Pasal IV.*

[184] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 46.

[185] Lukman Hakiem, *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan. Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H*, (Jakarta: Media Dakwah, 1993), 348.

[186] Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt. Sebuah Biografi*, 140.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

muslimat. Islam melindungi menyembah Tuhan menurut agama masing-masing, baik di masjid maupun di gereja".[187]

Masyumi melandasi pandangan tentang toleransi itu dengan keyakinan bahwa tidak ada paksaaan dalam agama.[188] Lebih dari itu, menurut Masyumi, "*Iman hanya dapat diperoleh dengan rahmat kurnia Ilahi, tidak dihasilkan dengan paksaaan; dalam pergaulan hidup dan dalam peraturan negara diakui kemerdekaan orang lain atau kesopanan umum dan tertib keamanan negeri*".[189]

Adapun toleransi yang dimaksud adalah berdiri tegak di atas perbedaan-perbedaan dan bukan menghilangkannya. Menurut Natsir, toleransi dapat berlangsung dalam situasi ketika pihak-pihak yang ada memiliki jati diri yang kuat. Natsir menyatakan, "*....bahwa justru lantaran bertoleransi itu, kita harus berani membuka pendirian kita seterang-terangnya. Toleransi yang dimaksud ialah untuk membuka ruang dan suasana yang seluas-luasnya bagi konfrontasi dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran*".[190]

Selain itu, negara ideal bagi Masyumi adalah juga negara yang kuat dalam menjamin pemerataan kemakmuran tanpa harus menghancurkan hak-hak individu atau Hak Asasi Manusia (HAM).

---

[187] M. Natsir, "Islam Berantas Intoleransi Agama dan Tegakkan Kemerdekaan beragama" dalam Mohamad Natsir, *Capita Selecta 2*, ed. Mohammad natsir (Jakarta: Yayasan Capita Selecta, 2008), 385–386.

[188] Dalam banyak kesempatan ayat Al-Qur'an dalam Al-Baqarah ayat 252 selalu dikemukakan oleh Masyumi untuk melandasi pemikiran dan sikap toleran dan penghormatan terhadap pluralisme. Ayat itu selengkapnya adalah "*Tidak ada paksaan dalam beragama: sesungguhnya djalan jang benar sudah njata dari djalan jang sesat! Oleh karena itu, barang siapa jang tidak mempertjajai (mengingkari) Thagut dan berpegang kepada Allah, sesungguhnya dia sudah berpegang kepada sekuat-kuat tempat berpegang, jang tidak akan patah, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui*". Lihat, misalnya, dalam "Tafsir Asas Masyumi", dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 48.

[189] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 48.

[190] M. Natsir, "Islam sebagai Dasar Negara", dalam Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, 49.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Negara secara prinsipiel harus melindungi HAM.[191] Disebutkan bahwa memilih Masyumi berarti *menjamin kemerdekaan beragama serta menyuburkan keragaman hidup antara pemeluk agama*. Disebutkan dalam "Khitah Masyumi" bahwa, "*…bagi pemeluk agama lain terdjamin kemerdekaan menganut dan mengamalkan agama masing-masing, di mana penunaian kewajiban-kewajiban asasi oleh perseorangan terhadap masjarakat dan negara terlaksana, sebagai dasar hidup berkeragaman antara segenap lapisan dan golongan…*".[192]

Begitu pula dalam draf konstitusi Masjumi, terdapat pula bagian mengenai HAM yang menyebutkan beberapa hak, seperti hak diperlakukan sama di depan hukum, hak beragama, hak kemerdekaan, hak keselamatan, hak pendidikan, hak atas properti, hak bergerak, hak mengeluarkan pendapat, hingga hak pendidikan.[193]

Selain itu, negara ideal yang dibayangkan Masyumi dekat dengan ide sosialisme, tetapi bermoralkan nilai-nilai ketuhanan. Sjafruddin mengatakan bahwa dasar sosialisme yang dimaksud Masyumi bukanlah historis materialisme atau sistem kelas, melainkan "kewajiban manusia terhadap manusia dan kewajiban manusia terhadap Tuhan".[194] Bentuk negara ini sejalan dengan tujuan negara yang dimaksud oleh Masyumi, yakni menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran lahir batin kepada seluruh masyarakat, yang pada saat yang sama senantiasa mendapat bimbingan dan ampunan, dari Tuhan semesta alam, singkatnya sebuah negara yang modern dan penuh kemakmuran di bawah ampunan Tuhan.[195]

---

[191] "Program Perdjuangan Masjumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 61.

[192] *Inilah Chittahku*, (Jakarta: Penerangan Partai Masjumi, 1953), 6.

[193] Bahagian Ketiga, HAM, Pasal 28-28. *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun). Berbagai hak tersebut juga sempat dimuat dalam *Hikmah*, no. 17 (21 Djuni 1958), 6.

[194] Sjafruddin Prawiranegara, "Politiek dan Revolusi Kita", dalam *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965, ed. Noer,* 143.

[195] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 45. Lihat juga Prawoto, "Amanat Penderitaan Rakyat ialah Masyarakat yang Adil dan Makmur, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jadi, sistem pemerintahan seperti apakah yang dikehendaki oleh Masyumi? Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Masyumi membuka diri dan cenderung berkeinginan beradaptasi dengan perkembangan politik modern yang dianggap sesuai dengan Islam dan perkembangan umat manusia pada umumnya. Sehubungan dengan itu, secara formal Masyumi memperjuangkan sistem presidensial. Dalam "Program Perdjuangan Masjumi", disebutkan bahwa, "*Masjumi berpendapat bahwa sebaiknja pemerintah berbentuk presidential, di mana Presiden sebagai kepala executief bertanggung-djawab kepada DPR*".[196]

Untuk menciptakan adanya pengawasan pemerintahan yang efektif, Masyumi meyakini pentingnya sistem parlemen dua kamar (bikameral), terdiri dari parlemen dan senat.[197] Ide Masyumi ini dekat dengan prinsip-prinsip *trias politica* yang esensinya adalah pembagian kekuasaan (*division of power*). Prinsip ini juga sejalan dengan semangat *checks and balances* yang lazim ada dalam pemerintahan demokratis.

Jika dilihat dari aspek keterwakilan politik, senat dapat dikatakan merupakan refleksi dan representasi dari keragaman suku, etnis, agama, dan budaya, yang di dalam konteks Indonesia demikian plural. Lebih jauh, esensi keterwakilan dari senat melintasi sekat-sekat ideologi karena anggota senat pada dasarnya lebih merepresentasikan eksistensi daerah dengan keunikannya, yang tentu saja tidak sepenuhnya hanya berasal dari kelompok ideologi politik tertentu saja, tetapi juga merupakan keterwakilan semua kelompok ideologis, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang ada di suatu daerah. Dengan demikian, ide dibentuknya bikameral dengan senat di dalamnya, selain parlemen, terutama bertujuan memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu,

---

Ghafur", dalam Bajasut dan Hakiem, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito. Ketua Umum (Terakhir) Partai Masjumi*, 105–113.

196 "Program Perdjuangan Masjumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 60.

197 "Program Perdjuangan Masjumi", 60–61.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembentukan bikameral juga ditujukan untuk memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah di sebuah negara yang masih baru yang masih berpotensi untuk mengalami ganguan internal yang tinggi.

Selain itu, keberadaan bikameral adalah juga untuk meningkatkan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Selain itu, ini tidak hanya dapat mendorong kepercayaan dan percepatan penguatan demokrasi, tetapi juga akselerasi pembangunan daerah-daerah secara serasi dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hakikat keberadaan bikameral pada akhirnya adalah juga dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah menuju terciptanya pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berwibawa serta melayani seluruh wilayah republik.

Tambahan pula, isu sentralistik pembangunan di Jawa atau tidak meratanya pembangunan di seluruh Indonesia saat itu telah demikian mencuat sebagaimana yang telah diprediksi oleh Hatta, sebagai tokoh yang cukup rajin membangun komunikasi dengan daerah-daerah. Hal ini merupakan dampak dari kurang efektifnya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi tuntutan pemerataan pembangunan daerah, dibutuhkan peran senat, selain parlemen, sebagai representasi kepentingan daerah agar apa yang dibutuhkan daerah dapat terpenuhi. Dengan menganut sistem pemerintahan ini, sekali lagi terlihat jelas sikap Masyumi yang cenderung terhadap demokrasi.

Meskipun demikian, sepanjang keberadaannya, Masyumi dapat menerima format sistem parlementer. Hal itu tidak dapat dihindari oleh Masyumi karena kebijakan untuk menggunakan sistem parlementer merupakan kesepakatan umum partai-partai yang terdapat dalam parlemen dengan presiden yang telah disahkan secara demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa pada era awal kemerdekaan, pandangan pro-presidensial bukanlah pandangan yang mayoritas.

Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa secara umum bentuk negara atau sistem pemerintahan yang diidealkan Masyumi ada-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lah perpaduan antara spirit Islam dan pandangan politik modern, khususnya demokrasi dan penghormatan terhadap keragaman serta yang dapat memberikan kemakmuran. Dari kajian di atas dapat terlihat pula kecenderungan kuat terhadap pluralisme. Adanya kecenderungan ini, maka tidak mengherankan jika sikap-sikap yang cenderung positif terhadap pluralisme dapat mudah terbangun dalam partai ini. Singkatnya, Masyumi memiliki fondasi yang cukup memadai bagi sikap positif terhadap pluralisme.

E. Tentang Keragaman di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah entitas majemuk yang demikian kompleks. Dari sisi etnis terdapat sekitar 1.340 etnis, yang menyebabkan Indonesia layak disebut sebagai negara multietnis. Tidak itu saja, Indonesia juga merupakan negara dengan multibahasa dengan sekitar 718 bahasa di dalamnya, multiagama dengan adanya 6 agama yang diakui, dan multiideologi—yang setidaknya menurut kajian Herbert Feith dan Lance Castles dalam 20 tahun sejak kemerdekaan terdapat enam ideologi yang cukup dominan di Indonesia. Atas dasar kenyataan itu, John S. Furnivall menyebut Indonesia sebagai "masyarakat majemuk paling kompleks di dunia".[198]

Masyumi menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam etnis, agama, dan golongan. Masyumi menganggap Indonesia sebagai sebuah *kurnia Ilahi.*[199] Natsir mengatakan bahwa Masyumi melihat Indonesia sebagai karunia Ilahi atas jihad perjuangan umat Islam dan menerima sepenuhnya dengan rasa syukur.[200] Pernyataan-pernyataan tersebut menyiratkan adanya sikap untuk dapat menerima bangsa ini dengan tangan terbuka apa adanya sebagai sebuah kehendak dan pemberian dari Tuhan. Dalam Islam, sebuah anugerah harus disyukuri. Jika tidak, itu termasuk

[198] John S. Furnivall, *Netherlands India, A Study of Plural Economuy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1967).

[199] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 45.

[200] *Inilah Chittahku*, hal. 5. Lihat juga Natsir, *Tjita-Tjita Masjumi*, 2.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pengingkaran atas karunia Tuhan dan merupakan sebuah perbuatan tercela.

Sikap positif terhadap segenap keragaman adalah sesuatu yang tertanam dalam Masyumi. Bagi Masyumi, perbedaan jelas tidak dapat diingkari, apalagi dihapuskan oleh siapa pun. Hal ini jelas terkait dengan ajaran Islam yang tidak menolak adanya keragaman suku, bangsa, dan negara. Ketua Umum Masyumi, Natsir, mengatakan, "Adapun bangsa dan suku bangsa adalah suatu kenyataan dan tidak seorang pun dapat memungkirinya. Al-Qur'an datang bukan untuk menghapuskan bangsa dan kebangsaan".[201]

Dengan demikian, upaya untuk menegakkan ajaran Islam tidak ditujukan untuk menghapuskan perbedaan, tidak juga dimaksudkan untuk membatasi hak dan kewajiban kelompok-kelompok yang berbeda, apalagi untuk menciptakan diskriminasi. Masyumi meyakini bahwa keberadaan negara Republik Indonesia berdasarkan Islam akan tetap menyuburkan keberagaman. Pancasila juga akan subur dalam naungan Islam dan mati manakala meninggalkan Islam.[202] Dengan demikian, menurut Masyumi, keberadaan negara berdasar Islam itu adalah bagian dari upaya melestarikan keragaman itu sendiri. Natsir menegaskan bahwa Masyumi menggunakan Islam sebagai *"Tjara-tjara hidup bagi negara sebagai negara hukum jang menegakkan kea'dilan serta memelihara hidup keragaman diantara seluruh warga dan penduduknya dengan tidak ada ketjualinya"*.[203]

Masyumi juga meyakini bahwa hubungan yang produktif dan sehat antargolongan harus dilakukan. Masyumi menyatakan bahwa harus dibuka kerja sama dengan berbagai golongan yang ada dalam negara ini demi mencapai cita-cita luhur. Masyumi tidak membenarkan cara-cara paksaan oleh satu pihak kepada pihak lain

---

[201] Mohammad Natsir, "Apakah Pancasila bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an", dalam *Capita Selecta 2*, ed. Mohammad Natsir (Jakarta: Yayasan Capita Selecta, 2008), 207–208.

[202] Mohammad Natsir, "Bertentangankah Islam dengan Al-Qur'an", *Majalah Hikmah*, 29 Mei 1954.

[203] *Inilah Chittahku*, 5.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk mencapai maksudnya.[204] Artinya, perbedaan tidak saja semata harus diakui dan ditoleransi, tetapi juga harus diikuti dengan kemauan untuk membangun kerja sama demi kepentingan bersama dan menolak segala bentuk pemaksaan. Kesamaan kesempatan merupakan suatu hal yang diakui oleh Masyumi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang diyakini Masyumi, yakni tidak hanya sebagai penuntun perilaku yang bermoral, tetapi juga pemberi manfaat dan rahmat bagi semua kalangan, sebagaimana yang telah dicontohkan pada masa-masa nabi dan khulafaurasyidin. Saat itu, pemerintahan yang dibangun dalam cita-cita politik Islam di Madinah mampu memberikan perbaikan kehidupan bagi manusia, menegakkan keadilan, dan menumbuhkan penghargaan bagi perbedaan.

Masyumi juga menyusun beberapa ketetapan sebagai sikap resmi partai atas keberagaman dalam konteks agama. Ketetapan ini disusun untuk menjelaskan posisi Masyumi terhadap keberagaman itu dan untuk menghindari salah sangka terhadapnya. Untuk mereka yang berbeda agama, disebutkan dalam "Program Perdjuangan Masjumi" bahwa kebebasan beragama harus dijamin oleh negara.[205] Dalam "Tafsir Asas Masyumi", diketengahkan bahwa rakyat bebas memilih agamanya. Dalam dokumen resmi itu dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan diserukan untuk bersama-sama memegang teguh keyakinan pada Tuhan. Ayat mengenai tidak ada paksaan dalam agama (Al-Baqarah ayat 252) kerap dikedepankan sebagai landasan dari pandangan ini. Lagi pula, Masyumi mengatakan secara jelas bahwa, *"Kami ummat Muhammad saw., dalam memegang amanat-Nya, adalah ummat yang mendjundjung tinggi kemerdekaan agama, bahkan memperdjuangkan kemerdekaan agama dari tekanan dan tindasan siapa pun jua"*.[206]

Sejalan dengan pandangan itu, Ketua Umum Masyumi terakhir, Prawoto Mangkusasmito, bahkan pernah mengatakan bahwa Masyumi dapat menerima jika penganut agama-agama lain

[204] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 55.

[205] "Program Perdjuangan Masjumi", 60.

[206] "Tafsir Asas Masyumi", 46–48.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menginginkan agar kewajiban menjalankan ajaran agama mereka juga dimasukkan dalam konstitusi negara. Prawoto mengatakan, "Kepada para penganut-penganut agama di luar Islam, kami menyatakan bahwa kami tidak menaruh keberatan sedikit pun jika saudara-saudara di dalam rumusan-rumusan itu menginginkan pula jaminan untuk menunaikan syariat agama golongan saudara".[207]

Adapun terkait dengan keberadaan beragam partai dan organisasi, Masyumi, melalui "Tafsir Asas Masyumi", memandang hal tersebut sebagai sebuah kewajaran dan melihatnya sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Masyumi menjadikan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 48 sebagai landasan untuk pandangannya tersebut.[208] Dalam surat itu, disebutkan bahwa perbedaan golongan adalah sebagai situasi untuk saling berbuat baik bagi sesama.

Berbagai keputusan di atas dibuat memang dalam rangka membangun citra positif partai, baik dalam rangka menyanggah tuduhan negatif maupun menguatkan pandangan positif atas partai ini. Kemunculan berbagai tuduhan sebagai partai radikal menyulitkan posisi politik dan citra Masyumi, yang oleh karenanya, perlu direspons dengan tepat sejak dini melalui keputusan-keputusan resmi partai. Walaupun demikian, keputusan ini tidak hanya ditujukan untuk sekadar memenangkan pemilu, mengingat alasan-asalan yang disampaikan bersifat ideologis dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Keputusan itu juga tampak konsisten dengan pandangan politik dan cita-cita negara ideal Masyumi. Oleh karena itu, keputusan ini dapat dikatakan bersifat menegaskan sikap Masyumi atas perbedaan agama dan golongan yang ada.

Ketiga bagian pembahasan di atas memperlihatkan bahwa perbedaan atau pluralisme dalam pandangan Masyumi tidak saja di-

---

[207] Prawoto Mangkusasmito, "Jiwa dan Semangat 1945 Masyumi menolak Suatu "Machtsstaat," dalam *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, ed. Bajasut & Hakiem, 104.

[208] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 47.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

akui, tetapi juga dilindungi dan diakomodasi. Pandangan formal Masyumi di atas juga mengindikasikan adanya keinginan partai ini untuk membangun toleransi dan saling pengertian dengan kalangan nonmuslim dan golongan yang berbeda. Hal ini tentu saja berbeda dengan kalangan fundamentalis yang cenderung pesimis terhadap upaya membangun toleransi dan saling pengertian dengan kalangan nonmuslim.

Dalam kehidupan antaragama, toleransi yang diajarkan oleh Islam itu bukanlah suatu yang bersifat pasif, melainkan aktif. Aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Aktif dan senantiasa bersedia untuk mencari titik persamaan di antara bermacam-macam perbedaan. Bukan itu saja. Kemerdekaan beragama bagi seorang muslim adalah suatu nilai hidup yang lebih tinggi daripada nilai jiwanya sendiri. Apabila kemerdekaan beragama terancam dan tertindas, seorang muslim diwajibkan untuk melindungi kemerdekaan ahli agama tersebut agar manusia umumnya merdeka untuk menyembah Tuhan menurut agamanya masing-masing dan jika perlu dengan mempertahankan jiwanya".[209] Berkenaan dengan golongan agama lain, Masyumi berpedoman kepada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang menegaskan bahwa iman hanyalah dapat diperoleh dengan rahmat Allah, tidak dihasilkan dengan paksaan. Dalam pergaulan hidup dan dalam peraturan negara diakui kemedekaan orang lain dan kesopanan umum dan tertib keamanan negara.[210]

Menurut Fouad Ajami, kalangan fundamentalis memiliki kecenderungan untuk *menafikan pluralisme*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusril Mahendra, bagi kalangan fundamentalis hanya ada dua jenis kelompok manusia, yakni masyarakat muslim dan kafir. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang digambarkan oleh Sayyid Qutb sebagai *al-nidlam al-Islam* atau masyarakat yang berdasarkan tatanan sosial yang islami. Masyarakat inilah yang

[209] Mohamamd Natsir, "Capita Selecta 2", 225–229, dalam *Biografi, ed. Hakiem,* 358–359.

[210] "Tafsir Asas Masyumi", dalam *Biografi Muhamamd Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan, ed. Hakiem,* 366.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

akan menegakkan sebuah sistem politik yang berdasarkan "hukum Tuhan" (*hakimiyyah*). Adapun masyarakat kafir adalah masyarakat yang didasarkan pada tatanan sosial jahiliah atau disebut sebagai *al-nidlam al-jahili*. Masyarakat ini dipenuhi dengan nilai dan praktik yang bertentangan dan jauh dari rida Tuhan. Cara pandang yang bernuansakan perspektif Manichean, atau "hitam-putih", ini telah menyebabkan adanya batasan yang dalam antara kalangan muslim dan kalangan nonmuslim (*unwanted*). Hubungan di antara keduanya kerap dibayangkan sebagai kontradiktif dan bukan sebuah pola hubungan kolaboratif yang penuh nuansa toleransi sebagaimana esensi dari pluralisme itu sendiri.[211] Bagian selanjutnya akan membahas sikap dan kebijakan Masyumi terkait dengan pluralisme. Pembahasan ini penting untuk melihat seberapa konsisten dan sungguh partai ini terhadap penerapan pluralisme.

[211] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, 19.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 4

PLURALISME DALAM SIKAP DAN KEBIJAKAN MASYUMI

Kajian ini akan menunjukkan beberapa sikap Masyumi terhadap pluralisme. Ini dapat dilihat dari kebijakan partai dan respons terhadap partai dan tokoh-tokohnya dalam soal-soal yang terkait dengan pluralisme. Sikap itu akan dibahas dalam kaitannya dengan konteks internal umat Islam dengan kelompok nonmuslim, kelompok nasionalis sekuler, kalangan komunis, hingga dalam soal kebijakan partai pada umummnya.

A. Pluralisme Politik dalam Konteks Internal Umat Islam

Keberagaman politik dalam konteks internal umat merupakan sebuah kenyataan historis. Dalam konteks politik, perbedaan pandangan telah terjadi, bahkan tepat pada masa Indonesia berdiri ditandai dengan keberadaan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) yang tidak berkenan bergabung dalam Masyumi. Masyumi sendiri kemudian gagal untuk dapat mempertahankan diri menjadi satu-satunya partai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Islam. Pada Pemilu 1955 terdapat beberapa partai yang beraliran Islam selain Masyumi, termasuk di dalamnya NU, PSII, dan Perti.

Terkait dengan kenyataan ini, Masyumi mengambil beberapa sikap yang mengindikasikan keinginan untuk tidak menonjolkan perbedaan dan menghormati perbedaan itu. Salah satunya adalah dengan memberikan penyikapan untuk menghormati seluruh aliran atau mazhab yang ada ditengah-tengah umat Islam. Penyikapan atas itu penting karena mazhab kerap menjadi landasan atas munculnya pengelompokan-pengelompokan di kalangan umat Islam. Keputusan Majelis Syura Masyumi menunjukkan sebuah sikap toleran terhadap mazhab, tercermin dari sidang yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 20–21 Desember 1954. Pada sidang itu, diputuskan empat hal, yakni:

> *(1) Masjumi adalah tempat perdjuangan politik ummat dan madzhab untuk mentjapai terlaksanannja adjaran Islam dalam kehidupan perseorangan, masjarakat dan negara Republik Indonesia menudju keridlaan Illahi, (2) Masjumi dengan sepenuh-penuhnja menghormati Madzhab jang dianut oleh anggauta biasa dan anggauta-anggauta istimewanya, (3) Pimpinan partai supaja memberi pendjelasan kalau perlu dengan memanggil djuru-djuru penerangan partai dari daerah-daerah tentang sikap Masjumi terhadap Mazhab, (4) Partai Masjumi djanganlah sampai mentjampuri soal-soal chilafiah jang dapat menjebabkan perpetjahan ummat Islam.*[212]

Sikap Masyumi tersebut mengisyaratkan bahwa partai ini tidak ingin "mengeraskan" perbedaan mazhab itu, tetapi merangkulnya menjadi satu kesatuan. Seluruh ormas Islam dipersilakan hadir untuk menjadi anggota istimewa dan partai tidak akan mencampuri persoalan-persoalan yang bersifat khilafiah. Semangat memberikan akses politik ke berbagai aliran dapat dirasakan. Dengan prinsip ini, terdapat pengurus dengan beragam latar belakang afiliasi keagamaan dalam partai ini.

[212] "Pertimbangan Madjlis Sjuro Pusat: Sikap Masjumi terhadap Mazhab", dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 97.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kenyataannya dalam jajaran Majelis Syura Masyumi terdapat ulama-ulama, baik yang beraliran tradisional maupun modernis. Masyumi menempatkan majelis ini sebagai perwakilan dari perkumpulan-perkumpulan dan aliran-aliran yang terdapat dalam kalangan umat Islam Indonesia. Pada awal pembentukan, bergabunglah tokoh-tokoh besar umat Islam dari berbagai aliran. Situasi ini sempat berubah saat NU keluar dari Masyumi, tetapi secara umum tidak menghilangkan penganut mazhab tradisional di Masyumi. Begitu pula dalam jajaran anggota parlemen yang mewakili partai Masyumi. Partai ini memiliki dua orang anggota parlemen yang mengaku sebagai orang NU.[213]

Dengan demikian, berbeda dari partai-partai Islam lain yang cenderung mewakili satu mazhab saja, Masyumi menjadi tempat berkumpulnya politisi dari berbagai aliran politik. Salah satu pendukung Masyumi dari kalangan Muhammadiyah menyatakan sebuah realitas di dalam partainya bahwa ormas mana pun dapat masuk ke dalam partai ini tanpa harus menanggalkan identitas aliran yang diyakininya. Hal ini karena menurutnya

> *"Masjumi bukan urusan mazhab, tetapi perdjuangan politik! Hanja Masjumi-lah satu-satunja parta Islam tempat kita berdjuang! Sebab, Masjumi tidak menghalangi kita akan berpendirian tidak taqlid, membela idjitihad atau tidak membela mati-matian mazhab Sjafiie. Dan dalam Masjumi kita berluas dada, bukan sadja tidak bermazhab sebagai Muhammadijah, bahkan jang bermazhab Sjafiie, sebagai sdr. Al-Washlijah dan Al-Ittihadijah, Mathla'il Anwar dan lain-lain, semuanja itu mempertahankan Mazhab Sjafiie… Masjumi tidak menghalangi kita dengan pendapat kita, dan Masjumi tidak menghalangi pembela Mazhab dalam kejakinannja pula."*[214]

Beberapa kantong umat Islam, yang memiliki tradisi Islam tradisional yang kuat, tetap memiliki kecenderungan dukungan terhadap Masyumi. Di Jawa Barat dan DKI Jakarta, misalnya, pondok-pondok

[213] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 22

[214] Hamka, *Muhammadijah-Masjumi*, (Jakarta: Masjarakat Islam), 44.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pesantren yang dibina oleh ulama-ulama tradisional, khususnya NU, cukup bertebaran, tetapi di wilayah-wilayah itu Masyumi dapat menjadi kekuatan Islam terbesar, jauh mengalahkan NU. Di wilayah Nusa Tenggara Barat situasinya juga tidak jauh berbeda. Di wilayah yang didominasi para pengikut Nahdlatul Wathan itu, yang dalam aktivitas keagamaannya lebih sejalan dengan kalangan Islam tradisional seperti NU, Masyumi kokoh sebagai pemenangnya. Di Sumatra Utara terdapat Jamiyatul Al-Wasliyah dan Al-Ittihadiyah: dua kelompok Islam tradisional yang memungkinkan Masyumi memperoleh suara terbanyak.

Sementara itu, Masyumi pun bukanlah sebuah kekuatan politik yang monolitik. Menurut Mahendra, Masyumi adalah partai yang dipenuhi oleh orang yang berbeda aliran dan karakter politik hingga mirip biduk yang memuat kalangan Islam dari berbagai kalangan, mulai dari abangan, sarjana berpendidikan Barat, sampai santri.[215] Bachtiar Effendi menambahkan bahwa keragaman itu tidak saja dalam soal pandangan ideologi, tetapi juga masalah etnis.[216]

Terkait dengan masalah pandangan ideologi, tidak lama sejak berdiri, partai ini terlihat memiliki potensi untuk memiliki faksi-faksi, terutama mereka yang dilabeli sebagai "kalangan tua" versus "kalangan muda". "Kalangan tua", yang dimotori Sukiman, dalam berpolitiknya lebih cenderung menjadi *solidarity maker* dan dekat dengan PNI dan NU. Sementara itu, "kalangan muda", yang berkerumun di seputar Natsir, lebih bersikap taktis dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan cenderung dekat dengan PSI. Kedua kelompok itu kerap terlibat dalam perdebatan yang sengit. Saat Natsir menjadi perdana menteri (PM), misalnya, Jusuf Wibisono yang merupakan bagian dari "kalangan tua" yang menganjurkan agar Natsir mengundurkan diri karena telah membentuk sebuah pemerintahan yang mengabaikan PNI sebagai kekuatan politik terbesar kedua saat itu.

---

[215] *Tempo*, 14–20 Juli 2008.

[216] *Tempo, 14–20 Juli 2008.*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sungguhpun demikian, adanya dua kelompok besar di dalam Masyumi tetap tidak menyebabkan faksionalisasi yang parah. Secara umum ada sikap saling menghargai tumbuh di antara mereka yang saling bersaing itu. Para pendukung Masyumi pun cenderung untuk mempersatukan kedua kelompok itu.[217] Tidak mengherankan jika "kalangan tua" tetap diberikan posisi terhormat dalam partai, meskipun pengendalian partai keseharian ada di "kalangan muda". Sukiman, sebagai representasi "kalangan tua", selalu ditempatkan dalam posisi terhormat dalam kepengurusan Masyumi, bahkan saat dipimpin oleh Natsir sekalipun.

Terpisahnya PSII pada tahun 1947 dan NU pada tahun 1952 tidak dilihat sebagai sesuatu yang janggal. Masyumi dapat menerimanya sebagai sebuah kenyataan historis. Natsir dengan tegas dapat menerima pluralitas dalam kehidupan politik. Perpecahan itu juga tidak dengan serta-merta membuat hubungan Masyumi dan partai-partai tersebut penuh dengan ketegangan. Berkenaan dengan partai-partai dan perserikatan-perserikatan lainnya, Masyumi pada dasarnya berpedoman pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 140 yang menyatakan bahwa setiap seorang ada tujuan yang dipentingkannya, maka perintah Allah supaya kita berlomba-lomba berbuat kebajikan dan menyerahkan kepada Allah yang pasti akan menghimpun hasil segala kebajikan itu untuk manfaat sekalian kita bersama.[218]

Terkait dengan PSII, Masyumi tidak berupaya secara sistematis menghantam partai yang notabene "mengkhianati" dan menjadi saingannya itu. Masyumi bahkan masih membuka diri dengan tokoh-tokoh ataupun anggota PSII untuk tetap bekerja sama dan memberikan akses politik kepadanya. Hal ini tecermin dari diberikannya posisi menteri saat Masyumi memimpin pemerintahan. Pada Kabinet Natsir, seorang tokoh PSII Harsono Tjokroaminoto mendapatkan posisi sebagai Menteri Negara. Pada Kabinet Burhanuddin Harahap, dua tokoh PSII di dalamnya, yakni Harsono

[217] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, 64.

[218] "Tafsis Asas Masyumi", dalam Hakiem, *Biografi Muhamamd Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan,* 366.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tjokroaminoto (Wakil Perdana Menteri II) dan Soedibjo (Menteri Sosial).

Pilihan untuk memasukkan tokoh PSII pada masa Natsir tersebut juga agar dirinya mampu membangun sebuah kabinet yang kuat, yang memang tidak mudah dia lakukan karena tidak mendapat dukungan PNI. Hanya dengan memasukkan tokoh-tokoh dari partai-partai kecil saja, termasuk PSII, akhirnya dia mampu untuk membentuk sebuah kabinet. Meskipun kemudian terbukti, sesuai dengan dugaan banyak orang, kabinet Natsir cukup ringkih dan bubar setelah mendapat tentangan yang keras dari parlemen.

Sekalipun kedekatan Masyumi dan PSII kerap dilandasi oleh kepentingan politik, sikap bersahabat dan tetap membuka diri Masyumi tidaklah selamanya dilandasi kepentingan pragmatis itu. Sikap persaudaraan tetap terjaga, yang kemudian memungkinkan beberapa eksponen PSII di beberapa daerah kembali memasuki Masyumi. Di antara yang kembali ke Masyumi adalah Amelz. Beliau adalah tokoh pergerakan Islam yang kembali ke pangkuan Masyumi setelah sebelumnya sempat merapat ke PSII. Kembalinya dia disebabkan kekecewaan atas sikap PSII yang mudah meninggalkan kesatuan partai Islam demi jabatan dalam pemerintahan. Seorang warga Muhammadiyah menyatakan bahwa tidak sedikit kalangan PSII yang akhirnya kembali ke Masyumi setelah menyadari bahwa Masyumi lebih mendekati ajaran Tjokroaminoto, terutama konsisten dalam menjaga persatuan umat Islam.[219]

Sementara itu, hubungan Masyumi dengan NU juga tidak jauh berbeda. Hubungan keduanya memang unik, turun dan naik. Tahun-tahun menjelang berpisahnya NU adalah momen yang demikian menegangkan di antara keduanya. Ketegangan itu tampak membuka "luka lama", yakni konflik klasik antara kalangan modernis dan tradisionalis pada awal abad ke-20. Kelompok NU kerap dengan keras menuduh kalangan modernis sebagai kelompok yang tidak menghormati dan mengucilkan peran ulama. Sebaliknya, sayap modernis menyerang kalangan NU secara tidak langsung se-

[219] Lihat dalam Hamka, *Muhammdiyah-Masyumi*, 44.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bagai kalangan kolot yang tidak paham politik. Sikap NU, juga PSII, dan Perti, yang lebih fleksibel dan pragmatis terhadap PKI juga menjadi titik perdebatan dengan Masyumi.[220]

Selepas perpisahan NU dari Masyumi, pada momen-momen tertentu, ketegangan di antara keduanya kerap muncul. Pada saat pemilu 1955, misalnya, beberapa pengurus di tingkat lokal dan akar rumput kedua partai itu kerap terpancing untuk melakukan manuver saling menyerang. Mereka tampak tidak mematuhi kesepakatan damai yang telah dibangun oleh para elite partai-partai Islam di Jakarta. Ini terjadi, misalnya, antara pengurus Masyumi dan NU di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.[221] Mereka terlibat serang-menyerang, yang terkadang melibatkan masalah-masalah tafsiran agama, terutama persoalan aliran agama yang mereka anut, termasuk persoalan seputar ijtihad dan taklid.[222]

Saling menyerang juga terjadi dengan melabeli pihak lawan sebagai *ahlul bid'ah*. Ketegangan juga sempat muncul saat kalangan NU menerima ajakan Ali Sastroamidjojo untuk masuk dalam kabinetnya dan meninggalkan Masyumi yang tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sikap NU menyebabkan PNI dan PKI mendapat rekan Islam dalam turut menentang Masyumi. Meskipun penuh dengan ketegangan, Pemilu 1955 tetap patut diapresiasi sebagai salah satu pemilu terbaik yang pernah dilaksanakan dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.[223]

Sungguhpun demikian, hubungan antara NU dan Masyumi tidak dapat dikatakan selamanya dalam ketegangan. Justru dalam level elite, terdapat kecenderungan untuk saling menahan diri. Da-

[220] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 135.

[221] Mudhofir, "Nahdlatul Ulama: Masalah dan perkembangannya dalam hubungan dengan Pemilihan Umum 1955 dan 1971" (Skripsi, Universitas Indonesia, 1971) dalam Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, 371.

[222] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, *1945–1965*, 371.

[223] Mengenai pelaksanaan Pemilu 1955 lihat misalnya, Herbert Feith, *Pemilu 1955 di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1999).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lam banyak hal, sikap saling menghargai dan bekerja sama tetap dikedepankan. Sikap Masyumi kepada NU, sama saja dengan PSII, cenderung enggan untuk meninggalkannya. Dalam pembentukan kabinet, misalnya, setelah Partai NU berdiri, Masyumi tetap selalu menyertakan orang-orang NU.

Baik dalam kabinet yang turut dibentuk maupun dipimpin langsung oleh tokoh Masyumi, NU selalu mendapat posisi dalam kabinet. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, terdapat dua orang menteri dari NU, yakni Soenarjo (Menteri Dalam Negeri) dan Mohammad Iljas (Menteri Agama). Kenyataan ini menunjukkan bahwa Masyumi tidak menghentikan akses politik bagi NU untuk terlibat dalam pemerintahan dan kehidupan politik secara umum. Masyumi bahkan memberikan posisi yang strategis kepada NU.

Pemberian posisi menteri kepada NU tentu saja memiliki motif politik, yakni untuk memperkuat dukungan terhadap kabinet yang dipimpin oleh tokoh Masyumi. Namun, kepentingan itu mudah dilakukan mengingat Masyumi memiliki landasan yang kokoh untuk mengakui keberadaan pihak yang berbeda orientasi politiknya. Konteks kedekatan antara tokoh-tokoh Masyumi, seperti Sukiman dan Jusuf Wibisono dengan kalangan NU, lebih bersifat budaya. Hal ini disebabkan tokoh-tokoh itu merasa lebih nyaman dan memiliki kedekatan *chemistry* dengan pihak NU ketimbang dengan beberapa kalangan di Masyumi sendiri. Hal ini memungkinkan hubungan baik antara Masyumi dan NU tetap dapat terpelihara. Bahkan, Sukiman diundang saat Mukatamar NU di Palembang yang memutuskan NU keluar dari Masyumi.

Terkait dengan keluarnya NU dari Masyumi, adanya penyingkiran ulama dalam Masyumi kerap dijadikan alasan utama dari keputusan itu—khususnya terkait dengan keberadaan unsur kiai atau ulama dalam majelis syura di Masyumi. Bagi sebagian kalangan, hal ini dimaknai sebagai upaya sistematis membatasi peran kalangan NU melalui pembatasan peran majelis syura. Sekalipun demikian, hal tersebut disangkal oleh Mahendra yang berargumen bahwa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

peran majelis syura itu sejatinya tidak pernah berubah,[224] tetapi keluarnya NU dari Masyumi pada dasarnya lebih disebabkan oleh kepentingan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dalam pemerintahan. Sementara itu, Deliar Noer melihat bahwa elite Masyumi pada umumnya tetap menaruh hormat kepada ulama tradisional dan meyakini kepentingan politiklah yang menyebabkan NU keluar dari Masyumi.[225]

Pandangan ini didukung oleh Audrey Kahin. Kahin mencatat bahwa Idham Chalid, Ketua Umum Partai NU, tidak merasa bahwa Natsir (sosok yang selama ini dituduh berikap keras terhadap kalangan NU) memiliki karakter yang melecehkan ulama dan kaum tradisionalis, yang kemudian seolah-olah mendorong kalangan NU untuk akhirnya keluar dari Masyumi.[226] Sementara itu, Madinier menilai keluarnya NU dari Masyumi lebih lantaran pimpinan NU merasa terbatas ruang geraknya dalam jajaran pimpinan Masyumi, terutama adanya peluang untuk melakukan petualangan politik di tengah kondisi politik yang cenderung tidak stabil.[227]

Dengan demikian, keluarnya NU sebetulnya lebih pada persoalan kepentingan politik NU sendiri, ketimbang sikap Masyumi yang tidak menghargai ulama. Kepentingan politik yang dimaksud itu terkait dengan kedudukan menteri agama, yang setelah melalui *voting* internal, menetapkan K.H. Fakih Usman dari Muhammadiyah sebagai pemangku jabatan[228] serta terkait dengan kebutuhan internal agar para politisi muda NU mendapatkan posisi politik yang memungkinkan mereka lebih berkembang lagi.[229]

---

[224] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 125–126.

[225] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, 67.

[226] Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy*, 94.

[227] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 133.

[228] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, 87–92.

[229] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 150.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hubungan personal tokoh-tokoh dalam Masyumi dan NU pun tetap berjalan dengan baik. Majalah *Hikmah* yang merupakan corong Masyumi, misalnya, kerap memuat pandangan dan pemikiran tokoh-tokoh teras NU, terutama terkait dengan kepentingan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Sementara itu, pada era Orde Baru, hubungan mesra itu terlihat dari pergaulan yang erat antara Natsir dan K.H. Masykur—salah satu politisi dan sesepuh NU. Saat ulang tahun Natsir ke-80, misalnya, Masykur hadir dalam perayaan itu.

Kerja sama Masyumi dengan partai-partai Islam terbangun dengan lebih baik dan solid dalam parlemen. Masyumi dan partai-partai Islam, seperti NU, PSII, dan Perti saling bahu-membahu dan bekerja sama memperjuangan apsirasi umat Islam. Mereka dikenal dalam sejarah politik nasional dengan perjuangan menegakkan nilai-nilai dan hukum Islam dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara. Hingga dapat dikatakan bahwa aspirasi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak eksklusif Masyumi.

Dalam pada itu, hubungan Masyumi dengan kalangan Islam tradisional pada umumnya tetap baik. Kalangan tradisional di Indonesia dan Masyumi pada khususnya jelas bukan hanya NU. Terdapat kalangan Islam tradisional lain yang diwakili oleh Al-Jamiyatul Washilyah, Nahdlatul Wathan, atau Al-Ittihadiyah. Kenyataannya ulama-ulama tradisional yang tergabung dalam Jamiayatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Matla'ul Anwar, atau Nahdlatul Wathan tidak mengalami ketersinggungan yang sama dengan NU, terkait dengan kedudukan majelis syura.

Sampai dengan Masyumi dibubarkan, kelompok-kelompok Islam tradisionalis itu tetap menyatakan berada dalam Masyumi. Sepanjang perjalanannya dengan Masyumi, mereka mampu membangun komunikasi yang baik dengan penganut modernisme Islam ataupun para politisi yang berpendidikan Barat.[230] Ulama-ulama itu tetap merasa dihargai oleh tokoh-tokoh Masyumi. Bahkan, dalam

[230] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, 68, 103.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masyumi dipercaya bahwa kalangan yang tadinya berseteru karena alasan mazhab menjadi mencoba saling memahami.[231]

Jadi, walaupun hubungan antara Masyumi dengan kelompok Islam lainnya dalam ranah politik sempat berseteru, tetapi tak satu pun disebabkan oleh hal fundamental—sebagaimana terlihat dari program masing-masing, NU dan Masyumi—yang membedakan keduanya pada tahapan sejarah pada masa itu. Oleh karena itu, perspektif negara Islam menjadi terlalu jauh untuk dipertengkarkan hingga ke doktrin-doktrin dasar yang mendasarinya. Pokok percekcokan NU dan Masyumi, sebagaimana terjadi jauh sebelum itu antara PSII dan Masyumi (meskipun keduanya sama-sama menyatakan diri sebagai aliran modernis), terutama adalah persoalan kekuasaan dan persoalan pribadi.

Jika PSII dan NU meninggalkan Masyumi pada tahun 1947 kemudian tahun 1952, hal ini lantaran para pemimpinnya merasa terbatas ruang geraknya karena kurang terwakili di jajaran kepemimpinan. Namun, penyebab paling utama adalah situasi zaman yang memang mengundang aksi-aksi petualangan politik. Krisis kabinet kementerian yang terus berulang memang menciptakan banyak sekali peluang bagi semua formasi politik hingga yang terkecil sekalipun. Penting diungkapkan dalam hal ini bahwa, baik dalam kasus PSII keluar dari Masyumi tahun 1947 maupun NU tahun 1952, perpecahan di tubuh Masyumi terjadi saat pembentukan kabinet baru.[232]

Adapun terkait dengan kalangan minoritas, Masyumi memang tidak dekat dengan kalangan Ahmadiyah. Masyumi pun tidak memasukkan aliran Ahmadiyah untuk menjadi anggota istimewanya. Bagi Masyumi, Ahmadiyah bukanlah bagian dari umat Islam. Perlu diketahui bahwa untuk dapat menjadi anggota istimewa Masyumi, sebuah organisasi harus disetujui oleh setidaknya setengah dari anggota istimewa.

---

[231] Hamka, *Muhammadijah-Masjumi*, 31.

[232] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 133.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada awal-awal pembentukannya, tidak ada satupun angota-anggota istimewa partai, termasuk NU dan Muhammadiyah, yang menyetujui keberadaan kelompok Ahmadiyah dalam partai ini. Alasan utama anggota-anggota istimewa itu adalah Ahmadiyah bukanlah bagian dari *ahlus sunah wal jamaah.*[233] Dengan kata lain, secara tidak langsung Masyumi melalui anggota-anggota istimewanya tidak mengakui Ahmadiyah sebagai bagian dari kelompok Islam. Walaupun demikian, dalam perjalanannya Masyumi tidak pernah melakukan anjuran untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah.

Dalam hubungan dengan sesama kelompok Islam, sepanjang hidupnya, Masyumi juga dihadapkan pada keberadaan gerakan yang dilakukan sekelompok umat Islam yang menginginkan tegaknya syariat Islam sekarang juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan itu dikenal sebagai Darul Islam (DI) dengan sayap militernya yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini kemudian dikenal dengan sebutan DI/TII, yang mendeklarasikan pembentukan negara Islam.

Di beberapa daerah, gerakan ini memang melibatkan beberapa eks pimpinan dan anggota Masyumi. Di Jawa Barat, DI/TII—yang kemudian menginsipirasi gerakan-gerakan sejenis di Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan—dipimpin oleh bekas salah seorang pimpinan pusat Masyumi, S.M. Kartosoewirjo. Di Aceh, Pimpinan PUSA—organisasi yang menjadi anggota istimewa Masyumi—Daud Beureuh, menjadi pimpinan DI/TII. Selain itu, di Sulawesi Selatan, beberapa pengurus Masyumi terlibat dalam gerakan ini. Tidak mengherankan jika kemudian musuh-musuh Masyumi, terutama PKI, kerap mengaitkan Masyumi dengan gerakan pemberontakan ini. Masyumi menolak tegas anggapan bahwa Masyumi sama dengan DI. Menurut Natsir, menyamakan Masyumi dengan DI/TII adalah menyamakan gerakan sosial demokrat dengan kaum stalinis, yang sama-sama terinspirasi oleh marxisme.[234]

---

[233] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi*, 54.

[234] Hendra Gunawan, *M. Natsir Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953–1958* (Jakarta: Media Dakwah, 2000), 68.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Darul Islam (DI) pertama kali mendeklarasikan wilayahnya sebagai Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. DI menyatakan diri sebagai entitas yang secara konsisten menerapkan hukum Islam sebagai landasan pengaturan pemerintahan. Atas dasar itu, DI menyatakan tidak lagi bersama dengan Republik Indonesia, yang dianggapnya kemudian sebagai negara kafir. Belakangan, DI menuntut pengakuan secara *de facto* dari Indonesia, yang tentu saja ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia.

Alasan terbentuknya DI/TII, selain kepentingan membangun negara Islam, juga dipicu oleh beberapa hal. *Pertama*, bagi kalangan DI, dengan dihapusnya kewajiban menjalan syariat Islam dalam konstitusi, RI telah jatuh menjadi negara sekuler. *Kedua*, Pemerintah RI dianggap terlalu akomodatif terhadap pemerintahan Belanda, terutama dengan mematuhi Perjanjian Renville (1948)—yang berujung dengan diterapkannya Garis van Mook—yang telah amat merugikan pihak Indonesia. *Ketiga*, pemerintah juga dianggap telah mengabaikan peran dan jasa pejuang di wilayah-wilayah yang memberontak dengan melakukan reorganisasi yang menyebabkan pemecatan banyak pejuang itu dari keanggotaan TNI. *Keempat*, pemerintah tampak tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pemerataan kesejahteraan serta tidak menghargai kearifan lokal dan karakteristik masyarakat. Khusus untuk Aceh, penerapan syariat Islam yang dijanjikan oleh Soekarno tidak kunjung diterapkan. Belakangan, menguatnya kelompok komunis juga menjadi alasan DI/TII untuk terus melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat.[235]

Meskipun sama-sama menghendaki tegaknya negara atas dasar Islam, sikap dan strategi Masyumi berbeda dengan DI/TII. Masyumi lebih menempuh jalur moderat. Sebelum pertengahan tahun 1955, misalnya, sikap Masyumi jauh lebih terbuka pada Pancasila. Sebagai pimpinan Masyumi, Natsir pada tahun 1952 pernah menafsirkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Sikap Masyumi

[235] Lihat keempat persoalan itu dalam kajian Karl D. Jackson, *Kewibawaaan Tradisonal, Islam dan Pemberontakan. Kasus Darul Islam di Jawa Barat* (Yogyakarta: Grafiti, 1990).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semacam itu jelas berbeda dengan kalangan DI/TII yang melihat penganut ajaran Pancasila sebagai kafir. Sikap moderat Masyumi itu menyebabkannya dianggap tidak layak hidup. Bahkan, pimpinan DI/TII wilayah Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar, menyatakan bahwa keberadaan Masyumi harus dilarang di wilayahnya.[236]

Salah satu tokoh Masyumi, Sjafruddin Prawiranegara, menentang keras pembentukan DI yang menurutnya mementingkan nama di atas kenyataan. Dia juga meragukan bahwa DI adalah sebuah *ideal-staat* bagi Indonesia, apalagi cara untuk mewujudkannya harus menggunakan cara-cara kekerasan. Oleh karena itu, dia menganjurkan untuk menentang DI dengan sekeras-kerasnya.[237] Selain itu, Masyumi tegas untuk menggunakan jalur parlementer dalam semangat demokrasi untuk memperjuangkan cita-citanya. Komitmen terhadap demokrasi ini digambarkan oleh seorang tokoh Kristen, Joppie Lasut, dengan mengacu pada sikap Natsir sebagai pimpinan Masyumi sebagai berikut.

> "Sebuah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa Mohammad Natsir adalah salah seorang tokoh Islam yang gigih memperjuangkan agar syariat Islam menjadi dasar negara di Indonesia. Namun demikian, sebuah kesalahan besar jika menganggap Natsir adalah seorang fundamentalis. Ia adalah orang yang sangat demokratis".[238]

Tambahan pula, Masyumi juga dengan tegas menolak cara-cara kekerasan. Sejak awal pembentukannya, Masyumi telah menarik dengan tegas cara yang harus ditempuh oleh umat Islam dalam memperjuangkan kepentingannya. Dalam "Tafsir Asas Masyumi" disebutkan bahwa *"Masjumi tidak membenarkan sesuatu orang atau sesuatu pihak di dalam negeri menggunakan kekuasaan paksaan*

[236] Gunawan, *M. Natsir Darul Islam. Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan,* 65.

[237] Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt. Sebuah Biografi*, 142–143.

[238] Joppie Lasut, "Bukan Fundamentalis tapi Demokratis", dalam *100 Tahun M. Natsir*, ed. Lukman Hakiem (Jakarta: Penerbit Republika, 2008), 105.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

atau melakukan perkosaan atas sesuatu pihak jang lain untuk menjampaikan maksudnja".[239]

Sikap ini jelas tidak sejalan dengan DI yang memilih membentuk tentara dan mengangkat senjata. Perbedaan sikap Masyumi dengan DI dalam melihat eksistensi negara Republik Indonesia dapat diwakili dari pernyataan Natsir yang mengatakan, "*Kalau rumah jang baru kita dirikan belum memuaskan kehendak kita, apakah lantas kita bakar sadja sampai hangus?*".[240] Atas dasar sikap keras DI/TII tersebut, Masyumi menyatakan menolak untuk mendukungnya. Masyumi kemudian mengeluarkan deklarasi yang menjelaskan posisi dan perbedaannya dengan DI/TII. Disebutkan dalam deklarasi itu bahwa

> *(3) Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dewan Pimpinan Partai menganggap perlu untuk mengumumkan pendjelasan yang tegas tentang perbedaan pendirian politik antara Masjumi dan Gerakan Darul Islam. (4) Masjumi hendak mentjapai maksudnya melalui djalan Demokrasi-Parlementer, melalui djalan juga sesusai dengan Undang-Undang Dasar dan semua Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (5) Dengan pengumuman ini, mudah-mudahan menjadi tambah djelas perbedaan antara pendirian "Masjumi" dan Gerakan Darul Islam bagi umum.*[241]

Dalam upaya meredakan ketegangan, Natsir mengirim utusan kepada para pimpinan DI untuk kembali ke pangkuan republik. Dia juga dalam kapasitas sebagai Perdana Menteri menolak dengan tegas permintaan DI untuk diakui secara *de facto*. Meskipun demikian, sikap Natsir tetap saja kerap dianggap tidak pasti oleh pihak-pihak yang anti-Masyumi.[242]

---

[239] "Tafsir Asas Masyumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 55.

[240] "Berita Masjumi", 24 Januari 1952, dalam Artawijaya, *Belajar dari Partai Masjumi*, xi.

[241] "Berita Masjumi, 24 Januari, 1952", dalam Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 158.

[242] *Suara Masjid*, April 1993, 12–13.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Meskipun menentang keberadaan dan strategi perjuangan DI/TII, Masyumi menolak untuk menggunakan cara-cara militeristik atau kekerasan dalam menyelesaikan kasus DI/TII ini. Masyumi dan beberapa pihak pendukungnya secara konsisten menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan dialog dengan pihak DI/TII dan berjanji memberikan kompensasi yang setimpal bagi mereka yang menyerahkan diri. Bagi Masyumi, pemerintah hendaknya harus dapat memahami akar persoalan di balik kehadiran DI sebagaimana yang telah disampaikan di atas.[243] Karena sikap semacam inilah, Masyumi dinilai tidak tegas, bahkan dianggap mendukung secara sembunyi-sembunyi gerakan ini.

Alasan Masyumi untuk menolak cara-cara kekerasan adalah atas pertimbangan bahwa mereka yang memberontak masih dapat diubah pendiriannya melalui pendekatan persuasif dan melalui komitmen melakukan pemerataan kesejahteraan. Hal ini mengingat salah satu hal yang dipersoalkan oleh kalangan DI/TII adalah ketimpangan kesejahteraan atau distribusi kewenangan militer yang kurang proporsional.[244] Lebih lanjut, sikap ini juga terkait dengan adanya upaya Masyumi menarik simpati para pendukung DI/TII dalam Pemilu 1955, meskipun tidak selamanya berhasil.[245]

Kendatipun pada awalnya pemerintah—dengan dukungan PNI, PKI, dan NU—memilih untuk menggunakan cara-cara kekerasan, belakangan sikapnya melunak dan mau membuka dialog. Kalangan militer dan umat Islam akhirnya sejalan dengan pandangan Masyumi, setuju untuk lebih mengedepankan cara-cara kemanusiaan dan dialog. DI/TII sendiri baru dapat benar-benar ditumpas pada tahun 1962 dengan tertangkapnya Kartosuwiryo oleh TNI.

Kasus DI/TII ini menunjukkan setidaknya dua sikap Masyumi. *Pertama*, penolakan Masyumi atas upaya penegakan sebuah idealisme—dalam hal ini, perjuangan penegakan negara atas dasar Islam—

[243] Gunawan, *M. Natsir Darul Islam. Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan* , 23–24.

[244] Gunawan, M. Natsir Darul Islam. Studi Kasus Aceh, 4–11.

[245] Gunawan, M. Natsir Darul Islam. Studi Kasus Aceh, 37.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan cara-cara di luar parlemen dan menggunakan kekerasan. *Kedua*, Masyumi menolak cara-cara militersitik dalam menghadapi kelompok yang berbeda. Kedua sikap Masyumi ini sejalan dengan semangat pluralisme yang cenderung mengedepankan dialog dan menolak cara-cara kekerasan atau militerisme.

Selain itu, penolakan Masyumi juga terkait dengan karakter dasar DI/TII yang cenderung melemahkan kedudukan nonmuslim dan kaum sekuler dalam banyak aspek. Bahkan, terhadap kalangan muslimin sendiri yang berbeda pandangan, DI/TII pun tak segan bersikap keras. Dengan kata lain, penolakan Masyumi terhadap DI/TII juga disebabkan sikap mereka yang cenderung tidak kondusif terhadap pluralisme.

B. Sikap terhadap Kelompok Minoritas Nonmuslim

Sikap Masyumi terhadap kelompok politik dari kalangan minoritas dapat dilihat dari sikap resmi partai ataupun sikap tokoh-tokoh terasnya terhadap keberadaan kalangan minoritas. Sehubungan dengan hal ini, Mohammad Natsir mengatakan bahwa Al-Qur'an mengajarkan penganutnya agar menghargai dan menjunjung tinggi keyakinan dan pendirian sendiri dengan sungguh-sungguh, serta menghargai hak pribadi orang lain untuk berbeda paham. Toleransi yang diajarkan Al-Qur'an—seperti yang tercantum dalam surah Al-Kafirun yang salah satunya berintikan *lakumdinukumwaliadin* (bagimu agamamu, bagiku agamaku)—bukanlah sebentuk toleransi yang negatif. Toleransi dalam Islam adalah toleransi yang mewajibkan tiap-tiap pemeluknya untuk berjuang—malah mempertaruhkan jiwanya jika perlu—untuk menjunjung kemerdekaan beragama. Bukan bagi agama Islam saja, melainkan juga bagi agama-agama yang lain, agama-agama ahli kitab: melindungi kemerdekaan menyembah Tuhan dalam gereja, biara, sinagoge, dan masjid-masjid di mana disebut nama Allah.[246] "Ini adalah setinggi-tinggi bentuk toleransi,

[246] Hakiem, *Biografi Muhamamd Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan,* 350.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang umat manusia kini masih memperjuangkannya di dalam negara-negara modern sekarang ini".[247]

Semasa eksisnya Masyumi, terdapat dua kelompok politik atau partai politik yang didirikan oleh kalangan agama minoritas, yakni Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Pilihan politik kalangan Masyumi, untuk mendirikan negara atas dasar Islam, tentu saja mendapat tentangan keras dari dua partai itu. Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa pada pertengahan Agustus tahun 1945, seorang tokoh Kristen bernama A.A. Maramis, saat diminta tanggapan oleh beberapa tokoh Islam tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, menyatakan setuju 200%.[248] Terlepas dari itu, masyarakat kristiani, melalui partai Kristen dan Katolik, tentu saja lebih menyambut baik usulan agar kalimat itu dicabut. Akhirnya, mereka menjadi pembela yang gigih hingga saat ini—Pancasila sebagai landasan bernegara. Hal itu dapat dipahami karena bagi umat Kristen, Pancasila tampak lebih memberikan jaminan kebebasan atas keberagaman.[249]

Akan tetapi, kedua partai itu bukanlah kekuatan politik yang signifikan. Hasil Pemilu 1955 memperlihatkan bahwa Parkindo hanya mendapat 2,66% dari total suara dan hanya memperoleh 8 kursi dari 257 kursi yang ada. Sementara itu, PKRI hanya mendapat 2,04% dari total suara atau hanya 6 dari 257 kursi. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda dan kerap terlibat dalam sebuah perdebatan yang sengit, hal itu tidak berarti Masyumi berupaya menyingkirkan kalangan minoritas dalam "panggung politik".

---

[247] Hakiem, *Biografi Muhamamd Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan,* 350.

[248] Wawancara Deliar Noer dengan Prof. Kahar Moezakkir di Bandung, Desember 1957, dalam *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, *1945–1965*, ed. Noer, 37.

[249] *Konstituante Republik Indonesia Panitia Persiapan Konstituis, Sidang ke-III Tahun 1957 Repat ke-28, Hari Selasa, 10 September 1957 dan Sidang ke-III Tahun 1957 Rapat ke-33, Hari Rabu, 18 September 1957* (Jakarta: tanpa penerbit dan tahun), 504.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebaliknya, Masyumi cenderung bersedia membuka kerja sama dan hubungan baik dengan kalangan minoritas. Hal ini dijalankan dengan cukup konsisten. Masyumi, misalnya, selalu mengikutsertakan kalangan minoritas dari kedua partai itu dalam kabinet-kabinet yang dipimpinnya.

Menurut sejarawan Mansur Suryanegara, tokoh Masyumi terkemuka, Mohammad Natsir, sebagai perdana menteri lebih mampu memperlihatkan sikap politik yang berada di atas *bhinneka tunggal ika*. Ini terbukti ketika terjadi pertentangan pada masa penjajahan Belanda dengan politik kristenisasinya dan pada masa penjajahan fasisme kekaisaran Jepang dengan program perang dan romushanya, ia bersama para kolaboratornya meminta supaya tidak ada lagi pertentangan antarsesama pemimpin bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya menteri-menteri dari kalangan Parkindo dan PKRI. Demikian pula sikap politik yang ditunjukkan Masyumi terhadap Partai Islam Indonesia dan pimpinan kalangan kejawen.[250]

Sikap menghargai perbedaan itu dilakukan karena tidak mungkin menyusun kabinet secara mutlak seluruhnya hanya terdiri dari partai Islam. Idealnya memang demikian, tetapi cara itu akan menghasilkan aspirasi yang tidak realistis karena dalam penyusunan kabinet harus menggambarkan kerja sama dan tampak adanya pembagian kerja antarkementerian dengan partai lain atau perwakilan lainnya secara berimbang. Dalam menyusun kabinet parlementer, jumlah kursi pendukung yang ada di DPR harus dihitung. Dengan begini, Masyumi mencoba tetap berdiri pada prinsip demokrasi. Masyumi juga mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif untuk menghadapi pergolakan politik dunia yang sedang terjadi.[251]

Hal itu terbukti pada Kabinet Natsir. Dari 19 anggota kabinet, ada empat orang nonmuslim. Dua di antaranya adalah Menteri Sosial F.S. Harjadi (PKRI) dan Menteri Kesehatan Dr. Johannes Leimena (Parkindo). Pada Kabinet Sukiman Wirjosandjojo, dari 20 anggota

[250] Suryanegara, *Api Sejarah 2*, 324.

[251] Suryanegara, *Api Sejarah 2,* 324.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kabinet, terdapat empat orang nonmuslim. Dua di antaranya adalah Menteri Pertanian Ir. Suwarto (PKRI) dan Menteri Kesehatan Dr. Johannes Leimena (Parkindo).

Adapun pada masa Burhanuddin Harahap, ada dua menteri dari PKRI, yakni Menteri Perekonomian Ignatius J. Kasimo dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Prof. Ir. Suwandi; serta satu orang dari Parkindo, yakni Dr. Johannes Leimena. Ditunjuknya Ketua Umum PKRI sebagai menteri perekonomian, sebuah posisi yang amat prestisius dan strategis, merupakan bukti sikap Masyumi untuk bersedia dengan sungguh-sungguh memberikan akses politik kepada kalangan minoritas.

Sikap mau bekerja sama dengan kalangan minoritas ini bahkan telah dipupuk jauh sebelumnya. Pada masa-masa awal kemerdekaan, saat Sukiman menjadi ketua PPI Belanda, Arnold Manuhutu, tokoh pemuda beragama Kristen Protestan, adalah wakil ketuanya.[252] Sikap untuk mau bekerja sama ini tetap berlanjut ketika Masyumi sudah menjadi partai oposisi. Masyumi bersama partai-partai Kristen dan PSI, dalam hubungannya dengan pembentukan kabinet, kerap menjadi sebuah kubu yang berseberangan dengan kelompok PNI dan PKI.

Dalam membendung upaya Soekarno untuk membangun sistem politik yang otoriter, kalangan Masyumi, PSI, Parkindo, dan PKRI serta beberapa partai lainnya bahu-membahu membangun Liga Demokrasi. Liga ini dibangun sebagai respons atas upaya Soekarno membangun Demokrasi Terpimpin. Kasimo termasuk mereka yang marah dan keberatan atas pembubaran Masyumi.

Kenyataan bahwa kalangan minoritas ini mau bergabung ke dalam kabinet yang dipimpin tokoh Masyumi menunjukkan adanya kepercayaan partai-partai itu terhadap Masyumi. Dari manakah kepercayaan itu muncul? Tentu saja hal itu muncul dari penilaian yang objektif terhadap Masyumi, yang merupakan hasil

[252] Muchtarudin Ibrahim, *Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Hasil Karya dan Pengabdiannya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982), 45.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

akumulasi konsistensi sikap Masyumi atas nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan. Kalangan minoritas ini merasa lebih nyaman berdekatan dengan Masyumi karena mereka yakin bahwa tokoh-tokoh Masyumi dapat mereka percaya.[253] Di samping itu, sikap itu muncul sebagai hasil dari pergaulan personal yang cukup rapat antara tokoh-tokoh Masyumi dan tokoh-tokoh teras kedua partai itu.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Jacob Oetama menggambarkan bahwa kalangan Masyumi telah mempraktikkan pola hubungan yang menghormati pluralisme, termasuk dalam soal membina hubungan baik dengan kalangan minoritas. Hubungan "mesra" Natsir dan Kasimo telah menjadi legenda manis tersendiri dalam kehidupan politik masa itu. Pada saat lebaran, Kasimo dan keluarga kerap mengunjungi rumah Natsir. Sementara Natsir, menurut pengakuan anaknya, mengirimkan bunga kepada Kasimo dan Leimena pada saat tahun baru.[254] Bahkan, menurut seorang tokoh Katolik, Chris Siner Key Timu, ketika hari raya Natal, Natsir selalu berkunjung ke rumah Kasimo.[255] Hubungan baik itu tetap berlanjut pada masa Orde Baru.

Konteks pergaulan yang baik ini dapat dilihat dari pandangan tokoh-tokoh politik Kristen itu terhadap Masyumi dan tokoh-tokohnya. Secara umum, mereka melihat bahwa tokoh-tokoh Masyumi adalah sosok yang demokratis dan menghargai perbedaan. Seorang tokoh Permesta, Nicholas V. Sumual, mengatakan sebagai berikut.

> "M. Natsir bukanlah pimpinan masyarakat Islam saja, tetapi dia betul-betul tokoh nasional yang sangat toleran kepada semua golongan... Secara konsepsional, Islam dia pertahankan mati-matian. Akan tetapi, dalam praktik politik kenegaraan, dia bisa menerima keberagaman dan perbedaan yang ada."[256]

---

[253] Yusril Ihza Mahendra, *Rekonsiliasi tanpa Mengkhianati Reformasi (Versi Media Massa)*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), 33.

[254] *Tempo*, 14–20 Juli. 89.

[255] Chris Siner Key Timu, "Natsir, Aspirasi Islam dan Komunitas Katolik" dalam *100 Tahun M. Natsir*, ed. Hakiem, 68–69.

[256] Herman Nicholas Ventje Sumual, "M. Natsir dan PRRI", dalam *Natsir, Aspirasi*, Hakiem, 260–261.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kesaksian Sumual tersebut memperlihatkan bahwa Natsir tidak memandang rendah keberadaan kalangan nonmuslim. Negara ideal yang dia perjuangkan dengan sendirinya merupakan negara yang menghargai kalangan minoritas dan itu dirasakan langsung oleh Sumual sebagai seorang Kristen.

Terkait dengan sikap yang konsisten terhadap demokrasi, komentar Chris Siner Key Timu dapat menggambarkan sikap Masyumi itu. Saat Timu menanyakan peran Islam dalam kehidupan politik, Natsir dengan tegas dan konsisten menyatakan akan memperjuangkan sebentuk negara atas dasar Islam. Sikap itu dapat dipahami oleh Timu. Namun, Timu juga mencatat bahwa hal itu akan diperjuangkan oleh Natsir melalui jalur demokrasi. Berdasarkan kesaksian Timu, Natsir mengatakan, "Saudara Chris, bagi kami umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami memang diharuskan untuk memperjuangkan penyelenggaraan negara berdasarkan syariat agama kami. Akan tetapi, kami akan memperjuangkan itu secara demokratis".[257]

Hubungan yang terjalin di antara Masyumi dan partai-partai non-Islam memang tidak dapat dilepaskan dengan kepentingan strategis untuk memperjuangkan dan memenangkan sebuah pertarungan politik. Masyumi jelas membutuhkan dukungan partai-partai minoritas untuk mengimbangi PNI dan kelompok komunis. Begitu juga sebaliknya.

Terlepas dari kepentingan politik tersebut, hubungan saling menguatkan (*mutual relations*) ini menunjukkan bahwa antara Masyumi dan kalangan nonmuslim telah terbangun sikap saling menghormati dan saling bekerja sama. Jika dilihat dalam konteks hubungan personal antara tokoh-tokohnya, terlihat bahwa hubungan itu jauh dari sekadar hubungan politik, melainkan hubungan yang dilandasi oleh semangat kemanusiaan dan persaudaraan. Catatan Jacob Oetama menggambarkan secara jujur situasi di mana hubungan semacam itu terjadi. Dia mengatakan sebagai berikut.

[257] Hakiem, *Natsir, Aspirasi*, 70.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> "Saya amat terkesan oleh hubungan baik, bahkan hubungan persaudaraan akrab antara Pak Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya dengan Pak Kasimo, pemimpin Partai Katolik. Persahabatan Pak Natsir, Pak Mohammad Roem, dan Pak Prawoto dengan Pak Kasimo amat mengharukan... Perbedaan pendapat, bahkan konflik pendapat dalam memikir politik tidak mengganggu persahabatan dan persaudaraan."[258]

Beberapa kesaksian di atas memperlihatkan pengakuan yang tulus atas adanya kedekatan yang demikian erat antara Masyumi dan partai-partai nonmuslim melalui perilaku para tokoh-tokohnya. Sebuah perilaku yang didasari oleh kesadaran yang kuat akan penghormatan terhadap keberagaman dan menunjung tinggi toleransi di antara mereka.

C. Sikap terhadap Kalangan Nasionalis dan Sosialis

Kalangan sekuler, baik nasionalis maupun sosialis, adalah pesaing utama bagi Masyumi dalam upaya menegakkan model pemerintahan yang dianggap ideal. Kalangan sekuler dapat dikatakan adalah penghalang dari cita-cita mendirikan negara atas dasar Islam yang diusung oleh Masyumi. Salah satu partai yang mewakili kalangan nasionalis adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Sikap kalangan sekuler yang kerap merendahkan agama dan kalangan agamawan dalam konteks politik menjadi faktor pendorong perlawanan kalangan muslim. Kalangan muslim seolah terpicu untuk membuktikan kemampuan mereka dalam dunia politik dan menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam dunia politik. Dapat dikatakan bahwa hubungan di antara kalangan nasionalis sekuler dengan kelompok Islam penuh dengan persaingan.

Dalam konteks perorangan, persaingan atau perdebatan itu ada dalam wacana yang tersebar dalam tulisan-tulisan di berbagai media. Salah satunya adalah perdebatan klasik antara kedua tokoh besar

[258] Jacob Oetama, "Mohammad Natsir: Jujur dalam Sikap, Santun dalam Tindakan", dalam *Natsir, Aspirasi*, Hakiem, 40.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

partai itu, Natsir dan Soekarno, yang telah dimulai sejak sebelum kemerdekaan dan menginspirasi kedua kelompok itu hingga masa-masa setelahnya.[259] Persaingan itu juga terlihat dari perdebatan dalam PPKI dan BPUPKI. Sementara itu, secara organisatoris, perbedaan itu terlihat dalam perdebatan dalam banyak hal, terutama mengenai dasar negara di Konstituante Republik Indonesia atau DPR.[260]

Sikap saling menjatuhkan dalam kabinet juga tecermin dari upaya mencari celah dan memanfaatkan persaingan internal masing-masing partai. Sikap bersahabat PNI dengan kalangan kiri di parlemen juga menjadi salah satu titik perbedaan dengan Masyumi. Di sisi lain, sikap keras dengan pendekatan militer PNI terhadap DI/TII bertolak belakang dengan pandangan Masyumi yang lebih setuju dengan pendekatan dialogis.[261] PNI juga cenderung mendukung ide Demokrasi Terpimpin dan Nasakom. Dua konsep yang ditolak keras oleh Masyumi. Terkait dengan Soekarno, kedua partai ini juga berbeda.

Secara umum, PNI cenderung sejalan dengan pandangan Soekarno dan menjadikannya sebagai tokoh besar yang dijadikan rujukan. Sementara itu, Masyumi cenderung untuk tidak membesar-besarkan peran Soekarno, bahkan lebih sering mengkritiknya secara terbuka. PNI cenderung untuk setuju atas pembubaran Masyumi (dan juga PSI) tanpa mengeluarkan sikap kritis apa pun atas kebijakan yang anti-demokrasi itu. Dapat dipahami jika PNI tentu merasa pembubaran dua partai saingannya itu akan membawa banyak keuntungan bagi mereka, sesuatu yang belakangan terbukti tidak terlalu benar.

Sungguhpun demikian, hubungan kedua pihak itu tidak selamanya tegang dan berlawanan. Dalam momen-momen kritis, me-

[259] Salah satu buku yang baik membahas polemik kedua tokoh ini misalnya Ahmad Suhelmi, *Soekarno versus Natsir. Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, (Jakarta: Darul Falah, 1999).

[260] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Perbandingan Partai Masyumi,* 204–222.

[261] Gunawan, *M. Natsir Darul Islam. Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan,* 39–40.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

reka dapat bersatu padu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Baik dalam menghadapi agresi Belanda maupun kaum komunis tahun 1948, kelompok ini bahu-membahu mempertahankan eksistensi negara yang masih muda.

Pada awal tahun 1950-an, terjadi hubungan yang unik di antara keduanya. Baik Masyumi maupun PNI merupakan kelompok terkuat yang tidak dapat diabaikan. Keduanya kadang mencoba pula untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak sehingga tercipta sikap saling mendukung antarfaksi dalam tubuh masing-masing. Faksi Sukiman dalam Masyumi membangun aliansi dengan kalangan Faksi Sidik Djojosukarto dari PNI. Sementara itu, Faksi Wilopo di PNI membangun koalisi strategis dengan Faksi Natsir di Masyumi. Hubungan saling menguntungkan berdiri tegak antara prinsip ideologis dan pragmatis. Di antaranya adalah kalangan nasionalis yang bersedia untuk tidak memasukkan kaum komunis dalam kabinetnya. Sementara itu, kalangan Masyumi bersedia untuk tidak membangun kekuatan parlemen daerah yang dipandang PNI akan menguatkan posisi politiknya.

Tarik menarik kepentingan ini pada akhirnya berimplikasi pada penyusunan kabinet. Ada masa-masa ketika kabinet bernuansakan kelompok Natsir yang biasanya mengikutsertakan PSI, PKRI, dan Parkindo. Kabinet ini cenderung lebih bersifat *problem solver* dan *rigid* dalam soal keuangan. Hal ini terlihat, misalnya, pada Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Sementara itu, ada kalangan kabinet bernuansakan dominasi PNI yang berorientasi radikal, cenderung mengecilkan peran Natsir, anti-PSI, dan bersikap moderat dengan PKI di parlemen. Hal ini dapat terlihat pada Kabinet Sukiman dan Kabinet Ali I. Namun, adakalanya terbentuk keseimbangan yang lebih proporsional, seperti yang terjadi pada Kabinet Ali II.

Situasi di atas menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks dan sulit di antara kedua partai itu. Sekalipun demikian, adanya hubungan itu juga memperlihatkan bahwa bagi Masyumi, PNI bukanlah sebuah partai yang harus dijauhi, apalagi diharamkan atau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dihilangkan. Masyumi senantiasa bersedia membuka dialog dan kerja sama dengan PNI di hampir sebagian besar masa hidupnya meskipun kerap tidak mudah.

Walaupun demikian, memang harus diakui bahwa hubungan antara PNI dan Masyumi dalam konteks koalisi pemerintahan di kabinet adakalanya berselisih. Meskipun demikian, jika berpatokan pada pokok-pokok perselisihan antara PNI dan Masyumi, perbedaan yang ada sebenarnya lebih menyangkut bentuk di permukaan ketimbang prinsip mendasar.[262]

Lepas dari itu, hubungan kemanusiaan para tokoh teras Masyumi dan kalangan petinggi kelompok nasionalis dan PNI relatif tetap terjaga hingga waktu yang lama. Pertentangan demi pertentangan tidak pula menimbulkan dendam kesumat di antara mereka. Misalnya, Hamka adalah tokoh yang diminta Soekarno untuk menjadi imam bilamana dia meninggal dan sosok yang diminta Moh. Yamin untuk menemaninya saat menjelang ajal. Kedua permintaan itu dipenuhi Hamka.[263]

Hubungan Roem dengan Oei Tjoe Tat, tokoh Tionghoa yang juga elite Partai Nasional Indonesia, terbangun mesra dengan intensitas saling berkunjung yang tinggi pada masa Orde Baru. Keduanya menyadari bahwa latar belakang pendidikan Belanda membantu mereka untuk terbiasa dalam perbedaan pendapat.[264] Sementara itu, hubungan yang erat juga terbangun antara Sukiman dan Ki Hadjar Dewantara hingga akhir hayat keduanya. Bahkan, Sukiman meminta khusus dikuburkan di lingkungan Taman Siswa agar dekat dengan sahabatnya itu.[265] Jauh sebelumnya, Sukiman juga pernah bersama-sama Ali Sastroamidjojo mendirikan majalah bernama *Janget* (Ikatan).[266]

---

[262] Madiner, *Partai Masjumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral,* 133.

[263] Artawijaya, *Belajar dari Partai Masjumi*, 146–155.

[264] *Tempo,* 14–20 Juli 2008.

[265] Ibrahim, *Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Hasil Karya dan Pengabdiannya*, 116.

[266] Ibrahim, Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Hasil Karya dan Pengabdiannya, 106.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jika hubungan dengan PNI tampak lebih banyak diliputi oleh persaingan dan ketegangan, hubungan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) jauh lebih baik. PSI tampak dapat membangun hubungan yang jauh lebih erat dengan Masyumi ketimbang PNI. Dalam pemetaan ideologi yang dibuat oleh Herbert Feith dan Lance Castles, terlihat adanya irisan yang jauh lebih besar antara Masyumi dan PSI ketimbang Masyumi dan PNI.[267] Ini mengindikasikan adanya kesamaan pandangan dalam lebih banyak hal di antara Masyumi dan PSI.

Salah satunya adalah pandangan mengenai sebuah pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan pragmatisme, yang dapat menyelesaikan persoalan secara langsung dan disiplin. Dalam kabinet yang dibentuk oleh Masyumi, terutama sayap Natsir, PSI dan partai-partai Kristen dan Katolik selalu menjadi kekuatan tersendiri yang kerap berhadapan dengan kalangan PNI, PKI, dan beberapa partai Islam berorientasi tradisionalis. Dalam kabinet yang dibangun oleh Masyumi, terutama dari sayap Natsir—baik yang dibentuk oleh Natsir sendiri maupun yang dibentuk oleh kawan dekatnya semacam Roem dan Prawoto—orang-orang PSI selalu dilibatkan di dalam kabinet. Sementara itu, selain persoalan dasar negara dan menentang kabinet parlemen yang berkecenderungan radikal dengan orientasi *solidarity maker*, Masyumi dan PSI cenderung menjadi satu kubu.

Sikap PSI yang tegas dan bermusuhan terhadap PKI dan tidak mengagung-agungkan Soekarno, tampak sesuai dengan sebagian besar anggota Masyumi. Bersama PSI, Masyumi membangun sebuah model pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai *administrator*. Kedekatan antara Masyumi juga terbangun dengan tokoh-tokoh, baik sipil maupun militer, yang dikenal bersimpati dengan PSI, termasuk Sultan Hamengkubuwono IX, Achmad Subardjo, dan T.B. Simatupang. Dengan karakter administrator yang kental, kedua partai ini cenderung dekat dengan Wapres Hatta, tokoh yang juga dikenal sebagai sangat anti-PKI.

[267] Feith & Castles, *Indonesian Political Thinking 1945–1965*, 160.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Meskipun pada awal kemerdekaan banyak kebijakan PSI dan PM Sjahrir yang tidak dapat dipahami oleh Masyumi—termasuk dalam soal dihapuskannya sistem presidensial dan hasil diplomasi yang cenderung memberikan keuntungan kepada Belanda—kesamaan pandangan personal sudah terbangun sejak awal kemerdekaan antara Natsir dan Sjahrir, terutama dalam soal melakukan pendekatan yang lebih rasional.

Masyumi dan PSI bahu-membahu melakukan kebijakan rasionalisasi dan reorganisasi tentara. Kedua partai ini juga sepakat dalam kebijakan fiskal yang ketat dan disiplin. Sikap Masyumi yang tidak anti terhadap investor asing tampak sejalan dengan pandangan ekonomi yang cenderung pragmatis dari ekonom PSI, seperti Sumitro Djojohadikusumo. Kedekatan Sumitro dengan tokoh-tokoh Masyumi, terutama dengan Sjafruddin dan Natsir, bahkan berlanjut dalam PDRI di mana Sumitro adalah Menteri Keuangan dalam pemerintahan yang dianggap Soekarno sebagai pemberontakan.

Kedekatan di antara kedua partai ini juga terjadi dalam soal penegakan demokrasi. Sosialisme demokrasi yang dianut PSI menginginkan terbentuknya kemandirian dan kedaulatan rakyat yang jauh lebih besar dan kuat—sejalan pula dengan konsep persamaan atas dasar tauhid Masyumi. Sikap yang tidak terlalu disukai oleh Soekarno yang tampak ingin selalu dianggap sebagai "bapak" dan menjadi "penyambung lidah rakyat". Tidak mengherankan kedua partai, yang berkomitmen terhadap kebebasan dan kedaulatan rakyat ini, menjadi ujung tombak dari gerakan yang menolak ide Demokrasi Terpimpin. Hal yang kemudian membuat keduanya menjadi makin berjauhan dengan Soekarno. Keduanya kemudian diminta Soekarno untuk membubarkan diri pada tahun 1960 dengan pendekatan hukum yang kontroversial.[268]

Sungguhpun demikian, tidak seluruh anggota Masyumi memiliki kecenderungan yang sama terhadap PSI. Kelompok Sukiman, misalnya, cenderung berseberangan dengan PSI dan mendekat ke

[268] Yusril Ihza Mahendra, "Ketika Ketua Mahkamah Agung Menghadapi Tekanan Politik", dalam *Rekonsiliasi tanpa Mengkhianati Reformasi, ed. Mahendra, (Versi Media Massa),* 55–58.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

golongan nasionalis.[269] Kabinet Sukiman tidak menyertakan seorang PSI pun sebagai konsesi kesediaan bergabungnya PNI ke dalam kabinetnya. Meskipun demikian, ketidakdekatan itu tidak pula membuat mereka bersikap antipati terhadap PSI. Tokoh-tokoh seperti Sukiman dan Jusuf Wibisono tidak memiliki kecenderungan yang berbeda dengan tokoh Masyumi yang lain dalam melihat keragaman atau pluralisme dalam konteks politik. Bahkan, Sukiman saat memerintah jauh lebih agresif terhadap komunis dibandingkan Natsir ataupun Burhanuddin Harahap. Suatu sikap yang tentu saja sejalan dengan PSI.

Di kemudian hari, hubungan personal tokoh-tokoh Masyumi dengan Sjahrir tetap terjaga baik. Dalam rumah tahanan militer (RTM), di mana banyak tokoh Masyumi dan PSI dipenjara oleh Soekarno, hubungan itu tetap erat. Ada sebuah peristiwa yang menunjukkan hubungan yang baik itu, yakni tatkala Sutan Sjahrir terjatuh di kamar mandi karena serangan strok. Sebagaimana yang digambarkan oleh Sumual:

> "Tubuhnya kemudian diangkat beramai-ramai ke tempat tidur. Semua tokoh Masjumi memijat seluruh bagian tubuh Sjahrir. Mereka tidak tahu apakah pijatan itu menolong atau malah menambah parah sakitnya Sjahrir. Yang penting mereka pijat saja semua bagian tubuh Sjahrir. Sjafruddin, misalnya, dia memijat kepala, Natsir bagian tangannya, dan Burhanuddin Harahap memijat kaki Sjahrir. Tiba-tiba Mochtar Lubis *nyeletuk*, 'lihatlah Masjumi-Masjumi sedang memijat Pemimpin PSI'".[270]

Fragmen di atas sedikit-banyak memperlihatkan bagaimana hubungan yang demikian baik terjalin antara mereka yang memiliki pandangan dan cita-cita politik yang berbeda. Hal ini memperlihatkan secara objektif bahwa perbedaan yang ada di antara mereka itu tidak menyebabkan hilangnya semangat persaudaraan.

Kajian di atas mengindikasikan bahwa Masyumi tidak saja mengakui keberadaan partai-partai sekuler, tetapi juga bersedia ber-

[269] Ibrahim, *Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Hasil Karya dan Pengabdiannya*, 100.

[270] Sumual, "Natsir dan PRRI", 263.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kompromi dan memberikan akses politik serta bahkan menoleransi kepentingan mereka. Hubungan Masyumi dengan kalangan sekuler, terutama PNI, tidak dapat dimungkiri penuh intrik dan kerap diselingi dengan semangat saling menjatuhkan. Adapun hubungan Masyumi dengan PSI agak sulit pada awalnya, tetapi kemudian menjadi lebih mudah setelah tahun 1950. Kesulitan pada awal hubungan itu terjadi karena orientasi atau aliran politik keduanya yang berbeda—PSI cenderung sekuler-liberal, sedangkan Masyumi adalah partai yang anti-sekularisme. Namun, dalam perkembangannya, kedua partai itu menyadari bahwa mereka adalah sama-sama pendukung setia demokrasi dan penganut pendekatan rasional dalam mengisi kemerdekaan, serta menentang segenap bentuk otoritarianisme yang coba dihembuskan dan ditegakkan oleh berbagai kalangan, termasuk Soekarno dengan bantuan angkatan darat dan belakangan PKI.

Keduanya sama-sama menjadi elemen pro-demokrasi dan pro-desentralisasi kekuasan yang ulet, yang berkonsekuensi pada pembubaran kedua partai tersebut oleh Soekarno. Sebagian kalangan percaya bahwa hubungan baik itu semata lebih didasari oleh kepentingan pragmatis dan politik praktis. Itu tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Namun, semangat untuk mengakomodasi dan menoleransi kalangan sekuler, seperti PNI dan PSI, bukanlah sesuatu yang sulit bagi partai seperti Masyumi, apalagi mengingat sikap dasar partai ini yang menghormati perbedaan pandangan politik.

D. Sikap terhadap Kalangan Komunis

Dalam kehidupannya yang singkat, Masyumi dikenal sebagai salah satu partai yang secara konsisten dan keras menentang PKI dan komunisme. Masyumi memang pernah bekerja sama secara singkat pada awal kemerdekaan dengan kalangan kiri dalam Persatuan Perjuangan ataupun dalam Kabinet Amir II. Namun, hal itu sebatas kepentingan strategis untuk mengkritisi pemerintahan yang dianggap tidak aspiratif dan cenderung lemah dalam melawan penjajahan. Sejak peristiwa Madiun tahun 1948, yang tidak saja melukai bangsa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia, tetapi juga umat Islam yang telah menjadi korban dan sasaran utama pembantaian yang dilakukan oleh "kaki-tangan" PKI. Masyumi bersumpah tidak lagi mau bekerja sama dengan kaum komunis pada umumnya dan PKI pada khususnya.

Setelah peristiwa Madiun, Masyumi dan PKI tumbuh menjadi kekuatan yang berseberangan hampir di semua aspek. Ideologi yang saling bertolak belakang menyebabkan hubungan mereka dapat dikatakan saling membenci. Keduanya tampak terlibat dalam perang ideologi yang tak berkesudahan. Hal itu ditumpahkan dalam banyak kesempatan, termasuk dengan menerbitkan bacaan-bacaan wajib yang salah satunya ditujukan untuk melawan ideologi komunisme.[271]

Masyumi secara tegas mengeluarkan anjuran bagi umat Islam untuk meninggalkan PKI. Berdasarkan hasil musyawarah majelis syuro, mereka yang masih ada di PKI dianggap sesat apabila tidak tahu persis ideologi komunisme atau bahkan dianggap kafir apabila paham akan ajaran ini, tetapi tetap menjadi anggota atau simpatisan PKI. Bagi Masyumi, komunisme pada dasarnya melenyapkan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan. Hal ini seperti tertulis dalam *Manifesto Komunis* halaman 65 yang berbunyi, "... yang menjadi sifat komunisme bukanlah penghapusan hak milik pada umumnya, melainkan hak milik perdata. Akan tetapi, hak milik orang-seorang menurut hukum perdata adalah penjelmaan yang terakhir dan paling sempurna dari produksi dan penguasaan atas hasil-hasil produksi yang berdasarkan atas pertentangan kelas dan pada penindasan terhadap kelas yang lain. Dalam pengertian ini, kaum komunis dapat merumuskan teorinya dengan satu keterangan: *penghapusan hak milik perseorangan*."[272]

Selain itu, bagi Masyumi ajaran komunisme memperjuangkan dan melaksanakan cita-citanya dengan sistem diktator-proletariat.

---

[271] Lihat Bab V Media Pendidikan Politik Anti-Komunis buku karangan Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis. Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. (Yogyakarta: Safiria Insania Press dan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2004), 95–104.

[272] "Hukum Islam terhadap Komunisme", dalam Hakiem, *Biografi,* 379.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hal tersebut sebagaimana yang tertulis dalam *Manifesto Komunis* halaman 76 yang berbunyi

> Kekuasaan politik, dalam arti yang sesungguhnya, adalah suatu kekuasaan yang teratur dan terorganisasi dari suatu kelas untuk menindas kelas yang lainnya. Bilamana kaum *proletary,* dalam perjuangannya melawan kaum *borjuis,* dapat menjadikan dirinya sebagai suatu kelas dengan jalan revolusi dan sebagai kelas yang berkuasa dengan jalan kekerasan melenyapkan perbandingan produksi yang lama, maka dapatlah dia dengan melenyapkan perbandingan itu melenyapkan pula segala syarat-syarat yang ada dari pertentangan kelas pada umumnya dan dengan demikian kekuasaannya sebagai sesuatu kelas akan lenyap pula.[273]

Berdasarkan paparan tersebut, nyatalah bahwa komunisme menurut hukum Islam adalah *kufur*. Barang siapa yang menganut komunisme dengan pengertian, kesadaran, dan keyakinan akan benarnya paham komunisme yang nyata-nyata bertentangan, menentang, dan memusuhi Islam, dia hukumnya kafir. Seorang muslim yang mengikuti komunisme atau organisasi komunis—dengan tidak mempunyai pengertian, kesadaran, dan keyakinan atas hakikat, falsafah, ajaran, dan tujuan serta cara-cara perjuangan komunis—adalah sesat dari agama Islam.[274]

Pernyataan kafir ini jelas sesuatu yang amat keras dan tidak pernah diberikan Masyumi kepada partai-partai lain. Ada empat alasan mengapa partai ini menetapkan bahwa komunisme itu haram, yaitu

1) komunisme adalah falsafah yang berdasarkan *historic-materialism* (paham kebendaan). Dengan kata lain, komunisme menolak ide bahwa dunia dan seluruh isinya adalah ciptaan Tuhan.
2) Komunisme memusuhi agama dan memungkiri adanya Tuhan.
3) Komunisme melenyapkan ikatan keluarga dan menjadikan wanita miliki bersama.

[273] "Hukum Islam terhadap Komunisme", dalam Hakiem, *Biografi,* 380.

[274] S.U Bajasut dan Lukman Hakiem, *Alam pikiran dan Jejak Perjuangan PrawotoManhkusasmito Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, 487–496.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

4) Komunisme pada dasarnya melenyapkan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan.[275]

Pada Muktamar ke-IX di Yogyakarta, Masyumi kembali mengeluarkan pernyataan bahwa komunisme membahayakan agama, perikemanusiaan, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, partai ini kembali menegaskan dengan konsekuen tentangannya terhadap komunisme dalam manifestasi apa pun juga.[276]

Selain alasan-alasan tersebut, sikap anti-PKI Masyumi disebabkan kecenderungan PKI untuk menonjolkan peran dan "kehebatan" tokoh-tokoh komunis internasional. Selain itu, hubungan yang erat antara PKI dan Partai Komunis Uni Soviet atau Partai Komunis Tiongkok mengkawatirkan Masyumi akan kemungkinan Indonesia suatu saat nanti akan menjadi negara satelit Uni Soviet atau Tiongkok, yang disebut Masyumi sebagai "imperalis komunis".[277] Terkait dengan ini, Masyumi kerap melihat PKI sebagai bagian dari organisasi internasional yang akan mengajak bangsa Indonesia sebagai "budak Soviet" sehingga tidak lagi bebas merdeka dalam menentukan nasibnya.

Sikap anti terhadap komunisme juga disebabkan bahwa Masyumi tidak setuju dengan prinsip kediktatoran proleteriat sebagaimana yang diyakini oleh PKI. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kaum komunis akan segera mendirikan kediktatoran manakala mendapat kemenangan. Dalam situasi seperti itu, perbedaan akan sulit untuk terjadi. Semua yang dianggap melawan atau

---

[275] "Putusan Madjlis Sjuro Pusat Masjumi tentang Hukum Islam terhadap Komunis", dalam *Pedoman Perdjuangan Masjumi*, cetakan ke-2, (Jakarta: Partai Masjumi Bagian Keuangan, 1955), 82–93. Keputusan itu dibuat dalam pertemuan di Surabaya antara 23–27 Desember 1954, yang dihadiri oleh 11 anggota Majelis Syura yakni H. Moh. Saleh Suaidy (Ketua), K.H Taufiqurrahman (Sekretaris Sidang), K.A.Hasan, K.R.H. Badawi, K.H Salim Fachry, K.R.H. Hadjid, K.H. Imam Gazali, K.H. Ahmad, K. Danial, K.H. Prof. Abdulkahar Muzakkir, K. Umar Hubes, K.H Ahmad Azhary dan Arsjad Thalib Lubis.

[276] "Resolusi Tentang Komunisme", *Muktamar Masjumi ke-IX di Jogjakarta*, dilangsungkan tanggal 23–27 April 1959.

[277] *Kami Memanggil!*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Partai Masjumi Bagian Penerangan, 1955), 30–45.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berbeda dengan kehendak kaum komunis akan disingkirkan. Sistem demokrasi yang dianut Masyumi jelas bertolak belakang dengan konsep pemerintahan ideal PKI itu.

Sudut pandang PKI yang kaku dalam mengategorikan umat manusia menjadi kaum borjuis dan proletar juga berseberangan dengan Masyumi yang meyakini bahwa keberagaman manusia adalah kenyataan sebagai sebuah kehendak Sang Pencipta. Bagi Masyumi, PKI akan dengan sendirinya mengubukan orang pada dua kutub yang akan saling berkonflik, yakni kaum proletar dan borjuis, di mana yang terakhir akan dihabisi manakala kaum proletar yang diwakili oleh kaum buruh dapat menguasai sebuah negara. Dengan demikian, salah satu *focal point* penentangan Masyumi pada komunisme dan PKI adalah terkait dengan persoalan penghormatan atas keragaman kelompok manusia.

Selain ajakan untuk menolak komunisme, Masyumi juga melakukan langkah-langkah konkret untuk menghantam kaum komunis, baik dalam konteks kemasyarakatan maupun pemerintahan. Di beberapa daerah, kader dan simpatisan Masyumi kerap terlibat bentrok dengan kader dan simpatisan PKI. Bahkan, pernah terjadi simpatisan Masyumi di Malang, Jawa Timur, membubarkan secara paksa kegiatan kumpul-kumpul yang tengah dilakukan oleh pendukung PKI.[278] Pada Pemilu 1955, kontestasi yang kental lebih terasa antara Masyumi dan PKI. Hampir dalam setiap edisinya, terutama menjelang Pemilu 1955, majalah *Hikmah* dan media lain yang dikelola Masyumi membahas keburukan-keburukan komunisme dan PKI.

Bagi Masyumi, kekalahan yang nyata dalam pemilu adalah jika komunis dapat berjaya. Salah seorang tokoh dan pengurus Masyumi menyatakan bahwa jika di suatu daerah pemilihan, NU keluar sebagai pemenangnya, Masyumi tidak merasa kalah. Bahkan, jika PNI menang pun Masyumi merasa setengah kalah. Masyumi hanya merasa benar-benar kalah jika di wilayah itu dimenangkan

[278] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 140–141

Buku ini tidak diperjualbelikan.

oleh PKI.[279] Sikap ini menunjukkan bahwa kader-kader Masyumi demikian anti-PKI.

Dalam pemerintahan, Masyumi menolak untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan kalangan komunis. Sikap ini demikian jelas dan tanpa kompromi, sehingga siapa pun yang akan melibatkan Masyumi sebagai mitra koalisi pemerintahan, ia tahu diri dengan tidak memasukkan PKI sebagai bagian dari pemerintahan yang akan dibentuk. Sementara itu, dalam parlemen, Masyumi adalah penantang komunisme yang gigih. Salah satu alasan mengapa Masyumi bersikukuh menolak Pancasila sebagai dasar negara, antara lain, adalah adanya ketidakpastian mengingat ideologi itu telah ditafsirkan secara bebas, termasuk oleh kalangan komunis yang nyata-nyata anti-Tuhan.[280] Pemerintahan Sukiman mengeluarkan kebijakan penangkapan belasan ribu orang yang dicurigai sebagai anggota komunis yang kerap disebut sebagai "Razia Agustus 1951".

Tidak berhenti pada hal tersebut, Masyumi kerap menyokong gerakan-gerakan antikomunis. Dengan alasan ini, misalnya, beberapa orang pimpinan ikut serta ke dalam PRRI/Permesta.[281] Tokoh Masyumi, K.H. Isa Anshary, mendirikan Forum Anti Komunis pada tahun 1953, yang demikian jelas menunjukkan sikap permusuhan terhadap ajaran komunisme. Forum semacam ini ditanggapi oleh Ketua PKI, Dipa Nusantara Aidit, sebagai sebuah tindakan yang gila. Secara umum, Partai Masyumi selalu mencurigai sikap komunis dan upaya sistematis partai ini untuk menghancurkan umat Islam, terutama Masyumi. Oleh karena itu, surat kabar atau majalah yang dimiliki Masyumi, termasuk majalah *Hikmah* dan harian *Abadi,* menjadi corong sikap antikomunis Masyumi.

---

[279] Hamka, *Muhammadijah-Masjumi*, 22–23.

[280] Lihat Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan),* 207–211, dan Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, *1945–1965*, 141.

[281] R.Z. Leirissa, "PRRI: Membangun Indonesia tanpa Komunis", dalam *Tempo,* 14–20 Juli 2008, 76–77.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pihak komunis pun bukannya tidak melakukan perlawanan. Dalam banyak kesempatan, pihak komunis memanfaatkan momentum untuk melakukan serangan terhadap Masyumi. Masyumi dalam pandangan PKI adalah kekuatan borjuis yang menopang ide-ide kapitalisme. PKI kerap pula menyuarakan ide bahwa Masyumi adalah antek imperialisme.[282] PKI juga mengaitkan Masyumi dengan DI/TII. PKI mengatakan bahwa negara yang akan dibangun Masyumi adalah negara teror sebagaimana yang dibangun oleh DI/TII.[283]

Atas inisiatif kader-kader komunis, juga dilakukan fitnah dan penangkapan terhadap tokoh Masyumi. Di samping itu, PKI juga aktif menyudutkan HMI—organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan Masyumi—sebagai kalangan yang diragukan keberpihakannya pada pemerintah dan Bung Karno atau kerap disebut sebagai "kontra-revolusioner". Seorang kader PKI bernama Dasuki mengatakan bahwa PKI tidak anti-Islam, PKI hanya anti-Masyumi.[284]

Sungguhpun demikian, ada beberapa kejadian yang juga menunjukkan sikap kenegarawanan tokoh teras Masyumi dan PKI. Aidit, sebagai pimpinan PKI, kerap terlibat dalam perbincangan yang akrab dengan Natsir. Keduanya tidak canggung untuk menunjukkan sikap ramah dan saling membantu di muka umum.[285] Selain itu, jika Aidit ke Sukabumi, dia kerap menyempatkan berkunjung dan menginap di rumah Isa Anshary yang adalah ketua Forum Anti Komunis.[286] Kendati demikian, hubungan baik itu sama sekali tidak berpengaruh pada sikap tegas partai ini terhadap PKI. Masyumi menyatakan bahwa hubungan baik tetap tidak membatalkan sikap partai terhadap PKI. Bagi Masyumi, PKI adalah partai yang harus

[282] Lihat "Bintang Merah", tahun ke-IX, 1954, 2–3 Februari/Maret. Kongres Nasional ke-V Partai Komunis Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1954), dalam Ar *Belajar dari Partai Masyumi*, Artawijaya, 70.

[283] "Inilah Kepalsuan Masyumi", (Jakarta: Departemen Agitasi dan Propaganda Partai Komunis Indonesia, 1955), 16, dalam Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Perbandingan Partai Masyumi,* 76.

[284] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 210–211.

[285] *Tempo,* 14–20 Juli 2008.

[286] *Tempo,* 14–20 Juli 2008.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dilenyapkan dan mereka yang menjadi anggotanya, dalam pandangan Masyumi, adalah orang yang telah sesat atau bahkan kafir. Sikap itu tidak pernah bergeser hingga akhir hayat partai ini.

Dalam kasus PKI ini, tampak dengan jelas keengganan Masyumi untuk bekerja sama yang mengindikasikan ketidakinginan partai ini untuk hidup berdampingan dengan kaum komunis. Masyumi juga bersifat absolut dengan mengafirkan kalangan komunis. Masyumi pun tidak mau memberikan akses terhadap PKI. Tidak ada toleransi terhadap partai ini. Sekilas tampak bahwa Masyumi tidak menghargai perbedaan pandangan ataupun menghormati pluralisme dalam kasus PKI ini.

Sekalipun demikian, alasan-alasan dari sikap itu, sebagaimana yang telah disampaikan di atas, didasari oleh kepentingan mempertahankan demokrasi, hak-hak individu, dan pada akhirnya pluralisme itu sendiri. Sikap Masyumi ini tampak tidak ada perbedaan dengan sikap kalangan pendukung demokrasi di mana pun yang menolak komunisme, termasuk di negara-negara Barat. Namun, Masyumi tidak menghendaki penghancuran komunisme dengan cara-cara kekerasan. Masyumi tetap berupaya membendung PKI dengan cara-cara persuasif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Natsir, bahwa PKI adalah kekuatan jahat yang akan kita bendung melalui pemilu.[287]

E. Program Masyumi

Sebagaimana diketahui, perilaku politik sebuah partai ditentukan oleh aspek ideologi yang diyakininya. Dengan kata lain, persoalan latar belakang ideologi atau keberpihakan ideologis sebuah partai dapat terlacak dari perilaku politiknya.[288] Perilaku politik bahkan kerap dilihat sebagai bentuk ekspresi ideologi yang paling ekspresif. Salah satu cerminan dari perilaku politik itu adalah terkait dengan program atau kebijakan partai. Oleh karena itu, kajian mengenai

[287] *Tempo*, 14–20 Juli 2008.

[288] David Minar, "Ideology and Political Behavior", *Midwest Journal of Political Science5*, No.4, 1961, 317–331.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

manifesto partai atau kajian-kajian atas respons sikap atas sebuah kebijakan kerap dilakukan untuk merekam perilaku pemilih dan mengukur posisi ideologis partai-partai politik.[289]

Bagian ini akan memaparkan beberapa program Masyumi yang mencerminkan posisi ideologis partai ini. Selain program dan kebijakan yang terkait dengan sikap terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, program dan kebijakan partai dapat juga dijadikan alat ukur dalam melihat komiten partai terhadap pluralisme, terutama terkait dengan komitmen untuk hidup bersama secara adil dan sejajar dengan berbagai golongan dalam sebuah entitas politik yang sama, tanpa berupaya untuk mengurangi hak hidup kelompok-kelompok politik yang berbeda. Semua tampak terpenuhi.

Terkait dengan program-program partai, Masyumi menempatkan ajaran Islam sebagai tuntunan dan panduan atas berbagai program yang dimiliki. Sekalipun demikian, program-program partai secara umum tidak dimaksudkan untuk kepentingan umat Islam semata, melainkan untuk kepentingan nasional. Masyumi lebih memilih istilah *nasional*, ketimbang *Islam* dalam program-program yang dimilikinya. Dalam hal ini, Islam telah ditafsirkan secara kontekstual dan modern untuk menjawab persoalan-persoalan Indonesia.[290] Kendati tidak sepenuhnya berhasil dan koheren, sikap ini mengindikasikan kesadaran dan penghormatan atas keberagaman bangsa yang dipimpinnya. Dengan penyikapan ini pula, tersirat kesiapan Masyumi untuk memimpin bangsa dan bukan hanya umat Islam.

---

[289] Ian Budge & Micheel Laver, "Policy, Ideology, and Party Distance: Analysis of Election Programmes in 19 Democracies". *Legislative Studies Quarterly*, 11(4), (1986), 607–617. Geoffrey Evans, Anthony Heath, & Mansur Lalljee, "Measuring Left-Right and Libertarian-Authoritarian values in British Electorate". *British Journal of Sociology*, *47*(1), (1996), 93–112. Malek Abduljaber, "The Dimensionality, Type, and Structure of Political Ideology on the Political Party Level in the Arab World". *China Political Science Review,* 3, (2) May (2018), 464–494. Sebastian Jackle & James K. Timmis, "Left-Right-Position, party affiliation and regional differencesexplain low COVID-19 vaccination rates in Germany".*Microbial Biotechnology, (*2023), 662–677.

[290] Zainal Abidin Ahmad, *Masjoemi: Partij Politiek Islam Indonesia,* 65.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam soal pendidikan, misalnya, Masyumi tidak menyebut programnya sebagai *sistem pendidikan Islam*, melainkan *sistem pendidikan nasional*.[291] Dalam soal pendidikan ini, Masyumi menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembangunan sikap kreatif dan berpikir logis.[292] Masyumi mewajibkan seluruh warga negara, tanpa terkecuali, untuk bersekolah setidaknya hingga level sekolah dasar. Sehubungan dengan itu, Masyumi memperjuangkan adanya sebuah undang-undang mengenai wajib belajar. Meskipun telah memperjuangkan terciptanya undang-undang itu sejak 1946, barulah pada Kabinet M. Natsir undang-undang wajib belajar itu terwujud.[293] Masyumi juga memiliki program untuk memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta, termasuk yang dikelola oleh ormas-ormas agama, baik yang dikelola oleh kalangan muslim maupun nonmuslim.[294] Pandangan mengenai pendanaan bagi sekolah-sekolah swasta ini mencerminkan sebuah sikap yang menghargai pluralisme. Sebagai partai Islam, Masyumi tidak semata mendorong pemberian dana kepada sekolah-sekolah swasta dari kalangan Islam saja, tetapi juga mendorong agar dana tersebut juga diberikan kepada sekolah-sekolah nonmuslim.

Lebih jauh, Masyumi cenderung melakukan kompromi dalam menyelesaikan persoalan bangsa, bukan menariknya semata atas dasar pijakan ideologis Islam. Masyumi dapat menggunakan pendekatan yang lebih realistis untuk mencapai apa yang dimaksudkan. Pada soal pendidikan, misalnya, Masyumi akhirnya berkompromi dengan kalangan sekuler bahwa pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah sebaiknya bersifat pilihan.[295] Artinya, pendidikan agama tidak diwajibkan harus diikuti oleh peserta didik sebagaimana yang diharapkan sebelumnya, tetapi tujuan agar pendidikan agama diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional tercapai. Masyumi

[291] Pasal 23, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi.*

[292] Pasal 23, Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja.

[293] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 265.

[294] "Program Perdjuangan Masjumi", 63.

[295] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 266.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

juga berupaya membangun universitas di setiap provinsi yang ada, tidak terkecuali di provinsi-provinsi yang mayoritas nonmuslim.[296]

Dalam konteks budaya, Masyumi dengan tegas ingin membangun budaya nasional yang terdiri dari aneka budaya lokal di dalamnya.[297] Disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan daerah dan golongan, yaitu kebudayaan dan kesenian dari berbagai etnis yang ada di Indonesia, dalam upaya membentuk kebudayaan nasional Indonesia. Masyumi, dalam hal ini, dengan jelas tidak bermaksud menyeragamkan budaya-budaya daerah dan lainnya menjadi "budaya Islam". Bahkan, Masyumi tidak memiliki konsep yang pasti tentang apa yang disebut sebagai "budaya Islam" itu. Masyumi juga tidak ingin mematikan budaya-budaya dan seni yang telah ada di masing-masing daerah.

Meskipun demikian, Masyumi menyebut bahwa pemerintah wajib membangun kebudayaan dan kesenian sejauh tidak bertentangan dengan asas-asas Islam.[298] Dalam hal ini, Masyumi tampak berkepentingan menghalangi terciptanya budaya yang terlalu permisif atau liberal yang bertentangan dengan karakter dasar bangsa Indonesia yang bercorak Timur dan bermayoritaskan kaum muslimin. Masih dalam ranah kebudayaan, Masyumi juga memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam dunia pendidikan, yang berarti meluaskan peran bahasa Indonesia lebih dari sekadar bahasa dalam dunia pemerintahan.[299] Agenda ini berangkat dari sebuah kesadaran yang mendalam bahwa salah satu hal terpenting dalam upaya membangun persatuan bangsa adalah faktor

---

[296] Mohammad Natsir, "Membangun di Antara Reruntuhan Puing dan Pertumbuhan", dalam *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan), ed. Mahendra,* 265.

[297] Pasal 18 Ayat 2, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi*.

[298] Pasal 18 Ayat 1, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi*.

[299] Mohammad Natsir, "Membangun di Antara Reruntuhan Puing dab Pertumbuhan", dalam Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jam'at-i-Islami (Pakistan),* 268.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahasa Indonesia yang memainkan peran sebagai *lingua franca*—menghubungkan berbagai suku yang ada di Indonesia. Tanpa ada modal dasar bahasa persatuan ini, akan sulit kiranya membangun persatuan yang kokoh di negara yang multietnis ini. Masyumi juga turut aktif mengganti bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok yang digunakan dalam dunia akademis di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.[300]

Dalam agenda kebudayaan ini, Masyumi tidak melihat adanya urgensi untuk mengeklaim perwujudan budaya Islam. Masyumi bersikap inklusif untuk memperjuangkan sebuah agenda kebudayaan yang mengupayakan tetap berdiri dan dihargainya budaya lokal yang demikian beragam dan berurat akar di berbagai daerah di tanah air. Sikap ini mencerminkan penghargaan terhadap pluralisme, khususnya kebudayaan dan kesenian yang ada di tanah air.

Program ekonomi Masyumi berada dalam naungan konsep ekonomi terpimpin atau ekonomi *dirigee*.[301] Dalam konsep ini, campur tangan negara diakui untuk menjamin keadilan dan pemerataan kesejahteraan, tetapi tidak sampai terlalu mendalam sehingga menghancurkan kemerdekaan individu. Negara tidak hanya membolehkan tiap warga negara mencari rezeki sekuat tenaga, tetapi juga memberikan sebagian untuk sesama guna menciptakan kemakmuran bersama.[302] Sistem ekonomi yang dekat dengan sosialisme itu merupakan cerminan dari sikap Masyumi yang antikapitalisme dan kolonialisme. Dengan keyakinan ini, George Kahin menyebut Masyumi sebagai penganut "sosialisme-religius".

Salah satu tugas negara dalam konsep ekonomi terpimpin itu adalah menghilangkan peraturan ekonomi yang diskriminatif. Perlindungan atau proteksi harus diberikan kepada semua golongan tanpa memandang status keturunan dan golongannya. Masyumi juga

---

[300] Mohammad Natsir, "Membangun di Antara Reruntuhan Puing dan Pertumbuhan", dalam *Modernisme dan Fundamentalisme,* ed. Mahendra, 268.

[301] "Program Perdjuangan Masjumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 61.

[302] Mohamad Natsir, "Kita punya taruhan sendiri untuk pecahkan soal-soal hidup", Abadi, 15 Januari 1952, dalam Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, *1945–1965*, 144.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

cenderung pada sistem koperasi yang mengedepankan semangat kolegial dalam berusaha. Di sisi lain, dalam bidang ekonomi juga ditekankan pentingnya industrialisasi dan pentingnya modal asing, mengingat, menurut Masyumi, bahwa "*modal nasional masih belum mentjukupi untuk membiajai industri itu*".[303]

Sebagai landasan program ekonomi, Masyumi memiliki tujuh prinsip ekonomi yang bersifat nasional atau tidak mengkhususkan pada kalangan umat Islam. Di antara ketujuh prinsip itu adalah

> (5) Pemerintah harus berusaha meningkatkan taraf kemakmuran rakyat dan menjamin setiap orang memperoleh taraf hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya dan keluarganya, (6) pemerintah harus menyediakan pekerjaan bagi setiap orang, sesuai dengan sifat, bakat, dan kecakapannya, untuk turut serta dalam mengembangkan sumber-sumber kemakmuran negara dan rakyat.[304]

Dari dua poin di atas, dapat terlihat bahwa jaminan untuk memperoleh taraf hidup yang bermartabat dan penyediaan lapangan pekerjaan untuk setiap warga negara, tanpa terkecuali, merupakan suatu hal yang menjadi perhatian Masyumi. Dalam hal ini, Masyumi memiliki agenda yang berlaku bagi seluruh warga negara, tidak saja dari kalangan Islam. Dengan agenda itu, Masyumi memosisikan dirinya sebagai partai politik yang siap untuk memimpin bangsa ini dengan ide-ide kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Masyumi pun tidak mengenal konsep *jizyah* (pajak warga negara nonmuslim). Menurut Masyumi, hal ini karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak lagi relevan membaginya menjadi kalangan muslim dan nonmuslim.[305] Pandangan ini cukup progresif, mengingat masih ada kalangan umat

---

[303] "Program Perdjuangan Masjumi" dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, 63

[304] Pasal 13–15, *Konstitusi Masjumi. Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitus Masjumi*

[305] Zainal Abidin Ahmad, "Membentuk Negara Islam", dalam Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Perbandingan Partai Masyumi,* 284.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Islam yang melihat kedudukan kalangan nonmuslim sebagai warga negara kelas dua di sebuah negara berdasarkan Islam.

Pada saat memerintah, Masyumi memiliki karakter yang kondusif bagi pengharagaan dan penguatan pluralisme. Masyumi memosisikan diri sebagai partai yang memimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Masyumi mengedepankan kepentingan nasional dan terlibat aktif dalam mempertahankan eksistensi NKRI. Masyumi, misalnya, terlibat aktif secara langsung dalam upaya-upaya diplomatik mempertahankan keberadaan negara dan memperjuangkan kembalinya Irian Jaya. Masyumi juga konsisten menginginkan sebuah politik negara yang bebas aktif, yang memungkinkan Indonesia lebih independen dalam mengambil keputusan.

Adapun mengenai negara atas dasar Islam sendiri, pada akhirnya Masyumi mengalami pergerseran posisi sebagai hasil kompromi dengan kalangan sekuler. Konsep negara yang dikompromikan dan yang hampir disepakati pada kuartal ketiga tahun 1950-an oleh semua faksi adalah negara nasional yang bersendikan salah satunya nilai-nilai agama, yang tidak hanya agama Islam. Salah satu bagian dari dasar negara itu menyebutkan:

> Negara Republik Indonesia berdasarkan kehendak untuk menyusun masyarakat yang sosialistik yang bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa, dengan pengertian akan terjaminlah keadilan sosial yang menyeluruh dan kemakmuran yang merata dan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih menurut ajaran agama Islam, Kristen, Katolik, dan agama lainnya yang ada di tanah air kita.[306]

Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa para pimpinan Konstituante Republik Indonesia sempat melakukan perundingan untuk mencari bentuk negara kompromi. Menurut Nasution, "mereka sepakat, demokrasi harus dijaga demi menyelamatkan

[306] "Risalah Sementara Sidang Konstituante, Sidang I, Desember 1957", dalam Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Perbandingan Partai Masyumi*, 212.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

konsep pluralisme, menyelamatkan cita-cita negara hukum, juga penghormatan kepada hak asasi manusia".[307]

Dengan pendekatan yang realistis itu, Masyumi juga dapat menetapkan skala prioritas pembangunan Masyumi pada kepentingan-kepentingan yang dianggap urgen. Dalam hal ini, Masyumi tidak hanya fokus pada persoalan-persoalan yang sifatnya pembangunan ideologis saja. Masyumi justru mengedepankan kebijakan-kebijakan konkret yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, salah satu prioritas kebijakan Masyumi adalah pembangunan pertanian dan pengembangan industri yang menopang pertanian. Untuk memudahkan petani memperoleh modal, Masyumi memiliki program bantuan pengadaan modal bagi para petani dan pengusaha.[308]

Selain itu, Masyumi menginisiasi pembentukan Bapindo sebagai bank yang memiliki fokus pada pemberian modal. Bantuan modal ini juga ditujukan untuk menciptakan kelompok kelas menengah atau pengusaha yang kuat. Dalam praktiknya, bantuan modal diberikan tanpa membeda-bedakan golongan (bahkan terhadap kalangan komunis sekali pun). Terkait dengan peningkatan kapasitas industri dan pengadaan modal, Masyumi membuka masuknya investasi asing. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat memperoleh banyak modal dan tenaga ahli untuk menyejahterakan seluruh masyarakat. Sikap semacam ini memperlihatkan tendensi pragmatis Masyumi sekaligus sikap membuka diri terhadap pandangan-pandangan liberal.

Dari penjelasan atas program dan kebijakan Masyumi tersebut, dapat terlihat bagaimana komitmen Masyumi terhadap program-program kepartaian, baik untuk internal maupun bagi masyarakat Indonesia, yang bernuansakan penghormatan dan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap hakikat pluralisme. Bahkan, dalam catatan Yusril Ihza Mahendra, seorang pengamat partai Masyumi, ia meyakini bahwa beberapa agenda dan program Masyumi bernuansakan nasionalistik. Artinya, agenda dan program tersebut

[307] "Dasar Negara Islam tidak Dapat Dipaksakan", *Tempo,* 14–20 Juli 2008.

[308] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,* 286–288.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kerap disuarakan justru bukan oleh partai Islam, tetapi partai nasionalis.

Masyumi—sebagai partai Islam yang lahir dalam pergumulan sejarah—bersama-sama kekuatan politik dari berbagai aliran telah turut melahirkan dan mempertahankan negara baru yang demikian plural dalam banyak aspeknya menuju kemerdekaan hakiki, yakni menciptakan negara yang adil dan makmur bagi setiap warganya. Atas dasar pengalaman dan kesadaran historis yang objektif itu, kemudian Masyumi memiliki kesadaran tinggi atas hakikat keberadaan mereka yang hendaknya harus ditujukan tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga kepada seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Dengan kesadaran ini, Masyumi sebagai partai Islam tidak canggung dan, apalagi, berkeberatan untuk "menelurkan" program-program yang berlaku pada seluruh warga negara.

Meskipun partai ini tidak berupaya menuliskan label Islam dalam sebagian besar agenda atau program-programnya, bukan berarti bagi Masyumi label dan kepentingan umat Islam itu tidak penting. Namun, Masyumi meyakini bahwa hakikat Islam sudah tercakup di dalam program dan kebijakan mereka itu, sehingga secara substansial Masyumi merasa sudah sejalan dengan prinsip atau nilai-nilai Islam.[309] Selain itu, hal ini juga dilandasi kesadaran yang mendalam bahwa masyarakat sebagai sasaran dari program dan kebijakan itu adalah masyarakat yang esensinya plural sehingga perlu didekati dengan cara pandang yang inklusif. Tambahan pula, masyarakat sejatinya tidak saja plural dalam hakikat perbedaan agama (antaragama), tetapi juga adanya keragaman aliran-aliran pada masing-masing agama itu sendiri. Dengan cara pandang substansialistik sekaligus nasionalistik ini, tidak mengherankan jika kemudian semangat menghargai perbedaan itu demikian tertampung dan terimplementasi dalam program dan kebijakan Masyumi.

[309] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, 264.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

F. Menolak Demokrasi Terpimpin

Dalam merespons keragaman yang ada dan upaya membuka kerja sama, Masyumi tidak mencari sebuah keharmonisan yang menghapuskan perbedaan-perbedaan yang ada. Kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Masyumi, meskipun kental nuansa Islam, tidak eksklusif ditujukan kepada umat Islam semata, tetapi kepada seluruh anak bangsa yang tidak menentang keberadaan agama. Hal lain yang juga mencerminkan pluralisme dalam kehidupan politik adalah penolakan partai ini terhadap gagasan Soekarno untuk mengubur partai-partai politik, seiring kemarahannya terhadap keberadaan banyak partai politik pada era demokrasi parlementer. Menurut Soekarno, partai politik sama jeleknya dengan penyakit. Adanya penyakit kepartaian yang menyebabkan kita "cakar-cakaran". Jika hendak memperbaiki keadaan, partai politik harus dibasmi lebih dahulu.[310]

Selain membenci banyaknya partai poltik pada era demokrasi parlementer—yang dianggap sebagai demokrasi impor yang tidak sesuai dengan demokrasi Indonesia itu—Soekarno juga tidak senang dengan keberadaan oposisi. Menurutnya, oposisi yang mengkritik pemerintah sehebat-hebatnya tidak cocok dengan jiwa Indonesia. Oposisi inilah yang menurut Soekarno membuat kita menderita. Oleh karena itu, oposisi arus dihilangkan.[311] Menghilangkan keberadaan oposisi itu setidaknya sesuai dengan pemikiran Soekarno mengenai demokrasi yang dianggap sesuai jati diri bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Terpimpin. Menurut Soekarno:

> *"Demokrasi Indonesia sejak zaman purbakala adalah Demokrasi Terpimpin dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli di benua Asia. Ja benar, tanpa tedeng aling-aling kita memberi talak-tika kepada demokrasi Barat jang free fight liberalistis itu, tetapi sebaiknja pun kita dari dulu mula menolak mentah-mentah kepada kediktatoran. Demokrasi Terpimpin*

[310] Feith & Castles, *Pemikiran Politik Indonesia,* 62–63.

[311] Feith & Castles, *Pemikiran Politik Indonesia,* 67–68.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarchinja liberalisme, tanpa aoutokrasinja dikator."[312]

Gagasan Soekarno untuk mengubur partai-partai dan meniadakan oposisi itu ditanggapi dengan tegas oleh Masyumi. Hal ini dilandasi oleh sebuah argumen bahwa demokrasi adalah sebuah ide yang jelas mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat. Hal itu tidak perlu dipatahkan dengan mengonfrontasi demokrasi versi barat atau demokrasi versi timur. Di mana pun itu, demokrasi yang benar adalah demokrasi yang menegakkan kedaulatan rakyat. Sehubungan dengan itu, melalui Natsir, Masyumi menyatakan pendiriannya dengan mengatakan:

> "Kita tidak dapat mengadakan perbedaan antara 'Demokrasi Barat' dan 'Demokrasi Timur'. Yang ada hanya antara 'demokrasi' dan 'bukan demokrasi'. Sifat esensial dari tiap-tiap susunan demokrasi ialah adanya kemerdekaan mengemukakan pendapat bandingan, dan jadi adanya oposisi. Akan tetapi, apabila dalam suatu negara tidak ada oposisi, di situ tidak ada kemerdekaan berbeda pendapat. Singkatnya, tidak ada demokrasi. Kemerdekaan berbeda pendapat dilandasi dengan suatu prinsip saling menjunjung tinggi moral dan saling penuh penghargaan untuk masing-masing pendirian. ... Prinsip-prinsip tersebut di atas berlaku, baik dalam sistem demokrasi di Barat maupun demokrasi di Timur. Dengan demikian, tidak perlu untuk mengadakan perbedaan-perbedaan antara apa yang disebut demokrasi Barat atau Timur."[313]

Meskipun muncul berbagai reaksi dan kritikan yang menolak pandangan negatif Soekarno terhadap partai politik dan demokrasi parlementer, Soekarno dengan penuh keyakinan terus berupaya mewujudkan gagasannya tentang Demokrasi Terpimpin. Dalam hal ini, Masyumi menempatkan diri sebagai partai yang paling keras menolak konsep Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Soekarno pada akhir tahun 1950-an itu, tepatnya pada November

[312] Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*, (Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 376.

[313] "Demokrasi Barat dan Demokrasi Timur," *Harian Abadi*, 19 Januari 1957.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1959. Konsep ini membayangkan adanya sebuah demokrasi yang dipimpin oleh semangat kolektivisme dan musyawarah yang mengedepankan semangat kebersamaan. Alasan dikembangkannya konsep ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem politik yang lebih stabil sehingga keamanan dan pertumbuhan ekonomi dapat lebih terjamin. Kritik terhadap konsep ini adalah terkait dengan persoalan siapakah yang berhak mengatasnamakan diri sebagai pemimpin itu? Jika mengacu pada konteks Indonesia saat itu, pemimpin yang dimaksud tidak lain adalah Presiden Soekarno sendiri.

Dalam konsep Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menjadi penjuru terhadap segala keputusan dan kehendak negara yang dianggap luhur dan penting. Presiden menjelma menjadi sosok utama yang didaulat untuk dapat memberikan arahan berjalannya kehidupan politik dengan mengatasnamakan kepentingan bersama (*general will*). Pandangan ini adalah khas mereka yang secara substansi tidak menyetujui konsep demokrasi yang memberikan kebebasan secara luas kepada warga negara. Secara substansi, konsep ini lebih dekat dengan bentuk pemerintahan otoriter ketimbang demokrasi itu sendiri.

Soekarno berangkat dari sebuah asumsi bahwa pelaksanaan demokrasi di pertengahan tahun 1950-an telah melenceng dari hakikat kehidupan politik, terutama disebabkan oleh nuansa liberalisme dan individualisme. Alih-alih menyatukan, model demokrasi yang dijalankan selama ini telah membawa perpecahan dan ketidakefektifan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan jatuhnya kabinet, rata-rata setiap 8 bulan, akibat maraknya mosi tidak percaya. Oleh karena itu, Soekarno mengusulkan adanya sebentuk demokrasi yang bersifat kekeluargaan, yang di dalamnya ditandai dengan tidak adanya autokrasi diktator yang sejatinya menjadi lawan bagi demokrasi itu sendiri, tetapi juga bukan disemangati oleh nilai-nilai anarki liberalisme.

Meskipun sepintas konsep tersebut kompatibel dengan semangat kekeluargan yang khas Indonesia, jika dicermati dengan saksama, konsep itu tetap memiliki sikap antiliberalisme yang dapat menjadi fondasi munculnya kediktatoran. Tendensi ini kuat, mengingat arti

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kekeluargaan yang dimaksud mengisyaratkan adanya peran *bapak* dan *anggota keluarga* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika dikonfirmasi siapa *bapak* yang dimaksud kelak, Soekarnolah orangnya. Konsep "bapakisme" ini, amat terbuka peluang munculnya diktator perorangan, yang dapat muncul dan bekerja di atas nilai, prosedur, dan aturan main demokrasi. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Masyumi. Salah satunya tecermin dari pidato Ketua Umum Masyumi terakhir, Prawoto Mangkusasmito. Beliau mengatakan

> "*Apa yang dikatakan sebagai Demokrasi Terpimpin belum jelas bagi Masjumi. Pendirian Masjumi ialah, pimpinan negara dijalankan menurut qoidah-qoidah hukum yang dipatuhi djuga oleh tiap-tiap penguasa, sesuai dengan Preambule dan Pasal 1 Ajat 1 dari Undang-Undang Dasar Sementara, jang menamakan Republik Indonesia ini suatu Negara Hukum (Rechstaat). Pimpinan dari satu kekuasaan yang menempatkan dirinya di atas hukum, (adalah, pen) permulaan dari pertumbuhan ke arah 'negara kekuasaan' (Machtstast) tidak dapat diterima. Masjumi memperdjuangkan suatu rechtstaat bukan machtsaat*".[314]

Belakangan, terbukti "mantra" Demokrasi Terpimpin yang sangat didukung oleh tentara dan PKI ini justru menjadi basis bagi munculnya pemerintahan otoritarian pertama di Indonesia pascakolonialisme. Hal itu ditandai, misalnya, dengan kriminalisasi kalangan oposisi dan tokoh-tokohnya hingga dipenjara tanpa pengadilan, termasuk yang terjadi pada Hamka, Sutan Sjahrir, dan Mochtar Lubis. Selain itu, terjadi pula pembubaran partai-partai, khususnya yang dipandang kritis kepada pemerintah, termasuk Masyumi yang diminta untuk membubarkan diri, menyusul kemudian PSI dan Partai Murba (lawan ideologis PKI dalam menafsirkan marxisme), serta pengawasan dan intervensi kehidupan partai-partai politik, hingga tidak pernah dijalankannya pemilu pada periode Demokrasi Terpimpin itu (1959–1966).

[314] Bajasut & Hakiem, *Alam Pikiran dan Jeka Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*, 79.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebelum akhirnya dilaksanakan, beberapa kalangan telah mengkritik konsep Demokrasi Terpimpin karena potensi akan terkuburnya makna *demokrasi* dan menyisakan *terpimpin* yang secara substansi bersifat otoriter. Hatta dan tokoh-tokoh dari partai oposisi serta-merta menolaknya.

Penolakan Masyumi atas konsep Demokrasi Terpimpin demikian konsisten. Tidak saja di tataran kata-kata, tetapi juga upaya-upaya konkret. Bersama dengan partai-partai lain dan kekuatan demokrasi, seperti PSI, NU, PKRI, Parkindo, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Masyumi memprakarsai berdirinya Liga Demokrasi. Pada 25 Maret 1960, lembaga ini menyampaikan manifesto pertamanya yang menyatakan keberatan atas terbentuknya DPR lewat pengangkatan.[315]

Manifesto tersebut ditandatangani oleh 15 orang yang mewakili partai-partai pembentuk dan mencerminkan sebuah perlawanan terhadap jalannya praktik Demokrasi Terpimpin. Lembaga ini didirikan sebagai perwujudan upaya untuk menentang konsep Demokrasi Terpimpin yang menyuarakan semangat untuk mempertahankan pelaksanaan dan meningkatkan nilai-nilai demokrasi. Atas ketidaksukaan rezim Soekarno yang menganggap lembaga ini telah melenceng dari haluan negara, Liga Demokrasi dibubarkan pada 27 Februari 1961. Atas dasar komitmen mempertahankan sebentuk demokrasi yang murni itulah, Masyumi dipandang oleh George McTurner Kahin sebagai *the last bastion of democracy* (benteng terakhir demokrasi) di Indonesia.

Demokrasi Terpimpin itu sendiri diawali dengan usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945. Presiden menganggap UUDS 1950 tidak lagi dapat dijadikan landasan berpolitik bagi bangsa Indonesia, sementara UUD yang baru tidak kunjung selesai. Ajakan ini mendapatkan dukungan dari 269 orang dalam konstituante, sedangkan 119 orang lainnya menolak. Alasan mereka yang menolak adalah proses demokrasi yang sudah berjalan tidak bisa dihentikan secara mendadak, apalagi berpotensi digantikan oleh

[315] Madinier, *Partai Masjumi. Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral,* 260.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebuah sistem yang cenderung otoriter. Secara konstitusional, usulan tersebut tidak dapat dijalankan, mengingat suara pendukungnya kurang dari 2/3 total suara sebagaimana syarat sebuah usulan kebijakan dapat dilaksanakan.

Namun, Presiden kemudian memutuskan untuk membuat dekret pada 5 Juli 1959. Dekret ini tidak saja menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, tetapi juga membubarkan badan konstituante. Aksi sepihak Presiden Soekarno ini mendapat dukungan dari kalangan TNI dan komunis. Keduanya melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan emas untuk lebih banyak berkiprah dalam konstelasi politik nasional, setelah lebih dari satu dasawarsa hanya berperan di pinggiran. Praktis, setelah ditetapkannya dekret presiden tersebut, Indonesia memasuki tahap baru dalam kehidupan politiknya, yakni periode pemerintahan otoriter yang tidak memperbolehkan adanya oposisi ataupun perbedaan pandangan. Partisipasi politik demikian dibatasi, bahkan beberapa partai, termasuk Masyumi, akhirnya dibubarkan.

Bagi Masyumi dan para pengkritik Demokrasi Terpimpin lainnya, konsep ini lebih merupakan pembatasan kebebasan berpikir dan berkehendak. Atas dasar itu, Masyumi secara jelas menolak ide Demokrasi Terpimpin. Bagi Natsir, Demokrasi Terpimpin adalah konsep yang mengubur demokrasi itu sendiri dan dengan demikian, juga mengubur kedaulatan rakyat. Terkuburnya kedaulatan rakyat jelas merupakan hal yang bertentangan dengan pandangan dan sikap politik Masyumi. Sebagai reaksi atas itu, Masyumi bersatu dengan partai lain untuk memprakarsai berdirinya Liga Demokrasi pada 24 Maret 1960. Sehari kemudian, yakni pada 25 Maret 1960, lembaga ini menyampaikan manifesto pertamanya yang menyatakan keberatan atas terbentuknya DPR melalui pengangkatan. Atas dasar ketidaksukaan, rezim Soekarno menganggap Liga Demokrasi telah melenceng dari haluan negara dan lembaga ini pun dibubarkan pada 27 Februari 1961.

Demokrasi Terpimpin secara esensial bukanlah demokrasi. Dalam beberapa aspeknya, dengan menggunakan indikator demokrasi standar, sulit untuk dikatakan bahwa Demokrasi Terpimpin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berkomitmen dan mempraktikkan dengan sungguh-sungguh demokrasi. Dalam soal pelaksanaan demokrasi, misalnya, Demokrasi Terpimpin tidak membiarkan adanya kebebasan berekspresi yang meluas. Kebebasan berekspresi dimusuhi, bahkan dianggap sebagai tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Padahal, kebebasan berekspresi merupakan salah satu prinsip dasar dari demokrasi di mana intinya rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangan dan sikap sesuai dengan kepentingan dan aspirasi yang dimilikinya. Hal itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, mengingat kebebasan menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, diakui dalam konstitusi itu sendiri.

Dalam hal pelaksanaan HAM, Miriam Budiardjo melihat era Demokrasi Terpimpin merupakan masa mundurnya pelaksanaan HAM. Banyak tokoh-tokoh kritis yang berseberangan pendapat dengan Soekarno dipenjarakan tanpa melalui sebuah proses pengadilan yang jujur dan objektif. Salah satunya adalah Hamka yang merupakan tokoh Masyumi. Ia dipenjara tanpa pengadilan karena dituduh akan melakukan makar kepada kekuasaan yang sah. Suatu hal yang tidak pernah terbukti.

Sosok Hamka adalah figur yang menarik untuk dicermati sejenak. Ia dikenal sebagai ulama sekaligus sastrawan yang andal dan sangat dihormati. Karya-karyanya memiliki pengagum yang luas—bahkan hingga ke negeri Jiran—dan juga berpengaruh dalam dunia kesusastraan Melayu. Pada tahun 1955, Hamka terpilih sebagai salah satu anggota dewan konstituante dari partai Masyumi, mewakili Jawa Tengah. Sebagai ulama, sosok Hamka dikenal dengan narasi besar yang menjadi jiwa kebangsaan pada zaman perjuangan kemerdekaan.

Hamka, yang lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Sumatra Barat, adalah juga seorang penulis yang mencerahkan dan mampu menarik perhatian banyak kalangan. Tulisannya tersebar di berbagai media, mulai dari buku hingga majalah. Salah satu majalah tempat menyemaikan pemikiran-pemikirannya adalah majalah *Pedoman Masjarakat* yang terbit di tahun 1936.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menurut Prof. James Rush dalam *Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern* (2018), majalah *Pedoman Masjarakat* telah menjadi panggung perjuangan intelektual Hamka dalam membangun "imajinasi Indonesia". Dengan kata lain, majalah ini turut memperkaya khazanah tentang negara apa yang nantinya akan dibangun oleh bangsa ini selepas dari tangan penjajahan. Ini juga membuktikan bahwa spirit kebangsaan telah mulai disemaikan oleh Hamka dalam karya-karya tulisnya. Secara teratur, majalah *Pedoman Masjarakat* juga menerbitkan artikel pemikiran Soekarno, Hatta, Agus Salim, M. Natsir, dan aktivis nasionalis lainnya. Mereka diberi tempat sebagai tokoh terhormat dan punya otoritas menyuarakan Indonesia merdeka.[316]

Selain sebagai seorang yang berkomitmen terhadap kebangsaan, Hamka melalui berbagai karya sastranya pun dianggap mampu menilai dirinya sendiri dan membayangkan identitas kaum muslimin Indonesia. Salah satunya tecermin di puisi Hamka tahun 1970.

Bernenek yang turun dari Gunung Merapi/
Berkiblat ke Ka'batullah/
Berpikir yang dinamis/
Bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut James Rush, puisi ini adalah deklarasi Hamka bahwa, "kami muslim; kami modern; kami bangsa Indonesia."[317]

Kembali ke situasi Demokrasi Terpimpin, dalam hal kehidupan partai politik pada masa itu, terjadi pembubaran partai-partai politik secara sepihak tanpa alasan yang jelas, termasuk kepada Masyumi—sebagai partai terbesar kedua—dan PSI. Banyak pihak meyakini bahwa alasan partai-partai itu dibubarkan adalah sikap oposisinya terhadap Soekarno. Begitu pula dengan akhirnya eksistensi pemilu. Dalam kurun waktu tujuh tahun Demokrasi Terpimpin (1959–1966), pemilu sebagai pengejawantahan dari demokrasi tidak pernah

[316] Fajar Riza Ul Haq, *Hamka, Muhammadiyah, dan Integrasi Bangsa*, RT 10 Maret 2024, https://www.kompas.id.

[317] Muhamad Yuanda Zara, *Islam, Modernisme dan Keindonesiaan Hamka, RT 10 Maret, https://www.kompas.id*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sekali pun dijalankan. Soekarno tampaknya tidak menjadikan hal itu sebagai sebuah prioritas. Dia justru lebih mementingkan hal-hal lain, seperti pembangunan proyek-proyek mercusuar dan menjalankan politik konfrontasi melawan apa yang dia sebut sebagai kolonialisme dan imperialisme gaya baru atau Neokolim. Dengan melihat berbagai kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Terpimpin—yang ditentang keras oleh Masyumi—adalah sebentuk pemerintahan yang secara substansial anti-demokrasi dan anti-kritik, yang dengan demikian juga anti-pluralisme karena menghambat berkembangnya keberagaman ideologi, pandangan, dan sikap dalam dunia politik.

Tidak saja menentang keberadaan Demokrasi Terpimpin, Masyumi juga menentang pembubaran konstituante dan diberlakukannya kembali UUD 1945. Bagi Masyumi, hal itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi dan juga, secara esensial, sebuah upaya yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Sikap Masyumi terkait dengan ide kembali ke UUD 1945 ini jelas disampaikan oleh Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito. Dalam sebuah tulisannya, dia melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Soekarno itu dan mengajak seluruh umat Islam melakukan penolakan terhadap ide kembali ke UUD 1945. Alasan utama ajakan ini terkait erat dengan penyelamatan demokrasi Indonesia. Atas dasar itu, Masyumi tidak hanya mengajak kalangan Islam, tetapi juga siapa saja yang memiliki komitmen untuk penguatan demokrasi. Prawoto dengan tegas mengatakan

> *"Masjumi mengimbau partai-partai Islam yang lain agar menolak rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali UUD 1945 dan menyerukan penggalangan kerja sama dengan partai-partai demokratis lainnya untuk berdjoeang bersama-sama, bahu-membahu untuk menjelamatkan demokrasi di Indonesia ini".*[318]

Dalam situasi ketika Presiden Soekarno dengan dukungan penuh militer, sikap penentangan Masyumi dianggap terlalu berani dan

[318] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 251.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kaku. Masyumi memang menjadi motor penggerak penentangan terhadap manuver politik sepihak Soekarno. Suatu sikap yang sekali lagi menunjukkan sebuah komitmen yang tinggi terhadap pluralisme politik, dalam makna penentangan terhadap upaya pembentukan kekuasaan yang monolitik dan mengerdilkan partisipasi politik rakyat.

G. Antara Pluralisme dan Dialektika Islam-Negara

Sepak terjang Masyumi yang mencerminkan sikap pluralisme itu tidaklah berdiri di ruang hampa. Sikap pluralisme Masyumi merupakan hasil dari terjadinya dialektika antara Islam dan negara, yang mengiringi perjalanan sejarah partai Masyumi sebagai bagian dari kelompok Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dialektika yang terjadi antara Islam dan negara dalam konteks Indonesia itu setidaknya bisa dilihat dari aspek historis Islam sebagai perekat NKRI dalam sejarah masuknya Islam di Nusantara, dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Akhirnya, secara struktural, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai, Demak, Pajang, Mataram, Goa, Banten, dan sebagainya. Masuknya Islam, baik secara kultural maupun struktural, merupakan sebuah proses yang damai dan dialogis. Penduduk Nusantara dengan sukarela masuk ke dalam agama Islam.

Istilah masuknya Islam—yang oleh beberapa kalangan terkadang disebut "islamisasi"—apabila kita mengacu pada teori, seperti yang dikutip oleh Ahmad M. Sewang, proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya meliputi tiga tahapan: (1) tahap kedatangan Islam, (2) tahap penerimaan Islam, dan (3) tahap penyebaran Islam lebih lanjut.[319] Sementara itu, menurut Mukti Ali seperti yang dikutip oleh Kamaruddin Hidayat, proses masuknya Islam ke Nusantara meliputi aspek-aspek: (1) kontak pertama Islam

[319] Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad Ke XVI–XVII)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 80.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan berbagai wilayah Nusantara, (2) penerimaan Islam oleh penduduk atau raja-raja setempat, (3) penyebaran Islam secara meluas, dan (4) pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam.[320]

Islam kemudian tumbuh sebagai agama yang egaliter dengan etos kerja dan budaya dagang. Islam telah membangkitkan semangat dagang dari para pemeluknya yang terutama tinggal di pesisir. Pranata-pranata sosial keagamaan dan budaya yang diciptakan dari perkembangan Islam di Nusantara serta penulisan kitab keagamaan dan komunikasi dalam bahasa Melayu sangat efektif sebagai faktor pendorong terjadinya integrasi bangsa Indonesia. Sejak abad ke-16 praktis kepulauan Nusantara telah diintegrasikan oleh Islam. Kemudian, dalam tiga atau empat abad, Islam mampu menjadi agama rakyat yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia. Ketika kolonialisme datang ke Nusantara, Islam sebagai agama yang tumbuh secara egaliter itu menolak dengan tegas. Kesadaran nasionalisme umat Islam pada fase awal dalam praktiknya mengambil bentuk yang bersifat konfrontasi langsung dengan melakukan pertempuran terhadap kolonial, yang ditandai dengan pecahnya berbagai peperangan yang dipimpin tokoh umat Islam.

Selain itu, kita mengenal perlawanan terhadap kolonialisme secara modern melalui jalan pergerakan organisasi. Pada masa itu, para tokoh Islam juga turut mendirikan organisasi modern. Bahkan, Sarekat Islam (SI) menjadi salah satu organisasi paling menonjol dan menghendaki pemerintahan sendiri oleh rakyat Indonesia serta menuntut kemerdekaan sepenuhnya dari penjajah. Demikianlah SI kemudian menjadi tumpuan bagi kerumunan mayoritas warga Hindia Belanda yang saat itu seolah hidup nyaris tanpa kebanggaan identitas. Dengan prinsip "*nasionalistisch-islamistisch*", SI memberikan semacam identitas bagi para pribumi yang hakikatnya terjajah dan berserakan itu. Dengan adanya semangat identitas baru itu, SI memiliki kemampuan untuk tidak saja mencanangkan upaya penyadaran untuk tidak lagi terpecah-pecah, baik atas dasar status maupun etnis, tetapi juga menumbuhkan semangat perlawanan atas

[320] Kamaruddin Hidayat & Ahmad Gaus Af, *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara* (Jakarta: Mizan, 2006), 75.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kolonialisme berdasarkan kesadaran identitas itu. Di sini akhirnya berlakulah hukum identitas. Adanya dentitas akan membawa kaum bumiputra pada kebanggaan, kesetiaan, sekaligus kesediaan untuk berkorban para pemiliknya.

Sehubungan dengan gerakan kebangsaan, para peneliti dan pemerhati gerakan kebangsaan Indonesia yang objektif secara umum meyakini bahwa SI merupakan organisasi pertama yang bersifat lintas kelas dan etnis, bahkan ideologi.[321] Dalam kapasitasnya tersebut, organisasi ini dipandang sebagai sebuah agensi yang memiliki karakteristik pemersatu yang berjiwakan semangat nasional. Jika Boedi Oetomo pada dasarnya dilihat oleh sebagian kalangan sebagai organisasi pergerakan yang cenderung bersifat elitis dan bahkan punya kecenderungan menjadi pendukung terbentuknya "nasionalisme-Jawa",[322] SI merupakan organisasi yang berkontribusi dalam menegakkan akar kebangsaan dan persatuan Indonesia. Rasa kebanggaan akan identitas itu dalam SI tecermin, misalnya, dari penggunaan bahasa Indonesia dalam pertemuan-pertemuan organisasi, anggaran dasar (*statuten*), dan dokumen-dokumen resmi[323] dan penggunaan istilah "kongres nasional" dalam acara pertemuan tahunan sejak tahun 1916 yang memperlihatkan komitmen bahwa SI diperuntukkan bagi seluruh bangsa dan sebagai cerminan perjuangan membentuk pemerintahan nasional sendiri.[324]

---

[321] Mengenai sejarah pembentukan Sarekat Islam yang didahului oleh Sarekat Dagang Islam (SDI), sebuah organisasi yang dibentuk oleh H. Samanhudi 1905 dan juga belakangan oleh R.M Tirtoadisuryo 1910, di bilangan Bogor, lihat misalnya Noer *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965*, 114–118. Lihat juga A.P.E Korver, *Sarekat Islam. Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta; Grafiti Pers, 1985), 11-21.

[322] Lihat misalnya pandangan sedemikian dalam Syafiq A Mughni, "Munculnya Kesadaran Nasionalisme Umat Islam", dalam Hidayat & AF, Menjadi *Indonesia. 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, 527.

[323] Penggunaan Bahasa Indonesia terlihat bukan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan berorganisasi saat ini, tetapi pada masa itu hal tersebut dipandang sebagai suatu keradikalan yang menyebabkan organisasi moderat-konservatif semacam Boedi Oetomo enggan untuk melakukannya.

[324] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia,* 126.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keinginan untuk merdeka itu terungkap, misalnya, dari pandangan H.O.S. Tjokroaminoto yang mengatakan pada suatu saat nanti, "tak boleh tidak, kita kaum muslimin mesti mempunyai kemerdekaan umat atau kemerdekaan kebangsaan dan mesti berkuasa penuh atas negeri tumpah darah kita sendiri".

Kesadaran semacam inilah, menurut George Kahin, memperlihatkan agenda politik SI yang menghendaki pemerintahan sendiri dan menuntut kemerdekaan sepenuhnya dari kaum penjajah.[325] Ekspresi semangat perlawanan—dengan sikap menentang setiap kebijakan yang dianggap merugikan bumiputra—yang secara kontinu dilakukan oleh Tjokroaminoto dan Moeis dalam sidang-sidang Volksaard. Puncaknya adalah pada tahun 1921, ketika SI keluar dari Volksraad, sebuah institusi perwakilan yang disebut oleh Agus Salim sebagai "komidi omong". Bahkan, sebelumnya, Salim—sebagai tokoh teras SI—menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad sebagai simbol protes terhadap tidak dipenuhinya tuntutan bumiputra. Tercatat dalam sejarah bahwa apa yang dilakukan Salim itu merupakan kali pertama bahasa Indonesia diperdengarkan secara formal dalam forum resmi Volksraad.

Dari realitas sejarah itu, sangat jelas bahwa Islam tidak merintangi nasionalisme. Justru melalui kelompok Islam, nasionalisme Indonesia dapat tumbuh subur. Pergerakan-pergerakan Islam sudah lama memiliki ikatan kebangsaan. Misalnya, dibandingkan dengan Boedi Oetomo yang berbasis kaum priayi Jawa, gerakan Sarekat Islam (SI) justru bersifat nasional. Islam bisa dikatakan mampu berperan sebagai faktor pemersatu.[326] Begitu pula Masyumi, para tokohnya pada masa perjuangan kemerdekaan dikenal sebagai para patriot sejati. Partai Masyumi telah memainkan perannya dalam setiap persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Ketika Indonesia masih di bawah bayang-bayang kembalinya penjajah untuk menguasai

[325] Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, 66.

[326] Lihat misalnya padangan seperti itu dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982). Firman Noor, "Menimbang Perjuangan Kebangsaan Sarekat Islam (SI) dan Relevansinya Bagi Kehidupan Politik Bangsa Saat ini", *Masyarakat Indonesia,* 34, No.2, 2008.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia lagi, Masyumi turut serta membendung dan melakukan perlawanan, baik melalui jalur perang—sebagaimana yang diperjuangkan barisan Hizbullah sebagai *underbouw* Masyumi—maupun melalui jalur diplomasi.

Beberapa tokoh Masyumi pun pernah menjabat dalam beberapa posisi penting di level nasional, termasuk sebagai perdana menteri dan menteri-menteri dalam beberapa kabinet. Salah satu pimpinan partai, yakni Sjafruddin Prawiranegara, pernah menjabat sebagai Pejabat Presiden pada sebuah pemerintahan bawah tanah yang disebut sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tatkala Soekarno dan Hatta ditahan oleh Belanda pada tahun 1948. PDRI dibentuk untuk menunjukkan kepada dunia bahwa republik masih ada.[327]

Sama juga halnya ketika masyarakat menuntut untuk mengembalikan bentuk negara Indonesia ke negara kesatuan, Masyumi berperan aktif untuk memperjuangkannya sebagaimana yang diperankan oleh Mohammad Natsir melalui mosi integralnya untuk mengganti RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950.

Kemudian, sebagai kalangan yang memiliki rasa nasionalisme dan kontribusi besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak ada alasan bagi Masyumi untuk tidak berperan dalam panggung politik nasional. Untuk itulah, Masyumi berdiri menyambut proses demokrasi Indonesia.

Keikutsertaan Masyumi dalam proses demokrasi itu diwarnai oleh kesadaran bahwa maju-mundurnya Indonesia ditentukan oleh sejauh mana peran umat Islam di dalamnya karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam. Sebagai mayoritas, umat Islam bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan NKRI yang sama-sama diperjuangkan kemerdekaannya dahulu. Apabila Masyumi menginginkan umat Islam yang kuat dalam negara Indonesia yang maju, di mana umat Islam menjadi pelaku yang

[327] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia,* 199.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menentukan arah dan isi jalannya negara serta menjadi tulang punggung negara dalam konteks Indonesia yang plural secara agama dan etnik, format perjuangan umat Islam haruslah damai dan non-kekerasan.

Dengan demikian, arah perjuangan Masyumi terbentang di antara dua pilihan, yaitu kultural dan struktural. Masyumi sebagai partai Islam berpeluang untuk melakukan langkah islamisasi kultural melalui berbagai media dakwah dan pranata budaya, demi menguatkan basis kebudayaan dan intelektualitas umat dari bawah.

Namun, dalam perjalanan awal, Masyumi lebih memilih islamisasi secara struktural melalui jalur politik. Melalui jalur politik, Masyumi mencoba untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam penyelenggaraan negara, yaitu melalui ranah legislasi dengan menghadirkan undang-undang. Pilihan Masyumi untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam ranah politik itu sesuai dengan keinginan Soekarno pada awal kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Soekarno menyerukan kepada golongan Islam untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui badan perwakilan. Ia tidak setuju jika Indonesia secara langsung mendirikan negara berlandaskan Islam tanpa melalui musyawarah mufakat di lembaga perwakilan.

> *"Jikalau kita memang rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia yang sebagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya menggerakkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya, badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka Islam. Dengan sendirinya, hukum-*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu hukum Islam pula".[328]

Jadi, kehadiran Masyumi tidaklah dapat dipisahkan dari tantangan Soekarno tersebut, agar pemimpin-pemimpin Islam mampu menggerakkan segenap rakyat, sehingga mampu mengisi sebanyak-banyaknya badan perwakilan dengan utusan-utusan dari kalangan umat Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cita-cita Masyumi telah berubah dari pendirian negara Islam menjadi mengislamkan negara melalui penguasaan mayoritas badan perwakilan.

Dalam hal ini, Masyumi terlihat tidak memilih untuk mewujudkan negara Islam yang menerapkan syariat Islam ataupun negara sekuler yang menolak syariat. Akan tetapi, hal yang lebih diinginkan Masyumi adalah negara Indonesia yang merealisasikan ajaran-ajaran agama dengan hadirnya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal melalui perjuangan demokrasi dan konstitusional sehingga tercipta negara yang islami. Langkah Masyumi dalam melakukan islamisasi struktural itu terlihat di dalam mukadimah "Tafsir Asas Masyumi."

> *"Kita perdjuangkan ini dengan melalui djalan yang sjah, sebagaimana jang terbuka djalannja dalam Negara Republik kita jang berdasarkan kedaulatan rakjat, melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara demokrasi. Tjita-tjita jang luhur dan sutji ini hanja dapat ditumbuhkan dalam ketertiban dan keamanan. Kekatjauan tak dapat tidak mengakibatkan pemborosan tenaga, harta, dan djiwa, dan tidak dapat dipertanggung-djawabkan."*[329]

Agar negara yang islami dapat terwujud, Masyumi harus dapat melaksanakan ajaran agama yang *rahmatan lil alamin* (universal) dengan menghormati pluralisme yang ada di Indonesia untuk di-

[328] Marcel Bonnef, "Pantjasila Trente Annees de Debates Politiques en Indonesia" (Paris: Edition de la Masion des Sciences de l' Homme, 1980) dalam Madinier, *Partai Masjumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral,* 58–59.

[329] "Tafsir Asas Masyumi", dalam *Pedoman Perdjuangan Masjumi*, 46.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sinergikan demi terwujudnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, dan mampu membela kedaulatan negara. Mengingat dalam pandangan Masyumi bahwa memperjuangkan islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan sikap adil dan bijaksana terhadap kelompok nonmuslim, pihak yang berbeda organisasi, ataupun pihak yang berbeda pandangan politik.

> *"Kita perdjuangkan ini, dengan menjusun tenaga dengan tertib, dengan membangunkan peri kehidupan lahir-bathin, pengertian dan achlak ummat, dan mendidik sifat, kekuatan, dan ketjakapan untuk memperoleh segala sjarat mendukung dan mengembangkan tjita-tjita Islam sebagai tata-tjara hidup (way of life) jang memberikan rahmat bahagia bagi segenap machluk (rachmatan lil'alamien)."*[330]

Tekait dengan sikap menghargai pluralisme, Masyumi dengan jelas tidak menafikan kelompok-kelompok lain yang ada di Indonesia, termasuk kelompok atau kalangan dari agama-agama lain. Bagi Masyumi, hal itu merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari sebuah negara yang diidam-idamkan oleh Masyumi. Hal ini terlihat, misalnya, dalam penafsiran anggaran dasar perihal wacana negara yang berlandaskan keislaman.

> *"Kita menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang berkebajikan dan diliputi ampunan Ilahi. Di mana negara melakukan kekuasaannya atas musyawarah dengan perantara wakil-wakil rakyat yang dipilih. Di mana kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan sosial sebagai yang diajarkan oleh Islam terlaksana sepenuhnya. Di mana kaum muslimin mendapat kesempatan untuk mengatur kehidupan pribadi dan masyarakat sesuai dengan ajaran serta hukum-hukum yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Di mana golongan keagamaan lainnya memilih kemerdekaan untuk mengamalkan agamanya serta mengembangkan kebudayaannya. Di mana seluruh penduduk dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman dan terjamin baginya hak-hak asasi manusia*

[330] "Tafsir Asas Masyumi", dalam Pedoman Perdjuangan Masjumi, 46.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi, dan politik, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnja sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan susila."[331]

Dari tafsir anggaran dasar perihal wacana negara yang berlandaskan keislaman tersebut, terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan demi sampai pada titik di mana terwujud negara berlandaskan keislaman. Usaha-usaha tersebut tertulis dalam pasal IV yang berisi poin-poin yang ditujukan untuk umat Islam ataupun upaya menjalin kerja sama dengan kelompok lain, yakni

1) menginsafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik;
2) menyusun dan memperkokoh kesatuan dan tenaga umat Islam Indonesia dalam segala bidang;
3) melaksanakan kehidupan rakyat terhadap perikemanusiaan, kemasyarakatan, persaudaraan, dan persamaan hak berdasarkan takwa menurut ajaran Islam; dan
4) bekerja sama dengan golongan lain dalam lapangan yang bersamaan atas dasar rasa saling menghargai.[332]

Sebagai partai yang merepresentasikan nilai-nilai keislaman, pada masa kampanye, Masyumi justru melucuti hampir semua acuan keagamaan. Partai pimpinan Natsir itu bermaksud melepaskan diri dari kesan militan dengan harapan bisa menjadi simbol demokrasi muslim pembawa kedamaian. Untuk kepentingan itu, Masyumi harus lebih dahulu menghapus citra ekstremis agama yang kerap disematkan kepadanya oleh para pesaing politiknya, baik kaum komunis maupun nasionalis. Masyumi tak hentinya dituduh mengancam integritas negara lantaran mengusung tuntutan-tuntutan Islam

[331] "Tafsir Asas Masyumi", dalam Pedoman Perdjuangan Masjumi, 46.

[332] Pasal IV, *Anggaran Dasar Partai Politik Indonesia Masjumi*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

radikal, terutama sejak pidato Soekarno di Amuntai tahun 1953 berupaya menampilkan wajah keterbukaan.[333]

Selain itu, demi menyongsong Pemilu 1955, Masyumi tak ragu melucuti wacana mereka dari semua peristilahan yang terkesan agresif, yang tentu berisiko mengaburkan identitas keislaman mereka. Istilah "negara Islam" sedapat mungkin dihindari. Tak sekali pun pernah terucap rencana untuk mengislamkan institusi negara.[334]

Dengan demikian, tidak heran jika pada tahun 1955, Partai Masyumi sibuk menyiapkan gagasan untuk menghadapi pemilu. Gagasan tersebut dituangkan dalam 55 program politik Partai Masyumi terbaru dengan tidak mencantumkan kata ataupun kalimat tentang *Islam* atau *muslim*. Dalam hal ini, Partai Masyumi mengalami pergeseran cita-cita politik. Cita-cita yang terbaru ini yaitu mewujudkan negara dengan nilai-nilai yang lebih universal: egaliterianisme, libertarianisme, dan sebagainya.[335]

Program tersebut diawali dengan proklamasi prinsip-prinsip dasar yang, meski tidak bersama-sama, bisa disebut "Pancasila Masyumi". Tujuan utama partai adalah "*menegakkan negara hukum jang mendjamin keselamatan djiwa dan harta benda semua penduduk Indonesia, baik warga negara maupun asing*", mewujudkan permusyawaratan perwakilan, kebebasan menjalankan agama, perikemanusiaan dengan tambahan, serta melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, dipaparkan program kebijakan ekonomi yang bernafaskan sosialistis, yakni kegiatan produksi dan distribusi barang berdasarkan "*rentjana*" bagi sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat dan pembatasan konstruktif persaingan usaha, serta berbagai program lain yang tidak lebih bersifat universal.

---

[333] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral,* 196.

[334] Madinier, *Partai Masyumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, 196.

[335] Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda, Zia Hulhak, & Ahmad Bajuri, "Partai Masyumi: Mercusuar Politik Identitas Islam Positif di Indonesia (1945–1960)", *Historia*, Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah 6, No.1 (2023), 32.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan, program ini terkesan hati-hati dan menentramkan dalam hal institusi kenegaraan, dermawan, bahkan cenderung berani dalam bidang ekonomi dan sosial, meskipun langkah realisasinya tidak dikemukakan secara terperinci. Strategi elektoral Masyumi ini merupakan pertaruhan yang amat ambisius. Oleh karena yakin dengan kepastian suara kaum muslim militan, partai tak berusaha lebih dari mengingatkan mereka pada kewajiban agama. Sasaran kampanye Masyumi ini sebenarnya adalah kalangan pemilih di luar lingkaran islamis.

Strategi yang mencerminkan sikap universal itu juga tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi saat itu, terutama setelah kemunculan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan pemberontak pimpinan Kartosuwiryo itu secara terbuka menggaungkan keinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dan akan melawan pihak-pihak yang menghalanginya, termasuk pemerintah.

Kehadiran Darul Islam sangat terasa bagi Partai Masyumi. Pergerakan partai menjadi sangat sulit. Jika Partai Masyumi tetap mengusung cita-cita untuk mendirikan negara Islam ataupun negara bersyariatkan Islam, akan ada kesamaan agenda dengan Darul Islam sehingga akan muncul persepsi bahwa Partai Masyumi mendukung gerakan Darul Islam. Padahal, Partai Masyumi merupakan partai yang setuju dengan konsep negara kesatuan, tetapi pihak lawan politik memanfaatkan isu politik ini dengan melakukan *framing* anti-Republik Indonesia kepada Partai Masyumi. Belakangan, *framing* tersebut semakin menyudutkan Partai Masyumi, seakan-akan Partai Masyumi memiliki agenda yang sama dengan Darul Islam. Oleh sebab itu, para tokoh Partai Masyumi merancang ulang program politik yang lebih universal agar berbeda dengan cita-cita Darul Islam.[336]

Pada tahun 1951, akhirnya Masyumi menarik garis pemisah yang lebih tegas dengan para pemberontak. Hal ini dirasa penting

[336] Huda, Hulhak, *Partai Masyumi: Mercusuar Politik Identitas Islam Positif di Indonesia (1945–1960)*, 32.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dikemukakan dan disebarluaskan kepada khalayak, mengingat sudah mulai beredar desas-desus—terutama yang disebarluaskan kalangan komunis—yang menuduh seolah-olah Masyumi setengah hati dalam melawan DI/TII. Pada 20 Januari 1951, Masyumi mengeluarkan sebuah deklarasi yang berisi sebagai berikut.

1) *Meskipun dari fihak Masyumi telah kerap kali diterangkan perbedaan pendirian politik antara Partai Masyumi dan Gerakan Darul Islam, tetapi rupa2nja bagi banjak orang pendirian itu belum jelas benar.*
2) *Antara lain bagi alat2 pemerintah kita terutama kalangan bawahan, belum begitu jelas perbedaan pendirian itu.*
3) *Berhubung dengan hal2 tersebut di atas, Dewan Pimpinan Partai menganggap perlu untuk mengumumkan pendjelasan jang tegas, terutama perbedaan pendirian politik antara Masyumi dan Gerakan Darul Islam.*
4) *Masyumi hendak mentjapai maksudnja melalui djalan demokratis-parlementer, melalui djalan jang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan semua Undang-Undang Negara Republik Indonesia*
5) *Dengan pengumuman ini, mudah-mudahan mendjadi tambah djelas perbedaan antara pendirian Masyumi dengan Darul Islam bagi umum.*[337]

Dari poin-poin tersebut, dapat terlihat ketegasan sikap Masyumi terhadap keberadaan DI/TII, terutama adanya perbedaan yang mendasar dan diametral antara dirinya dan DI/TII. Hal itu dengan jelas terlihat pada poin keempat bahwa Masyumi akan memperjuangkan aspirasinya melalui cara-cara demokratis dan bukan kekerasan, yakni melalui parlemen dan bukan melalui peperangan. Pandangan ini sekaligus memberikan penekanan bahwa apa yang ditempuh oleh DI/TII, yakni melalui pemberontakan dan peperangan yang menjurus kriminal, jelas berbeda dengan cara Masyumi yang menghormati aturan dan kedamaian melalui par-

[337] Madinier, *Partai Masjumi. Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral,* 155–156.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lemen. Sikap ini menegaskan bahwa memang sejak awal di antara keduanya tidak memiliki kesepahaman yang prinsipiel mengenai arah dan strategi perjuangan yang, dengan demikian, menyebabkan keduanya tidak dapat bersatu. Poin ini juga sekaligus menegaskan pendirian Masyumi akan demokrasi parlementer sebagai sarana untuk memperjuangan aspirasi dan kepentingan Masyumi dan segenap pendukungnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 5
PENUTUP

Pembahasan di atas mengkaji komitmen Masyumi terhadap pluralisme dari dua hal utama, yakni cara pandang dan sikap. Sebagaimana yang telah disampaikan, untuk mengukur eksistensi pluralisme, tulisan ini menggunakan batasan pluralisme sebagai sikap yang terdiri dari lima hal, yakni (1) pengakuan adanya keragaman keyakinan, visi, tujuan, dan strategi dalam berpolitik yang dianut atau diyakini oleh berbagai kelompok politik, baik partai politik atau komunitas non-politik; (2) Kesediaan untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain, atau juga dengan kata lain menolak kekuasaan yang bersifat terpusat pada satu tangan, (3) komitmen mengedepankan dialog atau kompromi dalam mencapai tujuan, atau kesungguhan untuk menolak cara-cara pemaksaan terhadap pihak yang berbeda; (4) pluralisme juga berarti kesediaan membangun sikap toleran terhadap perbedaan politik, yang dicerminkan dengan kesediaan memberikan kesempatan kelompok yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan politik; (5) kesediaan untuk hidup bersama (ko-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

eksistensi) secara adil dan sejajar dengan berbagai golongan dalam sebuah entitas politik yang sama, tanpa berupaya untuk mengurangi hak hidup kelompok-kelompok politik yang berbeda, semua tampak terpenuhi.

Dalam konteks cara pandang, Masyumi menunjukkan sebuah perspektif yang dekat dengan pengakuan terhadap pluralisme, yang ditandai dengan bagaimana partai ini melihat kedudukan Islam politik, negara ideal yang akan dibangun, dan terhadap pluralisme itu sendiri. Kajian di atas memperlihatkan bahwa hubungan Islam dan politik, menurut Masyumi, akan membawa pada penghormatan atas keberagaman dalam politik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Negara ideal yang ingin dikembangkan juga merupakan sebentuk negara yang menghormati karakter mendasar bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan agama, yakni mengedepankan kerukunan dan toleransi.

Adapun pluralisme, menurut Masyumi, secara normatif adalah sesuatu yang tidak terelakkan dan sudah sepantasnya tumbuh dan berkembang. Secara formal, Masyumi menegaskan penghormatannya terhadap pluralisme. Perbedaan antargolongan dan antarkeyakinan diakui dan diakomodasi. Pandangan-pandangan Masyumi juga memperlihatkan kesediaan untuk membuka dialog dan bekerja sama dengan golongan yang berbeda.

Sementara itu, nuansa penghormatan terhadap pluralisme juga terlihat dalam sikap partai ini. Masyumi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berbeda untuk bekerja sama dan menduduki jabatan-jabatan penting dalam politik dan pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Masyumi memberikan cukup kesempatan, tidak saja kepada sesama muslim, tetapi juga kalangan sosialis dan partai-partai nonmuslim. Masyumi juga bersedia membuka dialog dan berkompromi dengan berbagai pihak, termasuk dengan kalangan nasionalis dan fundamentalis radikal, tak terkecuali DI/TII.

Sikap moderat dan membuka dialog yang dilakukan Masyumi bagi sebagian kalangan mengarah pada kesimpulan bahwa partai ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah pendukung DI/TII dan PRRI/Permesta. Namun, kesimpulan itu jelas salah kaprah. Dalam konteks DI/TII, Masyumi tidak pernah mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap gerakan itu. Sementara itu, dalam konteks PRRI/Permesta, gerakan itu tidak didukung oleh Masyumi, tetapi hanya melibatkan beberapa gelintir pimpinan Masyumi. Selain itu, esensi dari gerakan itu bukanlah separatisme, melainkan kritik atas kondisi negara yang makin jauh dari ideal. Hal ini dibuktikan dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Natsir pada tahun 2008 yang memperlihatkan sebuah sikap objektif pemerintah era Reformasi terhadap esensi dari peristiwa PRRI/Permesta.

Lebih lanjut, Masyumi dalam lima belas tahun keberadaannya tidak berupaya menghalangi dan memiliki angan-angan untuk melenyapkan kelompok-kelompok politik yang berbeda. Kelompok-kelompok tersebut didekati dengan sikap pertemanan yang dirasakan sendiri oleh kalangan-kalangan yang berbeda itu. Terhadap kalangan nonmuslim, misalnya, partai ini memberikan isyarat yang jelas untuk bersedia hidup berdampingan, toleran, dan bersikap rukun. Hal tersebut tampak sebagai pengejawantahan dari praktik politik yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah. Dengan mendasarkan diri pada semacam konstitusi yang bernama *Mitsaq-al-Madinah* (Piagam Madinah), Nabi Muhammad membangun sebuah sistem politik yang penuh toleransi dan mengakui keberagaman (pluralisme) saat beliau menjadi pemimpin negara Madinah dengan berbagai macam agama dan suku di dalamnya.

Walaupun demikian, sikap pluralisme Masyumi bukan tanpa batasan. Sikap tegas Masyumi untuk menolak komunisme menunjukkan penolakan keras partai ini untuk hidup berdampingan dengan kalangan komunis. Pada dekade sebelum tahun 1948-an, Partai Masyumi memiliki hubungan politik yang biasa-biasa saja dengan politisi kiri, seperti Tan Malaka dan kawan-kawan. Akan tetapi, pada tahun 1948, Partai Komunis Indonesia memberontak dan ingin mendirikan negara sendiri dengan pusat gerakan berada di Madiun. Sejak saat itu, partai-partai politik yang lain menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai musuh bersama,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak terkecuali Partai Masyumi. Sebagai akibatnya, muncul gagasan agar Partai Masyumi menjalin relasi dengan partai-partai lain yang juga menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai musuh, meskipun partai tersebut berbeda ideologi dan agama dengan Partai Masyumi.[338]

Jika kita cermati, alasan Masyumi menolak komunisme sebetulnya merupakan bagian dari komitmen partai ini terhadap penegakan pluralisme itu sendiri. Sementara itu, dalam soal penganut agama minoritas, pandangan dan sikap Masyumi tampak masih banyak keterbatasan. Masyumi, sebagimana kalangan agama *mainstream* lain pada masanya, tampak cenderung mengesampingkan keberadaan kelompok-kelompok itu.

Selain itu, dalam merespons keragaman yang ada dan upaya untuk membuka kerja sama, Masyumi tidak mencari sebuah keharmonisan yang menghapuskan perbedaan-perbedaan yang ada. Bagi Masyumi, toleransi adalah sikap yang dibutuhkan justru sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan sikap dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tanpa adanya ketegasan karakter, toleransi sejatinya tidak lagi relevan. Dalam situasi ini, kasus Masyumi tidak mendukung pandangan relativisme.

Keyakinan dengan ideologinya tidak menjadikan Masyumi partai yang tertutup dan intoleran. Sebaliknya, Partai Masyumi menerapkan toleransi dengan batas-batas yang sangat jelas sehingga setiap umat beragama dapat saling menghormati tanpa saling mengorbankan atau melukai kepercayaan. Artinya, bagi Partai Masyumi, toleransi harus memiliki batasan dengan menggunakan identitasnya masing-masing. Keterbukaan sikap dan pemikiran tidak berarti juga harus meyakini keyakinan penganut agama lain.[339]

> "Kepada penganut agama-agama lain di luar Islam, kami menyatakan bahwa kami tidak menaruh keberatan sedikit pun jika di dalam rumusan UUD, Saudara-Saudara menginginkan pula

[338] Huda, *Partai Masyumi: Mercusuar Politik Identitas Islam Positif di Indonesia (1945–1960),* 32.

[339] Artawijaya, (20 Maret 2014), "Keteladanan Partai Masyumi", *Republika*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> dijaminnya untuk menunaikan syariat agama golongan Saudara. Tujuan perjuangan umat Islam ialah keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak jarang berkisar alat menjadi tujuan, alat yang cuma berguna selain digunakan menurut fitrahnya. Sebaliknya, menjadi azab jika keliru memakainya (menerapkannya/menggunakannya), berubah menjadi tujuan yang dipujanya dan dipertahankan mati-matian, kadang kala dengan jalan di mana batas halal dan haram kurang diperhatikan".[340]

Dalam perjalanannya, terlihat bahwa pada masa revolusi Masyumi lebih berperan penting dalam terwujudnya pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, pada sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an, keadaan berbanding terbalik. Masyumi makin disisihkan peranannya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari adanya beberapa perbedaan dan arah tujuan di antara kalangan politisi pada masa itu. Konflik politik yang berbasis perbedaan ideologi dan kekhawatiran Presiden Soekarno atas Masyumi—yang dianggapnya "kepala batu"—yang dapat menghalangi "penyelesaian revolusi", merupakan latar dan puncak hubungan tidak harmonisnya Masyumi dengan kekuasaan Orde Lama.

Pertentangan antara Presiden Soekarno dan Partai Masyumi makin meruncing dengan adanya tuduhan bahwa beberapa pemimpin Masyumi terlibat dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Permesta. Beberapa tokoh teras partai ini, yakni Natsir, Prawiranegara, dan Burhanudin Harahap, dianggap menggabungkan diri ke dalam "gerakan koreksi" terhadap pemerintahan Soekarno itu.

Atas dasar sikap beberapa tokoh teras Masyumi itulah, pemerintah—dalam hal ini Presiden Soekarno—menuduh partai ini terlibat, atau setidaknya, menyetujui eksistensi PRRI/Permesta. Setelah PRRI berhasil ditumpas, Presiden bergegas mengambil tindakan untuk melarang Masyumi melakukan aktivitas politik. Pada akhirnya, Partai Masyumi menghadapi Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 dengan dua cara. *Pertama*, pimpinan Partai Masyumi

[340] Artawijaya, (20 Maret 2014), "Keteladanan Partai Masyumi", Republika.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menyatakan Masyumi bubar melalui suratnya No. 1801 BNI25/60 tanggal 13 September 1960. Partai Masyumi membubarkan diri untuk menghindari cap sebagai partai terlarang. Selain itu, pembubaran ini juga untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu, baik terhadap anggota Masyumi dan keluarganya maupun aset-aset Masyumi. *Kedua*, menggugat Soekarno di pengadilan. Akan tetapi, usaha Masyumi mencari keadilan di pengadilan menemui jalan buntu.

Setelah upaya menghidupkan kembali Masyumi pada awal Orde Baru mengalami kegagalan, para mantan pengurus Masyumi yang dipimpin oleh Mohammad Natsir lebih memilih untuk berkecimpung di jalur islamisasi kultural, yakni melalui dakwah. Bagi para pengikut Natsir, apabila tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah dan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar. Dengan demikian, sesuai dengan motonya, yaitu jika dahulu ia menjalani "dakwah lewat jalur politik", sekarang ia "berpolitik lewat jalur dakwah". Untuk mewujudkan idealisme itu, didirikanlah organisasi dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).[341]

Meskipun tidak dibahas secara mendalam, tidak semua "pewaris Masyumi" benar-benar dapat mewarisi apa yang dimaksud Masyumi dalam soal pluralisme ini. Hasil wawancara dengan seorang pengamat Masyumi mengindikasikan adanya pergeseran karakter antara Masyumi dan pihak-pihak yang kemudian dinisbatkan sebagai pewarisnya.[342] Persoalannya, apakah memang gerakan-gerakan itu secara tegas merasa mewakili kepentingan dan pemikiran Masyumi secara keseluruhan? Apakah hal-hal yang dilakukan oleh mereka—yang dianggap memiliki asosiasi dengan Masyumi itu—benar-benar masuk dalam kategori radikal atau semata karena melakukan hal yang berbeda dengan penguasa dan kebanyakan masyarakat pada zamannya? Penelitian ini memang tidak sampai pada sebuah jawaban yang tuntas akan pertanyaan tersebut.

---

[341] Wildan Hasan, "Berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia", *RT,* 20 Agustus 2023, *http//www.dewandakwah.com*.

[342] Wawancara dengan Prof. Dwi Purwoko, di Jakarta, 19 Maret 2015.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Meskipun dapat saja sebagian kalangan mengatakan bahwa Masyumi bertanggung jawab terhadap tumbuhnya benih-benih "fanatisme" terhadap Islam, tetapi dalam konteks pengalaman hidup Masyumi itu sendiri pluralisme adalah sesuatu yang dihormati dan dijalankan dengan cukup baik oleh partai Islam ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR SINGKATAN

BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
DDII	: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
FPI	: Front Pembela Islam.
Golkar	: Golongan Karya.
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia.
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat.
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia.
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia.
MIAI	: Majelis Islam A'la Indonesia.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia.
PBB	: Partai Bulan Bintang.
Persis	: Persatuan Islam.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PKI	: Partai Komunis Indonesia.
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan.
PSI	: Partai Sosialis Indonesia.
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pusa	: Persatuan Ulama Seluruh Aceh.
PDRI	: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
PRRI/Permesta	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta.
RIS	: Republik Indonesia Serikat.
SSBI	: Serikat Buruh Islam Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

GLOSARIUM

Absolutisme	: Keyakinan hanya ada satu penjelasan obyektif yang tepat dan tak berubah.
Absurd	: Tidak masuk akal.
Agus Salim	: Pahlawan nasional sekaligus ulama ternama.
Abdul Kahar Muzakkir	: Tokoh keagamaan Muhammadiyah.
Abdurrahman Wahid	: Mantan Ketua PBNU dan mantan Presiden RI.
Amir Syarifuddin	: Pemimpin sayap kiri terdepan pada masa Revolusi.
Al-Jamiyatul Washliyah	: Organisasi Islam yang lahir di Kota Medan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Al-Ittihadiyah : Organisasi masa Islam dari Sumatra Utara.

Al-Irsyad : Organisasi di bidang pendidikan dan kegiatan keagamaan.

Anwar Harjono : Salah satu tokoh Partai Masyumi.

Bikameral : Pemerintahan yang menggunakan dua kamar parlemen.

Boedi Oetomo : Organisasi pergerakan simbol kebangkitan nasional.

Borjuasi : Kelas menengah ke atas yang memiliki modal dan alat produksi.

Burhanuddin Harahap : Tokoh Partai Masyumi pernah sebagai Perdana Menteri Indonesia.

Check and balances : Saling kontrol dan seimbang.

Deliar Noer : Seorang dosen, pemikir, peneliti, dan politikus asal Indonesia.

Demokrasi terpimpin : Masa ketika Soekarno berkuasa penuh.

Hasyim Asyari : Tokoh ulama pendiri NU.

Ideal-staat : Konsep negara ideal.

Kartosuwiryo : Pendiri gerakan Darul Islam.

Kasimo : Salah seorang pendiri Partai Katolik Indonesia.

Lingua franca : Bahasa yang digunakan untuk komunikasi antar kelompok berbeda.

Mainstream : Arus pemikiran umum yang dianut oleh mayoritas.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Muhammadiyah : Organisasi Islam modern terbesar di Indonesia.

Muhammad Natsir : Ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia.

Mathla'ul Anwar : Lembaga pendidikan lahir di Menes, Banteng.

Mohammad Hatta : Wakil Presiden Indonesia pertama.

Mohammad Roem: Seorang diplomat di perang kemerdekaan Indonesia.

Nahdlatul Ulama : Organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia.

Nurcholis Madjid : Cendekiawan muslim modern Indonesia.

Orde Baru : Masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Orde Lama : Masa pemerintahan Soekarno.

Par excellence : Sangat baik dan unggul.

Rasyid Ridha : Intelektual muslim yang mengembangkan gagasan modernisme.

Sarekat Islam : Organisasi massa pertama dan tertua di Indonesia.

Solidarity maker : Mengedepankan strategi retorik.

Skripturalisme : Pemahaman yang hanya didasarkan oleh isi kitab suci.

Soeharto : Presiden kedua Indonesia.

Soekarno : Presiden pertama Indonesia.

Sjafruddin Prawiranegara : Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Underbow	: Sayap partai.
Volksraad	: Dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda.
Wahid Hasyim	: Tokoh NU, pernah sebagai Menteri Agama RI.
Yusril Ihza Mahendra	: Tokoh dijuluki Natsir muda/Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

"Surat Suara Pemilu 1955 Untuk Latihan Warga NU". Catatan Nusantara. Diakses pada 24 Juli 2024. https://www.catatannusantara.com/pustaka/k86hsb3c4zgndjr-57pcs-kymbk-9j6bj-gtcxk-3sky6-6le5x-sxdef-ly9yg-7f9er-n7229-y4j4g-96st4-4nh3x-gngbm-95hny-2sy4r-993a2-hszgx-saf3d-ysjzm-s6ymd-a4352-zdzsw-kh38f

Abidin, M. *Gagasan dan Gerak Dakwah Natsir*. Yogyakarta: GRE Publishing, 2012.

Abduljaber, M. "The Dimensionality, Type, and Structure of Political Ideology on the Political Party Level in the Arab World". *China Political Science Review* 3, no. 2 (Mei 2018).

Aboebakar. *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957.

Adan, H. Y., dan Jalil, H. A. *Mosi Integral Mohammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummah dan Bangsa dalam NKRI*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Al Chaidar. *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total.* Jakarta: Darul Falah, 1998.

al-Maududi, A. A. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan, 1988.

Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 10. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Ahmad, Z. A. *Masjoemi: Partij Politiek Islam Indonesia*. Pematang Siantar: Tanpa penerbit, 1946.

Ahmad, Z. M. "Sikap Politik Soekarno terhadap Masyumi Tahun 1957–1960." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Ansary, A. F., dan Ahmed, S. A. *The Challenge of Pluralism*: *Paradigms for Muslim Context* Ediburgh: Edinburg University Press, 2009.

Arsip Nasional Republik Indonesia, Nahdhatul Ulama, No. 142.

Anwar, A. *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cedekiawan Muslim Orde Baru.* Jakarta: Paramadina, 1995.

Artawijaya. *Belajar dari Partai Masyumi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Artawijaya. "Keteladanan Partai Masyumi." *Republika*, 20 Maret 2014.

Bachtiar, T. A. *Setengah Abad Dewan Da'wah Berkiprah Mengokohkan NKRI*. Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2017.

Benda, H. J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Budge, I., dan Laver, M. "Policy, Ideology, and Party Distance: Analysis of Election Programmes in 19 Democracies." *Legislative Studies Quarterly* 11, no. 4 (1986).

Bajasut, S. U., dan Hakiem, L. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito: Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Busyairi, B. *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution.* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Bruinessen, M. V. "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia." *South East Asia Research* 10, no. 2 (2002).

Connoly, W. E. *Pluralism*. Durham: Duke University Press, 2005.

Duverger, M. *The Study of Politics*. London: Nelson, 1972.

Effendy, B. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Eljunisiah, R., dan Yunus, H. *Djalan Lurus dalam Pendidikan Putera/Puteri, Agama dan Ekonomi*. Jakarta: Fikiran Baru,1956.

Evans, G., Heath, A., dan Lalljee, M. "Measuring Left-Right and Libertarian-Authoritarian values in British Electorate." *British Journal of Sociology* 47, no. 1 (1996).

Fealy, G., dan Platzdasch, B. "The Masyumi Legacy: Between Islamist Idealism and Political Exigency." *Studia Islamika* 12, no. 1 (2005).

Feith, H. *Pemilihan Umum 1955 di Jakarta*. Jakarta: Gramedia,1999.

Feith, H. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Ithaca and London: Cornell University Press, 1973.

Feith, H., dan Castles, L. *Indonesian Political Thinking 1945–1965.* Ithaca and London: Cornell University Press, 1970.

Feith, H. *Pemilu 1955 di Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 1999.

Furnivall, J. S. *Netherlands India, A Study of Plural Economuy.* Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

Geertz, C. "The Javanese Village." Dalam *Local, Ethnic, and National Loyalties in Village Indonesia,* diedit oleh G. W. Skinner. Itacha: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1959.

Geertz, C. *Religion of Jawa*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1976.

Noer, D. "Masjumi: Its Organization, Ideology, and Political Role in Indonesia."Disertasi, Cornell University, 1960.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ghosal, B. *Indonesia Politics 1955–1959: The Emergece of Guided Democracy.* Calcutta: K.P. Bagchi, 1982.

Gidden, A. *Sociology.* Cambridge: Polity Press, 1989.

Haikal, M. H. *al-Hukûmah al-Islâmiyah.* Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1983.

Gunawan, H. *M. Natsir Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953–1958*. Jakarta: Media Dakwah, 2000.

Hakiem, L. *Biografi Mohammad Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan.* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2019.

Hakiem, L. *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan. Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H*. Jakarta: Media Dakwah, 1993.

Hamka. *Muhammadijah-Masjumi*. Jakarta: Masjarakat Islam, 1978.

Hasan, W. "Berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia." *Dewan Dakwah.com,* 27 Agustus. 2023. *http//www.dewandakwah.com*.

Hasanudin, A. "Islam Negara dalam Pusaran Politik." *Bidik Utama,* 1 Agustus 2022. *https://bidikutama.com/akademik/opini/islam-negara-dalam-pusaran-politik/*

Hidayat, K., dan Gaus A. *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. Jakarta: Mizan, 2006.

Huda, I. W. A., Hulhak, Z., dan Bajuri, A. "Partai Masyumi: Mercusuar Politik Identitas Islam Positif di Indonesia (1945–1960)." *Historia*, Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah 6, no. 1 (2023).

Ibrahim, M. *Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982.

Ismail, F. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Iqbal, M., dan Nasution, A. H. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jackson, K. D. *Kewibawaaan Tradisonal, Islam dan Pemberontakan. Kasus Darul Islam di Jawa Barat*. Yogyakarta: Grafiti, 1990.

Jackle, S., dan Timmis, J. K. "Left–Right-Position, party affiliation and regional differencesexplain low COVID-19 vaccination rates in Germany." *Microbial Biotechnology, (*2023).

Jay, R. R. "Religion and Politics in the Rural Central Java." *Cultural Research Series,* no. 12 (1963).

Kahin, A. *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir*. Singapore: NUS Press, 2012.

Kahin, G. M. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan Press, 1995.

Karim, M. R. *Negara dan Peminggiran Islam Politik.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Kementerian Penerangan RI. *Kepartaian di Indonesia*. 1951.

Kementerian Penerangan RI. *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*. 1954.

Korver, A. P. *Sarekat Islam. Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafiti Pers, 1985.

Lasut, J. "Bukan Fundamentalis tapi Demokratis." Dalam *100 Tahun M. Natsir*, diedit oleh Lukman Hakiem. Jakarta: Penerbit Republika, 2008.

Legenhausen, M. "Misgiving about the Relious Pluralisms of Seyyed Hossein Nasr and John Hick." *Al-Tawhid* 14, no. 3 (1997).

Leirissa, R. Z. "PRRI: Membangun Indonesia Tanpa Komunis." *Tempo,* 14 Juli 2008.

Luth, T. *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Maarif, A. S. *Islam dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban.* Yogyakarta: IRCiSoD, 1999.

Maarif, A. S. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Maududi, A. A. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam.* Jakarta, Bandung: Mizan, 1998.

Madjid, N. "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan." *Republika*, 10 Agustus 1999.

Madjid, N. "Ikatan Keadaban." Dalam *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Madjid, N. *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.

Madner, R. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*. Bandung: Mizan, 2013.

Madinier, R., dan Feilard, A. "At the Sources of Indonesian Political Islam's Failure: the Split between NU and the Masyumi." *Studia Islamika* 6, no. 2 (1999).

Madjid, M. "Sekapur Sirih." Dalam *Teologi Inklusif Cak Nur*, diedit oleh Sukidi. Jakarta: Kompas, 2001.

Madjid, N. *Indonesia Kita.* Jakarta: Gramedia, 2003.

Mahendra, Y. I. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan).* Jakarta: Paramadina, 1999.

Mahendra, Y. I. *Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, Buku 3. Jakarta: Pro Deleader, 2016.

Mahendra, Y. I. *Rekonsiliasi Tanpa Mengkhianati Reformasi (Versi Media Massa)*. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.

Mardjoned, R. *K.H. Hasan Basri: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid.* Jakarta: Media Da'wah, 1990.

Marijan, K. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926.* Surabaya: Erlangga, 1992.

Mestenhauser, J. A. "Ideologies in Conflict in Indonesia, 1945–1955." Disertasi, University of Minnesota, 1960.

Minar, D. "Ideology and Political Behavior." *Midwest Journal of Political Science* 5, no. 4 (1961).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mudhofir. "Nahdlatul Ulama: Masalah dan perkembangannya dalam hubungan dengan Pemilihan Umum 1955 dan 1971." Skripsi, Universitas Indonesia, 1971.

Mulkan, A. M. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat 1965–1987*. Jakarta: Rajawali, 1998.

Nasution, A. H. "Bung Natsir adalah Pejuang Besar." *Media Dakwah*, Maret 1993.

Natsir, M. *Fiqud Da'wah*, Malaysia: International Federation of Student Organization, 1982.

Natsir, M. *Islam sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Media Dakwah, 2000.

Natsir, M. *Indonesia di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT Abadi, 1994.

Natsir, M. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 2001.

Natsir, M. *Tjita-Tjita Masjumi*, *Pidato Mohammad Natsir dalam Peringatan Ulang Tahun Ke-X Masjumi di Jakarta*. Jakarta: Kapu Masjumi Djakarta Raya, 1955.

Natsir, M. *Sumbangan Islam bagi Perdamaian Dunia*. Jakarta: U.B. Ideal, 1953.

Natsir, M. "Islam Berantas Intoleransi Agama dan Tegakkan Kemerdekaan Beragama." *Capita Selecta* 2. Jakarta: Yayasan Capita Selecta, 2008.

Natsir, M. "Apakah Pancasila Bertentangan dengan Ajaran Al-Qur'an." *Capita Selecta* 2. Jakarta: Yayasan Capita Selecta, 2008.

Natsir, M. "Bertentangankah Islam dengan Al-Qur'an." *Majalah Hikmah*, 29 Mei 1954.

Natsir, M. "Kita Punya Taruhan Sendiri untuk Pecahkan Soal-Soal Hidup." *Abadi*, 15 Januari 1952.

Noer, D. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Noer, D. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965*. Bandung: Mizan, 2000.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Noer, D. *Aku Bagian Umat, Aku Bagian Bangsa*. Bandung: Mizan, 1999.

Noor, F. "Menimbang Perjuangan Kebangsaan Sarekat Islam (SI) dan Relevansinya bagi Kehidupan Politik Bangsa Saat ini." *Masyarakat Indonesia* 34, no. 2 (2008).

Noor, F. "Perilaku Politik Pragmatis dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian atas Menyurutnya Peran Ideologi di Era Reformasi."*Masyarakat Indonesia* 40, no. 1 (2014).

Pedoman Perdjuangan Masjumi, cetakan ke-2. Jakarta: Partai Masjumi Bagian Keuangan, 1955.

Pippes, D. *In the Path of God: Islam and Political Power.* New York: Basic Books, 1983.

Poesponegoro, M. D. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Pratinjau, "Sejarah & Hasil Pemilu 1955 – 2019," Youtube Video, 4:00, 4 Januari 2021, https://www.youtube.com/watch?v=xEz0JUyarAs.

Prawiranegara, S. *Islam dalam Pergolakan Dunia*. Bandung: Al Ma'arif, 1950.

Rasjid, S. M. *Di Sekitar PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Rosidi, A. *Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1986.

Rowe, W. L. *Philosopy of Religion. An Introduction, 4th Edition.* California: Wodsworth Publishing Company, 1992.

Saidan. *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Antara hasan Al-Banna dan Mohammad Natsir*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Samsuri. *Politik Islam Anti Komunis. Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Safiria Insania Press dan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2004.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Scruton, *A. R. Dictionarny of Political Thought.* London: Macmillan, 1982.

Sewang, A. M. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad Ke-XVI–XVII)*. Jakarta: Yayasan Obor, 2001.

Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965.

Soemarsono. *Biografi Muhamamd Natsir. Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*. Diedit oleh Lukman Hakiem. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Sjamsuddin, N. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: CV Rajawali, 1998.

Syamsudin, D. *Islam dan Politik Era Ode Baru*. Jakarta: Logos, 2001.

Suhelmi, A. *Soekarno versus Natsir. Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah, 1999.

Sumartana, T. H., ed. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Sumbulah, U. "Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majlis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi." Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2006.

Suradi. *Grand Old Man of the Republic: Haji Agus Salim dan Konflik Politik Sarekat Islam*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2014.

Syadzali, M. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.

Tamam, M. "Pengatar" *Majalah Islamia*, September–November 2004.

The Shorter Oxford English Dictionary on Historiacl Principles. Oxford: The Clarendon Press, 1933.

Thoha, A. M. *Tren Pluralisme Agama. Tinjauan Kritis.* Jakarta: Perspektif, 2005.

Tornquist, O. *Penghancuran PKI*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ward, K. *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Ithaca: Cornell University, 1970.

Widjaja, A. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Wolf, C. *The Indonesia Story*. New York: Institute of Pacific Relation, 1949.

Woodward, M. R., ed. *Toward a New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Political Thought*. Temple: Arizona State University, 1996.

Zada, H. *Agama dan Etnis: Tantangan Pluralisme di Indonesia dalam Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam*. Diedit oleh Sururin dan Maria Ulfa. Jakarta: Nuansa-Fatayat NU-Ford Foundation, 2006.

Zuhri, S. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al maarif, 1981.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

TENTANG PENULIS

Firman Noor

Ia adalah Peneliti Ahli Utama IV/e pada Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, demokrasi, pemikiran politik, politik Islam, dan masalah kebangsaan.

Ia pernah aktif sebagai peneliti dan terlibat dalam penelitian dalam beberapa lembaga swadaya masyarakat dan penelitian, seperti Laboratarium Ilmu Politik/Pusat Kajian Politik FISIP UI, Center for Information and Development Studies (CIDES), dan CETRO. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, ia menyempatkan diri untuk mengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) (pada Program Sarjana, Master, dan Doktoral) dan Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kegiatan terkait pengajaran di kampus telah dimulai sejak tahun 1997. Dirinya pernah menjadi asisten dosen dan kolega dalam tim pengajar dalam lingkup Departemen Ilmu Politik FISIP UI, di antaranya dengan Prof. Miriam Budiardjo, Prof. Dr. Rahman Zainuddin, Prof. Dr. Maswadi Rauf, dan Prof. Dr. Ahmad Suhelmi.

Ia menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Setelah itu, ia melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies, Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS).

Pada saat kuliah di ANU, ia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award pada tahun 2007 sebagai mahasiswa berprestasi di fakultasnya. Kelulusannya, yang dianggap memuaskan dengan nilai rata-rata *High Distinction* (HD), membuatnya lulus dengan predikat *with Honors* (Hons). Ia juga menjadi anggota pengurus pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) yang dilakoninya selama studi di Australia. Selama di Australia, ia pernah pula terlibat dalam beberapa penelitian terkait dengan perkembangan politik di Indonesia.

Ia melanjutkan studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi doktoral ditempuhnya dengan relatif singkat, yakni 5 semester (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul *Institutionalizing Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998–2008)*.

Dirinya juga mendapatkan kesempatan melanjutkan program Post-Doctoral (2015) dan menjadi Research Fellow di University of Exeter (Inggris) pada tahun 2016–2017. Dalam kesempatannya di Inggris, ia juga sempat menjadi pembicara dalam beberapa *event* seminar, termasuk seminar internasional, di antaranya di Oxford University, ISEAS, SOAS, University of London, dan Leiden University. Ia juga pernah mengunjungi beberapa negara, baik dalam perjalanan akademis maupun tugasnya, seperti Perancis,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Taiwan, Tiongkok, Uzbekistan dan Swedia. Pada kurun waktu 2023–2024, ia menjadi Research Fellow di Departemen Ilmu Politik, Lund University (Swedia).

Disertasinya kemudian diterbitkan oleh LIPI Press dan menjadi salah satu "Buku Terbaik" sekaligus sebagai "Buku Terlaris" versi LIPI Press pada tahun 2016. Dalam versi bahasa Indonesia, buku itu berjudul *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Studi Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*. Kumpulan tulisannya di berbagai media cetak dibukukan pula dengan judul *Quo Vadis Demokrasi Kita?*. Selain itu, ia juga menjadi kontributor dalam beberapa buku, di antaranya *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*; *Sistem Presidensial Indonesia: Dari Soekarno Hingga Jokowi*; *Nasionalisme and Keindonesiaan di Tapal Batas*; *Globalization and Global Village*; *Improving Electoral Practices: Case Studies and Practical Approaches*; *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*; *Evaluasi Pemilu Legislatif 2009: Tinjauan atas Proses Pemilu, Strategi Kampanye, Perilaku Memilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu*; *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Identitas Primordialisme di Indonesia*; *Mereka Bicara PKS: Telaah Objektif Perjalanan Dakwah Politik PKS*; dan *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*.

Firman memperoleh gelar Profesor Riset pada tahun 2018 (usia 42 tahun) dengan orasi berjudul "Partai Politik sebagai Problem Demokrasi di Indonesia Era Reformasi". Ia juga pernah bertugas sebagai Ketua PME Puslit Politik LIPI dan Anggota PME IPSK. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Kerjasama. Pada tahun 2017, ia diangkat menjadi Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan selesai pada tahun 2021. Saat ini, ia tengah menjadi Visiting Fellow Researcher di Lund University (Swedia). Scopus ID: 57191200091.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ade Wiharso

Pria kelahiran Jakarta ini mendapatkan gelar sarjana dalam bidang ilmu politik setelah menyelesaikan kuliah jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) pada tahun 2011. Setelah menyelesaikan kuliah, ia aktif menjadi penulis, termasuk menulis beberapa buku atas nama sendiri. Selain itu, ia juga aktif sebagai editor ataupun sebagai penulis bayangan untuk beberapa buku melalui penerbit Rakyat Merdeka Books (RMBooks).

Ade pernah menjadi editor beberapa buku, antara lain *Republik Akal-Akalan: Mengungkap Kebohongan Rezim di Atas Ketidakberdayaan Rakyat* pada tahun 2013 dengan penerbit RMBooks; *Hidup Sukses dengan Lima Jari: Seni Menjalani Hidup Melalui Prinsip Lima Jari*, penulis Agun Gunanjar Sudarsa (Ketua Komisi II DPR RI) pada tahun 2013 dengan penerbit RMBooks; *Presiden Tersandera: Dampak Kombinasi Sistem Presidensial dan Multipartai dalam Pemerintahan Sby-Boediono* pada tahun 2012 dengan penerbit RMBooks; *Api Nasionalisme Kaum Muda: Peluang dan Tantangan Menumbuhkan Semangat Kebangsaan di Kalangan Muda Indonesia* pada tahun 2011 dengan penerbit RMBooks; *Pancasila sebagai Rumah Bersama: Bunga Rampai Pemikiran tentang Kebangsaan* pada tahun 2013 dengan penerbit RMBooks; dan *Membangun Indonesia Sejahtera: Langkah Nyata Menuju Visi Indonesia 2020* pada tahun 2013 dengan penerbit RMBooks.

Ade juga pernah menulis buku atas namanya sendiri, antara lain *Lukman Edy: Mencari Hikmah dan Maslahah: Peran Kekuasaan, Kerakyatan, dan Kebangsaan* pada tahun 2016 dengan penerbit RMbooks; *Evolusi Mimpi Menata Indonesia* pada tahun 2017 dengan penerbit RMBooks; *Menolak Diam: Mengungkap Rahasia di Balik Kontroversi Fahri Hamzah* pada tahun 2018 dengan penerbit RMBooks; dan *Menuju Indonesia Digital* pada tahun 2021 dengan penerbit RMBooks.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ade juga aktif menulis beberapa artikel dan kolom di berbagai media cetak dan daring terkait isu-isu sosial, ekonomi, dan politik, antara lain "Ekonomi di Tengah Globalisasi", *Koran Jakarta,* 21 Oktober 2019; "Cermati Sinyal Pelemahan Industri", *Koran Jakarta*, 22 November 2019; "Catatan untuk Komite Penanganan Covid-19", *Detik.com*, 2021; "Agar UMKM Tidak Mati karena Pandemi", *Detik.com,* 2020. "Vaksinasi, '*Game Changer*', dan Tantangannya", *Detik.com*, 2021; "Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 'Keren *Abis*'?", *Detik.com,* 2023.

Ia sempat menjadi tenaga ahli untuk beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak tahun 2013 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi menjadi staf khusus (stafsus) Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada 2020–2024. Selain itu, ia juga aktif menjadi peneliti di Media Survei Nasional (Median) hingga sekarang. Tambahan pula, ia juga menjadi peneliti di Inmind Institute, sebuah lembaga yang melibatkan diri pada pengembangan konsep-konsep moderat dalam beragama. Hingga saat ini, Ade juga masih aktif menulis kolom di beberapa media daring mengenai isu-isu terkait sosial, politik, dan ekonomi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

INDEKS

A

Abdul Kahar Muzakkir 28
Agus Salim 7, 8, 29, 35, 155, 160, 181, 193
Al-Irsyad 30, 32, 36, 182
Al-Ittihadiyah 30, 32, 36, 37, 106, 112, 182
Al-Jamiyatul Washliyah 30
Amir Syarifudin 7
Anwar Harjono 91, 182, 188

B

Belanda 6, 7, 8, 9, 23, 31, 33, 34, 40, 41, 115, 121, 122, 127, 129, 130, 143, 159, 161, 184
Boedi Oetomo 159, 160, 161, 182
Bulan Bintang 7, 16, 61, 179, 184, 192
Bumiputera 160, 161
Burhanuddin Harahap 42, 55, 81, 108, 110, 122, 128, 131, 132

D

DDII 10, 63, 176, 179
Deliar Noer 6, 15, 23, 28, 58, 111, 120, 161, 182
Demokrasi Terpimpin 26, 54, 58, 123, 127, 131, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 189
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 10, 62, 63, 176, 188

F

FPI 4, 179
Front Pembela Islam 4, 179

Buku ini tidak diperjualbelikan.

G
Gerakan Pemuda Islam 91
Golkar 60, 61, 62, 179
GPI 91

H
Hasyim Asyari 35, 182
Hizbut Tahrir Indonesia 4, 179
HTI 4, 179

I
Indonesia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 126, 129, 133, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Islam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197

J
Jepang 29, 31, 121, 188

K
Kartosuwiryo 119, 167, 182
Kasimo 122, 123, 125, 182

M
Majelis Mujahidin Indonesia 4, 179
Masyumi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 182, 186, 187, 188, 190, 193
Mathla'ul Anwar 30, 183
Mohammad Hatta 7, 183
Muhammadiyah 30, 31, 35, 36, 105, 108, 112, 114, 155, 181, 183
Mohammad Natsir 8, 121, 162
Muhammad Roem 7, 61, 183
Muso 7

N

Nahdlatul Ulama 23, 25, 36, 45, 46, 48, 109, 183, 191
Nurcholis Madjid 2, 3, 11, 19, 21, 183

O

Orde Baru 2, 44, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 112, 123, 129, 183, 186
Orde Lama 16, 26, 175, 183

P

Partai Bulan Bintang 16, 179, 184
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 53, 180
Partai Nasional Indonesia 5, 25, 45, 46, 48, 66, 129, 179
Partai Persatuan Pembangunan 62, 180
Partai Sosialis Indonesia 11, 25, 46, 49, 129, 180
PBB 16, 179
PDIP 53, 180
PDRI 6, 7, 41, 130, 161, 180, 192
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia 6, 7, 41, 161, 180, 192
Persatuan Ulama Seluruh Aceh 30, 32, 36, 180
persis 15, 134
pluralisme 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 65, 69, 92, 96, 100, 101, 102, 103, 119, 123, 131, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 156, 157, 164, 171, 172, 173, 176, 177
PPP 62, 180
PRRI/Permesta 55, 57, 58, 138, 173, 175, 180
PSI 25, 26, 46, 49, 55, 56, 57, 68, 106, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 152, 156, 180
PUSA 30, 32, 36, 114

R

Rasyid Ridha 183

S

Sjafruddin Prawiranegara 55, 77, 91, 93, 116

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Soeharto 59, 60, 61, 183, 196
Soekarno 6, 7, 8, 26, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 115, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 166, 175, 182, 183, 186, 193, 197
Sarekat Islam 46, 48, 159, 183

V

Volksraad 160, 184

W

Wahid Hasyim 28, 29, 35, 184

Y

Yusril Ihza Mahendra 16, 23, 34, 78, 83, 123, 131, 190

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Koherensi Islam dan pluralisme di Indonesia berawal dari realitas masyarakat Indonesia yang sangatlah pluralis, baik dari segi etnis, adat istiadat, maupun agama. Selain Islam, realitasnya bahwa hampir semua agama, khususnya agama besar dapat berkembang subur dan terwakili aspirasinya di Indonesia. Beberapa studi menunjukkan adanya sikap setengah hati dari sebagian umat Islam Indonesia dalam menerima dan menjalankan pluralisme. Kalangan penolak pluralisme memiliki kecenderungan bahwa pluralisme agama sebagai paham dan bukan keniscayaan dari realitas. Salah satu ikon yang dianggap mewakili umat Islam dalam konteks mewakili cita-cita dan perjuangan ajaran Islam pada masa lalu adalah Masyumi. Partai ini tercatat sebagai partai Islam terbesar dalam sejarah Indonesia.

Buku *Partai Islam dan Pluralisme: Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi* membahas hubungan antara partai Islam dan pluralisme. Kajian pandangan dan sikap Partai Masyumi sebagai partai Islam di Indonesia pada masa Orde Lama yang moderat dalam sikap dan pandangan politiknya, jauh dari kesan ekstrem, yang anti-pluralisme. Meskipun sebagian kalangan mengatakan bahwa Masyumi bertanggung jawab terhadap tumbuhnya benih "fanatisme" terhadap Islam, dalam pengalaman hidup Masyumi itu sendiri pluralisme adalah sesuatu yang dihormati dan dijalankan dengan baik oleh partai Islam ini. Buku ini tidak saja akan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, tetapi juga dapat memperlihatkan perkembangan pemikiran dan sikap mayoritas umat Islam dalam menerima pluralisme.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.956

ISBN 978-623-8372-86-7